



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2014 - 2018**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( BAPPEDA )  
2013**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten  
Hulu Sungai Selatan  
Nomor 11 Tahun 2013  
Tentang Rencana Pembangunan  
Jangka Menengah Daerah  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
2014-2018.

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2014 -2018**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( BAPPEDA )  
2013**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014-2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah yang lebih komprehensif sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagai acuan penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
  - b. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang RePublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2015, maka agar kegiatan pembangunan di Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode 5 (lima) tahun;
  - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2013-2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurustamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**dan**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014-2018.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
15. Kebijakan adalah tindakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

**BAB II**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAN SELATAN**

**Pasal 2**

- (1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

Penjabaran dari RPJMD ini akan ditindaklanjuti dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Renstra SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### **Pasal 4**

Berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 pada setiap periode tahunan disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **Pasal 5**

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I     Pendahuluan
- Bab II    Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III   Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
- Bab IV    Analisis Isu-Isu Strategis
- Bab V     Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Bab VI    Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VII   Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- Bab VIII  Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
- Bab IX    Indikator Kinerja Daerah
- Bab X     Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

### **Pasal 6**

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 7**

- (1) Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati Hulu Sungai Selatan yang sedang memerintah pada tahun terakhir berlakunya RPJMD ini wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode masa jabatan Bupati Hulu Sungai Selatan berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati selanjutnya.

**BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 8**

Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 015 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009-2013 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 155) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 19 November 2013

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**



**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 19 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

  
**MUHAMMAD IDEHAM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAN SELATAN  
TAHUN 2013 NOMOR 11**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014-2018**

**I. UMUM :**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

**II PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 11**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH</b> .....	II-1
2.1 Aspek Geografis dan Demografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	II-1
2.2 Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	II-27
2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	II-49
2.4 Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	II-57
<b>BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</b> .....	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-2
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III-16
3.3 Kerangka Pendanaan 2014-2018.....	III-26
<b>BAB IV ISU – ISU STRATEGIS</b> .....	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	IV-1
4.2 Isu – Isu Strategis .....	IV-8
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	V-1
5.1 Visi .....	V-1
5.2 Misi.....	V-5
5.3 Tujuan dan Sasaran.....	V-7
<b>BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	VI-1
6.1 Strategi .....	VI-1
6.2 Arah Kebijakan .....	VI-9
<b>BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b> .....	VII-1
7.1 Kebijakan Umum .....	VII-1
7.2 Program Pembangunan Daerah.....	VII-5

	<b>Halaman</b>
<b>BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN .....</b>	VIII-1
<b>BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .....</b>	IX-1
9.1 Aspek Pelayanan Umum.....	IX-2
9.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	IX-12
9.3 Aspek Daya Saing Daerah .....	IX-16
<b>BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN.....</b>	X-1
10.1 Pedoman Transisi.....	X-1
10.2 Kaidah Pelaksanaan.....	X-1

## DAFTAR TABEL

<b>No Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten HSS Menurut Kecamatan Tahun 2012 .....	II-1
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Semester II Tahun 2013 .....	II-17
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Pada Masing-Masing Kecamatan Tahun 2007 -2012 .....	II-20
Tabel 2.4	Indikator Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2007 – 2012 .....	II-21
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 .....	II-22
Tabel 2.6	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2007- 2012 .....	II-23
Tabel 2.7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Tahun 2007-2012 .....	II-29
Tabel 2.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2007 -2012 .....	II-29
Tabel 2.9	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2007-2012 .....	II-29
Tabel 2.10	Realisasi Penuntasan Buta Aksara Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 – 2011.....	II-30
Tabel 2.11	Indeks Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007-2012.....	II-33
Tabel 2.12	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2008-2012 .....	II-34
Tabel 2.13	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2008-2012 .....	II-34
Tabel 2.14	Akses Terhadap Jamban Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012.....	II-36
Tabel 2.15	Data Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2008-2012.....	II-36
Tabel 2.16	Data Daerah Irigasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	II-37
Tabel 2.17	Daerah Irigasi Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008-2012 .....	II-38
Tabel 2.18	Banyaknya Jembatan Menurut Jenis Bahan Jembatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 – 2012.....	II-39

<b>No Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 2.19	Banyaknya Jembatan Menurut Jenis Kondisi Jembatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	II-39
Tabel 2.20	Persentase Rumahtangga Menurut Penggunaan Sumber Air Minum Tahun 2010 .....	II-40
Tabel 2.21	Cakupan Pelayanan Air Bersih Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 .....	II-40
Tabel 2.22	Pelanggan dan Air Terjual PDAM Kandangan 2008-2012 .....	II-42
Tabel 2.23	Total Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Terjual (Ltr/dtk) PDAM Kandangan 2008-2012 .....	II-43
Tabel 2.24	Data Kualitas dan Kuantitas Drainase serta Luas Areal Pelayanannya .....	II-44
Tabel 2.25	Jumlah Menara Telekomunikasi (BTS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 .....	II-48
Tabel 2.26	PDRB Berdasarkan Harga Berlaku di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2007-2011).....	II-50
Tabel 2.27	Distribusi Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Harga Konstan) Tahun 2007-2011 .....	II-52
Tabel 2.28	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Harga Konstan) Tahun 2007-2011 .....	II-53
Tabel 2.29	Angka PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007-2012 .....	II-53
Tabel 2.30	PDRB Per Kapita Per Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007-2012 .....	II-54
Tabel 2.31	Distribusi Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007-2012 .....	II-54
Tabel 2.32	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2008-2012 .....	II-55
Tabel 2.33	Jumlah Penyandang Masalah Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2008-2012.....	II-57
Tabel 2.34	Produksi Padi Dan Tanaman Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007-2012 .....	II-58
Tabel 2.35	Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007-2013 .....	II-59
Tabel 2.36	Lembanga Distribusi Pangan .....	II-60
Tabel 2.37	Kawasan Hutan Di Kabupaten HSS Tahun 2011 .....	II-60

<b>No Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 2.38	Luas Areal Pengembangan Kayu Manis Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 – 2012.....	II-61
Tabel 2.39	Perkembangan Luas Areal Perkebunan Rakyat Tahun 2007-2012 .....	II-62
Tabel 2.40	Perkembangan Produksi Perkebunan Rakyat Tahun 2007 – 2012.....	II-63
Tabel 2.41	Potensi Jenis Usaha Perikanan di Kabupaten HSS .....	II-64
Tabel 2.42	Keadaan Produksi Budidaya Perikanan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007-2012 .....	II-65
Tabel 2.43	Keadaan Produksi Benih Ikan pada UPTD BBI Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009-2012 .....	II-65
Tabel 2.44	Keadaan Produksi Tangkap Perikanan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007-2012 .....	II-66
Tabel 2.45	Target Produksi Perikanan 2013-2018 .....	II-66
Tabel 2.46	Banyaknya Populasi Komoditas Peternakan Tahun 2007-2012 Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	II-68
Tabel 2.47	Produksi Unggas Tahun 2007-2012 Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	II-69
Tabel 2.48	Produksi Peternakan Besar dan Kecil Tahun 2007-2012 .....	II-70
Tabel 2.49	Industru Kecil / Menengah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 - 2012 .....	II-71
Tabel 2.50	Usaha Mikro Kecil & Menengah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008-2012 .....	II-71
Tabel 2.51	Jumlah Koperasi Per Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 .....	II-72
Tabel 2.52	Potensi Keanekaragaman DTW Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2011) .....	II-73
Tabel 2.53	Banyaknya Hotel dan Jumlah Kamar Menurut Kecamatan Tahun 2012).....	II-77
Tabel 2.54	Banyaknya Kunjungan Wisatawan ke Kawasan Loksado & Objek Air Panas Tanuhi .....	II-77

<b>No Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 2.55	Lokasi, Jumlah dan Daya Terpasang PLTMH dan PLTS Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007- 2011 .....	II-78
Tabel 2.56	Produksi Bahan Tambang Dan Galian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007-2012 (M3) .....	II-80
Tabel 2.57	Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Penerangan Tahun 2010 .....	II-81
Tabel 2.58	Data Jumlah Pelanggan PLN, Kwh Terjual dan Daya Tersambung Tahun 2008-2012 .....	II-81
Tabel 3.1	Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008-2012 .....	III-3
Tabel 3.2	Capaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008-2012 .....	III-5
Tabel 3.3	Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2008-2012 dalam Jutaan Rupiah.....	III-6
Tabel 3.4	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2008-2012 .....	III-7
Tabel 3.5	Perkembangan Total Belanja Tahun Anggaran 2008-2012 .....	III-9
Tabel 3.6	Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008-2012 .....	III-9
Tabel 3.7	Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008-2012 .....	III-11
Tabel 3.8	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2008-2012 .....	III-12
Tabel 3.9	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2008-2012 .....	III-13
Tabel 3.10	Neraca Tahun Anggaran 2008-2012 .....	III-13
Tabel 3.11	Analisa Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2008-2012 .....	III-15
Tabel 3.12	Hasil Analisa Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2008-2012.....	III-16
Tabel 3.13	Proporsi Belanja Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2008-2012 (%) .....	III-20

<b>No Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 3.14	Surplus (Defisit) Riil Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2010-2012 .....	III-24
Tabel 3.15	Komposisi Penutupan Riil Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2010-2012.....	III-25
Tabel 3.16	Kerangka Pendanaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2013-2018 .....	III-30
Tabel 3.17	Ketentuan Umum Kelompok Prioritas Anggaran .....	III-33
Tabel 4.1	Analisis Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2013-2018 Terkait Isu Perencanaan Pusat, Regional dan Kabupaten serta Permasalahan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam RPJPD Tahap III.....	IV-23
Tabel 7.1	Perumusan Program Prioritas Pada Program Pembangunan Daerah.....	VII-5
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Dan Pagu Indikatif Pendanaan.....	VIII-2
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Aspek Pelayanan Umum .....	IX-2
Tabel 9.2	Penetapan Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	IX-12
Tabel 9.3	Penetapan Indikator Aspek Daya Saing Daerah.....	IX-16

## DAFTAR GAMBAR

<b>No Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Gambar 2.1	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Hulu sungai Selatan.....	II-16
Gambar 4.1	Pola Hubungan antara Permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Perumusan Visi Misi dan Perumusan Program Kegiatan .....	IV-1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berakhirnya masa bakti kepala daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2013, sekaligus juga berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 – 2013 yang mengusung visi “Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Agropolitan Dan Religius (Pembangunan Pertanian Berbasis Agroindustri Dan Keagamaan) akan dilanjutkan dengan masa bakti kepala daerah berikutnya yang akan mengusung visi dan misi yang baru yaitu “ **Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif**” sebagai kelanjutan dari pelaksanaan pemerintahan daerah periode sebelumnya. Untuk ini tentunya diperlukan adanya penyusunan RPJMD baru untuk periode 2014 - 2018 yang merupakan penjabaran tahapan ketiga dari RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 – 2025. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, bahwasanya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus menyusun RPJMD untuk 5 tahun masa bhaktinya sebagai pimpinan daerah yang memuat penjabaran daripada visi dan misi saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Muatan RPJMD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, didasarkan pada pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta top down dan bottom up. Pendekatan teknokratik sebagaimana pasal 7 PP Nomor 8 Tahun 2008 merupakan penggunaan metoda dan kerangka berpikir ilmiah, yakni proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan partisipatif sebagaimana pasal 8

PP Nomor 8 Tahun 2008 merupakan pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) ; Pendekatan politis sebagaimana pasal 9 PP Nomor 8 Tahun 2008 merupakan pendekatan yang mengakomodir program-program pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; sedangkan perencanaan pembangunan dengan pendekatan *bottom up* dan *top down* sebagaimana pasal 10 PP Nomor 8 tersebut di atas merupakan penyelarasan melalui musyawarah pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergi sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Dokumen RPJMD disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah yang terpilih melalui proses pemilihan kepala daerah telah dilantik. Dengan demikian proses awal penyusunan RPJMD sampai penetapan dengan peraturan daerah tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan.

Berdasarkan agenda kerja penyusunan dokumen RPJMD sesuai lampiran III Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, proses penyusunan RPJMD dimulai dengan (a) persiapan penyusunan RPJMD, (b) penyusunan rancangan awal RPJMD, (c) penyusunan rancangan RPJMD, (d) musrenbang RPJMD, (e) penyusunan rancangan akhir RPJMD, dan (f) penetapan RPJMD dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk penyusunan isi/ materi RPJMD sampai dengan rancangan akhir RPJMD waktu efektif yang tersedia hanya sekitar 3 (tiga) bulan. Sisanya 1 (satu) bulan untuk proses verifikasi dan konsultasi rancangan akhir di provinsi dan 2 (dua) bulan berikutnya untuk proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan waktu efektif 3 (tiga) bulan untuk penyusunan dokumen RPJMD dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan mengingat banyaknya data yang harus dikumpulkan, diolah dan dianalisis maka dirasakan waktu yang tersedia ini masih sangat kurang. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan berinisiatif untuk melakukan pengumpulan data, identifikasi data dan pengolahan data, identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis secara lebih awal

serta melakukan analisis terhadap berbagai dokumen perencanaan terkait lainnya.

Pada proses penyusunannya digunakan 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu (a) pendekatan secara politis, (b) pendekatan teknokratik, (c) pendekatan partisipatif, (d) pendekatan atas-bawah (*top down*) dan (e) pendekatan bawah atas (*bottom up*). Pendekatan secara politis dipahami bahwa pemilihan kepala daerah adalah salah satu bagian dari penyusunan rencana karena rakyat memilih dan menentukan pilihannya didasarkan atas program-program terbaik yang ditawarkan oleh kepala daerah terpilih. Pendekatan secara teknokrat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan kerangka berpikir ilmiah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan atau *stakeholder* terhadap pembangunan dalam hal ini melibatkan unsur masyarakat pada tahapan-tahapan penyusunan rencana. Pendekatan perencanaan bawah-atas dan atas-bawah dilaksanakan atas jenjang pemerintahan.

Keberadaan dokumen RPJMD selanjutnya akan menjadi program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya selama lima tahun. Dokumen RPJMD akan dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja pembangunan daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

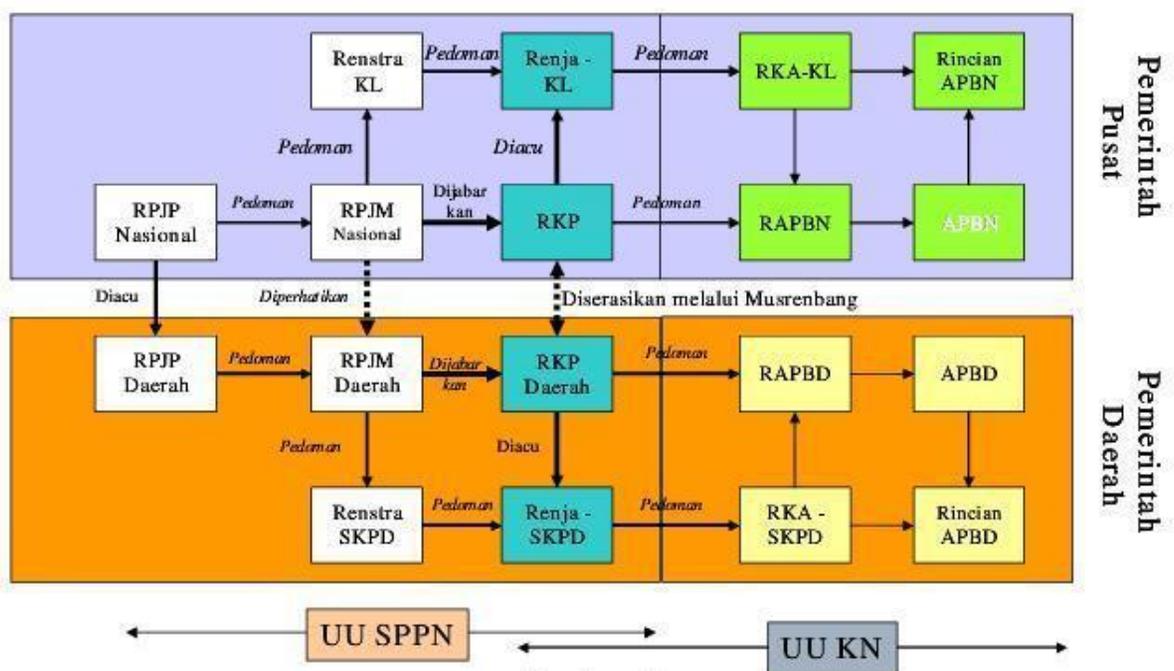
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender di Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927).
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 - 2025 dengan tetap memperhatikan arahan RPJM Nasional 2010 – 2014 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2015.

Hubungan antara UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU Keuangan Negara (KN) pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1 .1

Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Selanjutnya untuk setiap tahun selama periode perencanaan, RPJMD sebagai dokumen strategik perlu dijabarkan kedalam kebijakan taktikal berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang akan menjadi acuan bagi seluruh SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada setiap tahunnya.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

##### 1.4.1 Maksud Penyusunan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014- 2018 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan visi dan misi daerah tahun 2014 – 2018.

##### 1.4.2 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018 adalah:

1. Mengidentifikasi perkembangan pembangunan serta pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 5 tahun perencanaan dengan memperhatikan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah.
2. Merumuskan visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan dicapai melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah.
3. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan pilihan program prioritas setelah dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD.

4. Sebagai bahan acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Perencanaan Penganggaran.
5. Menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan baik Pemerintah Daerah maupun SKPD.
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

- Bab I      Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- Bab II      Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bab ini memuat tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.
- Bab III     Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan. Bab ini menyajikan gambaran kinerja pengelolaan keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.
- Bab IV     Analisis Isu-Isu Strategis. Bab ini memuat tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah.
- Bab V      Penyajian Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran. Bab ini menyajikan Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014–2018.
- Bab VI     Strategi dan Arah Kebijakan. Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- Bab VII    Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah. Bab ini menguraikan kebijakan umum dan program pembangunan daerah atas dasar misi-misi yang telah ditentukan.

- Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan. Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD.
- Bab IX Penyajian Kerangka Indikator Kinerja Daerah. Bab ini menetapkan berbagai indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada akhir periode jabatan.
- Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi masa bakti Kepala Daerah terpilih, serta kaidah pelaksanaan yang menjadi acuan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAERAH

#### 2.1. Aspek Geografis Dan Demografis Hulu Sungai Selatan

##### 2.1.1. Kondisi Fisik Dasar

###### a. Letak Geografis

Secara astronomis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak diantara 02°29'58"LS - 02°56'10"LS dan 114°51'19"BT - 115°36'19"BT. Sedangkan ibukotanya yaitu Kecamatan Kandangan terletak 2°47'LS dan 115°40'BT yang dilewati oleh Sungai Amandit, anak sungai dari Sungai Barito.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 11 kecamatan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara

Sebelah timur : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kotabaru

Sebelah selatan : Kabupaten Tapin

Sebelah barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tapin

Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam tiap-tiap kecamatan terlihat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten HSS**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2012**

No.	Kecamatan	Nama Ibukota	Luas (km <sup>2</sup> )	Desa/ Kelurahan
1.	Padang Batung	Padang Batung	203,93	17
2.	Loksado	Loksado	338,89	11
3.	Telaga Langsat	Telaga Langsat	58,08	11
4.	Angkinang	Angkinang	58,40	11
5.	Kandangan	Kandangan	106,71	18
6.	Sungai Raya	Sungai Raya	80,96	18
7.	Simpur	Simpur	82,35	11
8.	Kalumpang	Kalumpang	135,07	9
9.	Daha Selatan	Tumbukan Banyu	322,80	16
10.	Daha Utara	Tambak Bitin	268,11	19
11.	Daha Barat	Bajayau	149,62	7
Luas Keseluruhan			1804,92	148

Sumber: BPS Kab. HSS, Kabupaten HSS Dalam Angka 2012

###### b. Topografi dan Ketinggian

Secara geologis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah alluvial yang

terkadang berawa-rawa (rawa menoton), sehingga udaranya terasa dingin dan agak lembab. Salah satu faktor tanah yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembangunan adalah faktor ketinggian tempat dan kemiringan wilayah.

Tinggi suatu tempat adalah tinggi tersebut yang diukur dari permukaan laut. Ketinggian (topografi) suatu tempat berkaitan dengan naik turunnya temperatur/suhu udara semakin tinggi suatu tempat suhunya semakin menurun. Begitu pula sebaliknya semakin rendah suatu tempat suhunya akan semakin tinggi. Hal ini terjadi karena terjadinya proses pemampatan dan perenggangan udara.

Klasifikasi ketinggian dapat dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelas, yang seolah-olah terbagi dua, yaitu wilayah sebelah barat berupa dataran rendah dengan kondisi medan umumnya datar, sedangkan wilayah sebelah timur medannya bervariasi. Daerah dengan ketinggian 0-25 meter atau relatif datar seluruhnya terdapat dibagian barat. Secara keseluruhan, daerah relatif datar ini luasnya mencapai 123.452 Ha atau  $\pm$  68% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Daerah dengan ketinggian di atas 25 meter dimulai dari wilayah Kecamatan Padang Batung, Telaga Langsung, Angkinang, dan Sungai Raya mengarah kesebelah timur. Wilayah yang paling luas adalah wilayah dengan klasifikasi ketinggian antara 0 sampai 7 meter, dengan persentase mencapai 58,3 %. Sedangkan wilayah ketinggian yang paling sempit adalah wilayah dengan klasifikasi ketinggian di atas 1000 meter dengan persentase 0,9% yang hanya terdapat di Kecamatan Loksado.

Sesuai dengan konfigurasi medannya, maka wilayah sebelah barat didominasi oleh daerah genangan (rawa) atau persawahan. Daerah ini meliputi Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat, dan sedikit wilayah Kecamatan Kalumpang dan Angkinang. Sedangkan wilayah sebelah timur terutama Kecamatan Loksado umumnya berupa hutan yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman keras (tahunan).

### **c. Kelerengan/Kemiringan Tanah**

Lereng/kemiringan adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang datar (datum) yang dinyatakan

dengan persen (%). Tingkat kemiringan lereng umumnya berkaitan dengan ketinggian suatu tempat. Semakin tinggi suatu tempat maka lerengnya akan semakin terjal. Selain itu, semakin besar tingkat kemiringan lereng akan mengakibatkan tanah semakin rentan terhadap erosi. Karenanya informasi tentang lereng bermanfaat untuk rencana pemanfaatan suatu kawasan.

Pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan, daerah dengan lereng relatif datar (0-8%) meliputi luas lebih dari 74%. Bahkan terdapat 6 (enam) kecamatan yang seluruh wilayahnya termasuk sangat datar (0-2%). Keenam wilayah kecamatan tersebut adalah Kecamatan Angkinang, Kandangan, Simpur, Kalumpang, Daha Selatan, Daha Utara, dan Kecamatan Daha Barat.

Daerah berbukit dengan lereng terjal (antara 25 sampai lebih dari 40%) yang mencapai luas hampir 12 % yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Padang Batung, Telaga Langsat, sebagian Sungai Raya dan yang paling luas terdapat di Kecamatan Loksado. Daerah dengan lereng terjal ini merupakan bagian dari jatur Pegunungan Meratus yang sebagian difungsikan sebagai kawasan lindung.

#### **d. Tekstur Tanah**

Tekstur tanah adalah perbandingan ukuran partikel-partikel pembentuk tanah yaitu antara debu, tanah liat dan pasir dari satu satuan sampel tanah. Perbandingan besar kecilnya persentase tiap unsur penyusun tanah membentuk tekstur tanah tertentu. Tekstur tanah akan menunjukkan perilaku tanah, yakni kepekaan terhadap erosi, daya serap air dan kandungan unsur hara. Semakin kasar tekstur tanah berarti persentase kandungan pasirnya semakin besar, maka tanah tersebut akan semakin peka terhadap erosi dan semakin mudah menyerap air.

Tekstur tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikelompokkan atas 2 (dua) jenis, yaitu halus dan sedang. Hampir 69% tanah bertekstur sedang, yang meliputi seluruh wilayah kecamatan. Sementara itu tanah dengan tekstur halus sekitar 30% yang menyebar di 5 (lima) wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Padang Batung, Loksado, Sungai Raya, Daha Selatan, dan Daha Utara.

#### **e. Curah Hujan**

Sifat hujan adalah perbandingan antara jumlah curah hujan yang terjadi selama satu bulan dengan nilai rata-rata atau normalnya hujan pada bulan tersebut. Jumlah curah hujan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam setahun 1.819,5 mm dengan banyaknya hujan 181 hari. Temperatur rata-rata menunjukkan antara 26,25°C-27,25°C sedangkan kelembaban udara rata-rata menunjukkan antara 76,5% - 77%.

#### **f. Pola Ruang**

Rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten/kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten/kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. Terdiri dari rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya (tabel 2.3 Pola Ruang dan Peta 2.1 Pola Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Hulu Sungai Selatan)

Berdasarkan PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, yang dimaksud dengan Kawasan Lindung adalah suatu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan kawasan lindung meliputi semua upaya perlindungan, pengawetan, konservasi serta pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan. Maka tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya, dan kawasan lindung meliputi kawasan suaka alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Arahan pengelolaan dalam upaya melestarikan kawasan lindung secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan lindung.
- b. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

- c. Pengembangan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung.
- d. Percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil hasil hutan non-kayunya.
- e. Membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki terhadap alam.
- f. Pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam.
- g. Percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi kawasan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung.

Pada bagian ini perlu dijelaskan tentang jenis kawasan lindung disertai dengan lokasi dan luasan sejauh memungkinkan. Dalam mengendalikan kegiatan alih fungsi kawasan lindung, ataupun tidak terjadi alih fungsi tetapi sudah mengalami penurunan fungsi, perlu dirumuskan upaya pengembalian dan pelestarian fungsi lindung sesuai dengan kepentingan fungsi masing-masing.

Jenis kawasan lindung di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :

### **Kawasan Lindung**

1. Kawasan Hutan lindung
  - Kec. Loksado 19.955 Ha
  - Kec. Padang Batung 3.059 Ha
  - Kec. Telaga Langsat 904 Ha
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya
  - Kec. Loksado luasnya 7.490 Ha
  - Kec. Padang Batung luasnya 750 Ha
  - Kec. Telaga Langsat luasnya 250 Ha
3. Kawasan perlindungan setempat
  - Danau Bangkau di Kec. Kandangan luasnya 615 Ha
  - Danau Paharangan di Kec. Daha Utara luasnya 8 Ha
  - Danau Pantai Ulin di Kec. Simpur luasnya 5 Ha
  - Danau Muning Dalam di Kec. Daha Selatan luasnya 5Ha
  - Danau Bago Tanggul di Kec. Kalumpang luasnya 56 Ha
  - Danau Bajayau Lama di Kec. Daha Barat luasnya 6 Ha

4. Ruang terbuka Hijau Kota (RTH) (Khusus untuk Kota )
  - RTH publik : lapangan olah raga, taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, rel kereta api dan sungai 30%
  - RTH privat : berupa kebun atau halaman rumah, gedung milik masyarakat dan swasta yang ditanami tumbuhan
5. Kawasan suaka alam dan cagar budaya
  - Kawasan Suaka Alam berada di Cagar Alam Gunung Kentawan luas 240 Ha
  - Kawasan Cagar Alam Budaya dan Ilmu Pengetahuan
    - a. Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi di Kec. Daha Selatan
    - b. Mesjid Su'ada di Kec. Simpur
    - c. Benteng Madang di Kec. Padang Batung
    - d. Tugu/Monumen Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 di Desa Ni'ih
    - e. Makam Tumpang Talu di Kec. Kandangan
    - f. Kubur Anam di Kec. Sungai Raya
    - g. Rumah Bersejarah H. Kaspul Anwar di Kec. Padang Batung
    - h. Rumah Bersejarah H. Abdul Kadir di Kec. Padang Batung
6. Kawasan rawan bencana alam
  - Bencana Longsor
    - a. Kec. Loksado di Desa Hulu Banyu
    - b. Kec. Padang Batung di desa Batu Laki
    - c. Kec. Telaga Langsat di Desa Hamak dan Hamak Utara
  - Bencana Banjir
    - a. Kec. Kandangan :
      1. Desa Jambu Hilir
      2. Desa Baluti
      3. Desa Sungai Kupang
      4. Desa Sungai Paring
      5. Desa Lungau
    - b. Kec. Kalumpang :
      6. Desa kalumpang
      7. Desa Karang Paci
      8. Desa Balanti
      9. Desa Balimau

- c. Kec. Angkinang :
  - 10. Desa Telaga Sili-sili
  - 11. Desa Sungai Hanyar
  - 12. Desa Angkinang
  - 13. Desa Angkinang selatan
  - 14. Desa Bakarung
- d. Kec. Sungai Raya :
  - 15. Desa Sungai Raya Selatan
  - 16. Desa Tanah Bangkang
  - 17. Desa Ida Manggala
- e. Kec. Padang Batung :
  - 18. Desa Malutu
  - 19. Desa Batu Laki
  - 20. Desa Malilingin
  - 21. Desa Jelatang
  - 22. Desa Batu Bini
  - 23. Desa Karang Jawa Muka
- f. Kec. Telaga Langsung :
  - 24. Desa Mandala
  - 25. Desa Lok Binuang
  - 26. Desa Pakuan Timur
  - 27. Desa Gumbil
- g. Kec. Daha Selatan
- h. Kec. Daha Utara
- i. Kec. Daha Barat

1. Kawasan lindung lainnya

- Reservaat Danau Bangkau di Desa Bangkau Kec. Kandangan luasnya 10 Ha
- Reservaat Sungai Jarum di Desa Bangkau Kec. Kandangan luasnya 100 Ha
- Kawasan rawa Simpur di Tanggul Desa Pantai Ulin Kec. Simpur luasnya 5 Ha
- Kawasan Bago Tanggul di Desa Bago Tanggul Kec. Kalumpang luasnya 5 Ha
- Kawasan Bajayau Lama di Desa Bajayau Lama Kec. Daha Barat luasnya 5 Ha

- Kawasan Muning Dalam di Desa Muning Dalam Kec. Daha Selatan luasnya 6 Ha

### **Kawasan budi daya**

Dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan Budidaya terdiri dari :

#### 1. Kawasan Hutan produksi

- Kawasan Hutan Produksi Tetap
  - a. Kec. Loksado luasnya 4.545 Ha
  - b. Kec. Padang Batung luasnya 7.702 Ha
  - c. Kec. Sungai Raya luasnya 444 Ha
  - d. Kec. Telaga Langsung luasnya 399 Ha
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi
  - a. Kec. Daha Barat luasnya 2.415 Ha
  - b. Kec. Daha Selatan luasnya 5.464 Ha
  - c. Kec. Daha Utara luasnya 10.843 Ha

#### 2. Kawasan pertanian

- Kawasan Peruntukan pertanian tanaman pangan
  - a. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah luasnya 12.981 Ha
    1. Kec. Sungai raya
    2. Kec. Simpur
    3. Kec. Kandangan
    4. Kec. Telaga Langsung
    5. Kec. Daha Utara
    6. Kec. Padang Batung
    7. Kec. Kalumpang
    8. Kec. Angkinang
    9. Kec. Daha Selatan
    10. Kec. Daha Utara
    11. Kec. Daha Barat
  - b. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering/tegalan luasnya 3.797 Ha
    1. Kec. Padang Batung
    2. Kec. Sungai Raya
    3. Kec. Telaga Langsung
    4. Kec. Loksado

- Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura luasnya 3.797 Ha dengan jenis komoditas
    - a. Buah-buahan berupa semangka meliputi :
      - Kec. Telaga Langsat
      - Kec. Padang Batung
      - Kec. Daha Barat
      - Kec. Daha Selatan
      - Kec. Daha Utara
    - b. Sayur-sayuran meliputi :
      - Kec. Sungai Raya
      - Kec. Telaga Langsat
      - Kec. Kandangan
      - Kec. Angkinang
      - Kec. Padang Batung
      - Kec. Simpur
3. Kawasan perkebunan
- Kawasan Perkebunan
    - a. Perkebunan Karet luasnya 23.839 Ha yaitu ada di
      - Kec. Telaga Langsat
      - Kec. Padang Batung
      - Kec. Loksado
      - Kec. Sungai raya
      - Kec. Angkinang
    - b. Perkebunan Kelapa Sawit luasnya 48.955 Ha yaitu ada di
      - Kec. Angkinang
      - Kec. Daha Barat
      - Kec. Daha Selatan
      - Kec. Daha Utara
      - Kec. Kalumpang
      - Kec. Kandangan
      - Kec. Simpur
    - c. Perkebunan Kayu manis
      - Kec. Loksado
    - d. Perkebunan Kelapa
      - Kec. Simpur
      - Kec. Kalumpang
      - Kec. Sungai raya

- Kec. Padang Batung
- Kec. Telaga Langsung
- Kec. Kandangan
- Kec. Angkinang

4. Kawasan Peternakan

a. Ternak sapi potong

- Daerah sentra sapi meliputi : Kec. Sungai Raya, Kec. Simpung, dan Kec. Kalumpang
- Daerah pengembangan meliputi : Kec. Kandangan, Kec. Padang Batung, Kec. Angkinang, Kec. Telaga Langsung dan Kec. Loksado

b. Ternak Kerbau Rawa

- Kec. Daha Barat
- Kec. Daha Utara

c. Ternak kambing berada di seluruh Kecamatan

d. Ternak domba

- Kec. Kandangan
- Kec. Daha Selatan

e. Ternak ayam buras dan ayam ras berada di seluruh kecamatan

f. Ternak itik

- Daerah sentra meliputi Kec. Daha Utara
- Daerah pengembangan meliputi : Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Barat, Kec. Kalumpang, Kec. Simpung, dan Kec. Angkinang.

5. Kawasan perikanan

• Kawasan Perikanan

a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di sekitar sungai besar dan danau luasnya 2.059 Ha meliputi :

- Kec. Daha Barat
- Kec. Daha Selatan
- Kec. Daha Utara
- Kec. Kandangan
- Kec. Simpung
- Kec. Kalumpang

b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan

- Pengembangan kawasan perikanan kolam meliputi : Kec. Kandangan, Kec. Daha Selatan, dan Kec. Kalumpang.

- Pengembangan kawasan perikanan keramba meliputi :  
Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Utara dan Kec. Daha Barat.
- c. Kawasan pengolahan ikan
  - Kec. Daha Selatan
  - Kec. Daha Utara
  - Kec. Daha Barat
  - Kec. Kandangan
  - Kec. Kalumpang
- d. Kawasan peruntukan perikanan minapolitan berada di Desa Muning Kec. Daha Selatan
- 6. Kawasan pertambangan
  - Mineral logam
    - a. Emas berada di Kec. Loksado
    - b. Mangan berada di Desa Tampak Pipi'I, Desa Bukuanin dan Desa Mawangi Kec. Padang Batung
    - c. Besi berada di Desa Malaris, Desa Kamawakan, Desa S. Tinggiran, dan Desa S. Landuyan Kec. Loksado
  - Mineral bukan logam
    - a. Pasir kuarsa berada di Desa Malilingin Kec. Padang Batung
    - b. Fosfat meliputi
      - Desa Gn. Batu Laki dan Desa Gn. Batu Bini Kec. Padang Batung
      - Desa Gn. Liang Mandala dan Desa Gn. Burit Sanga Kec. Telaga Langsat
    - c. Lempung meliputi :
      - Desa Karang Jawa, Desa Jambu Hulu, Desa Madang, Desa Pandulangan di Kec. Padang Batung
      - Desa Angkinang Kec. Angkinang
      - Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya
      - Desa Mandala, Desa Ambutun, Desa Taniti, dan Desa Pakuan Kec. Telaga Langsat
  - Batuan
    - a. Marmer berada di Desa Datar Kedayang, Desa Gn. Langara, dan Desa Gn. Kantawan Kec. Loksado
    - b. Granit berada di Desa Kamawakan Kec. Loksado
    - c. Andesit meliputi :
      - Kec. Loksado

- Kec. Padang Batung
- Gabro berada di Kec. Loksado

d. Basalt

- Desa Haratai Kec. Loksado
- Desa Padang Batung, Desa Durian Rabung Kec. Padang Batung.

e. Tanah liat

- Desa Karang Jawa, Desa Jambu Hulu, desa Madang, dan Desa Pandulangan Kec. Padang Batung
- Desa Angkinang Kec. Angkinang
- Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya
- Desa Mandala, Desa Ambutun, Desa Taniti, dan Desa Pakuan Kec. Telaga Langsat

f. Tanah urug berada di Desa Padang Batung dan Desa Tambak Pipi'i di Kec. Padang Batung

g. Kerikil berpasir alami (sirtu) meliputi :

- Sepanjang Sungai Amandit di Kec. Padang Batung
- Sepanjang Sungai Amandit di Kec. Sungai Raya

h. Batu gamping meliputi :

- Desa Gn. Batu Laki dan Desa Gn. Batu Bini, Desa Tayub, dan Desa Mandapai di Kec. Padang Batung
- Desa Gn. Liang Mandala, Desa Gn. Burit Sanga di Kec. Telaga Langsat
- Desa Datar Kedayang, Desa Haratai, dan Desa Tanuhi di Kec. Loksado.

- Batu bara

a. Bitumen padat di Desa Malutu Kec. Padang Batung

b. Desa Malutu, Desa Panglima Dambung, Desa Batu Bini, Desa Durian Rabung, Desa Muara Pipi'i, Desa Malilingin, Desa Kuangan, Desa Gn. Batubarang, Desa Gn. Pancur Binjai, Desa Pariangan, Desa Mandapai, Desa Tambak Pipi'i, Desa Tayub Kec. Padang Batung

c. Desa Taniti di Kec. Telaga Langsat

7. Kawasan industri

Kawasan industri kecil dan mikro meliputi :

a. Industri Dodol Kandangan meliputi :

- Desa Kapuh Kec. Simpur

- Desa Telaga Bidadari, Desa Hamalau, dan Desa Hariti Kec. Sungai Raya
  - Desa Gambah Luar, Desa Kandangan Barat dan Desa Kandangan Utara Kec. Kandangan
- b. Industri kerupuk berada di Bamban Utara Kecamatan Angkinang
  - c. Industri ikan kering meliputi :
    - Desa Bangkau Kec. Kandangan
    - Desa Bago Tanggul Kecamatan Kalumpang
    - Desa Muning dan Desa Muning Baru Kec. Daha Selatan
  - d. Industri propeler berada di Desa Penggadingan dan Desa Pekapuran Kecil Kecamatan Daha Utara
  - e. Industri imitasi berada di Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan
  - f. Industri pandai besi berada di Desa Sungai Pinang dan Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan
  - g. Industri gerabah berada di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan
  - h. Industri kue kering meliputi :
    - Desa Telaga Bidadari Kec. Sungai Raya
    - Desa Kapuh Kec. Simpur
  - i. Industri anyaman bambu berada di Desa Malinau, Desa Ulang dan Desa Panggungan Kec. Loksado
  - j. Industri Anyaman Purun berada di Desa Balimau dan Desa Karang Paci Kec. Kalumpang
  - k. Industri Kumpang Parang berada di Desa Sarang Halang dan Desa Sungai Raya Utara Kec. Sungai Raya
  - l. Industri Gula merah meliputi :
    - Desa Jambu Hulu, Desa Jambu Hilir Kec. Kandangan
    - Desa Baru Hulu, Desa Baru Tengah, Desa Asam-Asam, Desa Tamiyang, Desa Karasikan, Desa Batang Kulur Kanan, Desa Batang Kulur Kiri, Desa Bumi Berkat Kec. Sungai Raya.
8. Kawasan pariwisata
    - Pariwisata Budaya
      - a. Wisata Budaya Lokal meliputi :
        - Balai Adat Dayak di Kec. Loksado
        - Rumah Adat Banjar Bumbungan Tinggi di Desa Habirau Kec. Daha Selatan

- Rumah Adat Banjar Gajah Manyusu di Desa Amawang Kec. Kandangan
  - Upacara Aruh Ganal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
  - Seni Tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
  - Lomba Jukung Tradisional (Perahu Naga) di Kec. Daha Selatan
  - Olahraga Tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
  - Kalang Hadangan di Kec. Daha Utara dan Kec. Daha Barat
- b. Wisata Sejarah meliputi :
- Tugu/Monumen Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 di Desa Ni'ih Kec. Loksado
  - Tugu Peringatan Penyusunan Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV di Kec. Telaga Langsat
  - Tugu Garis Demarkasi di Desa Karang Jawa Kec. Padang Batung.
  - Tugu Peringatan Markas Daerah Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di Desa Jelatang Kec. Padang Batung
  - Gedung Juang Devisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di Desa Halantau Kec. Sungai Raya
  - Situs Benteng Madang di Desa Madang Kec. Padang Batung
  - Situs Amuk Hantarukung di Desa Hantarukung Kec. Simpur
  - Makam Tumpang Talu di Kandangan Barat Kec. Kandangan
  - Kubur Anam di Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya
  - Makam Singakarsa di Jln. Singakarsa Kec. Kandangan
  - Makam aluh Idut di Jln. Aluh Idut Kec. Kandangan
  - Tugu 2 Januari (Tugu Hamayung) di Desa Hamayung Kec. Daha Utara
  - Makam Ning Bulang di desa Hantarukung Kec. Simpur
  - Rumah Bersejarah
- c. Wisata Religi meliputi :
- Mesjid Su'ada di Desa Wasah Hilir Kec. Simpur
  - Makam H. M Said di Desa Simpur Kec. Simpur
  - Makam Datu H. Abbas di Desa Simpur Kec. Simpur
  - Kubah Datu Durabu di Desa Kalumpang Kec. Kalumpang
  - Kubah Taniran di Desa Taniran Kec. Angkinang

- Makam Keramat Datu H.M Rais di Desa Loknyiur Kec. Angkinang
- Makam Datu Daha Kec. Daha Utara
- Makam Surgi Tuan di Desa Pasungkan Kec. Daha Utara
- Makam Habib Ibrahim Desa Mandala Kec. Daha Utara
- Makam Tuan Guru H. Ali di Desa Pandansari Kec. Daha Selatan
- Makam Habib Lumpangi di desa Lumpangi Kec. Loksado

d. Pariwisata Alam

- Wisata Alam Loksado di Kec. Loksado
- Air Terjun Haratai di Kec. Loksado
- Air Panas Tanuhi di Desa Tanuhi Kec. Loksado
- Gunung Kentawan di Desa Tanuhi Kec. Loksado
- Danau Bangkau di Desa Kec. Kandangan
- Delta dan Dam Sungai Amandit di Desa Malutu Kec. Padang Batung
- Riam Anai di Desa Lok LahungKec. Loksado
- Air Terjun Kilat Api di Desa Tanuhi Kec. Loksado
- Air Terjun Uring di Desa Kamawakan Kec. Loksado
- Air Terjun Tangkaramin di Desa Malinau Kec. Loksado
- Air Terjun Tinggiran Hayam di Desa Kamawakan Kec. Loksado
- Air Panas Mandapai di Desa Batu Bini Kec. Padang Batung
- Telaga Bidadari di Desa Telaga Bidadari Kec. Sungai Raya

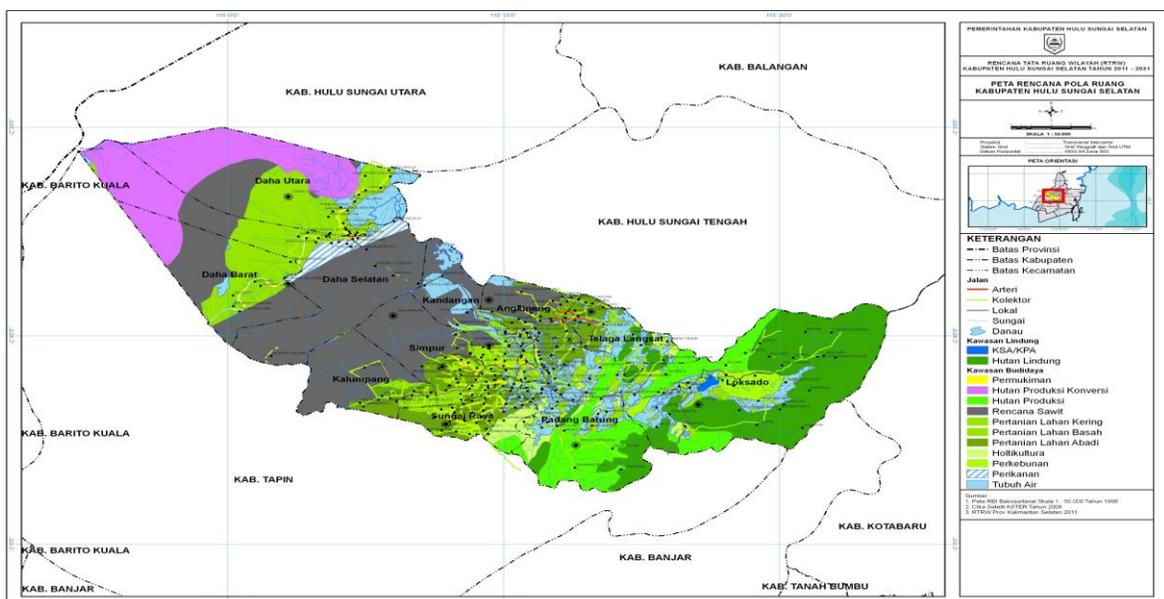
9. Kawasan permukiman

- Kawasan Peruntukan Pemukiman luasnya 4.533 Ha
  - a. Kawasan Peruntukan permukiman perkotaan terdiri atas :
    - Kawasan Perkotaan Kandangan di Kec. Kandangan
    - Kawasan Perkotaan Angkinang di Kec. Angkinang
    - Kawasan Perkotaan Sungai Raya di Kec. Sungai Raya
    - Kawasan Perkotaan Nagara di Kec. Daha Selatan dan Daha Utara
    - Kawasan Perkotaan Simpur di Kec. Simpur
    - Kawasan Perkotaan Loksado di Kec. Loksado
  - b. Kawasan Peruntukan permukiman perdesaan mencakup semua permukiman di luar kawasan Perkotaan di wilayah Kabupaten.

10. Kawasan lainnya

- Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi :
  - a. Pasar Los Batu Kec. Kandangan
  - b. Pasar Nagara Kec. Daha Selatan
  - c. Pasar Hewan Kec. Angkinang
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas :
  - a. Kawasan Militer Angkatan Darat berada di Kec. Kandangan
  - b. Komando Rayon Militer Tersebar di wilayah Kabupaten
  - c. Kawasan Kepolisian meliputi :
    - Kepolisian Resort berada di Kec. Sungai Raya dan Kec.Loksado
    - Kepolisian Sektor tersebar di wilayah Kabupaten

**Gambar 2.1**  
**Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Hulu sungai Selatan**



**2.1.2. Sosial Kependudukan**

**a. Pemerintahan**

Sistem pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berpedoman pada azas musyawarah mufakat, sebagaimana tercantum pada motto kabupaten, yaitu "RAKAT MUFAKAT" yang berasal dari bahasa Banjar. Rakat artinya persatuan dan Mufakat artinya musyawarah. Masyarakat Hulu Sungai Selatan sangat mengedepankan persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan. Jika timbul permasalahan maka musyawarah selalu dilakukan untuk mencari solusi terbaik. Dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana amanat Undang-Undang

mengedepankan pemerintahan yang bersih (Good Governance) dan mengedepankan partisipasi publik. Hal ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam setiap kesempatan pengambilan keputusan strategis selalu mengikutkan masyarakat dalam hal ini diwakili oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, dengan 144 desa dan empat kelurahan. Ibukota Kabupaten ini berada di Kecamatan Kandangan. Untuk menjalankan roda pemerintahan, dibentuklah Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). Sampai tahun 2012, Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdiri dari satu Sekretariat Daerah, Satu Sekretariat DPRD, Satu Sekretariat KPUD, Satu Sekretariat Korpri, 14 (empat belas) Dinas, 5 (lima) Badan, 5 (lima) Kantor ditambah dengan 11 (sebelas) Kantor Kecamatan dan 4 (empat) Kelurahan dan 2 Lembaga Teknis Lainnya. Lembaga teknis lain yang mempunyai tugas khusus dan langsung bertanggung jawab kepada Bupati adalah RSUD Hasan Basery dan PDAM Hulu Sungai Selatan. Terdapat juga sepuluh institusi vertikal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari 4 (empat) Kementrian, Kejaksaan Negeri, Mahkamah Agung, POLRI, dan 3 (tiga) Lembaga Non Departemen.

Aspek Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mengembangkan pelayanan publik dan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan baik lembaga- lembaga yang ada di desa maupun lembaga- lembaga pada masyarakat pedalaman pegunungan Meratus, khususnya pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum lainnya melalui sumber daya manusia kepegawaian yang seperti tertera pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil  
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Semester II Tahun 2013

No	Unit Kerja	Jumlah PNS
1	2	3
1	SEKRETARIAT DAERAH	7
2	BAGIAN TAPEM SETDA	11
3	BAGIAN HUKUM SETDA	10
4	BAGIAN ORGANISASI SETDA	11

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
5	BAGIAN UMUM SETDA	53
6	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA	20
7	BAGIAN EKOBANG SETDA	14
8	BAGIAN KESRA SETDA	12
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	34
10	BAPPEDA	33
11	INSPEKTORAT	46
12	SEKRETARIAT DPRD	41
13	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH	50
14	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH	9
15	KANTOR PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN ARSIP DAERAH	23
16	BADAN KB,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN	57
17	BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN	121
18	KANTOR PENGELOLA PASAR	25
19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	44
20	SEKRETARIAT KPUD	13
21	SEKRETARIAT KORPRI	5
22	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	11
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24
24	DINAS KESEHATAN	68
25	DINAS PENDIDIKAN	74
26	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	44
27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35
28	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	53
29	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	39
30	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	28
31	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	44
32	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	39
33	DINAS PEKERJAAN UMUM	72
34	DINAS LH, TATA KOTA DAN PERDESAAN	105
35	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	68
36	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	37
37	KECAMATAN SUNGAI RAYA	21
38	KECAMATAN SIMPUR	25
39	KECAMATAN KALUMPANG	18

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
40	KECAMATAN ANGKINANG	21
41	KECAMATAN TELAGA LANGSAT	22
42	KECAMATAN PADANG BATUNG	23
43	KECAMATAN LOKSADO	21
44	KECAMATAN DAHA SELATAN	18
45	KECAMATAN DAHA UTARA	18
46	KECAMATAN KANDANGAN	21
47	KECAMATAN DAHA BARAT	12
48	KELURAHAN KANDANGAN KOTA	15
49	KELURAHAN KANDANGAN BARAT	15
50	KELURAHAN KANDANGAN UTARA	14
51	KELURAHAN JAMBU HILIR	14
52	PUSKESMAS KANDANGAN	44
53	PUSKESMAS JAMBU HILIR	41
54	PUSKESMAS GAMBAH	25
55	PUSKESMAS BAYANAN	23
56	PUSKESMAS BAJAYAU	14
57	PUSKESMAS NEGARA	55
58	PUSKESMAS PASUNGGAN	22
59	PUSKESMAS SIMPUR	33
60	PUSKESMAS WASAH	25
61	PUSKESMAS SUNGAI RAYA	35
62	PUSKESMAS BATANG KULUR	24
63	PUSKESMAS PADANG BATUNG	36
64	PUSKESMAS KALIRING	41
65	PUSKESMAS ANGKINANG	34
66	PUSKESMAS BAMBAN	29
67	PUSKESMAS TELAGA LANGSAT	31
68	PUSKESMAS KALUMPANG	32
69	PUSKESMAS LOKSADO	15
70	PUSKESMAS MALINAU	11
71	PUSKESMAS SUNGAI PINANG	24
72	PUSKESMAS BARUH JAYA	12
73	BLUD R S U BRIGJEND. H. HASAN BASERY	329
74	UPTD-SKB	14

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
75	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. KANDANGAN	11
76	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. SUNGAI RAYA	10
77	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. SIMPUR	9
78	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. TELAGA LANGSAT	13
79	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. PADANG BATUNG	12
80	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. ANGKINANG	15
81	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. DAHA UTARA	12
82	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. DAHA SELATAN	6
83	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. DAHA BARAT	6
84	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. LOKSADO	7
85	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. KALUMPANG	7

Sumber : BKD Diklat Kab. HSS (data diolah ,semester II 2013)

### **b. Kependudukan**

Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 sebanyak 207.402 jiwa meningkat menjadi 208.507 jiwa pada tahun 2008 dan terus meningkat menjadi 249.073 jiwa pada tahun 2012. Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2007- 2012 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3.**  
**Jumlah Penduduk pada Masing-Masing Kecamatan**  
**Tahun 2007 -2012**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>					
		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1	Padang Batung	17.613	17.635	17.682	19.683	21.020	22.197
2	Loksado	7.802	7.811	7.837	8.320	8.786	9.575
3	Telaga Langsat	8.780	8.826	8.852	8.959	9.817	10.980
4	Angkinang	17.433	17.545	17.594	17.569	18.707	20.117
5	Kandangan	43.342	43.635	44.202	46.219	51.032	53.065
6	Sungai Raya	15.703	15.726	15.785	15.473	17.253	18.532
7	S i m p u r	13.515	13.644	13.712	14.575	15.435	16.243
8	Kalumpang	6.189	6.215	6.314	6.562	6.988	7.202
9	Daha Selatan	39.507	39.865	39.977	40.978	44.096	45.962
10	Daha Utara	29.974	30.026	30.110	32.940	34.925	36.945
11	Daha Barat	7.544	7.579	7.604	7.457	7.815	8.255
<b>Jumlah Total</b>		<b>207.402</b>	<b>208.507</b>	<b>209.669</b>	<b>218.735</b>	<b>235.874</b>	<b>249.073</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. HSS, 2012

Melihat data jumlah penduduk dapat diketahui kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perkembangannya cukup tinggi, pada tahun 2007 perkembangannya 0,50%, kemudian naik menjadi 0,53% (2008), menjadi 0,56% (2009), 4,32% (2010), 7,83% (2011) dan naik menjadi 5,66% (2012). Kepadatan penduduk pada tahun 2007 baru 121 jiwa per km<sup>2</sup> naik menjadi 122 jiwa per km<sup>2</sup> (2008) dan naik menjadi 150 jiwa per km<sup>2</sup>. Searah dengan kenaikan jumlah penduduk jumlah rumah tangga juga meningkat dari 57.463 buah (2007) naik menjadi 73.367 buah (2012). Indikator kependudukan ini dilihat pada tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Indikator Penduduk**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2007 – 2012**

<b>Uraian</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Jumlah penduduk (jiwa)	207.402	208.507	209.669	218.735	235.874	249.073
Perkembangan penduduk (%)	0,50	0,53	0,56	4,32	7,83	5,66
Kepadatan penduduk (jiwa/km)	121	122	123	128	143	150
Rasio Jenis Kelamin	99,55	97,70	100,07	146,22	100,36	100,42
Jumlah Rumah tangga	57.463	57.853	58.438	63.806	68.806	73.367
Rata-rata ART	3,48	3,43	3,33	3,42	3,45	3,40
Persentase penduduk berdasar klasifikasi umur (%)						
0-14	27,94	27,93	27,94	26,00	25,46	25,46
15-64	66,00	66,00	65,93	66,94	67,3	69,39
65 +	6,06	6,07	6,13	6,95	7,24	5,15

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. HSS, 2012

Peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2010 disebabkan oleh perubahan pada peristiwa dari komponen demografi yakni adanya lahir, mati, pindah dan datang (lampid). Namun kenaikan penduduk hanya pada kisaran nol koma dari pergerakan tahun 2007 hingga 2009, hal ini lebih disebabkan oleh berhasilnya program keluarga berencana (KB) dan diikuti juga arus perpindahan penduduk keluar Hulu Sungai Selatan khususnya penduduk yang berada dibagian bawah (Daha) karena penduduk di kawasan tersebut memiliki tradisi yang kuat dalam bermigrasi. Sementara tahun 2010 hingga 2012 terjadi kenaikan signifikan per tahun, yakni mencapai 4,32% dan seterusnya sebagaimana paparan di atas, disebabkan mulai dibukanya zona ekonomi baru berupa perkebunan kelapa

sawit di kawasan-kawasan lebak sebagai penyebab migrasi serta pertumbuhan karena Perbandingan komposisi jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan atau sex ratio di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih di dominasi penduduk perempuan dengan komposisi sebesar 50,22%, dan penduduk laki-laki sebesar 49,77%. Penduduk Perempuan yang lebih banyak jumlahnya terdapat di 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Kandangan sebesar 50,47%, Kecamatan Sungai Raya sebesar 50,98, Kecamatan Simpur sebesar 51,28%, Kecamatan Padang Batung sebesar 50,05% dan Kecamatan Daha Utara sebesar 50,50% . Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.5.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011**

Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Penduduk
	Jiwa	%	Jiwa	%	
1. Padang Batung	9.849	49,95	9.870	50,05	19.719
2. Loksado	4.202	50,93	4.048	49,07	8.250
3. Telaga Langsat	4.523	50,16	4.494	49,84	9.017
4. Angkinang	8.411	50,03	8.401	49,97	16.812
5. Kandangan	23.026	49,13	23.496	50,47	46.558
6. Sungai Raya	7.952	49,02	8.271	50,98	16.223
7. Simpur	6.789	48,72	7.147	51,28	13.936
8. Kalumpang	3.025	50,34	2.984	49,66	6.009
9. Daha Selatan	19.792	50,11	19.704	49,89	39.496
10. Daha Barat	3.724	51,07	3.568	48,93	7.292
11. Daha Utara	15.065	49,50	15.370	50,5	30.435
Jumlah	106.394	49,78	107.353	50,22	213.747

Sumber : BPS Kabupaten HSS, Kabupaten HSS dalam angka 2012

Perkembangan data kegiatan pengarusutamaan gender dan anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan data terpilah gender dan anak Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut ; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,83%, Indeks Pembangunan Gender (IPG) 57,73% dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 54,04%.

Pada Bidang Ekonomi dan ketenagakerjaan persentase penduduk yang bekerja disektor formal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut jenis kelamin terdiri dari Laki-laki 73,4%, Perempuan 85,5% dan jumlah total Laki-laki dan Perempuan 78,4%. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja disektor informal menurut jenis kelamin terdiri dari Laki-laki 26,6%, Perempuan 14,5% dan jumlah total Laki-laki dan Perempuan 21,6%.

Perkembangan perlindungan anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebanyak 11 buah dengan Jumlah Anak yang tinggal di LKSA menurut kelompok umur sebagai berikut ; Umur 7 – 12 Tahun sebanyak 48 anak, Umur 13 – 15 Tahun sebanyak 244 anak, Umur 16 – 17 Tahun sebanyak 167 anak dengan jumlah total sebanyak 459 anak. Sedangkan anak terlantar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada 6 anak dan jumlah ini merupakan 3 terkecil dari semua Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan.

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2010 sebesar 109.733 orang, kemudian naik menjadi 110.554 orang pada tahun 2012. Dari jumlah angkatan kerja tersebut jumlah pengangguran pada tahun 2010 sebesar 6.773 orang dan naik lagi menjadi 7.144 pada tahun 2012. Kenaikan jumlah pengangguran ini merupakan dampak dari meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja. Semakin meningkatnya iklim usaha di Kab. HSS diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Jumlah angkatan kerja, jumlah orang yang bekerja, jumlah pengangguran, jumlah angkatan kerja, TPAK dan TPT dapat dilihat pada tabel 2.6.

**Tabel 2.6**  
**Indikator Ketenagakerjaan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2007- 2012**

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Angkatan Kerja	112.216	109.279	111.476	109.733	109.536	110.554
Bekerja	108.122	104.102	105.125	103.020	102.330	103.410
Pengangguran	4.094	5.177	6.351	6.773	7.206	7.144
Bukan Angkatan Kerja	37.233	39.991	39.617	51.851	48.510	46.850
Sekolah	8.229	7.353	8.848	14.476	15.323	14.522
Mengurus rumah tangga	23.474	25.139	25.216	26.431	24.962	24.674
Lainnya	5.530	7.499	5.553	10.944	8.225	7.654
Jumlah penduduk 15+	150.793	149.270	151.093	161.644	167.040	179.329
TPAK	75,08	80,00	76,13	74,98	73,27	68,33
TPT	3,64	4,73	5,69	6,71	4,32	4,45

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. HSS

Dari gambaran tabel diatas dikatakan jumlah pengangguran relatif banyak karena belum semua terserap lapangan kerja. Namun demikian jika dirujuk dari rasio ketergantungan (*dependent ratio*)

menunjukkan angka 40, yakni 100 orang produktif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menanggung sebanyak 40 orang yang belum dan tidak produktif. Angka demikian memberikan gambaran bahwa capaian kesejahteraan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan relatif mudah diatasi disebabkan penduduk produktif melebihi dari penduduk tidak dan belum produktif. Persoalannya hanya seberapa banyak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dunia usaha membuka lapangan kerja bagi mereka.

### **c. Budaya, Seni dan Ragam Penganan.**

Budaya yang berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah mitologi suku Dayak Meratus (Dayak Bukit) menyatakan bahwa Suku Banjar (terutama Banjar Pahuluan) dan Suku Bukit merupakan keturunan dari dua kakak beradik yaitu Si Ayuh (Sandayuhan) yang menurunkan suku Bukit dan Bambang Basiwara yang menurunkan suku Banjar. Dalam khasanah cerita prosa rakyat berbahasa Dayak Meratus ditemukan legenda yang sifatnya mengakui atau bahkan melegalkan keserumpunan genetika (sating berkerabat secara geneologis) antara orang Banjar dengan orang Dayak Meratus. Dalam cerita prosa rakyat berbahasa Dayak Meratus dimaksud terungkap bahwa nenek moyang orang Banjar yang bernama Bambang Basiwara adalah adik dari nenek moyang orang Dayak Meratus, bernama Sandayuhan.

Suku bangsa Banjar diduga berasal mula dari penduduk asal Sumatera atau daerah sekitarnya, yang membangun tanah air baru di kawasan Tanah Banjar (sekarang wilayah provinsi Kalimantan Selatan) sekitar lebih dari seribu tahun yang lalu. Setelah berlalu masa yang lama sekali akhirnya (setelah bercampur dengan penduduk yang lebih asli, yang biasa dinamakan sebagai suku Dayak, dan dengan imigran-imigran yang berdatangan belakangan) terbentuklah setidaknya-tidaknya tiga subsuku, yaitu (Banjar) Pahuluan, (Banjar) Batang Banyu, dan Banjar (Kuala).

Kesenian Hulu Sungai Selatan terbentuk tidak terlepas dari pengaruh adat dan budaya yang telah digambarkan diatas sebagai proses asimilasi kedua kebudayaan. Kebudayaan eksotik yang masih bertahan di Hulu Sungai Selatan adalah budaya masyarakat Dayak Loksado. Mereka mendiami kawasan Pengunungan Meratus di Kecamatan Loksado yang membentang dari perbatasan Hulu Sungai

Tengah (HST) hingga Tapin dan Kotabaru.

Setidaknya tiga kali aruh ganal (pesta adat besar) yang dilaksanakan oleh masing-masing balai di atas pada setiap tahun. Aruh ganal tersebut dilaksanakan pada malam hari, yang meliputi:

- a. Aruh Basambu, yaitu aruh ganal yang dilaksanakan pada bulan Februari, yakni ketika orang dayak selesai melaksanakan tanam padi (behuma/menugal);
- b. Aruh Bawanang Lalaya, yaitu aruh ganal yang biasanya dilaksanakan pada bulan Juni, yakni ketika masyarakat dayak melaksanakan panen padi; serta
- c. Aruh Bawang Banih Halin, yaitu aruh ganal yang biasanya dilaksanakan pada bulan September. Aruh ini merupakan aruh penutup karena masyarakat dayak Loksado telah selesai melaksanakan panen padi.

Acara aruh ganal diisi dengan berbagai tarian adat yang lamanya antara 3 sampai 9 hari. Tarian adat yang disajikan pada aruh ganal tersebut seperti Batandik, Tari Kanjar, dan Tari Bangsai. Perlengkapan yang dipergunakan pada Tari Batandik yakni sarung, ikat pinggang kain putih, gelang hiayang, laung, gendang, manyan, kapur, baju, dan celana. Pada Tari Kanjar perlengkapan yang dipergunakan yakni baju lengan panjang, ikat pinggang kuning, laung, dan celana. Sedangkan pada Tari Bangsai dengan penarinya khusus wanita menggunakan baju kebaya, kakamban, dan tapih bahalai.

Kegiatan tradisional yang dimiliki oleh orang Dayak Loksado yang masih lestari sampai sekarang yakni:

- Naik dari manau (bersifat ghaib);
- Tari kurung-kurung;
- Basambui (orang sakit diobati secara kebathinan); serta
- Sumbiyang (membuat orang jadi sakit kemudian disembuhkan).

Disamping berbagai kesenian yang khas dari leluhur masyarakat Hulu Sungai Selatan yang telah disebutkan diatas juga ada beberapa kesenian lainnya yang mendapat perhatian dan perlu dilakukan pengembangannya, yaitu antara lain: Wayang Kulit, Wayang Gong, Musik Panting, Madihin, Bapantulan, Mamanda, Lamut dan lain sebagainya.

Sebagaimana paparan pada kebudayaan dan seni yang berlaku

pada masyarakat meratus, pada kawasan tengah dan bawah didominasi kebudayaan Banjar khususnya Banjar Hulu Sungai, penduduknya mayoritas beragama Islam dengan profesi kebanyakan menjadi petani, nelayan, pedagang, pegawai pemerintah dan swasta. Pada masyarakat kawasan tengah dan bawah dalam konteks sosial budaya mengacu dan didominasi pada nilai-nilai keagamaan.

Kota Kandangan merupakan Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), merupakan kota transit bagi kendaraan umum dari Kota Banjarmasin yang akan menuju ke kota lainnya atau sebaliknya. Kota kecil ini, memiliki terminal yang cukup sibuk yang dulunya memiliki sebuah bangunan pasar tua dengan bentuk arsitektur yang mengesankan peninggalan era kolonial namun seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan atas pertumbuhan ekonomi, pasar tersebut telah mengalami perubahan bentuk.

Di Kandangan beragam bentuk penganan yang menjadi ciri khas dari daerah ini dan sudah terkenal hampir ke seluruh pelosok negeri bahkan manca Negara yaitu berupa Ketupat, terkenal dengan sebutan “ketupat Kandangan” yang dimakan dengan Gulai Ikan Haruan (gabus), di setiap warung makanan di pinggir Jalan A Yani, Trans Kalimantan, nyaris semuanya menyediakan menu yang namanya Ketupat Kandangan ini. Parincahan adalah satu kawasan yang bisa dikatakan sentralnya ketupat kandangan yang terkenal sejak era 1980 an sampai sekarang. Di ruas Jalan A Yani, tepatnya mulai Simpang Lima sampai arah menuju luar kota menuju Kota Barabai, Hulu Sungai Tengah (HST) akan ditemui deretan warung Ketupat. Ketupat kandangan disediakan dengan gulai santan dan ikan haruan yang dipanggang menggunakan arang kayu dan batok kelapa. Gulai ikan haruan ini juga disajikan dengan cara khas daerah Kandangan. Ikan tidak langsung dicampur dengan kuah gulai, tetapi dibikin terpisah. Setelah dipanggang dalam tusukan sate, barulah haruan (gabus) ini dicelup dalam kuah gulai lalu disajikan bersama potongan-potongan ketupat. Ikan haruan atau gabus (*Ophiocephalus striatus* atau *Channa striatus*) adalah jenis ikan yang banyak hidup di rawa-rawa, bahkan di genangan-genangan air yang masam di Kalimantan Selatan (Kalsel). Dapat dikatakan ikan haruan adalah makanan rakyat Banjar yang

umumnya disantap bersama ketupat kandang. Inilah makanan yang menduduki nilai penting dalam hidangan makanan khas Kalsel.

Ragam penganan lainnya selain ketupat kandang yang telah digambarkan diatas, dapat pula ditemui Dodol Kandangan dengan bahan bakunya dari kelapa dalam, Wajik ketan, kerupuk bamban, apam wasah, mandai, iwak pakasam, iwak wadi, nasi pundut, ampal nyiur, ampal jagung, gaguduh, apam batil, lempeng, lupis, untuk bainti, pais pisang, cincin, puracit, lamang, lapat, tapai gumbili, tapai lakatan, lalampar, kuaci bigi waluh, surabi dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu dalam era kepemimpinan Kepala Daerah periode 2014-2018 terus ditumbuh kembangkan sehingga menjadi potensi daerah sebagai salah satu pengungkit perekonomian masyarakat.

Selanjutnya untuk periode-periode tertentu seluruh ragam budaya, seni dan penganan tersebut disajikan bersama selain menjadi ajang promosi daerah juga agar terjaga kelestariannya.

## **2.2. Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

### **2.2.1. Pendidikan**

#### **2.2.1.1 Pendidikan Formal**

Karakteristik fasilitas pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah tingkat pertama, hingga menengah tingkat atas. Data pokok pendidikan tahun 2011/2012 terdapat 146 sekolah Taman Kanak-Kanak yang terdistribusi merata di setiap kecamatan, baik swasta maupun negeri. Sedangkan jumlah fasilitas pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dari 245, dengan jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Kandangan sejumlah 45 unit, sedangkan untuk jumlah terendah terdapat di Kecamatan Kalumpang yaitu sejumlah 10 unit. Untuk jumlah MI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjumlah 39 unit terdiri dari 20 unit MI Negeri dan 19 unit MI Swasta. Untuk jumlah total fasilitas pendidikan tingkat pertama (SLTP) adalah 31 unit. Sementara untuk fasilitas pendidikan MTs berjumlah 21 unit. Jumlah fasilitas SMA di Kabupaten Hulu Sungai Selatan keseluruhan berjumlah 10 unit yang tersebar di Kecamatan Kandangan, Sungai Raya, Simpur, dan Daha Utara. Sementara

jumlah fasilitas MA adalah 7 yaitu 3 unit negeri dan 4 unit swasta dengan jumlah hanya terdapat di Kecamatan Padang Batung, Kandangan, Sungai Raya, Simpur, Daha Selatan, dan Daha Utara. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan jumlah SMK sebanyak 4 unit. Disamping itu sebagai masyarakat yang agamis di daerah ini juga terdapat 26 unit pondok pesantren dengan jumlah gurunya sebanyak 515 orang.

Melalui berbagai upaya intensif dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian program-program pembangunan pendidikan yang didukung dengan semakin harmonisnya koordinasi antar sektor serta stakeholders, maka dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dapat diwujudkan peningkatan keberhasilan pembangunan pendidikan, khususnya dalam aspek perluasan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang ditandai dengan peningkatan APK pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Untuk itu dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan dengan mempertahankan APM-SD pada tingkat 95 %, memperluas SMP/Mts hingga mencapai APK 98,0%, serta menurunkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas hingga 5%.

Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial budaya (yaitu penduduk miskin memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan dan daerah terpencil), maupun hambatan atau kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun akan menambah jumlah lulusan SMP/MTs/SMPLB setiap tahunnya, sehingga juga akan mendorong perluasan pendidikan menengah. Selain itu karena satu dan lain hal bagi mereka yang tidak dapat menikmati pendidikan SMA yang bersifat reguler melalui SMA Terbuka dan Paket C, sehingga pada gilirannya mendorong peningkatan APM-APK.

Angka partisipasi sekolah (APS) pada usia 7- 12 tahun pada tahun 2007 baru 90,3 terus mengalami kenaikan menjadi 96,7 pada tahun 2012. Pada kelompok usia 13- 15 tahun pada tahun 2007 sebesar 75,1 terus naik menjadi 77,4 pada tahun 2012. Pada

kelompok usia 16- 18 tahun pada tahun 2007 sebesar 24,0 naik menjadi 45,6 pada tahun 2012 (lihat tabel 2.7)

**Tabel 2.7.**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia**  
**Tahun 2007 – 2012**

No.	Kelompok Usia	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	7 - 12	90.3	92.7	95	95,7	96,6	96,7
2	13 - 15	75.1	74.6	76.3	76.8	77,1	77,4
3	16 - 18	24,0	32.7	33,9	47.1	43,2	45,6

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. HSS

Angka partisipasi kasar pada tingkat pendidikan SD pada tahun 2007 baru 102,7 kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 110,0. Tingkat pendidikan SLTP pada tahun 2007 sebesar 96 kemudian naik menjadi 101,4 pada tahun 2012, dan ditingkat SLTA pada tahun 2007 sebesar 33 kemudian naik menjadi 59,5 pada tahun 2012 (lihat tabel 2.8).

**Tabel 2.8.**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2007 -2012**

No	Tingkat Pendidikan	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD	102,7	104	106,3	108.8	109,2	110,0
2	SLTP	96	98	100	101,2	101,6	101,4
3	SLTA	33	38	44	57	58,12	59,5

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. HSS

Angka partisipasi murni (APM) pada tingkat pendidikan SD pada tahun 2007 sebesar 86 kemudian naik menjadi 95,5 pada tahun 2012. Kemudian untuk tingkat SLTP pada tahun 2007 sebesar 70,9 kemudian naik menjadi 75,3 pada tahun 2012 dan untuk tingkat SLTA pada tahun 2007 baru sebesar 21,6 naik menjadi 44,4 pada tahun 2012 (lihat tabel 2.9)

**Tabel 2.9.**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2007-2012**

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD	86	88	93	94	95,0	95,5
2	SLTP	70.9	72.2	73.7	75,5	78,8	75,3
3	SLTA	21.6	23.9	31	33,2	37,8	44,4

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. HSS

### 2.2.1.2 Pendidikan Non Formal

#### 1. Pemberantasan Buta Aksara / Keaksaraan Fungsional

Pemberantasan Buta Aksara merupakan satu kegiatan yang penting dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka meningkatkan penduduk yang melek huruf. Pemberantasan Buta Aksara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diupayakan secara maksimal sejak tahun 2006. Kerja keras dalam menangani masalah buta aksara ini telah memberikan hasil yang signifikan kepada sebanyak 17.675 jiwa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk mempertahankan tuntas buta aksara perlu dilakukan kegiatan pembinaan di setiap PKBM (lihat tabel 2.10).

**Tabel 2.10.**  
**Realisasi Penuntasan Buta Aksara**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Tahun 2009 - 2011**

Indikator / Usia	Sasaran	Realisasi		
		2009	2010	2011
15 s.d 44 tahun	17.675 (100%)	1.040 (5,88%)	2.551 (14,43%)	1.117 (6,32%)

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. HSS

#### 2. Pendidikan Kesetaraan meliputi : Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan paket C setara SMA

Pendidikan Kesetaraan program Paket A setara SD dilaksanakan untuk masyarakat yang belum memenuhi pendidikan di SD untuk memiliki ijazah setara SD. Begitu juga paket B dan Paket C, ke dua pendidikan kesetaraan ini dikhususkan bagi warga yang ingin memperoleh pendidikan akan tetapi tidak sempat mengikutinya. Untuk tahun 2014-2018 diharapkan pendidikan kesetaraan lebih kompetitif sesuai dengan perkembangan zaman modern.

#### 3. Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*)

Pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) merupakan kecakapan-kecakapan yang secara praktis dapat membekali peserta didik dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan. Kecakapan itu menyangkut aspek pengetahuan, sikap yang didalamnya termasuk fisik dan mental, serta kecakapan kejuruan

yang berkaitan dengan perkembangan akhlak peserta didik sehingga mampu menghadapi tuntutan dan tantangan hidup dan kehidupan. Pendidikan kecakapan hidup dapat dilakukan melalui kegiatan intra/ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan karakteristik, emosional dan spritual dalam prospek pengembangan diri, yang materinya menyatu pada sejumlah mata pelajaran yang ada. Penentuan isi dan bahan pelajaran kecakapan hidup dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan agar peserta didik mengenal dan memiliki bekal dalam menjalankan kehidupan dikemudian hari. Isi dan bahan pelajaran tersebut menyatu dalam mata pelajaran yang terintegrasi sehingga secara struktur tidak berdiri sendiri. Azas pengelolaan pendidikan yang berorientasi pada “*life skills*” adalah manajemen berbasis sekolah (*School Based Management*) dan manajemen berbasis masyarakat (*Community Based Management*). Dana bantuan untuk melaksanakan program pendidikan kecakapan untuk hidup akan diberikan melalui prosedur “*block grant*” yang akuntabilitas keuangannya dilakukan dengan sistem akuntansi publik.

#### **4. Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar**

Pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal sebagai tempat pembelajaran dan sumber informasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Perencanaan yang akan disusun menuju SDM Unggul dan Berkarakter tahun 2025.

#### **5. Peningkatan Budaya Baca Masyarakat**

Program peningkatan budaya baca masyarakat dilaksanakan selain untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan warga masyarakat yang telah terbebas dari buta aksara juga mencegah terjadinya fenomena kembalinya mereka yang telah melek aksara menjadi buta aksara lagi. Program peningkatan budaya baca masyarakat ini dilakukan dengan berbagai macam kegiatan perencanaan yang disusun dalam *grand design* pendidikan sampai tahun 2025 sehingga diharapkan dapat mendorong pendidikan SDM unggul berkarakter agamis.

### **2.2.2. Kesehatan**

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara keseluruhan adalah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes, klinik bidan praktek swasta, klinik dokter praktek swasta, took obat dan apotek.

Pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum dapat memenuhi rasio kecukupan fasilitasi pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk. Meskipun rumah sakit yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjumlah 3 (tiga) buah (1 RS pemerintah dan 2 RS Swasta) namun karena jumlah tempat tidur yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat.

Puskesmas yang merupakan penyedia fasilitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan keberadaannya telah memenuhi rasio kecukupan. Hingga saat ini telah ada 21 unit puskesmas yang tersebar merata di seluruh kecamatan. Namun yang menjadi kendala adalah kelengkapan prasarana dan sarana serta sumber daya manusia masih belum memenuhi standard baik jumlah maupun kualitasnya, sehingga banyak pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit baik rumah sakit yang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun ke luar kabupaten.

Puskesmas Pembantu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2012 terdapat sebanyak 69 unit, yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan jumlah tertinggi terdapat pada Kecamatan Kandangan dengan jumlah 11 unit, sedangkan terendah terdapat di Kecamatan Daha Barat yaitu sebanyak 3 unit.

Poskedes di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah tersebar merata di seluruh kecamatan, dengan jumlah total sebanyak 148 unit. Kecamatan Padang Batung merupakan kecamatan terbanyak dengan fasilitas poskedes yaitu sebanyak 28 unit, sedangkan Kecamatan Daha Barat hanya terdapat 3 unit. Sedangkan fasilitas kesehatan yang berupa rumah bidan desa sebanyak 17 unit yang tersebar merata di setiap kecamatan. Kecamatan Kandangan merupakan kecamatan terbanyak dengan fasilitas tersebut yaitu sebanyak 3 unit. Sedangkan Kecamatan Loksado, Telaga Langsat, Angkinang, Simpur, Kalumpang, dan Daha Barat hanya terdapat 1

unit. Keberadaan poskesdes di setiap kecamatan masih belum ditunjang dengan fasilitas yang memadai sehingga banyak bidan desa yang tidak menetap di desa sehingga pelayanan persalinan terkendala.

Sebaran toko obat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum tersebar merata, yaitu hanya terdapat di Kecamatan Kandangan 11 unit, Daha Selatan 9 unit. Fasilitas penunjang kesehatan selanjutnya yang berupa apotek di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2012 terdapat 13 unit yang berada di Kecamatan Kandangan 11 unit, Kecamatan Sungai Raya 1 unit dan Kecamatan Daha Utara 1 unit.

Keberadaan praktek dokter swasta di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hingga tahun 2012 berjumlah 22 unit sedangkan untuk praktek bidan swasta berjumlah 42 unit.

Indeks kesehatan terus mengalami perbaikan walaupun berfluktuasi, angka kematian ibu turun dari 223 (per 100.000 KH) pada tahun 2007 menjadi 176 pada tahun 2012. Angka kematian bayi turun dari 12 (per 1000) pada tahun 2007 menjadi 14,3 pada tahun 2012. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2007 sebesar 1,89% turun menjadi 0,02% ditahun 2012, (lihat tabel 2.11).

**Tabel 2.11.**  
**Indeks Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Tahun 2007-2012**

No	Indikator	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	223	278	143	222	294	176
2	Angka Kematian Bayi (per 1000)	12	7	7	10,86	13,5	14,3
3	Persentase balita gizi buruk (%)	1,89	0,05	0,02	0	0,02	0,02
4	Rasio Puskesmas / penduduk	1:10.916	1:10.997	1:11.035	1:11.174	1:10.721	1:10.960
5	Rasio Pustu / penduduk	1:3.006	1:3.023	1:3.029	1:3.076	1:3.107	1:3.176

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. HSS

### 2.2.3. Jaringan Jalan

Sistem transportasi yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih banyak ditunjang oleh sistem transportasi darat dan transportasi sungai, sedangkan transportasi udara saat ini masih belum ada.

Secara keseluruhan sistem transportasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih didominasi oleh angkutan jalan raya. Prasarana dan sarana transportasi yang ada pada prinsipnya telah menjangkau daerah-daerah penting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk wilayah perdesaan.

Jaringan jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2012 berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut jenis permukaan terbagi dari Permukaan Aspal sepanjang 537,450 km, Kerikil sepanjang 75,881 km, dan tanah sepanjang 221,041 km (lihat tabel 2.12)

**Tabel 2.12**  
**Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2008-2012**

Jenis Permukaan	STATUS JALAN														
	JALAN NEGARA					JALAN PROPINSI					JALAN KABUPATEN				
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
1. Aspal	21,388	21,388	21,388	21,388	21,388	112,264	106,504	106,504	117,98	117,98	397,54	431,65	431,65	486,995	537,45
2. Kerikil						2,09					72,1	84,59	84,59	92,702	75,881
3. Tanah											280,1	241,35	241,35	254,675	221,041
4. Tidak Dirinci															0
<b>Jumlah I</b>	<b>21,388</b>	<b>21,388</b>	<b>21,388</b>	<b>21,388</b>	<b>21,388</b>	<b>114,354</b>	<b>106,504</b>	<b>106,504</b>	<b>117,98</b>	<b>117,98</b>	<b>749,74</b>	<b>757,59</b>	<b>757,59</b>	<b>834,372</b>	<b>834,372</b>

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS (2012)

Sedangkan menurut kondisi jalan terbagi atas kondisi baik 276.76 Km, kondisi sedang 227.09 Km, kondisi rusak 225,47 Km, dan kondisi rusak berat 105,05 Km (lihat tabel.2.13),

**Tabel 2.13**  
**Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2008-2012**

Kondisi Jalan	STATUS JALAN														
	JALAN NEGARA					JALAN PROPINSI					JALAN KABUPATEN				
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
1. Baik	21,388	21,388	21,388		21,388	112,264	106,504	106,504		117,98	233,53	272,28	272,477	226,305	276,76
2. Sedarang				21,388		2,09			117,98		195,45	190,21	194,828	227,09	227,09
3. Rusak											227,86	210,51	213,697	242,287	225,47
4. Rusak Berat											92,9	84,59	76,589	138,69	105,052
<b>Jumlah II</b>	<b>21,388</b>	<b>21,388</b>	<b>21,388</b>	<b>21,388</b>	<b>21,388</b>	<b>114,354</b>	<b>106,504</b>	<b>106,504</b>	<b>117,98</b>	<b>117,98</b>	<b>749,74</b>	<b>757,59</b>	<b>757,59</b>	<b>834,372</b>	<b>834,372</b>

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS (2012)

Pada tabel 2.14 terlihat bahwa selama lima tahun terakhir sejak tahun 2008 hingga 2012 jumlah panjang jalan yang mengalami kerusakan dengan kondisi rusak dan rusak berat cenderung

mengalami peningkatan dengan persentase 40% dari total panjang ruas yang ada, hal ini terjadi karena:

1. Pada tahun 2010 terjadi 2 kali banjir, pada bulan Januari 2010 dan bulan Desember 2010, yang membuat jalan terendam air, hal ini mengakibatkan kerusakan pada permukaan jalan.
2. Akibat jalan dilintasi kendaraan baik roda dua maupun roda empat selama sepanjang tahun, bahkan kerusakan yang terjadi pada permukaan jalan akan diperparah lagi bilamana kendaraan yang melintasi jalan melebihi kapasitas, misalnya jalan sering dilintasi truck untuk mengangkut kayu maupun untuk mengangkut batu hasil galian c yang bermuatan melebihi beban ijin.

#### **2.2.4. Peribadatan**

Fasilitas peribadatan yang berupa masjid di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2011 sebanyak 122 unit tersebar merata di seluruh kecamatan dengan jumlah terbesar pada Kecamatan Padang Batung sejumlah 21 unit dan terendah pada Kecamatan Daha Barat sebanyak 2 unit. Sedangkan untuk langgar/musholla sejumlah 680 unit yang tersebar pada seluruh kecamatan. Jumlah tertinggi terdapat pada Kecamatan Kandangan yaitu sejumlah 127 unit, dan terendah di Kecamatan Daha Barat yang hanya terdapat 15 unit. Sedangkan fasilitas peribadatan yang berupa gereja, terdapat 2 gereja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada tahun 2003 fasilitas peribadatan balai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya terdapat di Kecamatan Loksado sebanyak 37 unit, tetapi dalam perkembangannya balai adat di loksado ini pada tahun 2011 bertambah menjadi 45 buah.

#### **2.2.5. Sistem Sanitasi dan Persampahan**

Cakupan pengelolaan limbah cair di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan tahun 2012 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari jumlah penduduk yang ada 249.070 jiwa, sebanyak 82.996 jiwa (33,32%) telah memiliki akses terhadap jamban secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.14.

**Tabel 2.14.**  
**Akses Terhadap Jamban Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Tahun 2012**

<b>Cakupan Akses Sanitasi Layak (2012)</b>			<b>Jumlah Jiwa yg Telah Mengakses Sanitasi yg Layak (2012)</b>		
Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan
33,32%	65,23%	33,03%	82.348	24.632	57.716
<b>Cakupan yg Belum Mendapat Akses Sanitasi Layak</b>					
Total	Perkotaan	Perdesaan			
67,68%	34,77%	66,97%			

Sumber : Diolah dari data Dinas PU dan Dinas Kesehatan, 2012

Pelayanan bidang persampahan/limbah padat hingga saat ini masih terbatas pada wilayah perkotaan yang meliputi penyediaan fasilitas penanganan sampah dan pengelolaan persampahan. Persentase terbesar timbunan sampah dari semua sumber sampah, adalah sampah yang bersumber dari permukiman penduduk (46%), sedangkan terkecil dari perkantoran (1%) dari keseluruhan timbunan sampah.

Potensi timbunan sampah yang ada pada kawasan terlayani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2012 adalah sebesar 130,28 m<sup>3</sup>/hari, diantaranya 25,95 m<sup>3</sup> (lihat tabel 2.15) sudah terpilah dan memberi manfaat ekonomis dan ± 80,08 % diangkut dan dibuang ke TPA.

**Tabel 2.15.**  
**Data Pengelolaan Persampahan**  
**di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008-2012**

No	Uraian	2008 (m <sup>3</sup> /hari)	2009 (m <sup>3</sup> /hari)	2010 (m <sup>3</sup> /hari)	2011 (m <sup>3</sup> /hari)	2012 (m <sup>3</sup> /hari)
1.	- Total timbunan sampah pada wilayah terlayani	106	113,22	121,77	124,66	130,28
2.	- Sampah terpilah	-	-	-	11,72	25,95
3.	- Sampah diangkut ke TPA	106	113,22	121,77	112,94	104,32
4.	- Sampah tidak terangkut	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas LH Takodes , 2012

### **2.2.6. Irigasi**

Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pengembangan sistem Daerah Irigasi (DI) yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu :

1. DI. Telaga Langsung berada di Kecamatan Telaga Langsung dibangun tahun 1989 mempunyai luas potensial 4.000 ha dan luas fungsionalnya kurang lebih 3.018 ha dengan debit maksimum 14,702 m<sup>3</sup>/detik, rata-rata 7,83 m<sup>3</sup>/detik sedangkan debit minimum 0,974 m<sup>3</sup>/detik.
2. DI. Amandit yang berlokasi di Desa Malutu Kecamatan Padang Batung dibangun mulai tahun 2005 dengan menggunakan Loan JBIC IP-505 mempunyai luas kurang lebih 5.472 Ha, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air irigasi dan meningkatkan daerah irigasinya seluas 5400 hektar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 2.003 Ha dengan 7 (tujuh) Daerah Irigasi, seperti pada tabel 2.16 berikut ini :

**Tabel 2.16.**  
**Data Daerah Irigasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

NO	NAMA DERAH IRIGASI	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)	JUMLAH PRASARANA					PANJANG SALURAN (m)	
				BENDUNG	INTAKE	BAGI SADAP	SADAP	PELENGKAP	PRIMER	SEKUNDER
1	KUANGAN	Pd.Batung	234	1	1	6	1	3	203	1.530
2	NUNUNGIN	Pd. Batung	165	1	1	-	1	1	-	656
3	PAMUJAJAN	Simpur	350	1	2	5	1	4	89	1.317
4	T A A L	Sungai Raya	572	1	2	11	1	9	150	2.169
5	HAWATU	Sungai Raya	188	-	1	3	-	6	1.353	197
6	T A Y U B	Pd. Batung	200	1	1	4	1	4	138	877
7	J A R A U	Sungai Raya	294	1	2	-	8	14	965	2.165
			2.003							

Sumber :

1. Survei inventarisasi Tahun 2012
2. Data sekunder Dinas PU Kab. Hulu Sungai Selatan

Daerah Irigasi yang diusulkan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada

tahun 2012 adalah sebesar 12.573 Ha (lihat tabel 2.17) dan telah diverifikasi data daerah irigasi usulan penetapan status daerah irigasi sebagai bahan Revisi Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 pada bulan April 2013.

**Tabel 2.17.**  
**Daerah Irigasi Yang Menjadi Kewenangan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 - 2012**

Kondisi	Daerah Irigasi				
	Luas Rencana (Luas Baku) (Ha)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Rusak Ringan	1.319,28	1.301,78	1.453,38	1.494,88	5.778,01
Rusak Sedang	375,57	393,07	278,37	287,37	2.205,00
Rusak Berat	308,15	308,15	193,75	220,75	4.579,99
	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	12.573,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan (2012).

Meningkatnya curah hujan, pemanasan global, gejala kemarau panjang, perubahan musim yang sulit diprediksi sebagai dampak perubahan iklim, meningkatnya kejadian banjir, menjadi kendala mengembangkan sistem irigasi yang ada. Dampak perubahan iklim ini diprediksi akan terus berlanjut yang diharapkan bisa diantisipasi dengan pemeliharaan hutan pada daerah tangkapan pada DAS yang ada dan penanaman kembali.

Faktor anggaran yang terbatas dan kurangnya SDM secara kualitatif menjadi kendala klasik yang patut disikapi dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana bidang sumber daya air tersebut sebagaimana isu strategis dan kegiatan strategis wilayah Kalimantan sebagaimana tersebut dalam PP Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 diantaranya Perkuatan Ketahanan Pangan Dalam Upaya Pencapaian Target Nasional Surplus 10 Juta Ton dengan kegiatan strategis yaitu : (1) Pembangunan Infrastruktur Irigasi; (2) Pengelolaan dan Stabilitas Ketahanan Pangan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantapan infrastruktur pengairan melalui pembangunan sarana prasarana pengendali banjir diantaranya melalui kegiatan pelaksanaan normalisasi sungai pada DAS, rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi secara berkesinambungan dan terintegrasi pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, serta kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan

tanggul sungai, kegiatan Operasional dan Pengendalian (OP) berupa pembersihan sungai pada Program Pengendalian Banjir.

### 2.2.7. Jembatan

Jumlah prasarana jembatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2012 mengalami peningkatan, yaitu jembatan besi sebanyak 8 buah, beton sebanyak 82 buah dan Kayu Ulin sebanyak 410 buah (lihat tabel.2.18), sedangkan jenis kondisi jalan terbagi atas kondisi baik 89 buah, kondisi sedang 405 buah, kondisi rusak 6 buah dan kondisi rusak berat tidak ada (lihat tabel.2.19)

**Tabel 2.18.**  
**Banyaknya Jembatan Menurut Jenis Bahan Jembatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008-2012**

Jenis Bahan	STATUS JALAN														
	JALAN NEGARA					JALAN PROPINSI					JALAN KABUPATEN				
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
1. Besi	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	7	7	8	8	8
2. Beton	9	9	9	9	9	17	30	30	30	30	17	29	39	62	82
3. Kayu	-	-	-	-	-	37	24	24	24	24	474	462	452	430	410
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>499</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan (2012).

**Tabel 2.19.**  
**Banyaknya Jembatan Menurut Jenis Kondisi Jembatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008-2012**

Kondisi Jembatan	STATUS JALAN														
	JALAN NEGARA					JALAN PROPINSI					JALAN KABUPATEN				
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
1. Baik	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	23	46	50	66	89
2. Sedang	9	9	9	9	9	54	54	54	54	54	452	448	432	411	405
3. Rusak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	13	14	6
4. Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	3	9	-
<b>Jumlah II</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan (2012)

### 2.2.8. Air Minum

Pelayanan air minum untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di wilayah perkotaan dilayani oleh PDAM dan di wilayah perdesaan masih menggunakan air minum non perpipaan dengan

sumber air berasal dari sumur, sungai dan mata air lainnya. Sumber air minum rumah tangga yang terbesar adalah bersumber dari air sungai (30,57%), kemudian sumur pompa (28,20%) baru air bersih PDAM sebesar 25,97% (lihat tabel 2.20)

**Tabel 2.20**  
**Persentase Rumah tangga**  
**Menurut Penggunaan Sumber Air Minum Tahun 2010**

Sumber Air Minum	Persentase (%)
Air bersih PDAM (meteran & eceran)	25,97
Air sungai	30,57
Mata air tak terlindung	1,33
Mata air terlindung	2,15
Sumur tak terlindung	7,82
Sumur pompa	28,20
Sumur Terlindung	3,01
Air kemasan	0,95

Sumber : BPS Kabupaten HSS, SP 2011

Pada tahun 2012 sesuai dengan data PDAM Kandangan jumlah pelanggan telah mencapai 13.236 sambungan atau melayani 79.416 jiwa (31,88%) dari total penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan untuk sambungan air minum non perpipaan hingga tahun 2012 jumlah penduduk yang dapat mengakses 35.553 jiwa (14,27%). Sedangkan secara cakupan akses air minum yang layak jika dibagi menurut wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.21.

**Tabel 2.21.**  
**Cakupan Pelayanan Air Bersih Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Tahun 2012**

Cakupan Akses Aman Air Minum (2012)			Jumlah Jiwa yg Telah Mengakses Aman Air Minum (2012)		
Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan
46,99%	77,31%	40,44%	99.852	29.192	70.660
Cakupan yg Belum Dilayani					
Total	Perkotaan	Perdesaan			
53,01%	22,69%	59,56%			

Sumber : Diolah dari data PDAM, DPU dan Dinas Kesehatan Kab. HSS, 2012

Rendahnya cakupan air bersih di perdesaan banyak dipengaruhi oleh kondisi alam. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan daerah rawa yang meliputi Kecamatan Daha Utara, Daha Barat, Daha Selatan, sebagian Kecamatan Kalumpang dan sebagian Kecamatan Simpung. Kondisi air rawa yang banyak mengandung zat besi (Fe) tidak layak dijadikan air

baku, selain itu butuh biaya besar untuk mengolahnya. Hal juga yang menyebabkan sambungan air perpipaan dari PDAM untuk wilayah-wilayah tersebut terbatas. Kondisi ini diperparah dengan budaya masyarakat yang terbiasa menggunakan air sungai yang tidak layak konsumsi untuk keperluan sehari-hari.

Untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih terutama di perdesaan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berusaha memanfaatkan sumber air yang ada untuk dapat diakses oleh masyarakat salah satunya melalui Program PAMSIMAS yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008.

Sedangkan untuk daerah perkotaan pelayanan air bersih dilaksanakan oleh PDAM, dengan Daerah pelayanan BNA Kota Kandangan meliputi wilayah pelayanan sebagai berikut :

1. Wilayah Kandangan Kota
2. Wilayah Kandangan Utara
3. Wilayah Kandangan Barat
4. Wilayah Kandangan Selatan
5. Wilayah Kandangan Timur
6. Wilayah Sungai Raya

Disamping itu juga terdapat daerah pelayanan diluar batas administrasi dan tentatif Kota Kandangan. Hal ini terjadi karena adanya interkoneksi sistem jaringan distribusi dengan beberapa IKK yang menyebabkan meluasnya wilayah pelayanan BNA Kota Kandangan. IKK yang termasuk kedalam wilayah pelayanan BNA Kota Kandangan adalah sebagai berikut :

- IKK Padang Batung
- IKK Angkinang – Telaga Langsung
- IKK Kalumpang
- IKK Simpur – Sungai Raya

Jumlah pelanggan dan air terjual pada PDAM Kandangan terus mengalami peningkatan (lihat tabel 2.22), kemudian kapasitas terpasang dan kapasitas terjual juga terus meningkat (lihat tabel 2.23).

**Tabel 2.22.**  
**Pelanggan dan Air Terjual PDAM Kandangan**  
**2008-2012**

NO.	WILAYAH	2008			2009			2010			2011			2012							
		Pelanggan	Air Terjual	M3	Pelanggan	Air Terjual	M3	Pelanggan	Air Terjual	M3	Pelanggan	Air Terjual	M3	Pelanggan	Air Terjual	M3					
01	Kandangan	5,612	Buah	1,334,714	M3	5,844	Buah	1,401,960	M3	6,028	Buah	1,411,197	M3	6,341	Buah	1,467,869	M3	6,691	Buah	1,610,893	M3
02	Padang Batung	974	Buah	178,844	M3	1,035	Buah	201,100	M3	1,107	Buah	199,588	M3	1,204	Buah	227,987	M3	1,290	Buah	255,948	M3
03	Angkinang	564	Buah	110,379	M3	612	Buah	126,299	M3	631	Buah	127,934	M3	674	Buah	133,093	M3	736	Buah	148,815	M3
04	Negara	1,401	Buah	276,879	M3	1,419	Buah	254,313	M3	1,427	Buah	258,176	M3	1,450	Buah	263,537	M3	1,481	Buah	282,877	M3
05	Pasungkan	838	Buah	143,096	M3	817	Buah	141,347	M3	864	Buah	149,056	M3	911	Buah	163,201	M3	924	Buah	173,072	M3
06	Tambak Bitin	652	Buah	104,786	M3	674	Buah	102,851	M3	662	Buah	111,372	M3	656	Buah	99,946	M3	660	Buah	114,310	M3
07	Telaga Langsung	249	Buah	39,220	M3	325	Buah	57,218	M3	339	Buah	64,779	M3	379	Buah	72,762	M3	399	Buah	80,868	M3
08	Kalumpang	242	Buah	34,872	M3	251	Buah	33,317	M3	252	Buah	36,285	M3	245	Buah	39,525	M3	228	Buah	40,886	M3
09	Simpur	327	Buah	74,310	M3	349	Buah	75,344	M3	387	Buah	75,561	M3	404	Buah	78,069	M3	426	Buah	89,860	M3
10	Sungai Raya	178	Buah	39,725	M3	180	Buah	45,128	M3	237	Buah	47,035	M3	263	Buah	58,300	M3	293	Buah	68,919	M3
11	Daha Barat	-	Buah	-	M3	-	Buah	-	M3	13	Buah	663	M3	108	Buah	7,414	M3	108	Buah	12,584	M3
	<b>J U M L A H</b>	<b>11,037</b>	<b>Buah</b>	<b>2,336,825</b>	<b>M3</b>	<b>11,506</b>	<b>Buah</b>	<b>2,438,877</b>	<b>M3</b>	<b>11,947</b>	<b>Buah</b>	<b>2,481,646</b>	<b>M3</b>	<b>12,635</b>	<b>Buah</b>	<b>2,611,703</b>	<b>M3</b>	<b>13,236</b>	<b>Buah</b>	<b>2,879,032</b>	<b>M3</b>

Sumber : PDAM Kandangan 2012

**Tabel 2.23.**  
**Total Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Terjual (Ltr/dtk)**  
**PDAM Kandangan 2008-2012**

NO	IKK/CABANG	DESA-KECAMATAN	TAHUN														
			2008			2009			2010			2011			2012		
			Terpasang (ltr/dtk)	Termanfaat (ltr/dtk)	Idle												
1	Instalasi Muara Banta	Muara Banta-Kandangan	85	80	5	85	80	5	85	80	5	115	110	5	115	110	5
2	Instalasi Amawang	Amawang-Simpur	15	15	0	15	10	5	15	10	5	15	10	5	35	30	5
3	Unit Padang Batung	Pdg Batung-Pdg Batung	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0
4	Unit Telaga langsung	Mandala-Telaga Langsung	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0
5	Unit Angkinang	Sungai Hanyar-Angkinang	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0
6	Kalumpang	Kalumpang-Kalumpang	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0
7	PDAM Cab. Negara																
		Habirau-Daha Selatan	25	20	5	25	20	5	25	20	5	25	20	5	25	20	5
		Tambak Bitin-Daha Selatan	15	10	5	15	10	5	15	10	5	15	10	5	15	10	5
		Hamayung-Daha Utara	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0
8	Unit Daha Barat	Bajayau-Daha Barat	0	0	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0
			180	165	15	190	170	20	190	170	20	220	200	20	240	220	20

Sumber : PDAM Kandangan 2012

### 2.2.9. Drainase

Drainase perkotaan merupakan suatu saluran yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (*chatchment area*) yang sebagian besar di dalam wilayah kota. fungsi lain dari drainase perkotaan adalah sebagai pengendali banjir. Pembangunan dan pengembangan sektor drainase meliputi aspek kelembagaan, aspek teknis operasional, peraturan perundangan, pendanaan serta peran serta masyarakat dan swasta.

Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang cepat menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan kawasan jasa/industri yang selanjutnya menjadi kawasan terbangun. Kawasan perkotaan yang terbangun memerlukan adanya dukungan prasarana dan sarana yang baik yang menjangkau kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah.

Perkembangan perumahan dan permukiman yang sangat pesat sering kurang terkendali dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang maupun konsep pembangunan yang berkelanjutan, mengakibatkan banyak kawasan rendah yang semula berfungsi sebagai tempat parkir air (*retarding pond*) dan bantaran sungai dihuni oleh penduduk. Kondisi ini akhirnya meningkatkan volume air permukaan yang masuk ke saluran drainase dan sungai.

Hal-hal tersebut di atas membawa dampak rendahnya kemampuan drainase mengeringkan kawasan terbangun, dan rendahnya kapasitas seluruh prasarana pengendali banjir (sungai, polder-polder, pompa-pompa, pintupintu pengatur) untuk mengalirkan air ke badan air (sungai dan rawa).

Perkembangan kawasan di beberapa wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan beberapa tahun terakhir berkembang pesat. Perkembangan kawasan ini berdampak langsung pada kebutuhan infrastruktur pendukungnya. Dampak yang sangat jelas yaitu adanya genangan air di beberapa lokasi khususnya di Kelurahan Kandangan Kota, Kandangan Utara, Kandangan Barat, Desa Amawang Kiri Muka dan Desa Karang Jawa. Hal ini salah satunya akibat adanya perubahan peruntukan lahan yang tidak lagi menyediakan areal yang cukup untuk penyerapan air permukaan terutama yang berasal dari air hujan.

Pengelolaan drainase di Kabupaten Hulu Sungai hanya meliputi wilayah Kota Kandangan. Layanan yang diberikan meliputi pembangunan dan peningkatan drainase, melakukan pengedukan lumpur/waled/sedimen pada saluran drainase, memelihara ketertiban penggunaan saluran drainase serta melakukan pemusnahan dan pemanfaatan hasil pembersihan saluran drainase, air kotor supaya berdaya guna dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan/banjir. Adapun data teknis saluran drainase yang ada dapat dilihat pada tabel 2.24.

**Tabel. 2.24.**  
**Data Kualitas dan Kuantitas Drainase serta Luas Areal Pelayanannya**

No	Drainase Kota Kandangan		Volume
1.	- Tipe saluran permanen	- Tertutup - Terbuka	7.160 m' 40.790 m'
2.	- Kualitas Saluran	- Tertutup - Terbuka	80% 40%
3.	- Luas areal pelayanan		815.800 m <sup>2</sup>

Sumber : Dinas LH Takodes , 2012

### **2.2.10. Transportasi**

#### **a. Sarana Transportasi Darat**

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam hal ini infrastruktur dalam bidang perhubungan.

Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi,

telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Infrastruktur transportasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih cukup minim, dan masih jauh dari kata ideal. Untuk infrastruktur jalan hal ini terlihat dari kondisi jalan dan prasarana keselamatan jalan seperti rambu dan marka yang masih minim dan tidak ideal. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan jumlah panjang jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat mencapai panjang 330.522 Km (39,61%) pada tahun 2012. Kondisi jalan yang kurang ideal tentunya juga menjadi tolak ukur akan sarana keselamatan transportasi yang juga kurang memadai, sehingga tidak bisa dipungkiri akan berdampak pada terbukanya peluang lebar akan sebuah kecelakaan lalu lintas.

Selain infrastruktur jalan, sarana penunjang transportasi lainnya adalah terminal. Terminal yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada empat, yaitu : Terminal Bus Kandangan, Terminal Kota Kandangan, Terminal Andi Tajang, dan Terminal Banjar Baru.

Sebagai kawasan yang terletak di perlintasan benua enam, Kota Kandangan mempunyai persoalan dengan terminal, karena kapasitas dan kelayakan prasarana yang belum memadai. Sebagai contoh terminal bus Kandangan yang merupakan jalur luar antar kota antar provinsi yang dilewati oleh bus dari Banjarmasin ke Balikpapan-Samarinda, Banjarmasin ke Buntok/Muara Teweh atau sebaliknya, dan merupakan jalur transit lintas provinsi antara Kalsel – Kaltim, Kalsel – Kalteng. Secara kuantitas sirkulasi angkutan setiap harinya adalah bus 15 buah dan minibus (colt) 200 buah, dalam segi fasilitas yang tersedia belum lengkap, bersih dan modern, sehingga para penumpang dan akan merasa nyaman apabila singgah dan transit di terminal ini.

Adapun kebutuhan sarana keselamatan transportasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih sangat banyak, hal ini misalnya terlihat dari hasil pendataan kebutuhan rambu dan marka jalan yang dilakukan pada tahun 2012 pada Kecamatan Sungai Raya dibutuhkan rambu sebanyak 404 buah, marka 47.400 m' dan *Warning Light* 8 buah dan Kecamatan Simpur dibutuhkan rambu sebanyak 349 buah, marka 42.500 m' dan *Warning Light* 4 buah

(sumber : Buku Pendataan Kebutuhan Rambu Lalu Lintas Kab. HSS – Dishubkominfo Tahun 2012).

**b. Sarana Transportasi Sungai dan Danau**

Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara geografis terdiri dari Pegunungan, datar dan Rawa. Di daerah rawa yang dibalut sungai ini kebanyakan berada di Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat. Dan di daerah inilah peran transportasi sungai sangat besar.

Angkutan sungai merupakan sebagai jembatan “mengapung” yang berfungsi menghubungkan jaringan transportasi darat yang terputus atau menjadi alternatif pilihan transportasi masyarakat. Angkutan sungai dan danau diperlukan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghidupkan perekonomian daerah sungai, serta memberikan aksesibilitas yang lebih baik sehingga dapat mengakomodasi peningkatan kebutuhan mobilitas penduduk, serta juga berfungsi melayani transportasi yang menjangkau daerah terpencil dan daerah pedalaman.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat dua dermaga/pelabuhan yaitu : dermaga/pelabuhan Pasar Senin dan dermaga/pelabuhan Tumbukan Banyu. Kondisi kedua dermaga ini tidak terlalu layak dan kurang memadai. Padahal potensi dan peran strategis dua dermaga ini sangatlah besar untuk kedepannya.

Kondisi dermaga pelabuhan di Hulu Sungai Selatan yang sebagian besar sudah tidak layak sehingga menghambat kelancaran arus barang, menimbulkan inefisiensi, memicu ekonomi biaya tinggi, dan menciptakan iklim usaha tidak kondusif. Kondisi ini membuat biaya distribusi barang cukup tinggi. Kondisi alur sungai yang mengalami pendangkalan dan penyumbatan alur oleh gulma air cukup menghambat kelancaran arus lalu lintas air di Hulu Sungai Selatan.

**c. Sarana Telekomunikasi dan Informatika**

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, kebutuhan akan telekomunikasi dan informatika tak terhindarkan. Banyaknya fasilitas yang dapat digunakan menjadikan alasan mengapa telpon, internet dan sarana telekomunikasi dan informatika yang lain sangat dibutuhkan di tengah masyarakat. Kebutuhan akan

akses internet dan telepon dewasa ini sangat tinggi sekali. Baik untuk menyambung komunikasi serta mencari informasi, artikel, pengetahuan terbaru, dan juga hiburan. Bahkan telepon dan internet dari sebelumnya merupakan kebutuhan tambahan tetapi sekarang telah menjadi kebutuhan penting seiring dengan jalannya waktu di mana hampir setiap hari masyarakat menggunakannya.

Dalam era globalisasi, penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi melalui peningkatan kemampuan masyarakat pengguna jasa pos, telekomunikasi, multimedia, dan informatika, tidak saja akan memacu pertumbuhan ekonomi tetapi juga mewujudkan daya saing daerah. Oleh karena itu, kesiapan dan kemampuan masyarakat untuk mengubah informasi menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi merupakan hal yang perlu dimiliki. Kurang memadainya kesiapan dan kemampuan tersebut terkait langsung dengan terbatasnya ketersediaan infrastruktur informasi, termasuk jasa pos dan telematika.

Pelayanan sarana telekomunikasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah terdapat hampir menyeluruh di semua kecamatan yang ada dengan jangkauan pelayanan rumah tangga, instansi pemerintah, dan perkantoran. Keadaan ini juga ditunjang oleh banyaknya menara telekomunikasi (BTS). Jumlah menara telekomunikasi sampai tahun 2012 berjumlah 49 buah yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (lihat tabel 2.25). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa desa yang belum terjangkau karena sulitnya medan untuk dilalui jaringan telepon selain itu masih minimnya akses internet dikarenakan biayanya yang tergolong masih sulit untuk dijangkau (mahal) menjadikan salah satu alasan kenapa jendela dunia masih sulit untuk dibuka, untuk itu peran pemerintah daerah diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut diatas sebagai jawaban tantangan dari tuntutan pembuka wawasan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, multimedia, dan informatika saat ini sudah banyak mengalami kemajuan. Telepon tetap dan telepon selular banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berkomunikasi dan memasuki dunia maya. Namun dalam perkembangannya terdapat beberapa permasalahan, antara lain maraknya keberadaan menara telekomunikasi di Hulu

Sungai Selatan, memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara yang memadai untuk menjamin keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan. Maraknya keberadaan jasa pelayanan teknologi informasi memerlukan pengaturan penyediaan ruang / lokasi dan ijin operasional untuk meminimalkan terjadinya dampak sosial lainnya.

**Tabel 2.25.**  
**Jumlah Menara Telekomunikasi (BTS)**  
**di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Tahun 2012**

NO	PROVIDER/NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH	LOKASI
1	2	3	4
1.	PT. Mitratel	1	Area PT. SAM Desa Bajayau Kec. Daha Barat
2.	PT. Protelindo	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Jl. Aluh Idut RT 03/4 Kandangan Kota Jl. Kandangan-Negara RT.03/II Desa Muning Tengah Jl. Pelayar RT.02/I Desa Perigi Jl. Siang gantung RT.02/I Kec. Daha Barat Jl. Tugu 2 Januari 1949 Desa Hamayung Kec. Daha Utara Jl. Limau Manis RT.04/I Desa Hariti Kec. Sungai Raya Jl. Batuah RT.05/II Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Jl. Hantarukung RT.02 Desa Tibung Raya
3.	PT. XL Axiata Tbk	1	Jl. Musyawarah RT.18 LK.I Kandangan Kota
4.	PT. Telkomsel	1 1	Jl. Singakarsa Kadangan Barat Jl. A. Yani RT.01/I Desa Angkinang
		1 1 1 1 1 1 1 1 1	Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Desa Samuda Kec. Daha Selatan Desa Ulin Kec. Simpurn Desa Teluk Labak Kec. Daha Utara Jl. H. Hasan Basery RT.03/II Desa Jembatan Merah Jl. Muara Hulu Banyu Loksado Desa Halunuk RT.01 Kec. Loksado Desa Mandala RT. 01 RW. I Kec. Telaga Langsat Desa Bangkau Kec. Kandangan
5.	PT. Hutchison CP Telecommunications	1 1	Jl. A. Yani RT.04/II Sungai Raya Utara Jl. A. Yani RT.02 Bakarung Kec. Angkinang
6.	PT. Excelcomindo Pratama	1 1	Kec. Padang Batung -

NO	PROVIDER/NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH	LOKASI
1	2	3	4
7.	PT. Indosat	1 1 1 1 1	Kec. Loksado Kec. Kalumpang Kec. Padang Batung Kec. Sungai Raya Kec. Loksado
		1	Hamak Timur
8.		1	Jl. A. Yani RT.09/V Kel. Kandangan Barat Parincahan
9.		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Kecamatan Kelumpang Kecamatan Sungai Raya Desa Mandala Kec. Telaga Langsat Kecamatan Loksado Desa Simpur Kec. Simpur Sungai Kupang Kec. Kandangan Karang Jawa Kec. Padang Batung Ex. Rel Kereta Api Angkinang Jl. H. M. Yusi Kel. Kandangan Utara Jl. A. Yani KM.9,5 RT.1 Angkinang Desa Muning Baru Kec. Daha Selatan Desa Padang Batung Kec. Padang Batung Desa Batu Bini Kec. Padang Batung Desa Lumpangi Kec. Loksado Jl. A. Yani KM. 4 Gambah Luar Kec. Kandangan
	Total	49	

Sumber : Dinas Hubkominfo Kab. HSS, 2012

### **2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

#### **2.3.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Hulu Sungai Selatan (PDRB)**

Kondisi pendapatan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat dari besaran nilai PDRB harga berlaku pada tahun 2007-2011 Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terus mengalami peningkatan dari Rp 1.492.231,98 pada tahun 2007 terus naik menjadi Rp 1.724.457,45 (2008), menjadi Rp 1.933.136,74 (2009), menjadi Rp 2.166.612,51 (2010) dan menjadi Rp 2.374.780,21 (2011). Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2007-2011 berdasarkan harga konstan pada tahun 2007 sebesar 3,75% kemudian pada tahun 2008 sebesar 4,32%, tahun 2009 sebesar 5,04%, tahun 2010 sebesar 3,46% dan tahun 2011 sebesar 5,60%, atau pertumbuhan per tahunnya selama

5 tahun terakhir mencapai rata-rata 4,43%

Struktur ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2011 ini lebih banyak didukung sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 32,79% terhadap perekonomian. Disusul sektor jasa-jasa dengan sumbangan sebesar 22,22%, kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,64%. Sementara sektor lainnya hanya menyumbang kurang dari 10% bahkan sektor listrik dan air bersih hanya menyumbang 0,38%. Untuk lebih jelasnya mengenai PDRB menurut harga berlaku di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel 2.26. berikut:

**Tabel 2.26.**  
**PDRB Berdasarkan Harga Berlaku**  
**Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2007-2011)**

(JutaRupiah)

Lapangan Usaha		2007	2008	2009	2010	2011
<b>I. Pertanian</b>		<b>515.404,52</b>	<b>561.793,59</b>	<b>647.179,62</b>	<b>720.958,88</b>	<b>778.609,87</b>
1	Tanaman Bahan Makanan	363.830,80	397.593,40	460.587,81	518.912,55	559.523,88
2	Tanaman Perkebunan	36.989,57	38.116,05	45.457,16	51.452,21	55.555,60
3	Peternakan	30.056,99	33.610,27	35.274,36	39.150,07	42.640,63
4	Kehutanan	7.051,25	7.502,21	7.980,98	8.492,56	8.787,98
5	Perikanan	77.496,22	84.971,64	97.879,30	105.951,49	112.101,77
<b>II. Pertambangan dan Penggalian</b>		<b>17.732,94</b>	<b>44.897,75</b>	<b>52.870,34</b>	<b>62.383,26</b>	<b>67.316,62</b>
1	Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
2	Pertambangan tanpa Migas	9.975,99	35.867,96	42.835,57	51.029,60	53.595,30
3	Penggalian	7.756,95	9.029,79	10.034,77	11.353,65	13.721,33
<b>III. Industri Pengolahan</b>		<b>132.518,68</b>	<b>140.125,54</b>	<b>144.091,82</b>	<b>156.947,14</b>	<b>162.357,86</b>
	a. Industri Migas	-	-	-	-	-
	b. Industri Tanpa Migas	132.518,68	140.125,54	144.091,82	156.947,14	162.357,86
<b>IV Listrik dan Air Minum</b>		<b>5.680,33</b>	<b>6.117,07</b>	<b>6.644,89</b>	8.108,50	9.094,96
1	Listrik	3.224,90	3.515,40	3.887,45	5.030,06	5.938,54
2	Air Minum	2.455,42	2.601,67	2.757,44	3.078,44	3.156,41
<b>V Bangunan / Kontruksi</b>		<b>92.972,22</b>	<b>98.133,63</b>	<b>103.160,14</b>	109.589,76	118.586,50
<b>VI Perdagangan, Restoran dan Perhotelan</b>		<b>306.927,12</b>	<b>360.669,74</b>	<b>400.449,80</b>	437.979,96	466.313,01
1	Perdagangan Besar dan Eceran	209.990,24	248.939,84	270.667,00	291.601,06	302.286,47
2	Hotel	198,13	358,02	453,45	614,05	725,42
3	Restoran	96.738,76	111.371,88	129.319,36	145.764,85	163.301,11
<b>VII Pengangkutan dan Komunikasi</b>		<b>84.338,53</b>	<b>96.500,72</b>	<b>105.749,69</b>	<b>120.946,63</b>	<b>137.731,51</b>

Lapangan Usaha		2007	2008	2009	2010	2011
1	Pengangkutan	78.806,63	90.932,78	99.073,11	113.484,10	129.490,23
2	Komunikasi	5.531,90	5.567,94	6.676,59	7.462,53	8.241,28
<b>VIII Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan</b>		<b>66.589,36</b>	<b>80.667,78</b>	<b>87.377,89</b>	<b>99.428,72</b>	<b>107.088,23</b>
1	Bank	12.455,00	21.662,29	24.075,85	30.287,59	34.105,95
2	Lembaga keuangan non Bank	5.205,03	7.916,24	8.778,91	9.729,42	10.320,71
3	Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
4	Sewa Bangunan	48.311,94	50.388,08	53.706,50	58.459,51	61.617,78
5	Jasa Perusahaan	617,38	701,16	816,62	952,20	1.043,79
<b>IX Jasa-jasa</b>		<b>270.067,98</b>	<b>335.551,54</b>	<b>385.612,54</b>	<b>450.269,66</b>	<b>527.681,65</b>
1	Pemerintahan Umum	257.710,00	320.964,00	369.655,00	431.225,64	505.959,85
2	Jasa Swasta	12.357,98	14.587,54	15.957,54	19.044,02	21.721,80
<b>PDRB</b>		<b>1.492.231,98</b>	<b>1.724.457,35</b>	<b>1.933.136,74</b>	<b>2.166.612,51</b>	<b>2.374.680,21</b>

Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan, PDRB tahun 2007- 2010 dan PDRB Tahun 2009-2011

Struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih didominasi sektor pertanian, kontribusi sektor pertanian pada tahun 2007 sebesar 34,54% kemudian pada tahun 2011 sedikit turun menjadi 32,79%, setelah sektor pertanian diikuti oleh sektor jasa- jasa pada tahun 2007 sebesar 18,10% kemudian pada tahun 2011 naik menjadi 22,22% selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2007 sebesar 20,57% kemudian pada tahun 2011 turun menjadi 19,64% sedangkan sektor lainnya dibawah 10% (lihat tabel 2.27).

**Tabel 2.27.**  
**Distribusi Struktur Ekonomi**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Harga Konstan)**  
**Tahun 2007-2011**

No.	Sektor/Lapangan Kerja	Tahun				
		2007	2008	2009	2010*	2011**
1	Pertanian	34,54	33,18	33,48	33,28	32,79
2	Pertambangan dan Penggalian	1,19	2,65	2,73	2,88	2,83
3	Industri Pengolahan	8,88	8,28	7,45	7,24	6,84
4	Listrik dan Air Bersih	0,38	0,36	0,34	0,37	0,38
5	Bangunan/Konstruksi	6,23	5,80	5,34	5,06	4,99
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	20,57	21,30	20,72	20,21	19,64
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5,65	5,56	5,47	5,58	5,80
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,46	4,74	4,52	4,59	4,51
9	Jasa-jasa	18,10	18,14	19,95	20,78	22,22
<b>Jumlah</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

\*Angka Direvisi \*\*Angka Sementara

Sumber : BPS; Kab. HSS Dalam Angka (beberapa edisi).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode 2007- 2011 mencapai rata- rata 4,87% per tahun dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tertinggi pada tahun 2011 yang mencapai 5,60%. Dilihat dari pertumbuhan sektoral sangat berfluktuasi, dan pertumbuhan sektoral yang tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian yang rata- ratanya mencapai 37,69% per tahun, kemudian sektor bank dan lembaga keuangan yang mencapai rata- rata 8,62% per tahun. Walaupun kedua sektor ini tingkat pertumbuhannya tinggi tetapi belum banyak menyumbang terhadap perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan dibawah rata- rata padahal sektor ini sangat dominan menyumbang ekonomi daerah (tabel 2.28).

**Tabel 2.28.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**(Harga Konstan) Tahun 2007-2011**

No.	Sektor/Lapangan Kerja	Tahun					Rata-rata
		2007	2008	2009	2010*	2011**	
1	Pertanian	5,95	1,62	5,42	-1,52	5,79	3,45
2	Pertambangan dan Penggalian	32,22	155,85	7,09	-1,90	-4,83	37,69
3	Industri Pengolahan	2,82	2,72	2,41	7,81	3,07	3,77
4	Listrik dan Air Minum	7,38	6,38	3,29	5,67	5,27	5,60
5	Bangunan/Kontruksi	4,34	3,61	2,29	4,36	6,80	4,28
6	Perdagangan, Restoran & Perhotelan	2,87	2,58	4,23	5,86	3,79	3,87
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0,94	3,68	7,72	8,80	7,29	5,69
8	Bank & Lembaga keuangan lainnya	10,41	11,84	7,07	8,56	5,24	8,62
9	Jasa-jasa	5,25	4,54	5,16	8,64	9,13	6,54
Jumlah		5,11	5,13	5,04	3,46	5,60	4,87

Sumber : BPS Kabupaten HSS (berbagai edisi).

\*Angka Direvisi

\*\* Angka sementara

PDRB per kapita harga berlaku Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2007 baru Rp 7.214.601 kemudian pada tahun 2011 naik menjadi Rp 10.969.012 atau mengalami kenaikan rata-rata 10,54%. Jika dilihat dari pendapatan per kapita riil pada tahun 2007 sebesar Rp 4.600.038 kemudian pada tahun 2011 naik menjadi 5.301.777 atau mengalami kenaikan pendapatan riil rata-rata 3,86% (lihat tabel 2.29).

**Tabel 2.29.**  
**Angka PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Tahun 2007-2012**

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Rupiah (000)	Pertumbuhan (%)	Rupiah (000)	Pertumbuhan (%)
2007	7.214.601	9,99	4.600.038	4,40
2008	8.118.468	12,53	4.795.650	4,25
2009	9.159.832	11,32	4.978.390	4,24
2010	10.196.543	11,31	5.115.562	2,75
2011	10.969.012	7,57	5.301.777	3,64
Rata-rata	-	10,54	-	3,86

Sumber : BPS Kabupaten HSS

Jika dilihat dari PDRB per kapita per kecamatan pada tahun terakhir ini (2011) yang paling tinggi pendapatannya adalah pendapatan masyarakat di Kecamatan Telaga Langsung yang mencapai

Rp 16.486.486, kemudian disusul Kecamatan Loksado Rp 16.035.222 dan yang terendah adalah Kecamatan Daha Selatan sebesar Rp 6.779.880 (lihat tabel 2.30)

**Tabel 2.30.**  
**PDRB Per Kapita Per Kecamatan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007- 2012**

Kecamatan	PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Rp)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Padang Batung	-	9.985.663	11.210.971	11.988.672	12.969.279
Loksado	-	10.233.881	11.497.433	14.010.419	16.035.222
Telaga Langsat	-	10.696.323	11.916.568	14.843.408	16.486.486
Angkinang	-	7.350.831	8.146.417	10.460.523	11.441.666
Kandangan	-	9.688.657	10.693.946	12.019.637	12.442.634
Sungai Raya	-	9.732.146	10.871.086	12.643.981	13.975.799
Simpur	-	8.841.699	9.941.922	12.073.007	12.975.710
Kalumpang	-	8.185.478	9.159.477	11.740.467	14.248.466
Daha Selatan	-	5.565.169	6.036.914	6.234.162	6.779.880
Daha Barat	-	7.629.410	8.643.969	9.122.355	11.351.945
Daha Utara	-	6.202.857	6.890.440	6.645.136	7.317.038
<b>Hulu Sungai Selatan</b>	-	<b>8.118.468</b>	<b>9.159.832</b>	<b>10.196.543</b>	<b>10.969.012</b>

Sumber : BPS Kabupaten HSS (diolah) Tahun 2007; tidak ada publikasi data

Jika dilihat dari distribusi pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan koefisien gini pada tahun 2007 nilai koefisiennya 0,22 dan 40% pendapatan yang dinikmati oleh penduduk pendapatan rendah 26,15% dari total pendapatan, kemudian pada tahun 2011 sebesar 0,34 dan mendapatkan bagian pendapatan 19,41% (tabel 2.31) yang berarti pembagian pendapatan semakin tidak merata, atau bisa juga dikatakan pertumbuhan ekonomi yang terjadi semakin tidak berkualitas.

**Tabel 2.31.**  
**Distribusi Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Tahun 2007- 2012**

Tahun	Koefisien Gini	40% Pendapatan yang Dinikmati oleh Penduduk Pendapatan Rendah
2007	0,22	26,15
2008	0,26	22,04
2009	0,32	20,43
2010	0,33	25,33
2011	0,34	19,41
2012	-	

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan (data diolah)

#### 2.2.1. Kemiskinan

Meskipun perekonomian terus tumbuh, namun pertumbuhan tersebut berbanding terbalik dengan jumlah masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hal tersebut sejalan dengan

analisa koefisien gini yang memperlihatkan kesenjangan ekonomi semakin lebar, yaitu dari 19.439 orang (9,32% dari jumlah penduduk) pada tahun 2008 menjadi 16.163 orang (6,85%) pada tahun 2011 dan menjadi 18.182 orang (7,29%) pada tahun 2012 (Tabel 2.32).

**Tabel 2.32.**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2008-2012**

No.	Klasifikasi	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Berdasarkan Jiwa/orang	19.439	15.327	16.300	16.163	18.182
2	Berdasarkan Prosentasi	9,32	7,31	7,45	6,85	7,29
3	Berdasarkan jiwa menurut tahun	208.571	209.669	218.735	235.878	249.073

Sumber :Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. HSS

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Untuk tahun 2012, angka kemiskinan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan beberapa sebab diantaranya: tenaga kerja dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sebelumnya merantau dan bekerja pada sektor usaha kehutanan (pengolahan kayu) pada kabupaten tetangga kembali ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut banyak yang merumahkan tenaga kerjanya. Berkurangnya penghasilan masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan akibat harga komoditas perkebunan (khususnya karet) mengalami penurunan yang relatif tajam serta curah hujan yang tinggi pada tahun 2012 sehingga berdampak pada ketidakmaksimalan panen. Selain itu dampak krisis ekonomi global walaupun kecil tetapi cukup mempengaruhi perekonomian di Kabupten Hulu Sungai Selatan.

Data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2008 dan 2011. Indikator kemiskinan yang digunakan dalam mengidentifikasi dan menentukan penduduk miskin adalah indikator yang ditetapkan oleh BPS yaitu sebanyak 14 indikator. Data kemiskinan ini merupakan

data yang sifatnya berkembang dan tidak kaku sehingga diperlukan upaya untuk memvalidasinya.

Permasalahan yang dihadapi dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain adalah karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersifat unik dikarenakan sumber mata pencaharian dari sebagian besar penduduk bersifat musiman, peningkatan angka kemiskinan secara umum didominasi oleh komposisi dari penduduk dengan kriteria hampir miskin sehingga apabila terjadi sedikit gejolak atau fenomena sosial, penduduk yang hampir miskin ini akan masuk dalam kriteria miskin. Selain itu indikator dan instrumen kemiskinan yang diperluas pada tahun 2012 juga menambah jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara umum semakin meningkat setiap tahunnya. PMKS ini dapat berupa individu, keluarga atau kelompok masyarakat, terdapat 22 jenis PMKS yang telah dikategorikan oleh Kementerian Sosial RI. Peningkatan jumlah PMKS tersebut disebabkan berbagai faktor diantaranya adalah tingkat ekonomi dan pengaruh sosial budaya masyarakat. Sebagai contoh Pada tahun 2008 jumlah lanjut usia terlantar sebanyak 765 orang meningkat menjadi 880 orang pada tahun 2012. Peningkatan jumlah lanjut usia terlantar tersebut selain disebabkan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat juga disebabkan oleh meningkatnya angka kemiskinan. Secara lengkap data penyandang masalah sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Kendala yang dihadapi dalam mengatasi peningkatan jumlah PMKS ini adalah semakin berkembangnya permasalahan sosial yang ada di masyarakat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, melemahnya perekonomian masyarakat, globalisasi dan akses informasi yang semakin meningkat serta menurunnya kepatuhan terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga PMKS akan selalu ada di masyarakat. Beragamnya objek dan jenis PMKS ini membutuhkan pendekatan penanganan tersendiri dan tidak dapat diselesaikan dengan satu pendekatan saja. Seluruh kegiatan pembangunan di bidang sosial yang dilaksanakan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai

Selatan adalah dalam rangka penanganan PMKS ini, namun keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dibandingkan jumlah PMKS yang ada menyebabkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menggunakan skala prioritas sehingga tidak seluruh PMKS dapat tertangani.

**Tabel 2.33.**  
**Jumlah Penyandang Masalah Sosial**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2008-2012**

No	PMKS	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Anak Balita Terlantar	0	0	0	0	0
2.	Anak Terlantar	33 Orang	41 Orang	43 Orang	46 Orang	50 Orang
3.	Anak Nakal	12 Orang	8 Orang	6 Orang	13 Orang	4 Orang
4.	Anak Jalanan	0	0	0	0	0
5.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2187 Orang	2032 Orang	2125 Orang	2227 Orang	2315 Orang
6.	Korban Tindak Kekerasan	0	0	0	28 Orang	0
7.	Lanjut Usia Terlantar	765 Orang	793 Orang	868 Orang	870 Orang	880 Orang
8.	Penyandang Cacat	1869 Orang	1873 Orang	1875 Orang	1862 Orang	1893 Orang
9.	Tuna Susila	0	0	0	0	0
10.	Pengemis	26 Orang	34 Orang	41 Orang	32 Orang	54 Orang
11.	Gelandangan	22 Orang	27 Orang	21 Orang	24 Orang	30 Orang
12.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan	-	-	11 Orang	20 Orang	175 Orang
13.	Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	5 Orang	6 Orang	15 Orang
14.	Fakir Miskin	19.439 Orang	15.327 Orang	16.300 Orang	16.163 Orang	18.182 Orang
15.	Keluarga Tinggal Di Rumah Tidak Layak Huni	-	5023 Kk	5045 Kk	4629 Kk	1197 Kk
16.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	0	0	0
17.	Komunitas Adat Terpencil	346 Kk	348 Kk	350 Kk	350 Kk	356 Kk
18.	Korban Bencana Alam	16 Kk	42 Kk	47 Kk	29 Kk	34 Kk
19.	Korban Bencana Sosial		13 Kk	17 Kk	6 Kk	285 Kk
20.	Pekerja Migran Terlantar	0	0	0	0	0
21.	Orang Dengan Hiv / Aids	0	0	0	0	7 Orang
22.	Keluarga Rentan	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. HSS

## **2.4. Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

### **2.4.1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan**

Kawasan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebar di 11 kecamatan, dengan mayoritas jenis komoditas pertanian yang dikembangkan adalah komoditas padi. Adapun beberapa komoditi pertanian yang dikembangkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

- Padi diusahakan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Jagung dikembangkan di Kecamatan Kandungan, Simpur dan

Kalumpang;

- Ubi Kayu diusahakan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kecuali Kecamatan Kalumpang, Daha Utara, Daha Barat dan Daha Selatan;
- Ubi Jalar dikembangkan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kecuali Kecamatan Kandangan, Sungai Raya, dan Kecamatan Kalumpang. Sebagai sentra tanaman ubi jalar (gumbili nagara) adalah di Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan dan Daha Barat;
- Kacang Hijau dikembangkan di Kecamatan Telaga Langsung, Angkinang, dan Kandangan;
- Kedelai dikembangkan di Kecamatan Kalumpang dan Kandangan; serta
- Kacang Tanah diusahakan pada lahan kering terutama Kecamatan Loksado, Padang Batung, Telaga Langsung dan Sungai Raya.

Pada tabel 2.34 terlihat hasil produksi padi sawah pada tahun 2012 mengalami penurunan, pada tahun 2007 produksi padi sawah dari 232.432 ton turun menjadi 223.625 ton pada tahun 2012. Hal itu terjadi karena pada tahun 2007 terjadi kemarau panjang dan tanaman pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2007 sampai dengan 2012, mengingat kondisi alam akibat adanya anomali iklim sangat berpengaruh pada hasil produksi, maka hasil yang dicapai pun berfluktuatif, terutama pada komoditi selain padi dan jagung.

**Tabel 2.34.**  
**Produksi Padi Dan Tanaman Pangan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 -2012**

No	Komoditas Pertanian TPH	Produksi (Ton)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Padi sawah	232.432	208.903	192.140	159.070	210.881	223.625
2.	Padi Ladang	13.765	17.170	19.013	19.988	19.173	19.228
3.	Jagung	3.984	660	1.790	479	2.500	4.659
4.	Ubi Kayu	3.836	2.462	2.136	2.777	1.984	1.913
5.	Ubi Jalar	11.223	5.482	10.006	9.400	10.472	7.928
6.	Kacang Tanah	1.619	1.668	1.216	902	646	634
7.	Kacang Kedelai	2	7	23	3	75	248
8.	Kacang Hijau	27	64	43	16	17	8

Sumber :Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab HSS

Untuk menciptakan keamanan stock pangan guna menuju ketahanan pangan yang tangguh, bebarapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Badan Penyuluh Pertanian, yaitu :

1. menjaga ketersediaan cadangan pangan yang meliputi cadangan pangan masyarakat dengan kegiatan yang dilakukan pembangunan dan pembinaan lumbung pangan masyarakat minimal 1 (satu) buah lumbung dalam satu kecamatan, tetapi bagi kecamatan yang dianggap perlu perhatian khusus dibangun lumbung lebih dari 1 (satu) buah (lihat tabel 2.35). Pengisian awal lumbung dilakukan dari dana pemerintah selanjutnya diharapkan dari swadaya masyarakat. Lumbung sebagai cadangan pangan daerah dimanfaatkan dalam memberikan bantuan pangan terhadap masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan apabila terjadi bencana yang disalurkan pada pasca bencana.

**Tabel 2.35.**  
**Lumbung Pangan dan Lantai Jemur**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 -2013**

No	Lokasi	Dibangun Tahun	Unit	Pengisian Gabah (Kg)	
				2011	2012
1.	Desa Asam Kec. Sungai Raya	2007	1	6.000	
2.	Desa Panjampang Bahagia Kec. Simpur	2007	1		7.500
3.	Desa Lungau Kec. Kandangan	2007	1		
4.	Desa Bago Tanggul Kec. Kalumpang	2007	1		
5.	Desa Muning Tengah Kec. Daha Selatan	2007	1	6.000	
6.	Desa Kayu Abang Kec. Angkinang	2007	1	6.000	
7.	Desa Telaga Bidadari Kec. Sungai Raya Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung	2009	2		7.500
8.	Desa Balimau Kecamatan Kalumpang Desa Muning Baru Kec. Daha Selatan	2010	2	6.000 6.000	
9.	Desa Ulang, Desa Loksado Kec. Loksado	2013	2		
10.	Desa Pasungkan Kec. Daha Utara	2013	1		
11.	Desa Banua Hanyar Kec. Daha Selatan	2013	1		
12.	Desa Bamban Selatan Kec. Angkinang	2013	1		
JUMLAH			15		

Sumber: Badan Penyuluh Pertanian Kab. HSS

2. Pembinaan lembaga distribusi pangan yang peduli terhadap kebutuhan pangan masyarakat dan menjaga kestabilan pangan saat panen raya terutama komoditi padi. Kegiatan yang telah dilaksanakan penyaluran dana talangan LUEP APBD I, APBD II dan PL-DPM dana Bansos APBN (lihat tabel 2.36).

**Tabel 2.36.**  
**Lembaga Distribusi Pangan**

No.	Nama Gapoktan, Desa, Kecamatan	Jumlah dana (Rp)	Tahun
1.	Banua Jaya, Desa Banua Hayar Kecamatan Daha Selatan	225.000.000	2010
2.	Bangun Banua, Desa Bamban Kecamatan Angkinang	225.000.000	2011

Sumber: Badan Penyuluh Pertanian Kab. HSS

#### 2.4.2. Sektor Kehutanan dan Perkebunan

##### a. Kehutanan

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kawasan hutan yang tersebar secara tidak merata pada wilayah kecamatan. Sebagian kawasan hutan ini ada di bagian pinggiran atau pedalaman, diantara kawasan hutan ini masih ada yang dimanfaatkan sebagai hutan produksi. Kawasan hutan yang terletak pada kawasan budidaya adalah kawasan hutan produksi konversi dan kawasan hutan produksi terbatas yang terletak pada kawasan hutan produksi. Jenis hutan yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didominasi oleh kawasan hutan lindung seluas 23.918,0 Ha dan hutan produksi konversi dengan luas 18.722,0 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.37 berikut:

**Tabel 2.37.**  
**Kawasan Hutan Di Kabupaten HSS Tahun 2011**

No.	Kawasan Hutan	Luas Area (Ha)	Luas (%)
1.	Hutan Produksi Tetap	12.461,0	22,5
2.	Hutan Produksi Terbatas	-	-
3.	Hutan Lindung	23.920,0	43,2
4.	Hutan Konversi	18.724,0	33,8
5.	Hutan Suaka Cagar Alam/wisata	240,43	0,4
Jumlah		55.345, 4	100,0

Sumber: BPS Kab. HSS, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2012

Salah satu hasil kehutanan yang dikelola oleh rakyat dan bernilai ekonomis adalah berupa Kayu Manis. Kayu manis yang merupakan hasil hutan bukan kayu merupakan hasil unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dikembangkan di Kecamatan Padang Batung dan Loksado, kayu manis tersebut sudah dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi, yaitu serbuk kayu manis dan sirup kayu manis. Adapun luas areal yang dikembangkan untuk tanaman kayu manis adalah sebagaimana pada table 2.38

**Tabel 2.38.**  
**Luas Areal Pengembangan Kayu Manis**  
**Di Kabupaten HSS Tahun 2007-2012**

No	Komoditas HHBK	Jumlah											
		2007		2008		2009		2010		2011		2012	
		Areal (ha)	Prod. (Ton)										
1	Kayu Manis	2,274.00	1,256.80	2,259.38	1,176.33	2,394.38	1,256.83	2,470.00	1,283.66	2,585.38	1,391.00	2,552.38	1,436.53

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. HSS (2012)

#### b. Perkebunan

Perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebar secara tidak merata pada tiap-tiap kecamatan yang ada. Jenis komoditi perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diantaranya adalah

- Perkebunan Rakyat Karet dikembangkan di Kecamatan Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Angkinang, Sungai Raya dan Kecamatan Simpur;
- Perkebunan Rakyat Kelapa dikembangkan di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kecuali Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat;
- Perkebunan Rakyat Cengkeh dikembangkan di Kecamatan Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Kandangan dan Sungai Raya;
- Perkebunan Rakyat Kapuk dikembangkan di Kecamatan Kandangan dan Sungai Raya;
- Perkebunan Rakyat Lada dikembangkan di Kecamatan Padang Batung, Loksado, Angkinang dan Sungai Raya;
- Perkebunan Rakyat Kopi dikembangkan di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kecuali Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat;

- Perkebunan Rakyat Coklat dikembangkan di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kecuali Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat; dan
- Perkebunan Rakyat Kemiri dikembangkan di Kecamatan Padang Batung, Loksado, dan Telaga Langsat.

Luas areal perkebunan beberapa komoditi terus mengalami peningkatan, seperti karet pada tahun 2007 baru 10.803,00 ha meningkat menjadi 14.711,01 ha pada tahun 2012, kayu manis pada tahun 2007 baru 2.274,00 ha kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 2.552,38 ha, aren pada tahun 2007 baru 183,80 ha meningkat menjadi 253,64 ha, dan yang baru berkembang didaerah ini adalah perkebunan kelapa sawit. Tetapi ada juga beberapa komoditi perkebunan yang luas lahan berfluktuasi (lihat tabel 2.39).

**Tabel 2.39.**  
**Perkembangan Luas Areal Perkebunan Rakyat**  
**Tahun 2007-2012**

No	Komoditas Perkebunan	Luas Areal (Ha)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Karet	10,803.00	11,711.03	12,786.03	12,986.03	<b>13,906.03</b>	<b>14,711.01</b>
2	Kelapa Dalam	8,561.42	8,724.42	8,298.38	8,435.38	8,535.38	8,565.38
3	Kemiri	1,845.30	1,815.00	1,828.33	1,838.33	1,811.33	1,825.33
4	Kakao	457.40	422.36	370.30	363.30	346.30	339.30
5	Kopi	323.80	229.79	238.61	238.61	243.61	243.61
6	Aren	183.80	183.82	184.73	174.73	179.64	253.64
7	Kelapa Sawit/Pr	1,533.00	1,908.00	1,917.50	2,084.00	2,234.00	3,034.00
8	Pinang	108.70	104.69	110.69	110.69	78.69	85.00
9	Lada	8.30	10.83	12.69	14.69	10.44	10.44
10	Sawit/PBS	-	-	-	-	-	6,800.00

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. HSS (2012)

Perkembangan produksi perkebunan rakyat sejak 2007 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan. Komoditi karet pada tahun 2007 baru 3.628,66 ton kemudian pada taun 2012 naik menjadi 7.206,92, produksi kelapa dalam pada tahun 2007 5.494,80 ton kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 6.123,66 ton, kemiri pada tahun 2007 baru 836,20 ton kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 892,00 ton, kayu manis pada tahun 2007 baru 1.256,80 ton naik menjadi 1.436,53 ton dan pada

tahun 2012 ini kelapa sawit mulai berproduksi menghasilkan CPO dan inti sawit (lihat tabel 2.40).

**Tabel 2.40.**  
**Perkembangan Produksi Perkebunan Rakyat**  
**Tahun 2007-2012**

No	Komoditas Perkebunan	Produksi (Ton)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Karet	3,628.66	3,902.76	4,192.34	4,854.08	6,213.70	7,206.92
2	Kelapa						
2	Dalam	5,494.80	5,555.80	5,738.91	5,726.32	6,016.96	6,123.66
3	Kemiri	836.2	839.22	839.88	841.35	843.49	892
4	Kakao	13.3	13.9	16.32	20.49	18.09	27.1
5	Kayu Manis	1,256.80	1,176.33	1,256.83	1,283.66	1,391.00	1,436.53
6	Kopi	14.7	15.71	16.32	16.32	27.27	27.84
7	Aren	129.7	128.8	134.5	136.7	153.49	163.8
8	Pinang	8.1	8.31	8.58	8.8	6.79	21
9	Lada	1.7	1.68	2.07	2.07	2.47	3
10	Kelapa						
	Sawit/PBS	-	-	-	-	-	-
	- CPO	-	-	-	-	-	550
	- Inti Sawit	-	-	-	-	-	150
11	Kelapa						
	Sawit/PR	-	30	2,051.45	4,854.60	3,723.00	-
	- CPO	-	-	-	-	-	2,063.00
	- Inti Sawit	-	-	-	-	-	563

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. HSS (2012)

### 2.4.3. Perikanan dan Peternakan

#### a. Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Perikanan darat (air tawar), terbagi atas usaha perikanan budidaya dan usaha perikanan tangkap. Usaha perikanan budidaya meliputi kegiatan budidaya ikan (pembenihan dan pembesaran) dengan sistem pemeliharaan di kolam, karamba/jaring apung, dan minapadi. Sedangkan usaha perikanan tangkap merupakan kegiatan penangkapan ikan di perairan umum rawa dan sungai (tabel 2.41)

**Tabel 2.41**  
**Potensi Jenis Usaha Perikanan**  
**Di Kabupaten HSS**

No	Jenis Usaha Perikanan	Lokasi
1	Kolam	Loksado (0,75 ha), Padang Batung (2,39 ha), Telaga Langsung (4,48 ha), Angkinang (3,56 ha), Sei Raya (0,19 ha) Kandangan (0,99 ha), Kelumpang (0,25 ha), Daha Selatan (4,42 ha), Daha Barat (0,07 ha) dan Daha Utara ( 0,14 ha).
2	Karamba	Daha Selatan (2.350), Daha Utara (1.250), Kalumpang (48), Simpung (32), Kandangan (477), dan Daha Barat (1.125).
3	Minapadi	Angkinang (1 ha), Telaga Langsung (2 ha), Padang Batung (1,58 ha) dan Daha Utara (114,35 ha) dan Sungai Raya.
4	Penangkapan	Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang, Simpung, Daha Barat, Angkinang dan Kandangan

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. HSS, 2012

Perkembangan produksi hasil budidaya perikanan mengalami fluktuasi, contoh produksi ikan mas pada tahun 2007 sebesar 33,09 ton kemudian naik menjadi 34,18 ton (2008), naik menjadi 36,0 ton (2009), naik menjadi 37,42 ton (2010), naik menjadi 77,25 ton (2011) dan pada tahun 2012 tidak menghasilkan lagi, fluktuasi ini terjadi karena dalam beberapa tahun terakhir terjadi wabah *Koi Herpes Virus (KHV)* yang menyerang jenis ikan Koi (ikan mas) di hampir seluruh perairan di dunia, tidak terkecuali Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ke depannya diharapkan dengan kerjasama semua pihak komoditas ikan mas ini dapat dikembangkan karena merupakan ikan konsumsi masyarakat dan bernilai jual tinggi.

Produksi ikan nila mengalami perkembangan yang sangat baik, pada tahun 2007 baru 75,34 ton naik terus dan menjadi 1.064,84 ton pada tahun 2012, ikan patin pada tahun 2007 baru 435,65 ton juga terus naik menjadi 1.306,85 ton pada tahun 2012, ikan tauman pada tahun 2007 baru 130,52 ton, terus naik menjadi 1.645,67 ton pada tahun 2012 (lihat tabel 2.42). Produksi benih ikan sejak tahun 2010 ada kecenderungan mengalami penurunan (lihat tabel 2.43).

**Tabel 2.42.**  
**Keadaan Produksi Budidaya Perikanan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 – 2012**

No	JENIS IKAN	Produksi (Ton)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Ikan Mas	33,09	34,18	36	37,42	77,25	-
2	Ikan Nila	75,34	96,97	107	152,25	168,04	1.064,84
3	Patin	435,65	539,71	541	818,46	1.241,10	1.306,85
4	Gabus	8,63	9,76	16	20,21	23,20	-
5	Tauman	130,52	135,42	387,19	415,60	1.331,50	1.645,67
6	Sepat Siam	419,4	0	0	0	-	-
7	Lele	0,57	0,62	0,83	1,7	34,18	532,42
8	Betok / Papuyu	1,76	2,53	10,98	15,72	34,68	290,41
9	Bawal Air Tawar	27,04	29,61	185,76	209,69	210,05	-
	<b>Total</b>	<b>766,6</b>	<b>848,80</b>	<b>1.285,6</b>	<b>1.671,1</b>	<b>3.671,05</b>	<b>4.840,19</b>

Sumber :Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. HSS

**Tabel 2.43.**  
**Keadaan Produksi Benih Ikan pada UPTD BBI**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009-2012**

No	Jenis Ikan	Produksi (ekor)			
		2009	2010	2011	2012
1.	Mas			2.000	
2.	Nila	110.000	310.000	270.000	200.000
3.	Patin	45.000	95.000	110.000	140.000
4.	Lele		55.000		
	<b>Total</b>	<b>155.000</b>	<b>460.000</b>	<b>392.000</b>	<b>340.000</b>

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. HSS

Produksi perikanan tangkap secara total mengalami peningkatan, pada tahun 2007 sebesar 6.916,30 ton naik menjadi 7.142,40 ton pada tahun 2008, naik lagi menjadi 7.201,70 ton pada tahun 2009, menjadi 7.225,30 pada tahun 2010, menjadi 7.263,00 pada tahun 2011 dan menjadi 7.293,21 ton pada tahun 2012. Produksi ikan tangkap yang besar adalah ikan sepat rawa pada tahun 2012 mencapai 1.779,9 ton, kemudian ikan sepat siam 1.418,1 ton (2012), ikan betok/ papuyu 1.219,4 ton (2012) dan ikan gabus 1.105,52 ton (2012). Keadaan ini dapat dilihat pada tabel 2.44. sedangkan untuk target produksi perikanan tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 2.45.

**Tabel 2.44.**  
**Keadaan Produksi Tangkap Perikanan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 – 2012**

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Baung	234,5	252,1	216,1	112,80	109,80	135,52
2	Gabus	724,3	831,8	1.098,6	1138,5	1.126,70	1.105,52
3	Lais	225,0	212,9	396,5	181,9	177,00	218,38
4	Tauman	38,2	42,5	144,0	177,4	175,90	166,8
5	Sepat Siam	1.239,8	1.293,9	1.296,2	1452,3	1.436,10	1.418,1
6	Tambakan/Biawan	720,5	763,7	432,1	497,3	492,70	474,00
7	Udang Galah (Tawar)	40,3	28,6	36,0	21,8	23,20	26,23
8	Lampan	0	267,9	467,7	254,7	247,80	306,0
9	Lele	42,8	26,6	36,0	49,4	49,20	43,95
10	Betok / Papuyu	1.068,2	1.146,8	1.224,3	1246,2	1.232,50	1.219,4
11	Keting/Sanggi /Lundu	64,3	56,6	71,9	102,5	101,90	92,26
12	Sepat Rawa	1.739,4	1.768,9	1.512,4	1670,6	1.773,40	1.779,9
13	Lainnya (Puyau, Sepat Biasa dll)	779,0	450,1	269,9	319,9	316,80	307,15
	Total	6.916,30	7.142,4	7.201,70	7.225,30	7.263,00	7.293,21

Sumber :Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. HSS

**Tabel 2.45.**  
**Target Produksi Perikanan 2013-2018**

No	Produksi Perikanan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Budidaya (ton)	4.766	6.998	8.499	9.348	10.283	11.312	12.443
2.	Tangkap(Ton)	7.293	7.512	7.737	7.969	8.208	8.454	8.708
3.	Benih Ikan :							
	1. Nila (ekor)	200.000	220.000	225.000	250.000	275.000	300.000	325.000
	2. Patin (ekor)	140.000	150.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
	3. Lele (ekor)	-	-	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
	4. Betok (ekor)	20.000	-	275.000	300.000	325.000	350.000	375.000

Sumber :Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. HSS

**b. Peternakan**

Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat beberapa kecamatan yang memiliki potensi pengembangan peternakan baik ternak besar maupun ternak kecil. Khusus untuk Sapi dan kerbau dikembangkan di beberapa kecamatan dan seperti Kecamatan Sungai Raya, Kandangan, Padang Batung, Telaga Langsung dan Kalumpang. Untuk ternak dalam kategori kecil seperti kambing terdapat di Kecamatan Padang Batung, Kandangan dan Kalumpang.

Populasi hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan domba cenderung mengalami penurunan. Populasi ternak sapi pada tahun 2007 sebesar 11.125 ekor kemudian pada tahun 2012 menjadi 4.630 ekor, ternak kerbau pada tahun 2007 sebesar 3.394 ekor turun menjadi 779 ekor pada tahun 2012, ternak kambing pada tahun 2007 sebesar 5.477 ekor turun menjadi 2.733 ekor pada tahun 2012, ternak domba pada tahun 2007 sebesar 225 ekor turun menjadi 40 ekor pada tahun 2012. Tetapi untuk ternak ayam ras pedaging, ayam

buras dan itik Alabio terus mengalami peningkatan populasinya (lihat tabel 2.46).

Banyaknya komoditas peternakan atau yang lebih dikenal dengan istilah populasi ternak dari tahun 2007-2012 untuk ternak besar (Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba) semuanya mengalami penurunan. Khusus untuk ternak sapi dan kerbau, sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Nasional Peternakan Sapi dan Kerbau. Berdasarkan hasil sensus tersebut diperoleh informasi bahwa data ternak sapi dan kerbau yang selama ini didasarkan pada laporan jumlah kelahiran, jumlah kematian, jumlah ternak masuk dan ternak keluar yang kemudian dihitung dengan rumusan statistik peternakan ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan di lapangan. Hal ini terjadi juga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan jumlah ternak sapi yang ada pada tahun 2010 sebanyak 13.579 ekor ternyata berdasarkan hasil sensus per 1 Juni 2011 hanya diperoleh data 4.035 ekor. Demikian juga dengan ternak kerbau dengan data yang ada pada tahun 2010 sebanyak 3.488 ekor ternyata berdasarkan hasil sensus per 1 Juni 2011 hanya 1.041 ekor. Data inilah yang kemudian digunakan untuk bahan resmi dalam rangka perencanaan pembangunan peternakan selanjutnya.

Berdasarkan data sensus sapi dan kerbau diketahui juga bahwa untuk peternakan sapi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ternyata sebagian (lebih dari 40 %) merupakan usaha penggemukan ternak untuk memenuhi kebutuhan daging sapi, dengan demikian peningkatan pertumbuhan sangat kecil karena hanya 60 % dari jumlah ternak sapi yang merupakan usaha pembibitan dan pengembangan. Sedangkan untuk ternak kerbau terutama kerbau rawa penurunan populasi juga disebabkan oleh banyaknya pemilik modal yang menghentikan investasinya pada usaha ternak kerbau sehingga banyak yang dijual, selain itu juga tekanan alih fungsi lahan yang selama ini menjadi tempat hidup kerbau rawa bersinggungan dengan lahan pertanian dan juga lahan perkebunan serta banyaknya kematian akibat penyakit.

Sedangkan populasi ternak unggas (Ayam ras pedaging, Ayam Buras dan Itik) semuanya mengalami peningkatan. Untuk ternak ayam pedaging dari jumlah 476.507 ekor pada tahun 2007 meningkat menjadi 1.371.292 ekor pada tahun 2012 atau mengalami peningkatan sebesar 187,78 persen. Ternak ayam buras dari jumlah 1.093.435 ekor pada tahun 2007 meningkat menjadi 2.723.958 ekor pada tahun 2012 atau mengalami kenaikan sebesar 149,12 persen. Sementara itu untuk ternak itik yang menjadi unggulan dari jumlah 558.575 ekor pada tahun 2007 meningkat menjadi 970.687 ekor pada tahun 2012 atau mengalami peningkatan sebesar 73,78 persen (lihat tabel 2.46).

**Tabel 2.46.**  
**Banyaknya Populasi Komoditas Peternakan Tahun 2007-2012**  
**Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No	Komoditas Peternakan	Banyaknya Hewan Ternak (Ekor)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Sapi	11.125	12.257	13.025	13.579	4.035	4.630
2.	Kerbau	3394	3496	3479	3.488	1.041	779
3.	Kambing	5477	5710	5927	5.591	3.694	2.733
4.	Domba	225	260	248	183	124	40
5.	Ayam Ras Pedaging	476.507	1.395.525	1.531.082	1.309.257	1.262.664	1.371.292
6.	Ayam Buras	1.093.435	1.411.595	1.432.684	1.664.902	2.796.881	2.723.958
7.	Itik Alabio	558.575	737.621	877.616	935.927	923.874	970.687

Sumber :Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. HSS

Produksi daging ayam ras pedaging pada tahun 2007 baru 578.213 kg kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 765.494 kg, produksi daging ayam buras pada tahun 2007 baru 42.019 kg kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 165.036 kg, dan produksi telur ayam buras pada tahun 2007 sebesar 741.063 kg kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 2.228.639 kg, produksi daging itik pada tahun 2007 baru 14.853 kg kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 106.709 kg, produksi telur itik pada tahun 2007 baru 2.989.646 kg kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 6.656.139 kg (lihat tabel 2.47).

Produksi peternakan berupa daging untuk ternak sapi dan kambing mengalami peningkatan dari tahun 2007 – 2012. Produksi daging berhubungan langsung dengan jumlah pemotongan ternak baik yang dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) maupun di tempat lain pada saat hari Qurban atau Aqiqah, akan tetapi tidak

terkait langsung dengan jumlah populasi ternak yang ada secara keseluruhan. Dengan demikian meskipun jumlah ternak cenderung mengalami penurunan akan tetapi produksi daging terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan konsumsi daging oleh masyarakat.

**Tabel 2.47.**

**Produksi Peternakan Unggas Tahun 2007-2012  
Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No	Komoditas Peternakan	Besarnya Produksi					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Ayam Ras Pedaging (kg)	578.213	266.143	716.934	646.571	722.448	765.494
2.	Ayam Buras (kg)						
	- Daging	42.019	54.303	149.886	83.777	126.657	165.036
	- Telor	741.063	1.197.062	1.172.196	1.362.193	1.339.224	2.228.639
3.	Ayam ras petelur (kg)	0	-	0	0		
4.	Telur Itik Alabio (kg)						
	- Daging	14.853	16.454	92.147	84.016	116.393	106.709
	- Telor	2.989.646	5.460.943	5.641,817	6.016.674	6.335.136	6.656.139

Sumber :Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. HSS

Produksi daging sapi potong pada tahun 2007 sebesar 219.446 kg kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 315.835 kg, produksi daging kerbau pada tahun 2007 sebesar 37.556 kg kemudian pada tahun 2012 turun menjadi 12.386 kg, produksi daging kambing pada tahun 2007 baru 11.111 kg kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 26.488 kg, produksi daging domba dan daging babi sangat berfluktuasi.

Untuk ternak kerbau dan kambing cenderung mengalami penurunan, hal ini lebih disebabkan oleh masyarakat yang mengkonsumsi daging tersebut lebih terbatas dibanding dengan daging sapi dan kambing. Dengan demikian permintaan masyarakat akan daging kerbau dan domba cenderung menurun setiap tahunnya, selain itu untuk ternak domba berkaitan dengan resiko penyakit apabila berdampingan dengan ternak sapi, sebagaimana diketahui bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selain ternak itik ada juga ternak sapi sebagai unggulan oleh karena itu diharapkan ternak domba tidak berkembang pesat (lihat tabel 2.48).

**Tabel 2.48.**  
**Produksi Peternakan Besar dan Kecil Tahun 2007-2012**

No	Komoditas Peternakan	Besarnya Produksi					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Sapi Potong (kg)	219.446	266.142	231.822	183.768	247.005	315.835
2.	Kerbau (kg)	37.556	39.040	42.363	31.219	37.772	12.386
3.	Kambing (kg)	11.111	14.497	12.339	10.444	24.096	26.488
4.	Domba (kg)	640	2.225	2250	2.457	1.188	906
5.	Babi (kg)	15.198	26.257	29.326	2.129	7.979	7.181

Sumber :Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. HSS

#### 2.4.4. Sektor Perindustrian

Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada dasarnya memiliki beberapa potensi sektor industri yang dapat dikembangkan, namun tidak terdapat industri besar, tenaga kerja lebih atau sama dengan 100 orang. Sedangkan industri sedang/menengah dengan tenaga kerja antara 20-99 orang terdapat di Kecamatan Kandangan dan Sungai Raya. Industri kecil dengan tenaga kerja antara 5-19 orang yang berjumlah 116 buah terbanyak terdapat di Kecamatan Kandangan dan Sungai Raya masing-masing sebanyak 19 buah. Pada tahun 2008 jumlah industri formal dan sebanyak 11.078 unit usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 23.900 orang dan pada tahun 2012 naik menjadi 11.393 unit usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 25.668 orang (lihat tabel 2.49). Sebagian besar usaha yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah usaha kecil (lihat tabel 2.50). Komoditi unggulannya adalah ikan kering, kerupuk, gerabah, dodol, profeller, perhiasan imitasi dan mandau.

**Tabel 2.49.**  
**Industri Kecil / Menengah**  
**di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008-2012**

No	Jenis Industri	Jumlah									
		2008		2009		2010		2011		2012	
		Unit Usaha	Tenaga Kerja								
<b>A</b>	<b>FORMAL</b>										
1	IKM Pangan	65	374	67	411	67	411	67	411	68	421
2	IKM Sandang	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15
3	IKM Kima dan Bahan Bangunan	60	615	62	623	62	623	62	623	62	623
4	IKM Logam dan Elektronika	81	495	88	516	88	516	88	516	88	516
5	IKM Kerajinan dan Umum	21	137	24	149	24	149	25	157	26	165
<b>B</b>	<b>INFORMAL</b>										
1	IKM Pangan	4.132	10.695	4.255	11.016	4.297	11.089	4.325	11.143	4.325	11.143
2	IKM Sandang	163	250	171	260	175	268	175	268	175	268
3	IKM Kima dan Bahan Bangunan	547	1.322	562	1.375	562	1.375	562	1.375	562	1.375
4	IKM Logam dan Elektronika	679	2.060	709	2.122	713	2.131	714	2.135	715	2.139
5	IKM Kerajinan dan Umum	5.325	7.937	5.344	7.981	5.365	7.999	5.366	9.001	5.367	9.003
	<b>TOTAL</b>	11.078	23.900	11.287	24.468	11.358	24.576	11.389	25.644	11.393	25.668

Sumber :Dinas Perindagkop & UKM Kab. HSS

**Tabel 2.50.**  
**Usaha Mikro Kecil & Menengah**  
**di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008-2012**

No	Jenis Usaha	Jumlah									
		2008		2009		2010		2011		2012	
		Unit Usaha	Tenaga Kerja								
1	Usaha Kecil	35.142	32.823	36.342	32.886	37.459	33.112	38.766	33.576	40.036	41.875
2	Usaha Menengah	40	134	44	145	49	161	58	168	60	177
3	Usaha Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	35.182	32.957	36.386	33.031	37.508	33.273	38.824	33.744	40.096	42.052

Sumber :Dinas Perindagkop & UKM Kab. HSS

#### 2.4.5. Sektor Koperasi

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan jumlah penduduk 249.073 jiwa pada tahun 2012 memiliki lebih dari 7.000 orang pencari kerja yang berpotensi menjadi pengusaha kecil dalam naungan koperasi.

Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan tahun 2012 berjumlah 149 unit yang terdiri dari koperasi produsen, jasa, fungsional, strategis dan konsumen.

Keberadaan koperasi tersebar di 11 kecamatan se Kabupaten Hulu Sungai Selatan (lihat tabel 2.51).

**Tabel 2.51.**  
**Jumlah Koperasi Per Kecamatan**  
**di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2012**

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi (Unit)
1	Kandangan	63
2	Telaga Langsung	8
3	Padang Batung	15
4	Angkinang	13
5	Kalumpang	5
6	Simpur	7
7	Sungai Raya	11
8	Loksado	7
9	Daha Utara	8
10	Daha Selatan	10
11	Daha Barat	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>149</b>

Sumber: Dinas Perindagkop, HSS

#### 2.4.5. Sektor Pariwisata

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pariwisata sebagai salah satu alternatif daerah tujuan wisata unggulan Kalimantan Selatan maupun Nasional karena keanekaragaman obyek wisata yang dimilikinya. Daya Tarik Wisata (DTW) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini meliputi keseluruhan potensi atraksi atau sumberdaya wisata, baik berupa sumberdaya wisata alam (antara lain: hutan, air terjun, sungai, pegunungan, flora, dan sebagainya) maupun budaya (antara lain: bangunan bersejarah, makam, adat-istiadat dan tradisi, dan sebagainya), serta potensi lainnya yang dapat dikembangkan untuk menarik kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Berdasarkan karakteristik daya tarik wisatanya, maka Daya Tarik Wisata (DTW) di kabupaten ini terbagi dalam tiga jenis, yaitu:

##### A. Daya Tarik Wisata Alam (*natural attractions*)

yaitu daya tarik yang berhubungan dengan lingkungan alam, termasuk di dalamnya adalah iklim, pemandangan alam, pantai dan laut, flora, dan fauna. Fenomena alamiah lain (pegunungan, fenomena geologis, gua, aktivitas vulkanologis, sumber air panas dan lainnya), taman dan area konservasi (taman nasional, cagar

alam), wisata kesehatan (tempat-tempat dengan sumber air panas, dan lainnya);

**B. Daya Tarik Wisata Budaya (*cultural attractions*)**

yaitu daya tarik yang berhubungan dengan aktivitas manusia. Atraksi-atraksi yang termasuk di dalamnya adalah situs arkeologis, sejarah, dan budaya (monumen, bangunan/kota/daerah bersejarah, bangunan ibadah), budaya, tradisi, gaya hidup yang unik (kebiasaan, pakaian, upacara, cara hidup, kepercayaan/agama), kesenian dan kerajinan, aktivitas ekonomi, kawasan perkotaan, museum dan fasilitas budaya lainnya, festival budaya, keramahan penduduk, dan lainnya;

**C. Daya Tarik yang Bersifat Khusus (*special types of attractions*)**

yaitu daya tarik wisata yang tidak termasuk dalam kategori daya tarik wisata alam dan budaya, yang diciptakan secara arti (buatan), mencakup di dalamnya antara lain taman bertema, gedung konvensi, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas belanja/shopping, serta fasilitas olahraga.

Potensi keanekaragaman Daya Tarik Wisata (DTW) yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terangkum dalam tabel 2.52 berikut:

**Tabel 2.52.**  
**Potensi Keanekaragaman DTW**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2011)**

<b>JENIS DTW</b>	<b>NAMA OBYEK</b>	<b>LOKASI</b>	<b>DAYA TARIK WISATA</b>
<b>DTW Alam</b>	1 Air tiring	Desa Kemawakan Kec Loksado	Air terjun bertingkat tiga
	2 Air Terjun Haratai	Desa Haratai Kec Loksado.	Ditempuh dengan jalan kaki dari Balai Haratai ± 15 menit melewati hutan bambu, perkebunan karet, dan kayu manis. Air terjun tersebut bertingkat tiga dengan ketinggian masing-masing ± 15 meter
	3 Air Terjun Tangkaramin	Desa Malinau Kec Loksado.	Air terjun bertingkat tiga
	4 Air Terjun Tinggiran Hayam	Desa Kamawakan Kec.Loksado	Air terjun bertingkat tiga
	5 Air Terjun Kilap Api	Desa Tanuhi Kec. Loksado	Air terjun bertingkat
	6 Riam Anai	Desa Lok Lahung Kec.Loksado	Air terjun bertingkat satu
	7 Goa Berangin/Batu Laki	Desa Malutu Kec. Padang Batung	Terdapat goa-goa lainnya
	8 Goa Batu Bini	Desa Batu Bini Kec. Padang Batung	Terdapat goa-goa lainnya
	9 Goa Mandala	Desa Mandala Kec. Telaga Langsat	Terdapat goa-goa lainnya
	10 Sumber Air Panas	Desa Batu Bini	Sumber air panas bumi

JENIS DTW	NAMA OBYEK	LOKASI	DAYA TARIK WISATA
	Batu Bini	Kec. Padang Batung	
	11 Sumber Air Panas Tanuhi	Desa Tanuhi Kec.Loksado	Sumber air panas alami dan ada cottage peristirahatan; Kurang lebih 8 Km sebelum. Terdapat 10 unit (untuk 20 orang) cottage dengan arsitektur unik yang dilengkapi dengan kolam renang, kolam air panas berendam, kolam air panas gelembung, cafetaria, kantor pengetota, jalan dan jembatan, sanitasi, dan loket pos jaga (security), lapangan tenis, serta tempat santai/istirahat. Keunggulan yang dapat dirasakan di sini adalah selain menikmati air panas, berenang, berolahraga, juga dengan leluasa dapat memandang alam Loksado yang dikelilingi dengan pegunungan
	12 Gunung Kantawan	Desa Muara Hatip	Cagar alam <i>tracking</i> dengan pemandangan alam pegunungan
	13 Telaga Bidadari	Kec. Sungai Raya	Telaga di kompleks permukiman dengan kepercayaan khusus
	14 Danau Bangkau	Kec.Kandangan	
	15 Delta dan Dam Sungai Amandit	Desa Malutu Kec.Padang Batung	
<b>DTW Budaya</b>	<b>A. Industri/Kerajinan</b>		
	1. Industri Dodol	Kec. Kandangan/ Sungai Raya	Pengolahan dodol dengan cara tradisional
	2. Kerajinan Logam/ Kuningan	Kec. Daha Utara / Daha Selatan	Cara pembuatan logam
	3. Pembuatan Badan Kapal	Kec.Daha Utara / Daha Selatan	Industri pembuatan kapal
	4. Kerajinan Aksesoris Perhiasan	Kec. Daha Selatan	Cara pembuatan aksesoris
	5. Kerajinan Mandau	Kec. Daha Selatan	Cara pembuatan mandau
	6. Industri Kerupuk	Desa Bamban Kec. Angkinang	Pembuatan krupuk dari ubi kayu
	7. Kerajinan Gerabah	Kec. Daha Selatan	Pembuatan gerabah dari tanah liat
	<b>B. Balai/Rumah Adat</b>		
	1 Rumah Adat Banjar	Desa Tibung Raya Kec. Kandangan	Bangunan rumah adat Khas Banjar
	2 Rumah Adat Banjar Gajah Menyusu	Desa Amawang, Kec Kandangan	Rumah adat
	3 Rumah Adat Banjar Bumbungan Tinggi	Desa Habirau, Kec. Daha Selatan	Rumah adat
	4 Rumah Toko Terapung	Kec. Daha Utara	Rumah adat
	5 Baiiai/Rumah Adat Bukit/Dayak	Kec. Loksado	Rumah adat yang digunakan dalam kegiatan adat/ kepercayaan
	<b>C. Festival/Event</b>		
	1. Festival Pengantin Balantiing	Kec. Loksado	Festival pasangan pengantin yang diarak menyusuri sungai dengan rakit lengkap dengan para pengaraknya, bebunyian, dan hiasan bak pawai di jalan raya
	2. Festival Lanting	Kec. Loksado	Festival Lanting dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

JENIS DTW	NAMA OBYEK	LOKASI	DAYA TARIK WISATA
	3. Upacara Aruh Ganal	Kabupaten HSS	Aruh Ganal artinya Kenduri Besar, dilaksanakan secara besar-besaran oleh seluruh warga kampung dan dihadiri oleh warga kampung lainnya, dalam rangka ungkapan rasa syukur atas karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sekaligus memohon hasil tahun ke depan mendapat panen yang melimpah, dijauhkan dari bahaya dan makhluk perusak tanaman
	4. Seni Tradisional	Kabupaten HSS	-
	5. Lomba Jukung Tradisional (Perahu Naga)	Kecamatan Daha Selatan	-
	6. Olahraga Tradisional	Kabupaten HSS	-
	7. Kalang Hadangan	Kecamatan Daha Utara	-
	<b>D. Minat Khusus</b>		
	1. Tracking dan Arung Jeram (bamboo rafting)	Kec. Loksado	Jelajah dan rafting khusus menggunakan rakit bambu menelusuri keindahan di sepanjang sungai Amandit
	2. Tracking dan Perahu/Jukung	Sei Negara Kec. Daha Selatan	Jelajah di area rawa dengan menggunakan perahu/jukung
	3. Kawasan Perikanan/ Pemancingan	Kec.Kandangan/ Daha Utara/Selatan/ Kalumpang	Minat khusus wisata pemancingan di area rawa
	4. Kerbau Rawa	Desa Pandak Daun Kec. Daha Utara	Obyek wisata satwa kerbau yang ditenakkan masyarakat sehari-hari berenang di rawa-rawa. Obyek wisata ini dapat ditemui di sebuah danau kecil di Desa Pandak Daun, sekitar 4 Km dari Nagara. Kawasan tersebut juga merupakan kawasan pemancingan tradisional, lahan terbuka yang sunyi dapat memunculkan inspirasi. Untuk mencapai ke tempat tersebut, sangatlah mudah dengan nail( klotok hanya membutuhkan waktu ± 20 menit. Waktu yang tepat pergi kesana adalah jam 6 sore. Keistimewaan dari pengem-bangbiakan Kerbau Kalang ini adalah kandang-kandanganya dibangun diatas tumpukan batangbatang yang tersusun menyilang rncapai ketinggian 2-3 meter
	5. Areal Hutan Kota di Komplek RSUD	Kec. Kandangan	Merupakan area hijau terbuka yang berpotensi untuk dikembangkan sebaaaai RTH Publik kota
<b>DTW Sejarah Perjuangan</b>	1. Monumen 17 Mei 1949	Kec. Kandangan	Monumen bernilai sejarah perjuangan nasional
	2. Gedung Juang	Desa Hamalau Kec Padang Batung	Museum sejarah Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan
	3. Situs Benteng Madang	Desa Madang Kec. Padang Batung	Benteng bersejarah dengan anak tangga lebih dari 400 buah dan dapat dijelajahi dengan menggunakan mobil dengan jarak ± 8 Km dari Kota Kandangan
	4. Situs Amuk Hantarukung	Desa Hantarkurun Kecamatan Simpui	-
	5. Makam Tumpang Talu	Kandangan Barat Kecamatan Kandangan	-
	6. Kubur Anam	Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya	-
	7. Makam Singakarsa	Jl. Singakarsa Kec. Kandangan	-
	8. Makam Aluh Idut	Jl. Aluh Idut Kec. Kandangan	-

<b>JENIS DTW</b>	<b>NAMA OBYEK</b>	<b>LOKASI</b>	<b>DAYA TARIK WISATA</b>
	9. Makam Ning Bulang	Desa Hantarkurung Kecamatan Simpung	-
	10. Tugu Peringatan Penyusunan Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV	Kecamatan Telaga Langsat	-
	11. Tugu Peringatan Peristiwa Pemencaran Pasukan ALRI Divisi IV 10 Mei 1949	Pagat Batu Desa Batu Bini Kec. Padang Batung	
	12. Tugu Gencatan Senjata Antara Gubernur Tentara ALRI Divisi IV dengan NICA	Kecamatan Sungai Raya	-
	13. Monumen Mandapai	Desa Mandapai Kec. Padang Batung	Upacara HUT ke IV RI 17 Agustus 1949
	14. Tugu Palagan Negara 2 Januari 1949	Desa Hakurung Kec. Daha Utara	-
	15. Tugu Garis Demarkasi	Desa Karang Jawa Kec. Padang Batung	-
	16. Tugu Peringatan Markas Daerah Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan	Desa Jelatang kec. Padang Batung	-
<b>DTW Religi</b>	1. Mesjid Su'ada	Desa Wasah Hilir Kec. Simpung	Wisata area masjid
	2. Makam Keramat Datu Taniran	Desa Taniran Kec. Angkinang	Makam bersejarah, berjarak ± 8 km dari ibukota kabupaten; nama sebenarnya dari obyek ini adalah Makam Al Allamah Syekh H. Sa'dudin.
	3. Makam Keramat Datu Ahmad	Desa Balimau, Kec. Kalumpang	Makam bersejarah; berjarak ± 15 km dari ibukota kabupaten; nama sebenarnya dari obyek ini adalah Makam Al Allamah Syekh Ahmad
	4. Makam Keramat Datu H. Rais	Desa Loknyiur Kec. Angkinang	Makam keramat
	5. Makam Tumpang Talu	Desa Hantarukung	Makam bersejarah; berjarak ± 7 km dari ibukota kabupaten; meliputi Makam Kusuma Bangsa Bukhari, H. Matamin, Landuk dan Pangeran Yuya
	6. Makam H.M.Said	Desa Simpung Kec. Simpung	Makam keramat
	7. Makam Datu H. Abbas	Desa Simpung Kec. Simpung	Makam keramat
	8. Kubah Datu Durabu	Desa Kalumpang Kec. Kalumpang	Makam keramat
	9. Makam Datu Daha	Kecamatan Daha Utara	Makam keramat
	10. Makam Surgi Tuan	Desa Pasungkan Kec. Daha Utara	Makam keramat
	11. Makam Habib Ibrahimi	Desa Mandala Kec. Daha Utara	Makam keramat
	12. Makam Tuan Guru Haji Ali	Desa Pandan Sari Kec. Daha Selatan	Makam keramat
	13. Makam Habib Lumpangi	Desa Laumpangi Kec. Loksado	Makam keramat

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. HSS 2012

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan baru tersedia 12 buah hotel yang terdapat di Kecamatan Loksado 4 buah hotel dan jumlah kamarnya 58 dan di Kecamatan Kandangan 8 buah hotel dan jumlah kamarnya 105 buah (Tabel 2.53)

**Tabel 2.53.**  
**Banyaknya Hotel Dan Jumlah Kamar Menurut Kecamatan Tahun 2012**

Kecamatan	Hotel	Jumlah kamar
Loksado	4	58
Kandangan	8	105
Jumlah	12	163

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. HSS 2012

Jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan setiap tahunnya selalu menunjukkan kenaikan, dari data tahun 2008 jumlah wisatwan yang berkunjung sebanyak 17.048 orang dan terakhir untuk tahun 2012 bertambah menjadi 41.666 orang (lihat tabel 2.54). Perkembangan jumlah kunjungan tersebut tentunya harus diiringi pula dengan peningkatan fasilitas penunjang lainnya antara lain berupa hotel serta sarana transportasi yang memadai.

**Tabel 2.54.**  
**Banyaknya Kunjungan Wisatawan ke Kawasan Loksado & Objek Air Panas Tanuhi**

No	Bulan	Jumlah														
		2008			2009			2010			2011			2012		
		Wisman	Wisnus	Jumlah												
1	Januari	-	2.233	2.233	-	4.418	4.418	6	5.294	5.300	4	5.696	5.700	8	5.746	5.754
2	Februari	-	800	800	5	1.828	1.833	2	2.725	2.727	2	2.798	2.800	4	2.818	2.822
3	Maret	6	1.166	1.172	11	1.989	2.000	12	1.988	2.000	6	2.794	2.800	5	2.821	2.826
4	April	-	300	300	5	995	1.000	10	3.190	3.200	7	2.393	2.400	9	2.416	2.425
5	Mei	-	1.933	1.933	3	1.163	1.166	4	3.896	3.900	2	4.398	4.400	7	4.441	4.448
6	Juni	-	600	600	8	8.058	8.066	27	2.673	2.700	20	2.980	3.000	18	3.009	3.027
7	Juli	-	1.266	1.266	23	3.410	3.433	24	2.276	2.300	18	4.082	4.100	22	4.122	4.144
8	Agustus	-	700	700	20	1.113	1.133	-	2.000	2.000	2	498	500	6	508	514
9	September	-	800	800	5	1.028	1.033	3	14.097	14.100	4	8.596	8.600	4	8.681	8.685
10	Oktober	-	6.266	6.266	1	7.632	7.633	9	1.291	1.300	5	1.195	1.200	7	1.305	1.312
11	November	3	930	933	25	1.175	1.200	7	3.293	3.300	3	3.497	3.500	1	3.847	3.848
12	Desember	-	45	45	10	6.490	6.500	2	2.398	2.400	5	1.695	1.700	6	1.855	1.861
	JUMLAH	9	17.039	17.048	116	39.299	39.415	106	45.121	45.227	78	40.622	40.700	97	41.569	41.666

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. HSS 2012

#### 2.4.6. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

##### A. Sektor Energi

Dalam sektor energi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai potensi yang besar dalam penyediaan tenaga listrik terutama yang berasal dari tenaga air dan tenaga surya. Dari tahun

2007 hingga 2011 telah dikembangkan pembangkit listrik tenaga air mikro hidro dan tenaga surya di beberapa lokasi sebagaimana pada tabel 2.56. Dengan pembangunan PLTMH dan PLTS tersebut diharapkan dapat membantu menerangi desa-desa terpencil yang belum mendapatkan pelayanan listrik dari PLN.

**Tabel. 2.55.**  
**Lokasi, Jumlah dan Daya Terpasang PLTMH dan PLTS**  
**Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007-2011**

NO	JENIS	LOKASI	KAPASITAS	SUMBER DANA	TAHUN PEMBANGUNAN
<b>A</b>	<b>PLTMH</b>				
1	PLTMH Paniungan	Ds. Malilingin Kec. Padang Batung	5 KVA	APBD	2007
2	PLTMH Ulang	Ds. Ulang Kec. Loksado	40 KVA	APBN & APBD	2008
3	PLTMH Malinau	Ds. Malinau Kec. Loksado	10 KVA	APBD	2008
4	PLTMH Haratai I	Ds. Haratai Kec. Loksado	20 KVA	APBN	2009
5	PLTMH Haratai II	Ds. Haratai Kec. Loksado	7 KVA	LSM	2009
5	PLTMH Datar Kedayang	Ds. Haratai Kec. Loksado	5 KVA	Swadaya Masyarakat	2011
<b>B</b>	<b>PLTS</b>				
1	PLTS	Ds. Badaun Kec. Daha Barat	20 x 50 Watt	APBN	2007
2	PLTS	Ds. Siang Gantung Kec. Daha Barat	15 x 50 Watt	APBN	2007
3	PLTS	Ds. Bajayau Lama Kec. Daha Barat	13 x 50 Watt	APBN	2007
4	PLTS	Ds. Hulu Banyu Kec. Loksado	20 x 50 Watt	APBN	2007
5	PLTS	Ds. Tumingki Kec. Loksado	42 x 50 Watt	APBN	2007
6	PLTS	Ds. Loklahong Kec. Loksado	15 x 50 Watt	APBN	2007
7	PLTS	Ds. Halunuk Kec. Loksado	15 x 50 Watt	APBN	2007
8	PLTS	Ds. Kamawakan Kec.	15 x 50 Watt	APBN	2007

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KAPASITAS</b>	<b>SUMBER DANA</b>	<b>TAHUN PEMBANGUNAN</b>
		Loksado			
9	PLTS	Ds. Malinau Kec. Loksado	15 x 50 Watt	APBN	2007
10	PLTS	Ds. Malinau Kec. Loksado	16 x 50 Watt	APBN	2007
11	PLTS	Ds. Muning Dalam Kec. Daha Selatan	29 x 50 Watt	APBN	2007
12	PLTS	Ds. Pantai Ulin Kec. Simpur	62 x 50 Watt	APBN	2009
13	PLTS	Ds. Muning Dalam Kec. Daha Selatan	62 x 50 Watt	APBN	2009
14	PLTS	Ds. Baru Kec. Daha Barat	10 x 50 Watt	APBN	2009
15	PLTS	Ds. Bajayau Tengah Kec. Daha Barat	11 x 50 Watt	APBN	2009
16	PLTS	Ds. Bajayau Kec. Daha Barat	7 x 50 Watt	APBN	2009
17	PLTS	Ds. Bajayau Lama Kec. Daha Barat	16 x 50 Watt	APBN	2009
18	PLTS	Ds. Siang Gantung Kec. Daha Barat	11 x 50 Watt	APBN	2009
19	PLTS	Ds. Hamak Utara Kec. Telaga Langsat	15 x 50 Watt	APBN	2009
20	PLTS	Ds. Hulu Banyu Kec. Loksado	39 x 50 Watt	APBN	2009
21	PLTS	Ds. Tumingki Kec. Loksado	80 x 50 Watt	APBN	2009
22	PLTS	Ds. Pantai Langsat Kec. Loksado	22 x 50 Watt	APBN	2009
23	PLTS	Ds. Ulang Kec. Loksado	7 x 50 Watt	APBN	2009
24	PLTS	Ds. Bago Tanggul Kec. Kalumpang	69 x 50 Watt	APBN	2009
25	PLTS	Ds. Malilingin Kec. Padang Batung	69 x 50 Watt	APBN	2009

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten HSS

## B. Sumber Daya Mineral

Pertambangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah ada yang diproduksi dan belum diproduksi. Produksi batubara pada tahun 2007 baru 159.099 M ton kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 3.277.947,68 M ton (tabel 2.56).

Produksi bahan tambang lainnya berupa galian berupa tanah, pasir pasang, kerikil, batu kali, batu pecah, sirtu, batu gunung, dan pasir urug. Produksi tambang/ galian terus mengalami peningkatan, yang meningkat signifikan, sedangkan bahan tambang/ galian lainnya kenaikan/penurunannya berfluktuasi sebagaimana terlihat pada tabel 2.56

**Tabel 2.56.**  
**Produksi Bahan Tambang Dan Galian**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Tahun 2007- 2012 (M3)**

No	Jenis Tambang / galian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Tanah	122.205	77.079	75.034	36.340,81	128.2212.23	109.207.46
2	Pasir pasang	25.385	30.667	35.446	20.053,23	14.551.96	26.052.54
3	Kerikil	23.821	38.740	40.470	11.784,50	13.960.50	4.318.67
4	Batu kali	11.528	21.270	16.882	7.177,00	11.915.00	12.383.40
5	Batu pecah	10.118	12.002	1.554	3.213,26	3.231.64	37.252.70
6	Sirtu	60.560	67.642	43.063	23.344,40	43.466.38	44.021.27
7	Batu gunung	4.275	8.798	3.817	3.012,50	1.157.75	2.003.74
8	Pasir urug	8.834	4.799	5.098	2.296,24	4.692.68	2.642.00
9	Batu bara (M ton)	159.099	640.688	692.275	513.196,10	3.277.947.68	3.277.947.68

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. HSS

### 2.2.2. Listrik

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pelayanan listrik di kelola oleh PLN dan non PLN. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2011 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat jumlah pelanggan listrik PLN tercatat tersebar 43.062 pelanggan dengan daya tersambung 28.588.040 VA (BPS Kab. HSS, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2012). Distribusi pelayanan listrik di beberapa kecamatan telah mencapai daerah pedesaan melalui proyek listrik masuk desa. Peningkatan pelayanan listrik nampak selalu mengalami kenaikan baik jumlah pelanggan maupun distribusi jaringannya. Sumber penerangan yang terbesar dari listrik PLN (70,03%), tetapi yang masih banyak warga yang belum menikmati listrik yaitu sebesar 10,61% (tabel 2.57). Kemudian data jumlah pelanggan PLN, Kwh terjual dan daya tersambung terus mengalami kenaikan (lihat tabel

2.58) yang berarti nanti jumlah warga yang tidak menikmati listrik akan makin sedikit.

**Tabel 2.57.**  
**Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Penerangan**  
**Tahun 2010**

Sumber penerangan	Persentase (%)
Listrik PLN	70,03
Listrik PLN tanpa meteran	17,50
Listrik non PLN	1,86
Bukan listrik	10,61
Jumlah	100,00

Sumber : BPS Kabupaten HSS, SP 2011.

**Tabel 2.58.**  
**Data Jumlah Pelanggan PLN, Kwh Terjual dan Daya Tersambung**  
**Tahun 2008-2012**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2008	2009	2010	2011	2012
A.	RAYON KANDANGAN						
1	Pelanggan	Plg	24,551	25,075	27,659	29,384	31,851
2	Kwh Terjual	Kwh	28,364,770	31,616,499	33,290,894	36,220,707	40,719,448
3	Daya Tersambung	VA	15,836,875	16,072,675	17,626,525	18,521,525	29,208,825
B.	RAYON DAHA						
1	Pelanggan	Plg	12,582	12,655	13,031	13,504	14,383
2	Kwh Terjual	Kwh	11,598,254	11,961,013	12,567,254	13,202,365	14,675,790
3	Daya Tersambung	VA	7,559,860	7,592,710	7,907,960	8,549,560	9,372,710

Sumber: PLN Kandangan (2012).

### **BAB III**

## **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan dengan mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perundangan- perundangan dan peraturan- peraturan yang mendasari pengelolaan Keuangan Daerah tersebut memberikan tekanan perlunya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara garis besar merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas/ kemampuan Keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka yang menjadi unit analisisnya adalah APBD. APBD merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJM, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan yang dilaksanakan melalui Program dan kegiatan pada SKPD selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan berfungsi untuk mencari kapasitas riil yang digunakan untuk membiayai pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Penghitungan kapasitas riil dihitung dengan mempertimbangkan terlebih dahulu kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Dalam upaya mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu dicermati kondisi kinerja Keuangan Daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Kinerja pelaksanaan APBD dapat diketahui dari rencana anggaran dan realisasinya, baik dari aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berdasarkan data tahun 2008 s/d tahun 2012 rencana anggaran dan realisasi dapat dijelaskan melalui penghitungan kinerja pelaksanaan pendapatan, kinerja pelaksanaan belanja, kinerja pelaksanaan pembiayaan dan neraca daerah.

#### **a. Kinerja Pelaksanaan Pendapatan**

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut. Pendapatan daerah dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan, yang terdiri dari Bagi hasil Pajak, Bagi hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Perimbangan ini sebenarnya diluar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena pengalokasiannya tergantung dari Pemerintah Pusat.

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan daerah lain, bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Lain-lain Daerah yang Sah ini juga diluar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sumber-sumber pendapatan daerah merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Disamping berasal dari sumber-sumber pendapatan di atas, pembangunan di daerah didukung dengan dana yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana dekosentrasi dan dana tugas pembantuan yang disalurkan melalui Kementerian dan Provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah guna memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai hakikat pemerintahan.

**Tabel 3.1.**  
**Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Tahun 2008-2012**  
**(dalam juta dan persen)**

Pendapatan	Realisasi					Pertumbuhan (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	
Pendapatan Asli Daerah (Kontribusi Terhadap APBD)	25.942,78 (5,67)	28.152,51 (5,56)	27.931,13 (5,57)	41.712,78 (6,87)	45.107,44 (5,75)	16,30
Dana Perimbangan (Kontribusi Terhadap APBD)	401.076,38 (87,73)	435.616,66 (87,64)	420.233,80 (83,76)	480.361,01 (79,10)	611.889,69 (77,00)	11,69
Lain-lain pendapatan yang sah (Kontribusi Terhadap APBD)	30.144,12 (6,60)	33.307,48 (6,80)	53.572,28 (10,67)	85.217,19 (14,03)	136.984,47 (17,25)	47,79
Jumlah	457.163,28 (100,00)	497.076,65 (100,00)	501.737,21 (100,00)	607.290,98 (100,00)	793.981,60 (100,00)	15,36

Sumber : DPPKAD Kabupaten HSS 2008 — 2012, Diolah kembali

Dalam kurun waktu lima tahun, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam pencapaian pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari pendapatan daerah pada tahun 2008 sebesar Rp 457.163.280.000,- meningkat sebesar Rp 793.981.600.000,- pada tahun 2012, atau mengalami persentase pertumbuhan pendapatan rata-rata 15,36% per tahun (lihat tabel 3.1).

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 5 tahun (2008-2012) memiliki pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 16,30% dan kontribusinya terhadap APBD pada tahun 2008 sebesar 5,67% dan menjadi 5,75% pada tahun 2012. Kontribusi dana perimbangan terhadap APBD pada tahun 2008 sebesar 87,73% dan ada kecendrungan menurun terus menjadi 77,00% pada tahun 2012, dan Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2008 sebesar 6,60% dan pada tahun 2012 menjadi sebesar 17,25% dari total pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (lihat tabel 3.1).

Kinerja dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari indikator Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah pada tahun 2008 sebesar Rp 25.942.780.000,- meningkat menjadi Rp 45.107.440.000,- pada tahun 2012, atau mengalami peningkatan sebesar 16,30% per tahun pada periode 2008- 2012 (lihat tabel 3.1).

Pencapaian realisasi penerimaan PAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode 2008 s/d 2012 tidak pernah mencapai 100% dari yang ditargetkan, yaitu antara kisaran 75,08% (2010) dan paling tinggi 94,55% (2012) (lihat tabel 3.2). Masih rendahnya tingkat pencapaian ini bisa dikatakan bahwa para SKPD yang dibebani untuk mengelola penerimaan PAD belum optimal, atau bisa juga penetapan targetnya terlalu tinggi.

**Tabel: 3.2**  
**Capaian Pendapatan Asli Daerah**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008-2012**

Tahun	Anggaran Setelah perubahan (000.000)	Realisasi (000.000)	Capaian (%)
2008	27.530,70	25.942,78	94,23
2009	33.851,40	28.152,51	83,16
2010	37.204,05	27.931,13	75,08
2011	47.191,25	41.712,78	88,39
2012	48.278,64	45.107,44	94,55

Sumber: DPPKAD Kabupaten HSS 2008 — 2012, Diolah Kembali

Penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2012 sebesar Rp 4.866.960.000,- angka ini meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian pajak daerah pada tahun 2008 sebesar Rp 2.453.760.000,- , dengan demikian terjadi peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2012 mencapai 24,59% rata- rata per tahun.

Penerimaan retribusi daerah dalam kurun waktu lima tahun fluktuasi. dari tahun 2008 retribusi daerah sebesar Rp 6.753.560.000,- dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp 7.403.060.000,-. Dengan demikian, peningkatan retribusi daerah dari tahun 2008 - 2012 mencapai rata- rata mencapai 2,40% per tahun. Naiknya penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut dapat dilihat secara positif sebagai keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim usaha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2008 sebesar Rp 2.194.650.000,- dan meningkat menjadi Rp 3.836.460.000,- pada tahun 2012, atau mengalami peningkatan rata- rata sebesar 18,70% dari kurun waktu 2008-2012.

Penerimaan dari Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2008 sebesar Rp 14.540.810.000,- menjadi Rp 29.000.960.000,- pada tahun 2012, atau mengalami peningkatan sebesar rata- rata sebesar 24,86% per tahun.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi penerimaan Dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan peningkatan. Keadaan ini dapat dilihat dari realisasi dana perimbangan tahun 2008 sebesar Rp

401.076.380.000,- meningkat menjadi Rp 611.889.700.000,- pada tahun 2012, atau mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 11,69% (periode 2008- 2012) (lihat tabel 3.1). Capaian dari komponen dana perimbangan tahun 2008 - 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi penerimaan dana perimbangan pada periode 2008-2012 mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 11,69% (tabel 3.1). Dana perimbangan yang bersumber dari hasil pajak dan bukan pajak pada tahun 2008 Sebesar Rp 58.019.520.000,- naik menjadi Rp 167.465.390.000,- pada tahun 2012, atau mengalami peningkatan rata-rata per tahun 47,16%, kemudian bersumber dari Dana Alokasi Umum pada tahun 2008 sebesar Rp 293.908.860.000,- naik menjadi Rp 404.135.720.000,- juta pada tahun 2012, atau mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 9,38%. Dana alokasi khusus pada tahun 2008 Sebesar Rp 49.148.000.000,- turun menjadi Rp 40.288.580.000,- pada tahun 2012. Capaian realisasi penerimaan bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak terhadap target yang ditetapkan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari 17,85% (2008) menjadi 151,74% (2012), capaian realisasi penerimaan dana alokasi umum dan dana khusus pada periode yang sama rata-rata mencapai 100% (tabel 3.3)

**Tabel: 3.3**  
**Realisasi Dana Perimbangan**  
**Tahun 2008-2012**

No	Uraian	Tahun	Anggaran (000.000)	Realisasi (000.000)	Capaian (%)
1	Bagi Hasil Hasil Bukan Pajak	2008	49.230,30	58.019,52	17,85
		2009	74.972,52	88.049,09	17,40
		2010	89.082,26	82.453,54	92,55
		2011	89.413,87	119.258,1	133,38
		2012	110.358,4	167.465,3	151,74
2	Dana Alokasi Umum	2008	293.908,8	293.908,8	100,00
		2009	294.246,5	294.246,5	100,00
		2010	298.470,9	298.470,9	100,00
		2011	324.267,5	324.267,5	100,00
		2012	404.135,7	404.135,7	100,00
3	Dana Alokasi	2008	49.148,00	49.148,00	100,00
		2009	53.321,00	53.321,00	100,00
		2010	39.309,30	39.309,30	100,00
		2011	36.846,00	36.835,40	99,97
		2012	40.288,58	40.288,58	100,00

4	Jumlah	2008	392.287,1	401.076,3	102,24
		2009	422.540,0	435.616,6	103,09
		2010	426.862,5	420.233,8	98,45
		2011	450.527,3	480.361,0	106,62
		2012	554.782,7	611.889,7	110,29

Sumber: DPPKAD Kabupaten HSS 2008 – 2012, Diolah kembali

Realisasi pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah dalam kurun waktu 2008- 2012 mengalami peningkatan sebesar 47,79% rata- rata per tahun (Tabel 3.1). Termasuk dalam kelompok pendapatan ini adalah pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya, dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum dari provinsi atau pemda lainnya, dan dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah serta pendapatan lainnya. capaian dari komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini.

**Tabel 3.4.**  
**Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**  
**Tahun 2008-2012**

No	Uraian	Tahun	Anggaran (000.000)	Realisasi (000.000)	Capaian (%)
1	Pendapatan Hibah	2008	4.941,96	2.615,32	52,92
		2009	5.608,82	1.798,43	32,06
		2010	4.695,68	2.685,51	57,19
		2011	4.120,72	3.077,86	74,69
		2012	2.580,00	5.778,31	223,97
2	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	2008	18.625,00	19.077,43	102,43
		2009	20.655,00	21.440,92	103,80
		2010	25.128,92	26.854,44	106,87
		2011	39.628,27	30.749,87	77,60
		2012	67.512,08	80.425,95	119,13
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2008	9.146,00	8.451,37	92,41
		2009	3.190,00	8.779,13	275,21
		2010	23.422,49	23.302,41	99,49
		2011	49.339,48	49.339,48	100,00
		2012	50.280,21	50.280,21	100,00
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	2008	-	-	-
		2009	1.289,00	1.289,00	100,00
		2010	730,00	729,9	99,99
		2011	2.049,98	2.049,98	100,00
		2012	500,0	500,0	100,00
5	DBH SDA Pertambangan Umum dari Propinsi atau Pemda lainnya	2008	-	-	-
		2009	-	-	-
		2010	-	-	-
		2011	-	-	-
		2012	-	-	-

No	Uraian	Tahun	Anggaran (000.000)	Realisasi (000.000)	Capaian (%)
6	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pemb.Daerah	2008	-	-	-
		2009	-	-	-
		2010	-	-	-
		2011	-	-	-
		2012	-	-	-
7	Jumlah	2008	32.712,96	30.144,12	92,15
		2009	30.752,82	33.307,48	108,31
		2010	53.977,09	53.572,28	99,25
		2011	95.138,44	85.217,19	89,57
		2012	120.872,29	136.984,47	113,33

Sumber: DPPAD Kabupaten HSS 2008—2012, Diolah kembali

### **b. Kinerja Pelaksanaan Belanja**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertumpu pada alokasi anggaran yang berazaskan keadilan, dimana keadilan merupakan misi utama dalam melaksanakan berbagai kebijakan, Khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran belanja telah dilakukan dengan baik. Selain itu dalam pengelolaan belanja daerah juga dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, hal ini dapat dilihat dari manfaat anggaran yang dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

**Tabel : 3.5**  
**Perkembangan Total Belanja**  
**Tahun Anggaran 2008-2012**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b> (000.000)	<b>Realisasi</b> (000.000)	<b>Capaian (%)</b>
2008	529.564,57	469.680,80	88,69
2009	547.029,67	487.773,66	89,17
2010	569.399,05	499.541,68	87,73
2011	635.373,01	554.084,59	87,21
2012	803.535,66	722.208,83	89,88

Sumber: DPPKAD Kabupaten HSS 2008 – 2012, Diolah Kembali

Realisasi belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2008 sebesar Rp 469.680.800.000,- kemudian pada tahun 2012 naik menjadi Rp 722.208.830.000,- atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11,80% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat penyerapan anggaran belanja daerah secara optimal. Jika dilihat dari pencapaian realisasi penerimaan terhadap target yang telah ditetapkan pada periode 2008 s/d 2012 dalam kisaran 87,21% - 89,88% (lihat tabel 3.5).

Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2008 sebesar Rp 236.839.610.000,- kemudia naik menjadi Rp 407.312.720.000,- pada tahun 2012 atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar 17,99%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat penyerapan Anggaran belanja operasi secara optimal. Jika dilihat dari penggunaannya, maka terdapat peningkatan disetiap tahunnya dan pencapaian realisasi penerimaan terhadap target yang telah ditetapkan terlihat sangat bervariasi, ini dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut.

**Tabel 3.6.**  
**Belanja Tidak Langsung**  
**Tahun Anggaran 2008-2012**

No	Uraian	Tahun	Anggaran setelah Perubahan (000.000)	Realisasi (000.000)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	2008	221.178,01	209.307,26	94,63
		2009	237.946,68	235.611,10	99,02
		2010	301.247,93	287.864,87	95,56
		2011	346.650,27	321.380,88	92,71
		2012	393.287,38	357.820,88	90,98
2	Belanja Hibah	2008	6.733,89	4.902,17	72,80
		2009	26.268,60	26.021,74	99,07
		2010	6.929,00	6.762,91	97,60
		2011	5.829,31	4.722,31	81,01
		2012	22.556,79	21.493,79	95,28

No	Uraian	Tahun	Anggaran setelah Perubahan (000.000)	Realisasi (000.000)	Capaian (%)
3	Belanja Bantuan Sosial	2008	18.657,26	11.763,66	63,05
		2009	22.409,20	14.198,91	63,36
		2010	18.058,04	10.975,32	60,78
		2011	21.223,00	15.194,85	71,60
		2012	4.845,01	4.669,86	96,39
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	2008	8.340,80	8.277,65	99,24
		2009	6.249,35	6.182,55	98,93
		2010	12.594,13	12.564,33	99,76
		2011	12.640,73	12.546,68	99,26
		2012	19.120,00	18.915,54	98,93
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa	2008	2.607,45	2.579,37	98,92
		2009	5.799,47	5.404,23	93,18
		2010	2.669,20	2.490,83	93,32
		2011	2.569,20	2.401,39	93,47
		2012	5.350,00	4.287,74	80,14
6	Belanja Tidak terduga	2008	1.502,00	9,49	0,63
		2009	1.700,00	316,40	18,61
		2010	1.858,05	995,53	53,58
		2011	1.000,00	416,02	41,60
		2012	3.000,00	124,91	41,64
7	Jumlah Belanja Tidak Langsung	2008	259.019,41	236.839,61	91,44
		2009	300.373,30	287.734,93	95,79
		2010	343.356,35	321.653,77	93,67
		2011	389.912,51	356.662,13	91,47
		2012	448.159,18	407.312,72	90,89

Sumber: DPPKAD Kabupaten HSS 2008 – 2012

Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2008 sebesar Rp 232.841.190.000,- kemudian naik menjadi Rp 314.896.110.000,- pada tahun 2012 atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8,81% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat efisiensi penggunaan anggaran belanja modal. Sedangkan jika dilihat dari segi penggunaannya maka terdapat peningkatan dan pencapaian realisasi penerimaan terhadap target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3.7 di halaman berikut.

**Tabel 3.7.**  
**Belanja Langsung**  
**Tahun Anggaran 2008-2012**

No	Uraian	Tahun	Anggaran setelah Perubahan (000.000)	Realisasi (000.000)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	2008	15.600,34	11.643,89	74,64
		2009	16.540,95	12.737,45	77,01
		2010	16.170,03	13.706,16	84,76
		2011	24.282,86	21.091,71	86,86
		2012	28.825,68	23.686,01	82,17
2	Belanja Barang dan Jasa	2008	76.192,16	63.563,78	83,43
		2009	73.929,00	62.659,28	84,76
		2010	65.742,83	51.147,99	77,80
		2011	75.708,74	61.591,56	81,35
		2012	104.337,96	84.929,00	81,40
3	Belanja Modal	2008	178.752,66	157.563,78	88,15
		2009	156.249,43	124.642,00	79,77
		2010	144.129,84	113.033,75	78,42
		2011	145.468,89	114.739,20	78,87
		2012	222.212,85	206.281,10	92,83
	Jumlah Belanja Langsung	2008	270.545,16	232.841,19	86,06
		2009	246.719,38	200.038,73	81,08
		2010	226.042,71	177.887,91	78,70
		2011	245.460,50	197.422,47	80,43
		2012	355.376,48	314.896,11	88,61

Sumber: DPPKAD Kabupaten HSS 2008 — 2012, Diolah Kembali

### **c. Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan**

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA Tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan kembali atas investasi jangka panjang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari SILPA tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dan pemberian pinjaman daerah.

Tujuan dan arah pembiayaan daerah adalah untuk menutup defisit penerimaan daerah ataupun mempergunakan surplus anggaran untuk tujuan yang produktif. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode tahun anggaran 2008-2012 dapat mengelola pembiayaan secara efektif dan efisien sehingga pembiayaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah. Adapun anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada periode 2008- 2012 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini.

**Tabel 3.8.**  
**Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2008-2012**

No	Uraian	Tahun	Anggaran setelah perubahan (000.000)	Realisasi (000.000)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2008	71.547,50	71.620,50
		2009	57.858,97	259,33
		2010	57.380,40	5.364,50
		2011	52.015,94	52.015,94
		2012	96.120,33	96.120,33
2	Pencairan Dana	2008	5.000,00	5.000,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2008	-	-
		2011	0,00	383,83
		2012	1.981,63	2.310,34
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2008	6.531,36	0
		2009	13.404,13	0
		2012	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2008	650,00	440,00
		2009	4.118,00	750,32
		2010	3.200,00	690,00
		2011	1.725,00	1.498,65
		2012	4.850,00	4.137,50
6	Penerimaan Piutang	2008	224,90	0
		2009	224,90	0
		2012	0	0
7	Jumlah	2008	83.953,76	77.060,50
		2009	75.606,00	1.009,65
		2010	60.580,00	6.054,50
		2011	53.740,94	53.898,44
		2012	102.951,95	102.568,17

Sumber: DPPKAD Kabupaten HSS 2008-2012, Diolah Kembali

Realisasi pengeluaran pembiayaan selama tahun 2008-2012 juga sebagian besar berasal dari Silpa tahun berkenaan, sebagian lagi berasal dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selisih dari penerimaan pembangunan dengan pengeluaran pembiayaan adalah pembiayaan netto. Realisasi pembiayaan netto pada tahun 2008 mengalami surplus sebesar Rp 70.155.500.000,-, kemudian pada tahun 2009 mengalami defisit sebesar Rp 9.302.990.000,-, tahun 2010 mengalami defisit sebesar Rp 2.195.500.000,-, tahun 2011 mengalami surplus sebesar Rp 42.913.940.000,- dan pada tahun 2012 mengalami surplus sebesar Rp 79.696.670.000,-. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2008-2012 sangat tergantung pada Silpa baik Silpa tahun lalu maupun tahun berkenaan, adapun realisasi pengeluaran pembiayaan daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut.

**Tabel 3.9.**  
**Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2008-2012**

No	Uraian	Tahun	Target (000.000)	Realisasi (000.000)
1	Pembentukan dana cadangan	2011	2.000,00	2.000,00
		2012	5.000,00	5.000,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2008	6.420,00	6.405,00
		2009	9.357,63	8.607,63
		2010	7.500,00	7.500,00
		2011	7.500,00	7.500,00
		2012	13.500,00	13.500,00
3	Pemberian Pinjaman Daerah	2008	500,00	500,00
		2009	6.300,00	750,00
		2010	1.725,00	1.484,50
		2011	1.725,00	4.371,50
4	Jumlah	2008	6.920,00	6.905,00
		2009	15.657,63	10.312,63
		2010	9.225,00	8.250,00
		2011	11.225,00	10.984,50
		2012	23.350,00	22.871,50

Sumber: DPPKAD Kabupaten HSS 2008 — 2012, Diolah Kembali

#### d. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu tahun 2008-2012 disajikan pada Tabel 3.10 berikut.

**Tabel 3.10.**  
**Neraca Tahun Anggaran 2008-2012**

(000.000)

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1</b>	<b>ASET</b>					
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>					
1.1.1	Kas	57.723,14	57.492,08	52.028,08	96.121,60	151.469,88
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Piutang	11.616,78	13.019,25	15.742,51	31.451,61	18.018,79
1.1.4	Piutang Lainnya	5.864,66	3.369,50	874,73	1.688,57	2.674,70
1.1.5	Persediaan	4.160,51	5.492,20	8.534,36	7.228,39	7.747,11
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>79.365,09</b>	<b>79.373,01</b>	<b>77.179,68</b>	<b>136.490,17</b>	<b>179.910,47</b>
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>					
1.2.1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Investasi Permanen	31.824,64	40.432,28	47.932,28	55.684,37	70.870,85
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>31.824,64</b>	<b>40.432,28</b>	<b>47.932,28</b>	<b>55.684,37</b>	<b>70.870,85</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>					
1.3.1	Tanah	215.188,65	220.149,67	227.218,86	237.350,46	334.388,45
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	87.535,56	105.543,99	133.682,86	132.635,80	154.536,41
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	233.350,00	264.976,01	332.784,89	336.682,64	459.434,43
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	396.525,55	463.965,96	482.441,96	527.438,93	606.925,17

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	13.803,99	16.438,32	22.639,51	21.642,47	25.650,12
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	736,68	38.348,55	1.476,01
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>946.403,75</b>	<b>1.071.073,94</b>	<b>1.199.504,76</b>	<b>1.294.098,87</b>	<b>1.582.410,59</b>
<b>1.4</b>	<b>DANA CADANGAN</b>					
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.326,75
	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.326,75</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>					
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	476,9	211,92	211,92	211,92	220,07
1.5.3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	495,93
1.5.5	Aset Lain- Lain	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>550,09</b>	<b>1.211,92</b>	<b>211,92</b>	<b>211,92</b>	<b>716,00</b>
<b>A</b>	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.058.143,57</b>	<b>1.192.091,1</b>	<b>1.324.828,63</b>	<b>1.488.485,32</b>	<b>1.841.234,66</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>					
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Utang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Pedapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	178,53	0,00	0,00	1.129,20	342,70
2.1.9	Utang Retensi	0,00	0,00	44,07	0,00	352,70
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>178,53</b>	<b>0,28</b>	<b>44,07</b>	<b>1.129,20</b>	<b>352,70</b>
<b>2.2</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>178,53</b>	<b>0,28</b>	<b>44,07</b>	<b>1.129,20</b>	<b>352,70</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA</b>					
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>					
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	57.639,76	57.380,43	52.015,94	96.120,33	0,00
3.1.2	Cadangan Untuk Piutang	17.481,44	16.388,74	16.617,24	33.140,17	20.693,48
3.1.3	Cadangan Untuk Persediaan	4.160,51	5.492,20	8.534,36	7.228,39	7.747,11
3.1.4	Dana Utk Pemb Utang Jk Pendek	(178,53)	0,00	(44,07)	(1.129,20)	(1.129,20)
3.1.5	Pendapatan Yang ditangguhkan	83,38	111,36	12,14	1,28	0,45
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>79.186,56</b>	<b>79.372,73</b>	<b>77.135,61</b>	<b>135.360,97</b>	<b>28.088,33</b>
<b>3.2</b>	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>					
3.2.1	Diinvestasikan dlm Investasi Jk Panjang	31.824,64	40.432,28	47.932,28	55.684,37	70.870,85
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	946.403,75	1.071.073,94	1.199.504,76	1.294.098,87	1.582.410,59
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	550,09	1.211,92	211,92	211,92	716,00
3.2.4	Dana Utk Pembayaran Utang Jk Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>978.778,48</b>	<b>1.112.718,14</b>	<b>1.247.648,95</b>	<b>1.349.995,15</b>	<b>1.653.997,44</b>
<b>3.3</b>	<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>					
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.326,75
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.326,75</b>

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>1.057.965,04</b>	<b>1.192.090,87</b>	<b>1.324.784,56</b>	<b>1.487.356,11</b>	<b>1.689.412,53</b>
<b>B</b>	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1.058.143,57</b>	<b>1.192.091,15</b>	<b>1.324.828,63</b>	<b>1.488.485,32</b>	<b>1.689.765,23</b>

Sumber: DPPKAD Kabupaten HSS 2008 — 2012, Diolah Kembali

Analisis terhadap neraca keuangan daerah pada lima tahun terakhir yang mencakup rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Namun pada analisis berikut yang disajikan hanya rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, Adapun analisa neraca dapat dilihat tabel 3.11 berikut

**Tabel :3.11**  
**Analisa Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Tahun Anggaran 2008-2012**

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
<b>A</b>	<b>RASIO LIKUIDITAS</b>					
1	Rasio lancar (current ratio)	444,55	283.475,04	1.751,30	120,87	510,09
2	Rasio quick (quick ratio)	421,24	263.860,04	1.557,64	114,47	488,13
<b>B</b>	<b>RASIO SOLVABILITAS</b>					
1	Rasio total hutang terhadap total asset	0,00017	0,0000	0,00003	0,00007	0,00019
2	Rasio hutang terhadap modal	< 1	< 1	<1	<1	<1

Sumber: DPPKAD Kabupaten HSS 2008 – 2012, Diolah kembali

Berdasarkan data neraca Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tersaji pada tabel 3.10. dan hasil perhitungan rasio keuangan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.11. menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan rasio solvabilitas yang positif. Hal ini diperlihatkan secara riil hasil analisis neraca keuangan pada tabel 3.12 berikut.

**Tabel 3.12**  
**Hasil Analisa Neraca Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Tahun Anggaran 2008-2012**

No	Indikator	Nilai	Keterangan
<b>A</b>	<b>RASIO LIKUIDITAS</b>		
1	Rasio lancar (current ratio)	> 1	Sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek
2	Rasio quick (quick ratio)	>1	Sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek secara cepat
<b>B</b>	<b>RASIO SOLVABILITAS</b>		
1	Rasio total hutang terhadap total aset	>1	Sangat mampu melunasi utang dengan aset yang tersedia
2	Rasio hutang terhadap modal	>1	Sangat mampu melunasi utang dengan modal yang tersedia

Sumber: DPPKAD Kabupaten HSS 2008 – 2012, Diolah kembali

### 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Melihat kondisi keuangan daerah di atas, maka mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan ekonomi biaya tinggi terhadap perkembangan arus investasi

Berdasarkan dinamika kebutuhan masyarakat, pencapaian visi dan misi daerah, serta kebijakan Pemerintah Pusat, maka arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah agar memperkuat kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, melalui upaya ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi penerimaan daerah.
2. Meningkatkan kualitas aparatur pengelola keuangan daerah agar mampu mengembangkan kreatifitas, inisiatif, kemampuan, dan memiliki motivasi yang kuat dalam menggali potensi dan sumber-sumber baru yang ada dalam meningkatkan penerimaan asli

daerah dan mengelola keuangan daerah secara optimal, efisien dan efektif dan menghindari kebocoran.

3. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah, agar lebih dimanfaatkan secara tepat waktu, tepat sasaran dan efisien.
4. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro yang mampu meningkatkan dan mendorong pertumbuhan serta perkembangan usaha ekonomi masyarakat kecil secara merata.

Arah kebijakan belanja lebih ditekankan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat. Arah kebijakan belanja daerah meliputi:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi urusan wajib pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangundangan sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah.
2. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada SKPD yang bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD).
3. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia dimana

semua pengeluaran daerah termasuk subsidi, hibah dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

4. Anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap SKPD serta pemeliharaan aset daerah melalui pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, diktum keenam, yang menginstruksikan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) agar melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.

Pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, terdapat juga UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan transfer ke daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 merupakan salah satu wujud upaya penguatan pungutan pajak daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.

Belanja daerah yang bisa dialokasikan untuk biaya program pembangunan, bantuan keuangan dan sosial, belanja bagi hasil serta belanja tidak tersangka sangat tergantung pada besarnya penerimaan daerah setelah dikurangi belanja untuk membiayai beban wajib dalam bentuk gaji upah dan tunjangan PNS. Sisa belanja setelah dikurangi belanja beban wajib itulah yang harus dikelola secara

efisien dan efektif untuk membiayai program-program baik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun untuk mendorong percepatan laju pembangunan daerah.

Dalam lima tahun terakhir 2008-2012, proporsi anggaran belanja untuk beban wajib (Gaji upah dan tunjangan PNS) dalam APBD mengalami peningkatan. Namun karena jumlah APBD juga mengalami peningkatan, jumlah dana yang bisa diatur pengalokasiannya berdasarkan prakarsa dan kebijakan daerah sendiri mengalami peningkatan pula.

Namun demikian pembiayaan pembangunan tidaklah hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah semata tanpa adanya partisipasi kalangan dunia usaha dan swadaya masyarakat. Arah pengelolaan pembiayaan ke depan diharapkan didalam pembiayaan pembangunan sumber dana APBD tersebut menjadi stimulan bagi pembiayaan pembangunan daerah. Dalam hal ini maka perlu diciptakan situasi yang kondusif bagi tumbuhnya investasi swasta dan institusi lainnya untuk mengembangkan berbagai potensi unggulan daerah.

#### **a. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Pada tabel 3.13 berikut dapat dilihat proporsi belanja anggaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2008-2012

**Tabel: 3.13**  
**Proporsi Belanja Anggaran**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Tahun Anggaran 2008-2012 (%)**

No	Uraian	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan)	Prosentase  (a) / (b) x
		(000)	(000)	
1	Tahun Anggaran	248.348,55	487.773,66	50,91
2	Tahun Anggaran	301.157,03	499.541,68	60,37
3	Tahun Anggaran	342.472,59	554.084,59	61,81
4	Tahun Anggaran	381.506,89	722.208,83	52,83

Sumber: DPPKAD Kabupaten HSS 2008 — 2012, Diolah kembali

Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikelompokkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah. Lain-lain PAD yang Sah adalah pendapatan yang tidak dapat dimasukkan dalam jenis pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kelompok selanjutnya adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, yang antara lain bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, bagi hasil Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan bagi hasil Pajak Penghasilan. Selanjutnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bentuk block grand dari Pemerintah, dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan fiskal daerah. DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Selanjutnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana perimbangan yang penggunaannya ditentukan oleh Pemerintah, misalnya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perdagangan, dan bidang infrastruktur. Ketentuan tentang DAK juga diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Kelompok terakhir adalah Lain-lain pendapatan yang sah, yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Provinsi, antara lain Pajak Bahan Bakar Minyak, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Permotor, Pajak Air Bawah Tanah, dan bantuan keuangan/hibah dari Pemerintah Provinsi. Kemudian Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, yang biasanya berasal dari Pemerintah Pusat, misalnya dana insentif daerah dan dana tambahan penghasilan untuk guru.

**b. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah**

Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 1999. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang memperkenalkan Anggaran Berbasis Kinerja. Ketentuan tersebut diperbaiki sehingga dihasilkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian diikuti pedoman teknisnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Inti dari berbagai peraturan tersebut di atas adalah penyusunan anggaran harus berdasarkan atau berbasis kinerja. Pada struktur APBD berbasis kinerja dapat dilihat adanya ketentuan surplus defisit anggaran. Kemudian berbasis kinerja juga pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, setiap usulan anggaran pendapatan dan anggaran belanja harus memperhatikan kinerja masukan yang digunakan, keluaran yang dihasilkan dan hasil atau berfungsi output sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Anggaran berbasis kinerja juga memperhatikan nilai waktu dari uang, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Selain berbasis kinerja, berbagai ketentuan tersebut juga masih menerapkan anggaran berimbang, artinya berimbang bahwa surplus anggaran harus jelas digunakan untuk apa dan apabila terjadi defisit anggaran yang jelas sumber untuk menutupnya. Dalam struktur anggaran keberimbangan diperlihatkan pada SILPA Tahun berkenaan nilainya adalah 0 (nol) Rupiah.

Kebijakan pendapatan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui :

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah yang diarahkan pada :
  - a. Penyesuaian berbagai peraturan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - b. Pendekatan intensifikasi dalam bentuk perubahan regulasi guna peningkatan nilai objek pajak tanpa menimbulkan

- dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
- c. Peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang dibarengi dengan penerapan akuntabilitas dan pemantapan kinerja pelayanan unit pemungut dan pengelola pendapatan dalam bentuk insentif, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
  - d. Perbaiki kinerja dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang efisien, efektif dan akuntabel dalam rangka peningkatan kontribusi laba terhadap pendapatan asli daerah.
  - e. Kebijakan pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang dikelola secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Konsep bagi hasil atas perimbangan keuangan Pusat dan Daerah memerlukan langkah-langkah pro aktif Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam :
    - a. Melakukan pemantauan, pendataan dan analisa terhadap wajib pajak seperti sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Provinsi.
    - b. Berkoordinasi serta melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan.
  3. Upaya untuk memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada meningkatkan penyediaan data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Berdasarkan kebijakan DAK, terdapat beberapa bidang yang memiliki potensi memperoleh alokasi DAK meliputi : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Keluarga Berencana; (4) Infrastruktur Jalan; (5) Infrastruktur Irigasi; (6) Infrastruktur Air Minum; (7) Infrastruktur Sanitasi; (8) Prasarana Pemerintahan Daerah; (9) Kelautan dan Perikanan; (10) Pertanian; (11) Lingkungan Hidup; (12) Kehutanan; (13) Sarana

dan Prasarana Daerah Tertinggal; (14) Sarana Perdagangan; (15) Transportasi Perdesaan; (16) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan; (17) Listrik Perdesaan; (18) Perumahan dan Permukiman; serta (19) Keselamatan Transportasi Darat.

4. Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian merupakan amanat dari UU Nomor 35 Tahun 2008, yang dialokasikan antara lain untuk dana penyesuaian berupa dana tambahan penghasilan guru PNSD, Dana Insentif Daerah, dana tambahan untuk tunjangan profesi guru (TPG), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Dana Insentif Daerah terutama ditujukan kepada daerah berprestasi yang memiliki kriteria keuangan dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, dana tambahan untuk TPG sejalan dengan telah ditetapkan PP Nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen. Dana tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian kebijakan terhadap belanja daerah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui :

1. Pengalokasian belanja wajib mengikat yaitu besaran belanja tidak langsung kelompok belanja pegawai dengan memperhitungkan adanya kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan penambahan formasi CPNS. PNS Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan pembangunan pedesaan dan peningkatan kinerja aparatur desa melalui Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta kelembagaan masyarakat desa termasuk.
3. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa diarahkan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan pemerintah dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Belanja bantuan sosial diarahkan dalam rangka pemberdayaan

organisasi/ kelompok/ anggota masyarakat yang diarahkan pada penguatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, pembinaan kehidupan beragama yang secara nyata mendukung pencapaian IPM serta secara teknis dilakukan melalui mekanisme pengujian atas kelayakan proposal.

5. Belanja Subsidi diarahkan khususnya kepada lembaga pendidikan dasar dan menengah sebagai upaya mengurangi biaya pendidikan siswa serta dalam rangka akselerasi pencapaian wajib belajar 9 tahun.
6. Belanja Hibah diarahkan dalam rangka penguatan fungsi lembaga/ badan, perusahaan daerah maupun organisasi kemasyarakatan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Selanjutnya kebijakan terhadap pembiayaan daerah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui :

1. Penerimaan Pembiayaan melalui penerimaan hasil Piutang Daerah baik piutang pajak maupun penerimaan piutang lainnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan melalui penyertaan modal, penanaman saham di Bank Kalsel, pembayaran hutang daerah termasuk pembiayaan belanja infrastruktur melalui anggaran kegiatan tahun jamak.

Analisis pembiayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu tahun 2010-2012 dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah yang cenderung meningkat. Secara rinci ditunjukkan secara berturut-turut pada tabel 3.14 dan tabel 3.15 berikut.

**Tabel 3.14.**  
**Surplus (Defisit) Riil Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Tahun Anggaran 2010-2012**

No	Uraian	2010 (000.000)	2011 (000.000)	2012 (000.000)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	501.737,12	607.290,98	794.040,50
2	Dikurangi Realisasi: Belanja Daerah	499.742,43	554.084,60	722.208,83
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.250,00	10.984,50	22.871,50
	Surplus (Defisit) riil	(6.255,31)	42.221,88	48.960,17

Sumber: DPPKAD Kabupaten HSS 2010 — 2012, Diolah kembali

Pada tahun 2011 dan 2012 Perhitungan Anggaran mengalami surplus perhitungan anggaran. Berdasarkan tabel surplus (defisit) riil anggaran maka dapat dilihat komposisi penutupan riil anggaran daerah pada tabel 3.15 berikut.

**Tabel 3.15.**  
**Komposisi Penutupan Riil Anggaran**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Tahun Anggaran 2010-2012**

No	Uraian	Proporsi dari total Surplus (defisit) riil		
		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	-	123,20	185,85
2	Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah	(11,03)	3,55	8,45
3	Penerimaan Pengeluaran	-	-	-

Sumber: DPPKAD Kabupaten HSS 2010 — 2012, Diolah kembali

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan penggunaan anggaran belanja antara lain:

- a. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (belanja tak langsung) dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan setiap tahunnya rata-rata masih diatas 50% dari total belanja daerah, sementara arah yang diinginkan secara nasional mengenai proporsi belanja untuk lebih didominasi oleh pemenuhan kebutuhan di luar belanja untuk aparatur.
- b. Faktor penyebab yang melatarbelakangi masih dominannya proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (belanja tak langsung) antara lain karena di dalam belanja tak langsung teralokasi belanja bantuan sosial, belanja hibah, serta belum maksimalnya sistem penganggaran dengan menggunakan Analisa Standar Belanja (ASB), belum efektifnya pola pengintegrasian antara target capaian pada Standar Pelayanan Minimum dengan penganggarnya. Selain itu, masih belum optimalnya pemanfaatan potensi serta rendahnya realisasi PAD menyebabkan masih sebagian besar alokasi DAU diserap untuk memenuhi kebutuhan belanja tak langsung khususnya pada belanja wajib, sehingga alokasi belanja langsung menjadi sangat terbatas.

- c. Tingginya potensi PAD yang bila dimanfaatkan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi PAD, serta semakin terbukanya sistem perekonomian daerah untuk pengembangan perekonomian lokal di masa datang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masih berpeluang diwujudkan.

### **3.3. Kerangka Pendanaan 2014- 2018**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu kerangka dasar pembangunan saat ini dalam dimensi masa depan, mencerminkan kerangka politik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah serta hak dan kewajiban masyarakat. APBD juga merupakan alat kontrol bagi masyarakat terhadap pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah, yang pada prinsipnya merupakan uang yang rakyat. Penyusunan APBD harus memperhatikan norma dan prinsip transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektifitas anggaran.

Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah merupakan salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Hal ini mengandung makna seluruh proses penyusunan anggaran semaksimal mungkin harus dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan umum, prioritas dan penetapan alokasi anggaran, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan anggaran dilaksanakan sejak proses identifikasi masalah, yang dilakukan oleh

unsur eksekutif dengan proses penjaringan aspirasi masyarakat melalui berbagai saluran dan mekanismenya maupun yang dilakukan oleh unsur legislatif. Selanjutnya partisipasi juga dilaksanakan dalam pelaksanaan anggaran dan pengawasannya. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan selalu mengevaluasi proses partisipasi masyarakat, dalam rangka meminimalkan adanya keluhan dari masyarakat mengenai kebijakan yang dijalankan yang tidak sesuai dengan aspirasi yang disampaikan dan dalam rangka optimalisasi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya target pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi dalam pelayanan publik.

Proses penyusunan dan pelaksanaan APBD difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas yang menjadi preferensi Pemerintah Kabupaten sebagai cerminan kebutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi dasar tersebut kemudian melandasi perumusan kebijakan fiskal baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Anggaran diperlukan karena kemampuan pendapatan yang terbatas sedangkan di sisi lain kebutuhan pendanaan relatif besar, sehingga diperlukan penyusunan skala prioritas. Pada posisi penentuan skala prioritas inilah diperlukan kompetensi dan kearifan pengambil kebijakan agar skala prioritas mencerminkan kebutuhan publik, bukan kepentingan pribadi atau golongan dan mencerminkan tingkat urgensi atas solusi suatu masalah, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas maka kerangka pendanaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018 diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat wajib, antara lain belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan pada pemerintah desa. Kemudian diprioritaskan untuk memenuhi

kebutuhan pelayanan dasar pada masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar permukiman. Pendidikan diprioritaskan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan sekaligus merintis penuntasan pendidikan 12 tahun. Kesehatan diprioritaskan untuk memberikan jaminan kesehatan pada masyarakat, khususnya penduduk miskin melalui peningkatan pelayanan puskesmas dan rumah sakit daerah. Infrastruktur dasar permukiman diprioritaskan untuk penyediaan air bersih, pembangunan saluran air limbah, dan penyehatan lingkungan permukiman. Tentunya beberapa prioritas tersebut dalam kerangka penanggulangan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan *millennium (MDGs)*. Kemudian pemenuhan kebutuhan lainnya adalah pengembangan ekonomi lokal pada sektor yang strategis, yaitu sektor yang menjadi pendorong perekonomian daerah. Dengan pengembangan ekonomi lokal, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta penciptaan dan penyerapan lapangan kerja. Pengembangan ekonomi lokal diprioritaskan pada pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pembangunan pertanian, termasuk perikanan dan peternakan.

Berkenaan dengan sumber pembiayaan untuk mendanai belanja wajib dan belanja investasi, sumber pendapatan yang utama adalah dari Pemerintah melalui pendapatan Dana Perimbangan dan Pemerintah Provinsi melalui pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Setelah itu pendapatan yang berasal dari PAD. Berdasarkan data yang ada, maka PAD masih dapat ditingkatkan baik dengan metode intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memperbaiki manajemen pengelolaan, *me-review* beberapa Perda yang perlu disesuaikan dengan perkembangan daerah, tetapi tetap diupayakan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi sekaligus adanya insentif bagi pengusaha untuk berinvestasi. Ekstensifikasi dimulai dengan pendataan wajib pajak yang masih potensial dan belum terjangkau oleh pelayanan, tetapi juga disertai dengan perbaikan layanan pada para pelaku ekonomi.

Sehubungan dengan analisis APBD Tahun Anggaran 2008-2012, maka selain pemenuhan kebutuhan belanja dan optimalisasi

sumber-sumber pendapatan, yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki struktur APBD yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta lebih realistis dalam penganggaran pendapatan dan belanja.

**Tabel 3.16**  
**Kerangka Pendanaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Tahun Anggaran 2013-2018**

No	Uraian	2013 (000.000)	2014 (000.000)	2015 (000.000)	2016 (000.000)	2017 (000.000)	2018 (000.000)
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>56.814,09</b>	<b>56.835,89</b>	<b>62.228,14</b>	<b>68.140,26</b>	<b>77.424,71</b>	<b>89.364,65</b>
1.1.1	Pajak Daerah	5.262,52	6.698,51	8.038,21	9.271,75	11.716,96	15.025,10
1.1.2	Retribusi Daerah	8.675,77	10.069,94	12.119,11	14.694,16	19.324,68	25.637,32
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5.058,36	4.727,04	4.963,39	5.211,56	5.472,14	5.745,74
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang	37.817,44	35.340,41	37.107,43	38.962,80	40.910,94	42.956,48
1.2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>626.012,43</b>	<b>710.005,78</b>	<b>779.077,99</b>	<b>854.960,93</b>	<b>979.054,83</b>	<b>1.139.994,</b>
1.2.1	Dana bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan	123.876,34	159.643,18	175.173,91	192.236,01	220.138,24	256.314,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	452.522,47	495.983,96	544.235,27	597.244,30	683.931,74	796.326,61
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	49.613,62	54.378,65	59.668,82	65.480,62	74.984,85	87.307,26
1.3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang</b>	<b>124.506,36</b>	<b>132.460,45</b>	<b>143.004,85</b>	<b>154.385,57</b>	<b>167.432,64</b>	<b>182.454,31</b>
1.3.1	Hibah	1.719,17	1.541,54	1.664,31	1.780,74	1.872,85	1.993,78
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	63.012,77	68.053,79	72.817,55	77.914,78	84.147,63	91.721,28
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	57.674,43	62.865,12	68.522,99	74.690,05	81.412,16	88.739,25
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>807.332,88</b>	<b>899.302,13</b>	<b>984.310,99</b>	<b>1.077.486,</b>	<b>1.223.912,</b>	<b>1.411.763,</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>955.635,99</b>	<b>943.850,45</b>	<b>1.017.694,</b>	<b>1.109.960,</b>	<b>1.258.831,</b>	<b>1.434.051,</b>
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>554.587,42</b>	<b>507.360,94</b>	<b>558.594,14</b>	<b>624.871,24</b>	<b>678.623,91</b>	<b>733.653,38</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	488.923,04	449.281,33	505.442,88	574.168,96	612.335,38	656.641,95
2.1.4	Belanja Hibah	22.160,74	16.128,13	10.000,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.959,10	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

No	Uraian	2013 (000.000)	2014 (000.000)	2015 (000.000)	2016 (000.000)	2017 (000.000)	2018 (000.000)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota & Pem.Des	1.404,00	1.449,49	1.540,91	1.671,80	1.855,63	2.050,53
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	22.140,53	24.001,99	25.110,35	25.530,47	30.932,90	41.460,90
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>401.048,56</b>	<b>436.489,51</b>	<b>459.100,07</b>	<b>485.089,55</b>	<b>580.207,75</b>	<b>700.398,34</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(148.303,1)</b>	<b>(44.548,32)</b>	<b>(33.383,22)</b>	<b>(32.474,02)</b>	<b>(34.919,48)</b>	<b>(22.287,90)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>164.311,68</b>	<b>64.048,32</b>	<b>55.383,21</b>	<b>54.474,01</b>	<b>49.419,48</b>	<b>36.787,90</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	151.479,44	58.241,08	49.883,21	48.974,01	33.919,48	21.287,90
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	232,2385	307,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>16.008,57</b>	<b>19.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	5000	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.408,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>148.303,11</b>	<b>44.548,32</b>	<b>33.383,21</b>	<b>32.474,01</b>	<b>34.919,48</b>	<b>22.287,90</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Diolah dari Laporan DPPKAD Kabupaten HSS 2008-2013.

Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke depan harus terus dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan dan meningkatkan kapasitas keuangan, baik dari aspek sumber-sumber penerimaan daerah maupun dari aspek pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kapasitas keuangan ini diarahkan untuk dapat mendanai pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM), dan untuk mendukung iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upaya bagi peningkatan kapasitas keuangan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengelola sumber daya daerah dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, akan terus dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara profesional dan akuntabel, termasuk dalam penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi.

Prioritas program dikelompokkan menjadi Kelompok Prioritas I, Kelompok Prioritas II dan Kelompok Prioritas III. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

**Tabel 3.18.**  
**Ketentuan Umum Kelompok Prioritas Anggaran**

<b>Kelompok Prioritas</b>	<b>Ketentuan Umum</b>
Prioritas I (KP I)	✓ KP I diperuntukkan bagi prioritas belanja tidak langsung yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Prioritas II (KP II)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Program KP II terkait langsung dengan pelayanan ke masyarakat, harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Disamping itu, KP I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>✓ KP II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.</li> </ul>
Prioritas III (KP III)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ KP III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah dan</li> <li>✓ Pengalokasian dana pada KP III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar</li> </ul>

Sumber : Hasil Analisis Tim RPJM HSS 2014- 2018

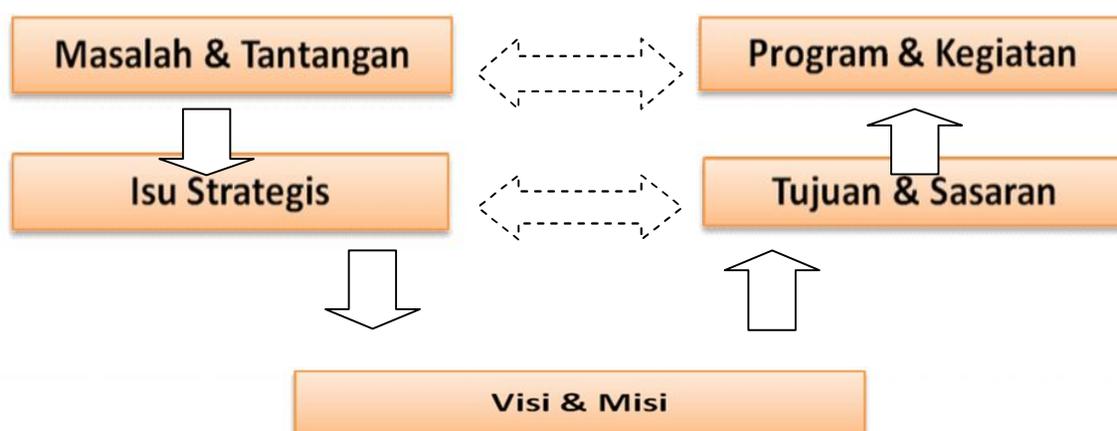
**BAB IV**  
**ISU-ISU STRATEGIS**

**4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal kota, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara ilustratif, pola hubungan antara permasalahan wilayah, isu strategis, visi dan misi hingga program dan kegiatan dapat dilihat dalam gambar 4.1 berikut.

**Gambar 4.1.**  
**Pola Hubungan antara Permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Perumusan Visi Misi dan Perumusan Program Kegiatan**



Berdasarkan gambaran kondisi wilayah, sosial dan perekonomian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, paparan permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan dibagi menurut kondisi infrastruktur dan tata ruang, sosial budaya serta ekonomi.

#### **4.1.1. Aspek Infrastruktur dan Tata Ruang**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Rendahnya pelayanan infrastruktur baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- b. Sulitnya pembangunan infrastruktur di Hulu Sungai Selatan yang disebabkan oleh kondisi geografis Hulu Sungai Selatan sebagian lahan lebak (wilayah Daha) sehingga menyebabkan biaya konstruksi yang relatif mahal.
- c. Sulitnya membebaskan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang merupakan faktor penghambat pengembangan infrastruktur dan daya saing daerah.
- d. Belum optimalnya pemeliharaan infrastruktur yang ada untuk memfasilitasi arus barang, jasa, dan manusia maupun finansial serta menjadi penentu bagi upaya pengurangan angka kemiskinan.
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
- f. Masih rendahnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
- g. Jika dilihat dari kelaikannya sebagian besar jalan raya dalam kondisi rusak berat, sedang dan ringan.
- h. Masih kurangnya infrastruktur untuk menunjang pertanian di Hulu Sungai Selatan.
- i. Infrastruktur pengairan masih kurang.
- j. Terbatasnya ketersediaan listrik dengan harga memadai, pemadaman bergilir saat ini menjadi menu harian, yang tidak

saja melumpuhkan dunia usaha/ industri, tetapi juga mematikan aktivitas rumah tangga.

- k. Tingginya resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir dan dampak negatif perubahan iklim.
- l. Lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar memerlukan penguatan para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah, pasar konstruksi dan meningkatkan profesionalisme industri konstruksi.
- m. Meningkatnya perhatian terhadap jasa konstruksi dan menguatnya tuntutan kualitas membutuhkan peningkatan pembinaan terhadap pelaku jasa konstruksi.
- n. Terbatasnya ketersediaan lahan bagi pengembangan perumahan dan permukiman di pusat Kota Kandangan
- o. Terbatasnya penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum baik secara kualitas maupun kuantitas dalam rangka memenuhi *target Millennium Development Goals (MDGs)* yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari jumlah penduduk harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air bersih.
- p. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap penyediaan air bersih. Cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini baru mencapai 12.635 buah dengan distribusi 2.611.703 M<sup>3</sup> (Kabupaten HSS Dalam Angka 2012)
- q. Meningkatnya tuntutan pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis sebagai dampak meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan.
- r. Masih rendahnya akses pelayanan sanitasi dan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
- s. Meningkatnya kebutuhan rumah akibat pertumbuhan keluarga baru.
- t. Belum tersedianya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikaitkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang

- kegiatan berskala kabupaten.
- u. Kondisi ruas-ruas jalan utama kabupaten pada umumnya masih kurang memadai, baik ditinjau dari faktor kapasitas maupun kondisi konstruksi jalannya.
  - v. Masih ada yang belum dilaksanakannya penetapan kelas jalan, penamaan, penyediaan perlengkapan jalan (rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan serta alat pengendali dan pengaman pengguna jalan); alat pengawasan dan pengamanan jalan; serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas pada semua ruas jalan yang ada di Hulu Sungai Selatan yang didasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan.
  - w. Rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum untuk mendukung kebutuhan akan pelayanan transportasi darat yang mampu menjangkau seluruh wilayah.
  - x. Kondisi dermaga pelabuhan di Hulu Sungai Selatan yang sebagian besar sudah tidak layak sehingga menghambat kelancaran arus barang, menimbulkan inefisiensi, memicu ekonomi biaya tinggi, dan menciptakan iklim usaha tidak kondusif. Kondisi ini membuat biaya distribusi barang cukup tinggi. Kondisi alur sungai yang mengalami pendangkalan dan penyumbatan alur oleh gulma air cukup menghambat kelancaran arus lalu lintas air di Hulu Sungai Selatan.
  - y. Belum terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal, khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.
  - z. Belum optimalnya pemanfaatan RTRW dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.
  - aa. Belum optimalnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku ekonomi.
  - bb. Belum mantapnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumberdaya secara optimal.
  - cc. Tingginya potensi konflik pemanfaatan ruang
  - aa. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

- penataan ruang.
- bb. Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektoral.
  - cc. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan.
  - dd. Terjadinya degradasi lingkungan akibat penyimpangan tata ruang
  - ee. Meningkatnya zat padat tersuspensi dan terlarut serta nilai kekeruhan yang tinggi yang disebabkan oleh aktivitas negatif kerusakan hutan di hulu sungai Amandit, mengakibatkan pengolahan air di PDAM Kandangan memerlukan cukup banyak tawas yang berfungsi sebagai pengikat partikel lumpur.
  - ff. Adanya masalah persampahan di lokasi-lokasi tertentu seperti pasar, terminal, pertokoan dan tempat-tempat lain yang padat penduduknya.
  - gg. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat-tempat tertentu, apalagi untuk mengolahnya.
  - hh. Belum optimalnya kinerja TPA yang berwawasan lingkungan.
  - ll. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan.
  - mm. Sering terjadinya pencemaran udara yang disebabkan pembakaran sampah dan pembakaran lahan pada saat persiapan tanam serta pembakaran jerami pada saat pasca panen menimbulkan kerugian dalam bentuk gangguan kesehatan manusia.
  - nn. Berkurangnya kawasan ruang terbuka hijau atau vegetasi sebagai korban pembangunan atau pengembangan wilayah, padahal fungsi dari vegetasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan.
  - oo. Meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal karena mobilitas penduduk yang cepat berdampak pada peningkatan terhadap kebutuhan lingkungan untuk menunjang sarana dan prasarana wilayah sebagai akibat adanya keunggulan ekonomi di Kota Kandangan yang mengundang terjadinya proses urbanisasi untuk mengejar pendapatan yang lebih baik.
  - pp. Terjadinya perubahan lingkungan karena aktifitas manusia antara lain penggunaan pestisida yang dapat menimbulkan

- pencemaran.
- qq. Terjadinya perubahan lingkungan secara alami disebabkan oleh bencana alam seperti kebakaran lahan di musim kemarau menyebabkan kerusakan dan matinya organisme di areal tersebut.
  - rr. Rendahnya tingkat kepedulian dan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kurang intensifnya pelaksanaan sosialisasi peraturan yang sudah ditetapkan.
  - ss. Maraknya keberadaan menara telekomunikasi di Hulu Sungai Selatan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara yang memadai untuk menjamin keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.
  - tt. Maraknya keberadaan jasa pelayanan teknologi informasi memerlukan pengaturan penyediaan ruang / lokasi dan ijin operasional untuk meminimalkan terjadinya dampak sosial lainnya.

#### **4.1.2. Aspek Sosial Budaya**

- a. Tingkat perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu pada tahun 2008 sebesar 70,11 kemudian naik menjadi 70,50 (2009), menjadi 70,84 (2010), dan menjadi 71,18 (2011) jadi masuk dalam kategori menengah atas, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 69,30 yang artinya kualitas SDM itu perlu ditigkatkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Angka harapan hidup masih rendah yaitu sebesar 64,32 Tahun pada tahun 2011 tetapi lebih tinggi dari rata- rata Kalsel 63,45 tahun.
- c. Angka kematian bayi (AKB) yaitu sebesar 7 per seribu kelahiran dan angka kematian ibu 143 per seratus ribu kelahiran (2009) sehingga untuk kedepannya diperlukan perhatian dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam hal pemenuhan tenaga medis dan paramedis yang memadai (bidan desa, dokter spesialis, dan lain lain), peningkatan pelayanan murah dan terjangkau kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dan pemenuhan infrastruktur kesehatan.

- d. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih terbatas
- e. Masih banyak masyarakat kurang mengerti akan arti pentingnya jaminan sosial
- f. Masih banyak masyarakat kurang mengerti tentang proses dan prosedur jaminan perlindungan dan jaminan masyarakat
- g. Rata-rata lama sekolah 7,35 tahun (2011) sedangkan kalsel 7,45 tahun, artinya rata-rata masyarakat kita hanya bersekolah sampai kelas 1 SLTP, sehingga perlu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
- h. APS SD/MI 95,7 %, SLTP 76,8 %, SLTA 47,1 % dan APK SD/Mi 108,8 %, SLTP 101,2 %, SLTA 57,0 %, sedangkan APM SD/MI 94,0 %, SLTP 75,5 %, SLTA 33,2% (data tahun 2010) Masih rendahnya APS,APK dan APM sehingga perlu penuntasan wajar 12 tahun
- i. Jumlah Angka Pengangguran, angka kriminalitas dan penduduk miskin masih banyak sehingga dipandang perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- j. Kualitas sumber daya birokrasi masih banyak rendah.
- k. Lemahnya koordinasi antara SKPD-SKPD di dalam melaksanakan program-program pembangunan
- l. Belum optimalnya pemanfaatan potensi dan pengembangan pariwisata
- m. Masih lemahnya kordinasi program-program kemiskinan diberbagai sektor
- n. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat

#### **4.1.3. Aspek Perekonomian**

##### **Bidang Ekonomi**

- a. Pertumbuhan ekonomi belum optimal. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ditahun mendatang, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas secara berkesinambungan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat

- b. Struktur Perekonomian Daerah belum kuat. Membangun struktur perekonomian yang kuat berlandaskan keunggulan kompetitif, dimana sektor pertanian dan perdagangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien, sehingga menghasilkan komoditas yang berkualitas dan berkembangnya industri kecil menengah yang berdaya saing, sehingga sektor perdagangan dan jasa perannya meningkat dengan pesat sebagai mesin penggerak perekonomian Hulu Sungai Selatan.
- c. Masalah yang dihadapi oleh produk andalan daerah adalah berupa masih rendahnya produktivitas dan mutu produk dan mutu hasil panen sektor pertanian pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan relatif masih rendah.
- d. Belum berkembangnya industri pengolahan yang mengolah hasil-hasil pertanian, mutu kemasan produk yang rendah dan belum adanya standarisasi produk.
- e. Terbatasnya Modal, IPTEK, informasi pasar dan promosi produk untuk menunjang kegiatan usaha, khususnya untuk UMKM dan Koperasi serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pada sentra-sentra produksi.
- f. Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif ( modal, iptek, bahan baku, informasi pasar )
- g. Daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di daerah masih belum optimal dikarenakan ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas, sumber daya alam yang masih belum terangkat dan kualitas pelayanan serta SDM yang masih rendah.

#### **Bidang Sumber Daya Alam**

- a. Pengelolaan sumber daya alam yang belum memperhatikan keseimbangan alam dan untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Belum adanya pengaturan dan perlindungan terhadap lahan pertanian secara berkelanjutan.

#### **4.2. Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan

karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Perumusan isu strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun dari permasalahan serta tantangan yang dihadapi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke depan, serta mengakomodir berbagai isu kebijakan regional maupun nasional.

Isu-isu strategis di atas perlu dikorelasikan dengan isu-isu dan kebijakan provinsi maupun nasional khususnya yang memberikan manfaat atau pengaruh dimasa datang terhadap pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebagai bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu memperhatikan isu dan permasalahan yang menjadi penekanan pusat dan provinsi pada periode pembangunan yang tengah berlangsung agar program pembangunan yang dijalankan nantinya dapat sejalan dan terintegrasi dengan arah kebijakan dari pusat dan provinsi. Di samping itu, sebagai tahapan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2005 – 2025, RPJMD 2014-2018 ini juga harus mengacu pada arahan yang terdapat dalam RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Rencana pembangunan Indonesia mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan saat ini tengah memasuki RPJM Nasional ke-2 (2010–2014) dengan penekanan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Selanjutnya, berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, terdapat 11 prioritas nasional, 10 di antaranya sangat relevan dengan isu pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini yakni reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup serta kebudayaan, kreativitas dan inovasi serta pemanfaatan ilmu, teknologi dan informatika.

Adapun fokus perhatian Provinsi Kalimantan Selatan pada periode RPJM Provinsi 2011– 2015 di antaranya adalah peningkatan

aksesibilitas dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan, ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah serta pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

**Arahan Tahapan Ketiga RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 — 2025**

Arahan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tercakup dalam tahapan ketiga menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) tahun 2005- 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Terbangunnya sumberdaya manusia yang religius yang mengamalkan ajaran agama sebagai bentuk sikap religius masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pembangunan SDM yang demikian mulai dilakukan melalui upaya menanamkan sikap religius sejak usia dini sampai remaja sebagai upaya membangun generasi muda yang cerdas dan berbudi luhur termasuk untuk senantiasa bersikap jujur.
- b. Mendorong adanya peningkatan kesalehan dan kepedulian sosial ummat yang difasilitasi melalui kelembagaan zakat, infaq dan sedekah yang dikelola secara profesional untuk perbaikan ekonomi ummat serta peningkatan pembiayaan berbasis syariah untuk mendorong kegiatan perekonomian.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama terus dilakukan termasuk pengembangan sarana peribadatan utama dan kelembagaan di tiap Kecamatan. Peningkatan kualitas pendidikan agama pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; Peningkatan kualitas pengelolaan serta pengembangan fasilitas untuk pelaksanaan ibadah, dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku; serta upaya pembinaan keluarga harmonis untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan generasi yang ber moral dan ber etika.
- d. Peningkatan peran serta pemuda, pengembangan peran wanita dalam pembangunan, pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pembinaan kelembagaan sosial di masyarakat.

- e. Semakin mantapnya profesionalisme aparatur pemerintahan, efisiensi birokrasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di daerah sehingga makin mengoptimalkan pelayanan publik.
- f. Terlaksananya pemenuhan dan pemerataan serta peningkatan pelayanan dasar yang bermutu dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat yang salah satu tolok ukur utamanya adalah meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) melalui (a) peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan termasuk meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal dan non formal; (b) meningkatnya derajat kesehatan dan menurunnya angka kesakitan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan termasuk jaminan memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
- g. Semakin menurunnya jumlah keluarga miskin yang dicapai melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang sifatnya terpadu dan berkesinambungan.
- h. Terwujudnya Rumah Sakit Hassan Basry sebagai pusat rujukan di wilayah Benua Anam.
- i. Terbangunnya sumberdaya manusia yang religius dan berbudaya yang memiliki karakter dan identitas diri berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat; musyawarah dan rakat mufakat dengan tidak menghilangkan sikap kritis dan demokratis serta mewarisi semangat dan nilai kejuangan sehingga mampu mendorong terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan.
- j. Menurunnya pengangguran terdidik dengan makin meningkatnya minat serta kemampuan generasi muda berwirausaha. Untuk itu perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sekolah kejuruan; pemberian keahlian kecakapan hidup maupun pemberian pelatihan kerja serta kegiatan magang terhadap kalangan generasi muda.
- k. Peningkatan produksi pangan dan hortikultura dengan didukung oleh optimalisasi waduk Amandit dengan jaringan irigasinya sehingga selain Hulu Sungai Selatan tetap menjadi daerah surplus padi dan sentra hortikultura juga terjadi peningkatan produksi perikanan, perkebunan dan peternakan.

- l. Optimalisasi waduk Amandit untuk tanaman pangan; perikanan; dan pariwisata.
- m. Peningkatan produksi sektor perkebunan dengan segenap *multiplier* efeknya guna mampu menjadi salah satu sumber penyerapan tenaga kerja serta sumber pembiayaan pembangunan melalui komoditas utamanya berupa kelapa sawit dan karet
- n. Memantapkan Kota Kandangan sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa di wilayah Banua Anam
- o. Terpeliharanya fungsi resapan kawasan rawa dan keanekaragaman hayati. dan juga terpeliharanya nilai ekonomis kawasan rawa di daerah bawah.
- p. Makin meningkatnya produksi, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian (pangan; perkebunan, peternakan, dan perikanan) melalui optimalisasi sub sektor agro-industri sebagai sektor sekunder yang didukung pula oleh sektor tersier. Peningkatan nilai tambah ini tetap memperhatikan aspek permintaan pasar dan daya saing yang didukung oleh pengembangan industri kecil dan koperasi yang berorientasi terhadap kebutuhan pasar. Kaitan dengan hal ini juga adalah peningkatan fasilitasi akses permodalan terutama yang berbasis syariah bagi pelaku perekonomian di daerah.
- q. Peningkatan perkembangan pusat kawasan agropolitan yang meliputi pusat kawasan agropolitan dataran koridor Kandangan; pusat kawasan agropolitan dataran koridor Angkinang; pusat kawasan agropolitan koridor pegunungan termasuk waduk Amandit dan pusat kawasan agropolitan kawasan sungai dan rawa yang ditandai dengan peningkatan produksi komoditas unggulan; peningkatan fasilitas penunjang kawasan; peningkatan perolehan nilai tambah dengan tetap berorientasi pada pasar.
- r. Konsep petik – olah – jual telah diterapkan dan optimalisasi sistim agribisnis yang mencakup hulu sampai hilir
- s. Mulai terbentuknya daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah agropolitan yang ditandai dengan berkembangnya perekonomian masyarakat karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis oleh masyarakat sebagai pelaku

utama termasuk juga kegiatan jasa dan perdagangannya. Selain itu masing-masing pusat kawasan agropolitan sudah mampu mendorong, menarik, dan menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) kawasan *hinterland* dan desa-desa wilayah sekitarnya; serta ditandai pula dengan peningkatan pertumbuhan PDRB secara signifikan bagi sektor-sektor yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan sektor pertanian.

- t. Peningkatan daya saing koperasi dan industri mikro kecil melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan, peningkatan produktivitas yang ditunjang oleh upaya adaptasi terhadap kebutuhan pasar.
- u. Makin meluasnya penyediaan jaringan dan prasarana infrastruktur perekonomian serta jaringan komunikasi untuk menunjang kegiatan perekonomian daerah.
- v. Sebagian besar masyarakat telah menikmati listrik dan lebih dari 50 % rumahtangga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah dapat terlayani oleh PDAM secara berkualitas.
- w. Meningkatnya dan laju pertumbuhan ekonomi disertai dengan penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya investasi.
- x. Tertatanya penunjang perkembangan ekonomi berupa regulasi, pengembangan sumberdaya manusia, penyediaan teknologi tepat guna, dan penataan jaringan distribusi.
- y. Terbangunnya dan terpeliharanya infrastruktur daerah yang ditandai dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur transportasi, peningkatan penyediaan air bersih perpipaan, peningkatan dan pemanfaatan sumber-sumber air baku, peningkatan pengembangan perumahan dan permukiman, pemenuhan energi, pengendalian banjir dan faktor penyebabnya.
- z. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di kabupaten dan kecamatan yang utamanya ditandai dengan semakin lengkapnya dokter spesialis serta tersedianya rawat inap pada puskesmas di Ibukota Kecamatan.
- aa. Terlaksananya peningkatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan fungsi pemerintah daerah; peningkatan kualitas pelayanan publik

melalui peningkatan pelayanan kedinasan, kapasitas lembaga eksekutif dan legislatif, kinerja pengelolaan administrasi pemerintah daerah.

- bb. Terselenggaranya demokrasi yang sehat dalam kehidupan politik melalui kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap sistem demokrasi itu sendiri; terselenggaranya kehidupan politik yang berlandaskan pada azas saling menghargai terhadap keragaman pilihan politik masyarakat; terlaksananya pemilu legislatif 2014, pemilihan kepala negara 2014, pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2015, dan pemilihan bupati dan wakil bupati 2018.
- cc. Terselenggaranya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kehidupan sosial di masyarakat.
- dd. Terkendalinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan khususnya lingkungan sumberdaya hayati.

Mengacu pada berbagai isu kebijakan serta permasalahan pembangunan dihadapi oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dijelaskan , maka dapat disimpulkan isu-isu strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu dalam hal :

### **1. Peningkatan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)**

Pemerintahan dibangun dan memperoleh legitimasi dari masyarakat dimaksudkan untuk terselenggaranya keteraturan terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan lainnya. Dalam pelaksanaannya fungsi-fungsi pemerintahan ini dilaksanakan oleh aparatur dan lembaga pemerintahan yang terbagi pada berbagai organisasi pemerintahan dengan pembidangan yang berspesialisasi dan bertanggungjawab atas segala pelaksanaannya.

Sejalan dengan perubahan sistem pemerintahan sejak era reformasi dimana telah diberikan status daerah otonom secara luas bagi daerah, khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengelola dan mengatur berbagai urusan pemerintahan yang ada di masing-masing daerah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah di daerah bagaimana melaksanakan pemerintahan yang otonom dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, yang dapat membawa kemajuan dan kemaslahatan bagi rakyatnya masing-

masing.

Berbagai kemajuan yang terjadi pada era globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan yang cepat dan radikal serta melewati batas-batas wilayah suatu negara dan telah membawa manusia dalam era baru. Perkembangan yang cepat khususnya kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi sangat berpengaruh serta mampu menstimulasi terhadap kemajuan bidang-bidang lainnya. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi telah dapat meningkatkan kemajuan dalam bidang ekonomi, menunjang kemajuan dalam bidang pendidikan dan pengetahuan masyarakat, serta kemajuan dalam bidang sosial lainnya.

Kemajuan yang tercipta dalam kehidupan sosial masyarakat berakibat terhadap semakin tingginya tuntutan terhadap peranan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang seimbang dengan kemajuan global yang terjadi. Dalam konteks ini masyarakat semakin menuntut untuk memperoleh akses terhadap layanan publik yang semakin baik, transparan dan akuntabel. Tuntutan terhadap keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, tuntutan terhadap layanan sosial, diberdayakannya masyarakat, penyetaraan jender, perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak, ketersediaan berbagai prasarana kemasyarakatan dan prasarana lainnya menuntut pemerintah untuk mampu mengembangkan organisasinya agar dapat menjawab berbagai tantangan dan tuntutan masyarakatnya.

Guna terlaksananya berbagai urusan wajib dan pilihan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dibentuk organisasi kerja yang terbagi dalam satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan. Pada pelaksanaannya, fungsi penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan ini masih belum sepenuhnya optimal dilaksanakan. Hal ini akibat adanya keterbatasan-keterbatasan baik secara kelembagaan maupun individu guna dapat melaksanakan urusan pemerintahan dimaksud. Keterbatasan ini antara lain terbatasnya SDM aparatur terkait bidang tugas yang ditangani atau masih belum sesuainya kompetensi aparat pemerintah dengan bidang tugas yang diemban disamping distribusi aparat yang belum sesuai dengan beban kerja SKPD.

Adanya keterbatasan ini maka berdampak pada kurang baiknya kinerja dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dilihat lain dari keterbatasan ini yakni kurang tertatanya administrasi kerja, relatif masih rendahnya pendapatan asli daerah (PAD), opini BPK terhadap pemeriksaan pengelolaan keuangan dan asset daerah masih dalam tahapan wajar dengan pengecualian (WDP), besarnya sisa lebih anggaran (SILPA), banyaknya dokumen-dokumen rencana, pelaksanaan program dan kegiatan, maupun pelaporan kegiatan yang tidak terpenuhi. Dengan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang dapat diberikan pemerintah belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

## **2. Peningkatan SDM (pendidikan dan kesehatan)**

Di bidang pendidikan, penyebaran SD, SMP dan SMA baik yang tidak merata dimana ada wilayah-wilayah tertentu yang prasarana sekolah dasarnya cukup banyak sehingga suatu saat kekurangan murid namun ada wilayah lain yang jumlah sekolah dasar masih kurang. Kedepan; kualitas gedung sekolah dasar makin banyak yang sudah tidak memenuhi standar (rusak berat dan ringan) yang lebih banyak disebabkan karena faktor umur gedung. Fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belum tersedia secara memadai.

Persoalan pendidikan di Kabupaten HSS tidak hanya menyangkut fisik gedung namun juga menyangkut kualitas guru dan faktor penunjang lainnya. Perlu evaluasi secara berkesinambungan terhadap guru yang sudah bersertifikasi, apakah kinerja para guru tersebut sudah sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Melihat kondisi sekarang maka pendidikan karakter sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Selain itu dengan tingkat pendidikan yang ada sekarang, ke depan rata-rata tingkat pendidikan akan meningkat dengan menyelesaikan wajib belajar 9 tahun dan permasalahan tuntas belajar 12 tahun, penuntasan buta aksara, peningkatan kualitas dan kapabilitas infrastruktur dan tenaga pendidik, kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan bidang studi yang diajarkan dan tuntasnya sertifikasi guru.

Pendidikan model “berasrama” baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta dalam bentuk pondok pesantren dan lain-lain harus tetap didukung. Pendidikan dengan sistim ini sebagai penyeimbang pendidikan model umum diharapkan mampu membekali para peserta anak didik selain dengan ilmu pengetahuan agama dan umum, juga dengan pendidikan kewirausahaan guna menghindari semakin banyaknya pengangguran terdidik.

Di Bidang kesehatan masih tingginya angka kematian bayi (AKB) serta masih tingginya angka kesakitan sehingga ke depan memerlukan perhatian dan kepedulian pemerintah dan masyarakat. Dalam kerangka itu pula maka kesinambungan pemenuhan tenaga medis dan paramedis yang memadai khususnya dokter di Puskesmas dan dokter spesialis di rumah sakit rujukan serta para bidan, peningkatan pelayanan murah dan terjangkau kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dan pemenuhan infrastruktur kesehatan sangatlah penting. Pemberian Jaminan kesehatan terhadap penduduk yang tergolong miskin harus tetap dilakukan dengan prosedur yang tidak rumit.

### **3. Kondisi Ekonomi Daerah yang Masih Rendah**

Kondisi makro ekonomi suatu daerah menggambarkan berbagai keadaan yang terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Salah satu gambaran keadaan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang menjelaskan tentang perkembangan dan perubahan terhadap produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah yang terbagi dalam 9 sektor ekonomi.

Pada aspek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ( 2007-2011 ) atas dasar harga konstan tahun 2000 tumbuh rata-rata sebesar 4,64 %. Pertumbuhan yang terjadi bervariasi dimana pada tahun 2007 terjadi pertumbuhan sebesar 4,95 %, meningkat di tahun 2008 menjadi 5,13 %, terjadi penurunan pertumbuhan ditahun 2009 menjadi 5,04 %, kembali terjadi penurunan ditahun 2010 menjadi 3,46% dan pada tahun 2011 tumbuh dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,60%. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih dibawah laju pertumbuhan Provinsi Kalimantan

Selatan yang tumbuh di atas 6 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih berada dibawah kinerja perekonomian rata-rata ditingkat provinsi.

Atas dasar kinerja sektor-sektor ekonomi daerah selama 5 tahun, dominasi sektor pertanian masih sangat tinggi dibanding sektor lainnya. Hal ini mencirikan bahwa corak ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersifat agraris. Pada tahun 2007 sampai 2009 sektor pertanian menyumbang kontribusi di atas 35% dan cenderung menurun ditahun 2010 menjadi 33,28% dan 2011 menjadi 32,79% (harga berlaku). Penurunan kontribusi sektor pertanian ini diikuti dengan meningkatnya kontribusi sektor jasa, namun sayangnya tidak diikuti oleh perkembangan pertumbuhan sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan pada tahun 2010 hanya mampu berkontribusi sebesar 7,24% % dan tahun 2011 turun lagi menjadi 6,84% dari total PDRB.

Atas dasar analisis PDRB di atas dapat digambarkan bahwa ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih bersifat primer (sub sistem) dan kurang memiliki inovasi untuk berkembang ke arah ekonomi yang bersifat sekunder. Dalam hal ini tidak banyak diperoleh nilai tambah ekonomi yang diharapkan terjadi pada sektor industri pengolahan khususnya yang berbasis potensi pertanian. Atas dasar hal ini dibutuhkan kebijakan yang lebih terhadap bagaimana mensinergikan antara sektor industri pengolahan sebagai industri hilir dengan sektor pertanian sebagai pemasok bahan baku industri berbasis potensi lokal.

Sektor jasa memberikan pertambahan kontribusi yang signifikan dimana pada tahun 2007 berkontribusi sebesar 48,78% dan pada tahun 2011 meningkat pesat menjadi 52,17 %. Namun demikian ternyata pertumbuhan sektor jasa ini hanya terjadi pada sub sektor jasa pemerintah, sedangkan pada sub sektor jasa swasta relatif tidak mengalami pertumbuhan signifikan.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah akan ditentukan oleh adanya investasi dan permodalan sebagai input terhadap proses produksi barang dan jasa. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perkembangan terhadap investasi dan permodalan masih sangat terbatas pada industri kecil, industri kerajinan, sektor usaha berbasis pertanian sedangkan jenis-jenis investasi besar masih

sangat minim.

Kondisi makro ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan lembaga-lembaga ekonomi yang terdapat di suatu daerah. Pada daerah perkotaan relatif mempunyai perkembangan yang cukup baik dengan adanya lembaga perbankan yang semakin bertambah dalam lima tahun terakhir. Namun untuk daerah kecamatan atau desa masih sangat terbatas keberadaan lembaga ekonomi yang dapat menunjang perkembangan ekonomi kecamatan/desa. Sebagian besar koperasi dan lembaga ekonomi pedesaan masih tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

#### **4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial**

*Millenium Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Milenium merupakan komitmen negara terhadap rakyat Indonesia dan komitmen Indonesia terhadap masyarakat global. Komitmen Indonesia dalam upaya mencapai MDG's adalah komitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terdapat 8 program MDG's yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, meliputi 1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; 2) mencapai pendidikan dasar bagi semua; 3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) menurunkan kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan ibu; 6) mengendalikan HIV dan AIDS, malaria serta penyakit menular lainnya ; 7) menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan 8) mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat global.

Terkait dengan 8 tujuan pembangunan milenium ini terdapat hal yang berkenaan langsung dan relevan dengan permasalahan terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Persoalan kemiskinan yang meliputi 7,29% dari penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tahun 2012) ;rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Hulu Selatan yang relatif rendah yakni 7,35 tahun atau setara kelas 1 SLTP (2011); masih kurangnya akses kaum perempuan terhadap kesetaraan gender; masih tinggi kasus kematian anak dan kematian ibu melahirkan; isu tentang permasalahan lingkungan yang rentan terhadap kegiatan budidaya di kawasan rawa serta bencana alam banjir yang terjadi hampir setiap tahunnya ; serta masih rendahnya kemitraan pembangunan di tingkat daerah. Permasalahan-

permasalahan ini bukan hanya telah menjadi isu di tingkatan regional Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun telah menjadi isu nasional dan global.

### **5. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan nilai yang menggambarkan tentang bagaimana kualitas sumberdaya manusia yang terdapat pada suatu daerah yang merupakan akumulasi terhadap berbagai indikator di masyarakat secara komposit. Indikator dimaksud meliputi angka melek huruf, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

Pada tahun 2008 angka IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 70,11 meningkat menjadi 70,50 (2009) menjadi 70,84 (2010), menjadi 71,18 (2011) dengan angka IPM tersebut pada tahun 2010 IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan dengan besaran 69,92 tahun 2010. Pada tahun 2010 posisi IPM Hulu Sungai Selatan dalam lingkup provinsi berada pada peringkat 6 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, angka IPM tersebut sudah masuk kategori dengan status menengah atas. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa dari indikator angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita masyarakat di Hulu Sungai Selatan sudah berada di atas rata-rata provinsi.

### **6. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur**

Keberadaan infrastruktur kewilayahan merupakan hal yang sangat fundamental bagi perkembangan daerah. Sebagai bentuk dari pelayanan publik maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membangun dan menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur dalam upaya mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas akan sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang mencukupi secara ekonomi akan berbanding lurus dengan daya tarik investasi dan permodalan pada daerah yang bersangkutan sehingga akan memberikan dampak pada meningkatnya daya saing daerah yang tercermin pada keunggulan komparatif yang dimiliki daerah.

Dalam prinsip pelayanan publik, infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah tidak hanya yang bersifat menunjang

perekonomian daerah tetapi juga terhadap pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Dalam hal ini infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah juga meliputi infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, fasilitas umum seperti misalnya perumahan, transportasi, informasi, dan berbagai fasilitas sosial ekonomi lainnya.

Dari uraian permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya pada bidang infrastruktur di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beberapa isu penting menyangkut persoalan infrastruktur yakni terbatasnya kesesuaian antara infrastruktur yang tersedia terhadap kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan. Panjang jalan kabupaten yang tersedia belum mencukupi dibanding mobilitas kendaraan yang membutuhkan jalan, saran dan prasarana pendidikan yang dituntut agar selalu menyesuaikan dengan kondisi terkini, tuntutan akan perumahan yang layak, lingkungan yang sehat dan kemudahan akses teknologi serta informasi serta penguasaannya yang dapat membuka wawasan setiap individu dan organisasi penggunanya. Hal ini terkait dengan upaya untuk membuka akses masyarakat pada wilayah-wilayah terisolir guna meningkatkan potensi perekonomian, ilmu pengetahuan dengan sasaran akhir adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **7. Pengembangan Wilayah dan Permukiman**

Kota Kandangan sebagai pusat kegiatan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, membawa konsekuensi terhadap kebutuhan infrastruktur penunjang yang semakin meningkat dalam upaya mewujudkan pengembangan Kota Kandangan. Dibutuhkan adanya ketersediaan fasilitas perekonomian seperti pasar yang representatif dan mampu melayani proses transaksi barang dan jasa baik pada lingkup regional Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun interregional dengan daerah-daerah lainnya yang berdekatan.

Kota Kandangan sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan ini daerah sekaligus Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki daya tarik bagi masyarakat yang ada di kecamatan dan desa untuk mencari peluang usaha dalam rangka memenuhi hajat hidupnya. Terjadi perpindahan masyarakat dari desa-desa dan kecamatan ke Kota Kandangan khususnya bagi penduduk yang termasuk dalam

katagori usia produktif. Hal ini berdampak pada semakin banyaknya kebutuhan sarana dan prasarana permukiman di kawasan perkotaan. Secara perlahan terjadi konsentrasi pemukiman pada kawasan-kawasan tertentu di kawasan perkotaan disamping juga semakin meningkatnya kebutuhan sarana prasarana penunjang permukiman.

Kebutuhan akan perluasan kawasan perkotaan sebagai kebijakan pengembangan wilayah pada wilayah-wilayah tertentu sehingga memungkinkan untuk dapat menampung pertambahan jumlah penduduk diperkotaan yang terkait dengan penyediaan kawasan permukiman. Sejalan dengan ini maka pada fase selanjutnya juga dibutuhkan berbagai penunjang permukiman seperti penyediaan lahan penampungan persampahan dan ruang terbuka hijau (RTH), penyediaan layanan air bersih.

### **8. Peningkatan pengamalan keagamaan**

Globalisasi dan derasnya arus informasi akan semakin mempengaruhi perilaku dan pola hidup masyarakat yang mengarah pada hedonisme. Penyimpangan perilaku termasuk penggunaan narkoba oleh generasi muda akan terus terjadi. Dengan derasnya arus globalisasi dan informasi media, maka mulai terjadi kecenderungan masyarakat muda pada khususnya untuk mengikuti budaya asing, dimana sebagian dari budaya tersebut tidak sesuai dengan norma serta akidah agama Islam khususnya. Agama dan budaya daerah sesungguhnya mempunyai nilai luhur dan nilai historis yang terus harus dipertahankan dan dikembangkan untuk mendasar citra diri daerah. Ketahanan norma agama dapat ditingkatkan, maka diperlukan pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap pelaksanaan ajaran agama itu sendiri.

Di Kabupaten HSS, kesadaran masyarakat dalam kehidupan beragama sangat tinggi tetapi bagi sebagian kelompok masyarakat masih belum mengimbangnya dengan perilaku kesehariannya. Ke depan hal-hal yang perlu dilakukan adalah : membentuk masyarakat yang semakin agamis sekaligus pula bersifat jujur, sehat, cerdas, produktif, serta berakhlak mulia, dan mampu menjaga kerukunan antar umat beragama baik berpemerintahan, bermasyarakat maupun berusaha. Untuk itu perlu kerjasama pemerintah dengan lembaga keagamaan dalam mendorong serta meningkatkan kualitas SDM serta mendorong peran ulama dan pondok pesantren dalam

menciptakan kehidupan beragama serta pelaksanaan ajaran agama di lingkungan masyarakat dan birokrasi.

Kaitan antara isu strategis, dengan prioritas kebijakan nasional, Kalimantan Selatan dan arahan dalam RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2005-2025 dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1**  
**Analisis Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018 Terkait Isu Perencanaan Pusat, Regional dan Kabupaten serta Permasalahan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam RPJPD Tahap III**

<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Isu Strategis Kalimantan Selatan</b>	<b>Arahan RPJPD Kabupaten HSS</b>	<b>Isu Strategis Kabupaten HSS</b>
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Ketahanan pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim investasi dan iklim usaha 8. Energi 9. Lingkungan hidup 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik 11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi	1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial dan budaya 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing 3. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis lingkungan dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi geografis 4. Penanganan Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas serta aksesibilitas infrastruktur wilayah 5. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik dan bersih	1. Mewujudkan peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai- nilai agama serta membangun sikap religius 2. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing 3. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik 4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan agribisnis – agroindustri 5. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 6. Pengembangan wilayah dan kawasan agropolitan.	1. Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> ) 2. Peningkatan SDM (pendidikan dan kesehatan) 3. Perbaiki kondisi ekonomi daerah yang berbasis pada pengembangan agribisnis- agroindustri. 4. Peningkatan kesejahteraan sosial (MDGs) 5. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan permukiman serta aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil dengan percepatan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan 8. Peningkatan pengamalan keagamaan

Sumber : Hasil Analisis Tim RPJM Kab. HSS 2014 -2018

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1. VISI**

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang dicita- citakan pada masa yang akan datang dan merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir suatu perencanaan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014- 2018 merupakan dokumen yang menjabarkan rencana pembangunan lima tahun sesuai masa bhakti kepala daerah terpilih yaitu 2014- 2018 dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam dokumen RPJMD terkandung berbagai tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah yang disusun atas dasar visi dan misi kepala daerah sebagai bentuk pendekatan politis dari kepala daerah pada saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Dalam proses penyusunan dokumen RPJMD menggunakan pendekatan secara ilmiah terhadap berbagai tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu juga menggunakan pendekatan partisipatif, yaitu dengan melibatkan unsur masyarakat dalam menyerap berbagai aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada kondisi daerah, potensi daerah, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah, dengan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2013, maka pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 5 (lima) tahun ke depan terarah pada VISI:

**“ Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang  
Sejahtera, Agamis Dan Produktif”**

Pemahaman terhadap visi di atas ada 3 (tiga) keadaan yang dicita- citakan, yaitu:

**“ Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera”** yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya kesempatan berusaha, meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial.

**“ Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis”** yang ditandai dengan suasana kondusif dan religius yang sudah menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai- nilai keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**“ Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Produktif”** yang ditandai dengan antara lain meningkatnya kualitas layanan publik pada sektor pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan, meningkatnya kemandirian daerah, meningkatnya efisiensi ekonomi masyarakat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Kondisi yang diharapkan 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana visi tersebut di atas akan terlihat dari berbagai indikator, yakni:

1. Pada aspek sumber daya manusia (SDM)

Ada 3 (tiga) hal pokok dalam pembangunan SDM, yaitu meningkatnya tingkat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan kehidupan sosial budaya masyarakat.

1.1. Bidang pendidikan, yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya pendidikan yang dilandasi nilai- nilai dan moral agama, (b) meningkatnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, (c) meningkatnya pencapaian indikator keberhasilan bidang pendidikan, (d) Meningkatnya angka melek huruf, dan meningkatnya kompetensi profesional bagi tenaga pendidik. Pada tahapan pembangunan ketiga (2014- 2018)

pada RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2005- 2025 sasaran yang ingin dicapai adalah: rata- rata lama sekolah 9,84 tahun, angka melek huruf 98,99%, APK SD 116,43%, APK SMP 105,14%, APK SMA 45,76%, APM SD 100%, APM SMP 78,18% dan APM SMA 41,76%.

- 1.2. Bidang Kesehatan, yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya masyarakat yang sehat dan berkeadilan dalam mendapatkan pelayanan, (b) meningkatnya pencapaian indikator kesehatan dan (c) menurunnya angka kematian bayi (AKB), meningkatnya angka harapan hidup (AHH). Pada tahapan ketiga (2014- 2018) pada RPJP sasaran yang ingin dicapai adalah AHH 68,28 tahun, angka kematian ibu/ 100.000 KH sebesar 90 dan AKB/1.000 KH sebesar 5.
- 1.3. Bidang sosial budaya, yang ditunjukkan oleh: (a) semakin menguatnya wawasan kebangsaan, (b) semakin terwujudnya jati diri berdasarkan nilai- nilai agama, taat nilai dan adat istiadat serta budaya masyarakat, (c) menguatnya kepekaan sosial masyarakat, (d) terpelihara dan berkembangnya semua potensi sosial dan budaya masyarakat, dan (e) semakin meningkatnya budaya tertib masyarakat dan kepatuhan pada aturan.

## 2. Pada tata kelola pemerintahan.

- 2.1. Politik dan hukum, yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya ketertiban dan keamanan, (b) meningkatnya kepastian hukum, (c) meningkatnya budaya politik yang sehat dan (d) meningkatnya fungsi dan peran masyarakat dari lembaga politik yang efektif.
- 2.2. Pemerintahan, yang ditunjukkan oleh; (a) meningkatnya etos kerja, produktivitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan, (b) meningkatnya pelayanan publik yang lebih baik, (c) terwujudnya *good governance* dan (d) meningkatnya pendapatan daerah yang disertai peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

- 2.3 Pada aspek perekonomian daerah yang berbasis agribisnis dan agroindustri, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB riil 6,6% per tahun, penduduk miskin 4,5% dan pengangguran terbuka 3,60% .
  - 2.4 Sektor pertanian, yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya produksi dan produktivitas, (b) meningkatnya nilai tambah produk pertanian, (c) makin rendahnya alih fungsi lahan pertanian, (d) berkembangnya kawasan agropolitan, (e) optimalnya pemanfaatan waduk Amandit, (f) meningkatnya pendapatan petani dan peternak serta UMKM pelaku produk olahan berbasis pertanian.
  - 2.5 Sektor industri dan perdagangan yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya nilai tambah produk- produk unggulan, (b) berkembangnya agroindustri, (c) meningkatnya daya saing UMKM, dan (d) meningkatnya peran Kota Kandungan sebagai pusat perdagangan wilayah Banua Anam.
  - 2.6 Bidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, yang ditunjukkan (a) semakin banyaknya pengusaha daerah sebagai pelaku utama ekonomi, (b) semakin tumbuh dan berkembangnya UMKM, dan (c) berkembangnya pembiayaan berbasis Syariah.
  - 2.7 Infrastruktur, yang ditunjukkan oleh : (a) terwujudnya keterpaduan sistem pembangunan infrastruktur, (b) bertambahnya kemampuan pelayanan air bersih, (c) meningkatnya jumlah dan kualitas penyediaan prasarana pemukiman, (d) meningkatnya kemampuan penyediaan energi dan (e) meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian.
  - 2.8 Tata ruang yang ditunjukkan oleh: (a) konsistensi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan (b) adanya sinergi dan kerjasama antar wilayah.
- 3 Pada Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memelihara SDA dan lingkungan, (b) rehabilitasi lahan- lahan kritis, (c) terpeliharanya DAS Amandit

- 4 Pengembangan wilayah dan kawasan agropolitan yang ditunjukkan oleh semakin berfungsinya perkembangan wilayah dan kawasan agropolitan yang telah ditetapkan oleh daerah.
- 5 Pada kehidupan beragama, yang ditunjukkan oleh (a) meningkatnya masyarakat yang berakhlak mulia dengan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya sehingga terbentuk sikap religius, (b) meningkatnya kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dan merata melalui kesalehan dan kepedulian sosial umat, (c) meningkatnya kerukunan intern dan antar umat beragama, (d) meningkatnya jumlah dan fungsi sarana peribadatan serta kualitas pelayanannya dan (e) menurunnya tingkat kriminalitas, penyalahgunaan obat terlarang dan penurunan angka indeks korupsi.

Indikator- indikator di atas diharapkan akan terwujud secara bertahap dari tahun ke tahun hingga akhir 2018 yang akan datang, dan secara berkesinambungan sampai tahun 2025 sebagai perwujudan keadaan yang lebih baik sebagaimana indikator RPJPD Tahun 2005- 2025 yang dapat direalisasi sebagaimana yang direncanakan. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah melaksanakan misi.

## **5.2 MISI**

Guna mewujudkan visi sebagaimana yang telah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun misi pembangunan yang harus dilaksanakan dalam RPJMD tahun 2014 - 2018 adalah sebagai berikut:

### **1. Meningkatkan Kehidupan Beragama**

#### **1.1. Melaksanakan nilai- nilai agamis dalam kehidupan sehari- hari**

Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

- Meningkatkan dukungan fasilitas pelaksanaan nilai-nilai agamis dalam kehidupan sehari-hari.

- Meningkatkan pelaksanaan kehidupan beragama yang berkualitas dan lebih religius.
- Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keagamaan dalam kehidupan beragama.

## **2. Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah.**

Dalam misi ini dengan meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah, maka pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

### **2.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, meliputi:**

- Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, terdiri dari bidang pemerintahan dan bidang hukum
- Kualitas sumber daya manusia ini terdiri dari layanan pendidikan, layanan kesehatan,
- Pemasyarakatan dan peningkatan prestasi pada bidang olah raga, seni dan budaya.

### **2.2. Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian secara luas, industri kecil, dan pariwisata, meliputi:**

- Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.
- Sektor Pariwisata dan Industri Pariwisata
- Sektor Industri Kecil dan Menengah

## **3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah.**

Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

### **3.1. Membangun semangat dan mewujudkan tingkat produktivitas dan kinerja dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah, meliputi:**

- Peningkatan Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Perimbangan dan Penerimaan Sah lainnya)

- Perekonomian Masyarakat ( Sektor Industri, Sektor Perdagangan dan Jasa, Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi Koperasi )

### **3.2. Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Pembangunan**

- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur
- Meningkatkan kualitas kawasan Permukiman, ketersediaan Fasilitas Transportasi dan Fasilitas Umum lainnya
- Pengembangan Kawasan Pembangunan agropolitan
- Penataan Tata Ruang dan Lingkungan
- Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan

### **4. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Dan Informatika.**

Dalam misi ini dengan memanfaatkan teknologi dan informatika

- Meningkatkan Pengembangan dan pemanfaatan Iptek dalam upaya menumbuhkembangkan kapasitas produksi.
- Meningkatkan penyebaran informasi dan pemanfaatannya guna mendukung pembangunan daerah.

### **5.3. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi serta menjawab permasalahan pembangunan dan isu- isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

## **A. Tujuan**

Tujuan yang diinginkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018 pada dasarnya adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di masa 5 (lima) tahun mendatang dengan kehidupan keagamaan dan produktivitas yang tinggi serta stabilitas sosial yang kondusif. Selanjutnya adalah komitmen terhadap kepatuhan hukum oleh aparatur pemerintah dan masyarakat. Perbaikan kualitas kehidupan masyarakat (SDM) merupakan tujuan mendasar yang dilakukan secara bertahap terhadap tingkat pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal ditujukan untuk mendorong pengembangan potensi masyarakat dengan didukung oleh peningkatan infrastruktur yang terintegrasi dalam segala aspek kehidupan dengan tetap memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

### **1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.**

Reformasi birokrasi saat ini ditujukan untuk perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah salah satu fokus pemerintah Republik Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pemerintahan daerah yang ditopang oleh aparatur yang memiliki kinerja baik, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung etika dan bebas KKN, dalam wadah kelembagaan dengan ukuran yang tepat, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional.

### **2. Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan**

Kualitas sumberdaya manusia merupakan prasyarat utama pencapaian tingkat kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk itu pemerataan akses dan kualitas pendidikan menjadi perhatian utama untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang ada.

Pendidikan merupakan bagian dari investasi jangka panjang yang ditujukan untuk pembentukan kualitas dan karakter manusia. Pendidikan yang diharapkan dalam pembangunan selama 5 tahun perencanaan yang akan datang dapat meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan keterjaminan, peningkatan kualitas pemuda dan meningkatkan wawasan, pemasyarakatan dan prestasi olah raga dalam mewujudkan layanan pendidikan untuk menuju pendidikan yang berkarakter, cerdas dan berkompetensi.

### **3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**

Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap individu dan menjadi layanan dasar wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, sehingga mampu lebih berdaya dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima dan masyarakat Hulu Sungai Selatan yang Sehat dengan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, peningkatan jangkauan dan pemerataan pelayanan, terciptanya lingkungan yang sehat.

### **4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.**

Masyarakat yang mandiri dan berdaya saing diwujudkan dengan mendorong pemberdayaannya. Perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat ditempuh dengan intervensi Pemerintah Daerah melalui Lembaga Kemasyarakatan yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat bisa lebih meningkat.

### **5. Mengembangkan Potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, dan pariwisata.**

Potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian rakyat dalam arti luas, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Dalam hal ini dibutuhkan peran Pemerintah Daerah yang lebih serius dalam menyediakan sarana dan prasarana terkait, termasuk

penggunaan teknologi dan pembinaan terhadap masyarakat sehingga nilai tambah produk pertanian dapat ditingkatkan dan ketahanan pangan daerah dapat diwujudkan.

#### **6. Meningkatkan pendapatan sumber keuangan daerah dan perekonomian masyarakat**

Sumber keuangan daerah untuk mendanai belanja wajib dan belanja investasi, sumber pendapatan yang utama adalah dari Pemerintah melalui pendapatan dana perimbangan dan pemerintah Provinsi melalui bagi hasil pajak dan non pajak. Setelah itu pendapatan yang berasal dari PAD. PAD ini sebenarnya masih dapat ditingkatkan baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilakukan dengan memperbaiki manajemen pengelolaan, mereview beberapa Perda yang perlu disesuaikan dengan perkembangan daerah, tetapi tetap diupayakan jangan menimbulkan biaya tinggi. Ekstensifikasi dimulai dengan pendataan wajib pajak yang masih potensial dan belum terjangkau pelayanan. Pendapatan daerah ini digunakan untuk membangun barang publik dan jasa publik masyarakat yang selanjutnya kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat ditandai dengan membaiknya perekonomian masyarakat. Struktur ekonomi yang kuat dan terus meningkat serta merata pada segenap masyarakat merupakan tujuan pembangunan ekonomi, yang ditandai dengan pendapatan perkapita masyarakat yang terus meningkat dan menurunnya angka kemiskinan. Untuk itu potensi ekonomi masyarakat harus terus diberdayakan dan peran industri mikro, kecil dan menengah terus dikembangkan. Selanjutnya juga diperhatikan pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan dan kemajuan ekonomi rakyat.

#### **7. Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja**

Salah satu cara untuk menurunkan angka kemiskinan adalah menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Untuk itu salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja. Tujuan ini menjadi komitmen daerah

sebab tenaga kerja merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan, yang diharapkan dapat menggerakkan potensi ekonomi masyarakat. Tanpa tenaga kerja yang berkualitas, baik dari penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan pengetahuan maupun keterampilan yang didukung oleh kemudahan informasi untuk mengaksesnya maka akan sangat sulit untuk bersaing di dunia kerja.

**8. Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah**

Penyediaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana wilayah yang memadai, efisien dan efektif mutlak diperlukan. Infrastruktur merupakan faktor penunjang bagi aktivitas masyarakat di dalam suatu wilayah. Secara tidak langsung infrastruktur yang baik akan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat, membuka daerah-daerah yang terisolir, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Sehingga dari sini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**9. Terlaksananya nilai-nilai agamis yang menjadi sumber dalam kehidupan sehari-hari**

Tujuan pembangunan ini meletakkan dasar yang kuat bagi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan terarah serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kehidupan sosial masyarakat tetap berpegang teguh pada norma-norma keagamaan. Kehidupan masyarakat yang religius dan menyatu dalam budaya merupakan katalis bagi penyelenggaraan pembangunan yang bersendi ketuhanan di satu sisi dan di sisi lain juga merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri.

**10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan**

Pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan ekonomi menjadi hal yang memang seharusnya diupayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun dalam hal ini perlu tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dengan tetap melindungi sumberdaya hayati maupun sumberdaya alam yang

ada. Pengelolaan sumberdaya alam yang memperhatikan kaidah kelestariannya menjadi hal yang harus diwujudkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang tertata dan pembangunan yang ramah lingkungan

## **B. Sasaran**

Sasaran adalah identifikasi tujuan dalam jabaran yang lebih spesifik dan terkuantifikasi. Dengan memperhatikan tujuan-tujuan pembangunan di atas, maka sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta melayani
2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima
3. Terwujudnya perbaikan tunjangan aparatur pemerintahan
4. Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan
6. Tersedianya sarjana pendamping desa sejahtera
7. Meningkatnya sumber daya tenaga kependidikan di Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah
8. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan
9. Tersedianya Kartu Hulu Sungai Selatan sehat
10. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
11. Meningkatnya kualitas hidup angkatan kerja usia produktif
12. Meningkatnya ketersediaan bibit bagi petani
13. Meningkatnya produksi hasil pertanian
14. Meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian
15. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
16. Meningkatnya fasilitas beras untuk orang miskin (raskin)
17. Terwujudnya Kota Kandangan dan sekitarnya menjadi kota seni dan olah raga
18. Terwujudnya Kota Kandangan dan sekitarnya menjadi kota kuliner.

19. Terciptanya peningkatan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya
20. Terciptanya struktur ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan berkualitas dan merata
21. Meningkatnya pendapatan per kapita
22. Menurunnya persentase kemiskinan
23. Berkembangnya peran usaha mikro, kecil dan menengah
24. Meningkatnya pembinaan untuk 5.000 pengusaha kecil produktif
25. Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan
26. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman
27. Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan
28. Tersedianya bus untuk pelajar dan guru
29. Terwujudnya fasilitas teknologi dan informasi, serta penguasaan Iptek yang ramah lingkungan.
30. Terlindunginya sumberdaya hayati dan sumber daya alam yang dikelola dengan sangat memperhatikan kaidah kelestarian, ramah lingkungan serta kearifan lokal
31. Terwujudnya Hulu Sungai Selatan sebagai daerah oksigen
32. Terwujudnya kehidupan yang kondusif bagi umat beragama.
33. Tersedianya fasilitas sosial untuk alim ulama/ tokoh agama/ tokoh adat.
34. Tersedianya fasilitas penerangan/listrik untuk tempat peribadatan
35. Tersedianya dana jaminan bagi lansia, anak yatim/ piatu dan penyandang cacat
36. Terwujudnya tatanan sosial kemasyarakatan yang beriman dan bertaqwa.

## **BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi kebijakan merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan, dan arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi. Jadi dapat dikatakan bahwa strategi kebijakan adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi, dan arah kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil sebagai rumusan perencanaan yang mengarah pada bagaimana nantinya pemerintah daerah mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Dalam perumusan strategi dijabarkan dengan strategi secara umum untuk capaian pembangunan yang bersifat makro. Selain itu dalam upaya mencapai tujuan yang bersifat lebih mikro dapat dilakukan dengan strategi yang lebih detail terhadap capaian pada masing-masing misi yang telah ditetapkan yang terintegrasi dengan arah kebijakan.

### **6.1. Strategi**

Strategi pencapaian visi dan misi didasarkan atas analisis terhadap berbagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi daerah. Secara umum strategi pencapaian visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018 diarahkan pada optimalisasi fungsi pemerintahan dalam upaya melaksanakan fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan masyarakat, khususnya yang terkait dengan visi- misi daerah. Berdasarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan, maka strategi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014 - 2018 adalah :

#### **1) Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah.**

Dengan semakin tinggi kualitas yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan, akan dapat mengembangkan kemampuannya secara teknis dalam hal penyelenggaraan dan manajemen layanan pemerintahan. Hal ini akan berhubungan dengan semakin meningkatnya kapasitas pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur

tentunya juga harus didukung dengan komitmen moral dan etika serta etos kerja dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan demikian maka pelayanan kepada masyarakat akan benar-benar optimal dalam memberikan kepuasan masyarakat. Karenanya keberadaan aparatur berkualitas dan profesional akan sangat menentukan kapasitas dan kualitas layanan publik yang optimal melayani masyarakat.

**2) Peningkatan manajemen pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien.**

Pelaksanaan manajemen pemerintahan yang berkualitas dengan didukung oleh keberadaan aparatur profesional, memiliki etika dan komitmen moral yang tinggi akan menghasilkan layanan publik yang prima, efektif dalam mencapai tujuan dan efisien dalam penggunaan sumberdaya pembangunan. Dengan demikian perwujudan pemerintahan yang baik akan tercermin pada bagaimana tata kelola pemerintahan itu dijalankan yang mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi serta bersinergi dengan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Aspek perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan merupakan bagian dari manajemen tata kelola pemerintahan yang harus ditingkatkan kinerjanya. Pada aspek perencanaan harus semakin dimantapkan, pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk implementasi berbagai program dan kegiatan juga harus semakin ditingkatkan kualitasnya, sedangkan pada aspek pengawasannya juga harus lebih diintensifkan. Dalam aspek perencanaan pembangunan perlu dibangun sistem perencanaan daerah yang teradministrasi dengan baik, lebih terpadu antar sektor dan lebih dapat diimplementasikan. Keberadaan dokumen perencanaan pada setiap unsur pemerintah daerah hendaknya tidak hanya dalam bentuk formal saja tetapi harus lebih substantif sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya. Demikian pula dalam hal pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan harus teradministrasi secara jelas sesuai perundang-undangan yang mengaturnya.

**3) Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan pemerintah.**

Gambaran pelayanan umum kepada masyarakat sangat terkait dengan kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan dapat dinilai pada indeks kepuasan masyarakat. Semakin baik kualitas layanan yang diberikan akan semakin tinggi kepuasan masyarakat yang dilayani serta semakin besar pula rasa keadilan yang diterima oleh masyarakat. Kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sangat tergantung dengan kualitas aparatur dan kelembagaan yang memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

**4) Pelibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan pembangunan.**

Salah satu syarat dalam menciptakan *good governance* adalah adanya keterlibatan masyarakat yang bertindak tidak hanya sebagai obyek dalam pembangunan, tetapi juga sebagai subyek. Perkembangan dan kemajuan yang tercipta sebagai dampak dari globalisasi menuntut adanya keterlibatan masyarakat secara lebih luas dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat berakibat pada munculnya akses dan desakan-desakan untuk menyerap dan menerima berbagai aspirasi serta keinginan masyarakat yang lebih banyak terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat luas. Karenanya secara sinergi pelibatan masyarakat dalam hal penentuan kebijakan pembangunan harus disikapi sebagai kekayaan khazanah dalam alam demokrasi.

**5) Peningkatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan politik, penegakkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.**

Semakin tinggi penerapan hukum dan aturan dapat dilaksanakan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara maka akan semakin baik kualitas demokrasi yang tercipta di negara tersebut. Kualitas penegakan hukum dan aturan yang berlaku sangat tergantung pada tingkat kepatuhan masyarakatnya untuk mentaati hukum dan aturan dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Tingkat kepatuhan terhadap hukum dan aturan

searah dengan terciptanya keamanan dan ketertiban, dimana semakin tegas penerapan hukum dan aturan akan semakin dapat memberi rasa aman serta terciptanya suasana yang kondusif di masyarakat. Oleh karenanya sebagai bentuk layanan pemerintah terhadap rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat perlu ditempuh upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mematuhi berbagai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula terhadap kehidupan sosial politik, diperlukan adanya pembinaan yang dapat menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta semakin meningkatnya kualitas demokrasi.

**6) Peningkatan mutu pendidikan, penyediaan sarana prasarana pendidikan, dan pemerataan akses pendidikan.**

Pendidikan ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian dan prioritas dalam pembangunan suatu negara atau daerah. Perhatian yang diberikan kepada bidang pendidikan merupakan investasi yang sangat berharga untuk terciptanya kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang, dan untuk ini maka strategi peningkatan mutu dan layanan pendidikan serta penyediaan berbagai sarana penunjang pendidikan serta pemerataan terhadap akses pendidikan sangat dibutuhkan dalam perencanaan bidang pendidikan.

**7) Peningkatan layanan, sarana dan prasarana, serta pemerataan akses kesehatan.**

Pelayanan terhadap bidang kesehatan merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Kebutuhan terhadap layanan kesehatan ini dirasakan semakin meningkat dari tahun-ketahun, seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki kehidupan yang semakin berkualitas. Oleh karenanya perlu disikapi oleh pemerintah dengan semakin meningkatkan mutu pelayanan dan akses kesehatan yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**8) Peningkatan kemampuan dan kapasitas keuangan daerah.**

Permasalahan umum yang terjadi dibanyak daerah khususnya pemerintah kabupaten adalah terbatasnya penerimaan

pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kontribusi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah hanya rata-rata 5,88% total APBD (tahun 2008- 2012). Dengan demikian ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap transfer pemerintah pusat sangat tinggi. Kondisi ini hendaknya harus selalu mendapat perhatian besar dari seluruh komponen di daerah agar pemerintah daerah bisa lebih independen dalam pembiayaan dan penganggaran terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam menerapkan strategi peningkatan kemampuan dan kapasitas keuangan daerah ini perlu dilakukan inventarisasi kembali terhadap sumber-sumber penerimaan yang ada serta perluasan terhadap potensi sumber penerimaan yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah. Selain itu dalam hal penyelenggaraan manajemen keuangan daerah juga perlu untuk semakin ditingkatkan kinerjanya, khususnya di tingkat SKPD. Hal ini dirasa perlu guna mendapatkan opini yang lebih baik terhadap pengelolaan keuangan dan asset daerah.

**9) Pemantapan integrasi ekonomi antara sektor primer, sekunder dan tersier.**

Berdasarkan struktur ekonomi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ketergantungan terhadap sektor primer (pertanian) masih sangat tinggi. Hal ini dapat dimaklumi mengingat potensi sektor pertanian di Hulu Sungai Selatan memang sangat ditunjang dengan ketersediaan lahan pertanian yang relatif luas, disamping jumlah tenaga kerja yang berkerja pada sektor pertanian juga sangat besar. Sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi tumpuan sektor ekonomi yang berkembang di pedesaan. Umumnya sentra-sentra usaha pertanian ini tersebar di berbagai pedesaan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan jika ada kebijakan yang mendukung terhadap perkembangan sektor pertanian maka akan semakin mendorong perkembangan ekonomi di pedesaan. Namun demikian potensi yang terdapat pada sektor primer ini hendaknya dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk menumbuhkan perkembangan pada sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa). Untuk ini diperlukan

adanya kreativitas dan inovasi yang ditunjang oleh penguasaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan serta kemudahan akses informasi terhadap informasi pasar dan penggunaannya, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar dan terintegrasinya hubungan antar sektor.

**10) Pengembangan industri kecil, koperasi, pertanian, perdagangan, hotel, rumah makan, pariwisata dan sektor strategis lainnya.**

Guna mewujudkan terciptanya nilai tambah perekonomian yang didasarkan pada potensi lokal yang dimiliki oleh daerah dan diharapkan dapat mentransformasi sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, maka strategi terhadap pengembangan sektor industri kecil, koperasi, perdagangan, hotel, rumah makan dan pariwisata sangat penting untuk dilakukan. Keberhasilan dalam merubah struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier akan berimplikasi pada meningkatnya PDRB yang berarti meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Peningkatan pendapatan per kapita menunjukkan secara rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Searah dengan pertumbuhan pendapatan, maka tingkat daya beli masyarakatpun akan meningkat. Dengan demikian pilihan konsumsi terhadap berbagai barang dan jasa juga meningkat. Kebutuhan akan barang-barang konsumtif akan semakin menyuburkan perkembangan sektor perdagangan, perhotelan dan rumah makan. Perubahan pada pola konsumsi masyarakat hendaknya dapat diimbangi dengan ketersediaan pangan yang akan menjamin stabilitas ketahanan pangan di daerah.

**11) Penciptaan lapangan kerja, daya saing tenaga kerja serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.**

Ketersediaan lapangan kerja akan menjamin pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang bekerja sebagai balas jasa terhadap faktor produksi yang disumbangkan. Semakin luas lapangan kerja yang tersedia, maka semakin banyak tenaga kerja yang diserap akan berakibat pada semakin meningkatnya aktivitas perekonomian di daerah. Perkembangan aktivitas perekonomian akan semakin memperluas kebutuhan dan penyerapan tenaga kerja sebagai efek dari multiplier ekonomi

yang berkembang. Guna mempertahankan kesinambungan perkembangan perekonomian harus diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan ketenagakerjaan.

**12) Percepatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan MDG's.**

Upaya penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya bersama semua pemangku kepentingan sehingga dibutuhkan sinergi dan kemitraan semua pihak. Dalam strategi ini diperlukan tindakan yang mengarah pada perbaikan sistem jaminan sosial terhadap penyandang masalah sosial, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat miskin, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengembangan sektor ekonomi produktif. Selain itu perlu adanya peningkatan kemampuan dasar masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, permodalan, prasarana, teknologi serta informasi pasar. Pencapaian target MDG's juga merupakan agenda penting bagi pemerintah dalam menunaikan komitmen nasional dan internasional. Komitmen ini juga harus direspon oleh setiap daerah dalam upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, disparitas gender dan permasalahan sosial lainnya.

**13) Peningkatan dan pengembangan layanan sosial, peran pemuda, olahraga, seni dan budaya.**

Salah satu fungsi hakiki dari adanya pemerintahan adalah untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ditujukan dalam upaya untuk membuahkkan kemandirian dan kemampuan mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan. Oleh karenanya dibutuhkan upaya-upaya pelayanan sosial guna menciptakan perbaikan dan kemandirian masyarakat. Pelayanan yang diberikan terarah pada upaya menciptakan ketahanan sosial bagi penyandang masalah sosial, memberdayakan peranan perempuan dalam rangka keseimbangan gender, memberikan perlindungan terhadap anak-

anak dan lanjut usia, mewujudkan terciptanya keluarga sejahtera, menangani masalah bencana, pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Disamping itu untuk meningkatkan aktualisasi masyarakat juga dibutuhkan adanya perhatian terhadap peran pemuda dalam pembangunan, serta pelestarian terhadap seni dan budaya daerah.

**14) Peningkatan infrastruktur wilayah, infrastruktur ekonomi, infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur pemerintahan dan sosial lainnya.**

Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur semakin meningkat seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat sehari-hari dalam upaya memenuhi hajat hidup dan kebutuhan terhadap berbagai aktivitas ekonomi, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan informasi dan kebutuhan sosial lainnya. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan terhadap sarana infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar bagi perkembangan kehidupan masyarakat, dan karenanya merupakan kewajiban pemerintah secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur ini sebagai bentuk layanan yang dapat membawa masyarakatnya pada tingkatan kesejahteraan yang lebih layak.

**15) Perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup serta ekosistem**

Secara ekologi kehidupan komunitas masyarakat tidak terlepas dari keseimbangan ekosistem yang ada di sekitarnya. Untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat tidak hanya membutuhkan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar saja tetapi juga dibutuhkan adanya lingkungan yang terjaga dan asri serta memiliki kenyamanan. Pemanfaatan lahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentunya akan berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem. Dengan demikian diperlukan upaya yang dapat meminimalisasi dampak negatif dari pemanfaatan lahan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, sebagai daerah yang rawan terhadap bencana banjir juga diperlukan upaya untuk meminimalisasi potensi bencana serta melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan yang terjadi.

## **16) Pemantapan pemahaman dan pengamalan serta layanan keagamaan.**

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicirikan dengan suasana religius berdasarkan norma-norma keagamaan yang telah lama berkembang di masyarakat. Adanya pengaruh globalisasi yang tercipta dapat membawa akibat pada tergerusnya nilai-nilai keagamaan yang menjadi ideologi masyarakat khususnya kalangan generasi muda. Oleh karenanya efek negatif dari kemajuan global harus dapat diimbangi dengan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang telah ada di masyarakat. Sebagai bentuk layanan pemerintah di bidang keagamaan perlu adanya upaya bersama dengan melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh agama untuk membina dan melestarikan nilai-nilai Islami di kalangan generasi muda khususnya dan di masyarakat pada umumnya. Pengembangan terhadap sarana dan prasarana keagamaan melalui bantuan pemerintah juga perlu untuk tetap dilakukan sejalan dengan upaya memandirikan masyarakat terhadap upaya penyediaan sarana dan prasarana keagamaan sebagaimana yang telah berkembang selama ini. Selain itu juga perlu adanya asuransi untuk alim ulama dan peningkatan tenaga pendidik dibidang keagamaan.

### **6.2. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan adalah tujuan yang terkait dengan visi dan misi sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan serta upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Arah kebijakan yang ditetapkan pada periode tahun 2013 – 2018 merupakan jabaran dari visi dan misi RPJMD, namun tetap tidak terlepas dan harus mengacu pada arah kebijakan yang ada pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 – 2025. Arah kebijakan ini dimulai pada tahun 2014 sebab pada tahun 2013 masih melanjutkan RPJMD terdahulu.

### **Arah Kebijakan Tahun 2014**

Arah kebijakan tahun 2014 pada aspek pemerintahan terarah pada upaya untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang semakin baik, memberikan layanan masyarakat yang semakin berkualitas, mewujudkan masyarakat yang semakin mandiri dan dewasa serta berdaya saing dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik serta budaya, meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, serta memelihara kerukunan beragama. Pada aspek pemerintahan ini juga dilakukan kebijakan terarah untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban guna mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum memilih anggota DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan DPR pusat. Pada aspek ekonomi terarah pada upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan perekonomian daerah berbasis potensi lokal. Selanjutnya pada aspek pendidikan dan kesehatan terarah pada melaksanakan perbaikan mutu dan pemberian layanan masyarakat baik pada sektor pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih produktif dan berdaya saing. Pada bidang infrastruktur dilakukan upaya-upaya perbaikan dalam penyediaan infrastruktur wilayah, infrastruktur pendidikan, kesehatan, ekonomi, optimalisasi penataan ruang, serta melakukan upaya pemeliharaan lingkungan dan kebersihan dalam rangka terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan kualitas keagamaan.

### **Arah Kebijakan Tahun 2015**

Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2015 arah kebijakan yang dibuat tentunya tidak terlepas dari kesinambungan dengan tahun sebelumnya. Berbagai arah kebijakan pada tahun 2015 ini tetap mengacu pada arah kebijakan tahun sebelumnya, namun lebih tertuju pada upaya peningkatan hasil yang diperoleh pada tahun 2014. Perbaikan pada tata kelola pemerintahan harus selalu dilakukan dengan lebih mensinergikan pada upaya pelibatan unsur masyarakat atau lembaga perwakilan rakyat untuk terlibat secara aktif berkontribusi pada berbagai kebijakan pemerintah daerah, peningkatan kompetensi dan kapasitas diri aparatur pemerintahan, penataan kelembagaan dan hubungan kerja antar instansi,

meningkatkan kualitas kerja baik pada bidang perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengendalian, pelaporan, meningkatkan kinerja keuangan daerah, dan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban guna mensukseskan pelaksanaan pemilu memilih Gubernur/ Wakil Gubernur. Pada aspek ekonomi diarahkan pada pemanfaatan berbagai potensi lokal guna terciptanya nilai tambah ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, mendorong terbukanya lapangan kerja baru serta perbaikan kualitas tenaga kerja. Pada aspek sumberdaya manusia dilakukan kebijakan terhadap upaya meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta layanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, pada aspek infrastruktur wilayah diupayakan untuk melakukan persiapan pengembangan wilayah kawasan perkotaan dengan melakukan pembebasan lahan, meningkatkan ketersediaan jalan baru baik kecamatan maupun desa dalam upaya mengurangi isolasi, memelihara serta memperbaiki sarana jalan yang telah ada, memelihara dan meningkatkan infrastruktur ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sosial lainnya. Pada aspek lingkungan dilakukan pemeliharaan, pemulihan dan rehabilitasi serta mencegah potensi bencana alam yang mungkin terjadi.

### **Arah Kebijakan Tahun 2016**

Arah kebijakan pembangunan di tahun 2016 juga merupakan kesinambungan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan tahun sebelumnya. Pada aspek pemerintahan yakni melaksanakan berbagai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewajiban daerah guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Perbaikan kinerja pemerintahan terus diupayakan dengan melakukan peningkatan terhadap kompetensi aparatur, pembinaan kelembagaan pemerintah, peningkatan kinerja untuk menggali sumber pendapatan daerah, dan memelihara kerukunan hidup dalam suasana keagamaan. Pada aspek ekonomi melakukan pengembangan pemanfaatan potensi lahan, meningkatkan inovasi masyarakat dalam sektor pertanian dan industri pengolahan

khususnya produk andalan daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan pembinaan terhadap lembaga ekonomi yang ada di kecamatan maupun pedesaan. Pada aspek pendidikan dan kesehatan melakukan perbaikan terhadap mutu dan layanan pendidikan dan kesehatan, menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pembinaan dan pemberdayaan baik secara sosial maupun ekonomi, meningkatkan peran perempuan, perlindungan dan pembinaan anak terlantar, membina penyandang masalah sosial dalam upaya menumbuhkan kemandirian. Pada aspek infrastruktur wilayah melanjutkan upaya pengembangan dan perluasan kota Kandangan serta membuka akses masyarakat di pedesaan, peningkatan dan pemeliharaan berbagai infrastruktur kewilayahan, perhubungan, ekonomi, dan infrastruktur sosial lainnya termasuk pemerintahan, pada aspek lingkungan diarahkan pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan dan ekosistem, pengendalian bencana alam serta perbaikan/rehabilitasi terhadap dampak pembangunan yang berpengaruh terhadap lingkungan.

### **Arah Kebijakan Tahun 2017**

Arah kebijakan tahun 2017 merupakan penyesuaian terhadap berbagai tujuan dan target pembangunan 5 tahun RPJMD. Pada tahun 2017 dalam pelaksanaan RPJMD lebih melihat pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya guna memastikan tercapainya visi dan misi serta target capaian indikator kinerja dalam RPJMD 2014 - 2018.

Kebijakan yang dilaksanakan di tahun 2017 masih terarah pada peningkatan tata kelola pemerintahan, mewujudkan terlaksananya program-program ekonomi kerakyatan, peningkatan pendidikan masyarakat baik formal maupun informal serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pada aspek ekonomi dan sosial, pelaksanaan berbagai program harus benar-benar terfokus dalam upaya

mengurangi kemiskinan. Meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja dan perbaikan terhadap masalah ketenagakerjaan. Pada aspek infrastruktur wilayah diarahkan pada semakin meningkatnya perwujudan perluasan Kota Kandangan, penyediaan infrastruktur perekonomian guna lebih memantapkan mobilitas perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan masyarakat, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan guna menunjang tercapainya sumberdaya manusia yang lebih berkualitas dan mandiri. Selanjutnya pada aspek lingkungan diarahkan pada semakin meningkat dan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup, menjaga keseimbangan fungsi ekosistem baik kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.

### **Arah Kebijakan Tahun 2018**

Tahun 2018 merupakan tahun akhir dari periode pemerintahan yang mengusung visi **Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis dan Produktif**. Pada tahun ini segala program pembangunan dan target capaian kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2014 – 2018 termasuk capaian terhadap arahan kebijakan tahapan ketiga RPJPD harus dapat dituntaskan. Pada arah kebijakan pembangunan tahun 2018 ini tetap melanjutkan berbagai arah kebijakan tahun-tahun sebelumnya namun dengan penekanan pada penuntasan berbagai program yang masih rendah capaian kinerjanya. Secara umum arah kebijakan pembangunan tahun 2018 tetap terarah pada pengelolaan tata pemerintahan yang semakin berkualitas, pembangunan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan lahan, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui program-program pendidikan baik pendidikan formal ataupun non formal serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada aspek ekonomi diarahkan pada meningkatnya produksi barang dan jasa yang bersumber dari potensi ekonomi lokal, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan lembaga ekonomi lokal, peningkatan investasi dan permodalan. Pada aspek pendidikan dan kesehatan tetap diupayakan peningkatan mutu layanan baik pendidikan maupun kesehatan serta pemerataan akses pendidikan

dan kesehatan bagi masyarakat. Pada aspek infrastruktur wilayah, infrastruktur ekonomi, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur umum serta infrastruktur sosial lainnya juga selalu dilakukan peningkatan dan perbaikan sesuai kebutuhan guna lebih terpenuhinya aksesibilitas masyarakat.

## **BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

### **7.1. Kebijakan Umum**

Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara strategi yang telah disusun dengan arah kebijakan yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMD 2014 - 2018). Kebijakan umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menerjemahkan strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahunan, yaitu:

1. Strategi peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
  - a. Penguatan profesionalitas aparatur pemerintah
  - b. Pemantapan kualitas fungsi pemerintahan dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan.
2. Strategi peningkatan manajemen pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
  - a. Memantapkan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan.
3. Strategi peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan pemerintah. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
  - a. Memantapkan kualitas institusi pemberi layanan langsung dan layanan dasar kepada masyarakat
  - b. Memantapkan kualitas aparat pemberi layanan

4. Strategi pelibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan pembangunan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
  - a. Meningkatkan sinergi pemerintah dengan masyarakat dan swasta pada proses pembangunan
5. Strategi peningkatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan politik, penegakkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
  - a. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
  - b. Meningkatkan sosialisasi produk hukum daerah dan aturan perundang-undangan yang berlaku
6. Strategi peningkatan mutu dan layanan pendidikan formal dan informal, penyediaan sarana prasarana pendidikan dan pemerataan akses pendidikan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
  - a. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga pendidik serta peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik yang bertugas di wilayah terpencil
  - b. Menyediakan sarana pendidikan yang lebih bermutu dan memadai
  - c. Menyediakan pendidikan gratis untuk SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMU/ sederajat berasal dari keluarga kurang mampu.
  - d. Menyediakan beasiswa bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu yang berasal dari daerah
7. Strategi peningkatan layanan serta pemerataan akses kesehatan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
  - a. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan
  - b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan
  - c. Meningkatkan sistem jaminan kesehatan dan pengobatan gratis di RSUD H.Hasan Basry
  - d. Menjadikan RSUD H.Hasan Basry sebagai rumah sakit rujukan Banua Enam

- e. Meningkatkan transparansi dalam pelayanan di RSUD H.Hasan Basry
  - f. Meningkatkan Puskesmas di semua kecamatan untuk melayani rawat inap dengan skala prioritas.
8. Strategi peningkatan kemampuan dan kapasitas keuangan daerah. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
    - a. Meningkatkan penggalan terhadap sumber-sumber penerimaan keuangan daerah
  9. Strategi pemantapan integrasi ekonomi antara sektor primer, sekunder dan tersier. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
    - a. Meningkatkan peran sektor industri, sektor perdagangan, serta sektor jasa swasta
    - b. Menumbuhkan ekonomi pedesaan yang terintegrasi dengan penyediaan pasar baik di daerah maupun luar daerah
    - c. Meningkatkan Kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat petani/nelayan
  10. Strategi pengembangan industri kecil, koperasi, pertanian dan kedaulatan pangan, perdagangan, hotel, rumah makan dan pariwisata serta sektor strategis lainnya. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
    - a. Pengembangan kawasan agroindustri berbasis komoditas lokal
    - b. Meningkatkan investasi dan permodalan
    - c. Meningkatkan produktivitas pertanian secara intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mewujudkan ketahanan pangan
  11. Strategi penciptaan lapangan kerja, daya saing tenaga kerja serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
    - a. Menciptakan peluang usaha dan revitalisasi terhadap unit-unit usaha strategis yang dapat menyerap tenaga kerja
    - b. Melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan ketenagakerjaan, manajerial usaha dan pemasaran produk
    - c. Meningkatkan SDM kalangan muda sebagai tenaga kerja potensial/siap kerja

12. Strategi percepatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan MDG's. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
  - a. Meningkatkan perkembangan sektor sektor ekonomi produktif daerah
  - b. Meningkatkan implementasi rencana aksi daerah dalam menanggulangi kemiskinan.
13. Strategi penyediaan layanan sosial, pemuda, olahraga, seni dan budaya. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
  - a. Meningkatkan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial
  - b. Melakukan penanganan dan penanggulangan bencana
  - c. Meningkatkan peran pemuda dan mengembangkan keolahragaan dalam pembangunan
  - d. Melestarikan serta mengembangkan seni dan budaya daerah
  - e. Meningkatkan peran perempuan
  - f. Melaksanakan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera
14. Strategi peningkatan infrastruktur wilayah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan infrastruktur sosial lainnya. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
  - a. Meningkatkan pemenuhan penyediaan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur kewilayahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan infrastruktur lainnya.
  - b. Meningkatkan pengembangan sarana prasarana permukiman, kependudukan, air bersih dan penunjang lainnya
  - c. Pengembangan wilayah Kota Kandangan
15. Strategi perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup serta ekosistem rawa. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
  - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan
  - b. Mewujudkan penataan ruang yang sesuai dan mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomian

- c. Meningkatkan pengembangan dan konservasi sumberdaya air untuk mengoptimalkan perlindungan dan pemanfaatan lahan
16. Strategi pemantapan pemahaman dan pengamalan serta layanan keagamaan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:
- a. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang agamis
  - b. Meningkatkan layanan keagamaan serta sarana dan prasarana keagamaan

## 7.2. Program Pembangunan Daerah

Guna mencapai misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat.

Program pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014 – 2018 dimuat pada tabel 7.1 dibawah ini.

**Tabel 7.1. Perumusan Program Prioritas Pada Program Pembangunan Daerah**

KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
<b>Strategi 1: Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Aparatur Pemerintah</b>			
<b>1. Penguatan Profesionalitas aparatur pemerintah</b>	1) Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Prosentase formasi pegawai dan jabatan sesuai dengan kompetensi aparatur	BKD Diklat
	2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kesejahteraan aparatur.	BKD Diklat/DPPKAD
		Pengkajian dan evaluasi kelembagaan SKPD	Bag organisasi Setda
	3) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Penurunan hasil temuan PKPT.	Inspektorat Kabupaten

<b>KEBIJAKAN UMUM</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SKPD PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>2. Pemantapan kualitas fungsi pemerintahan dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan</b>	1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jangka waktu pembahasan PERDA dan Implementasi PERDA	Set DPRD/Bag. Hukum Setda
<b>Strategi 2: Peningkatan Manajemen Pemerintahan Yang Berkualitas, Efektif Dan Efisien</b>			
<b>1. Memantapkan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan.</b>	1) Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Penyusunan E-planning, E-Budgeting dan E-Monitoring	Bappeda
	2) Program pengembangan wilayah perbatasan	Peningkatan keamanan dan kestabilan di wilayah perbatasan	Bag Tapem Setda
	3) Program perencanaan pengembangan kota	Penanganan dan penyelesaian masalah persampahan, drainase perkotaan, penataan kawasan permukiman, sistem transportasi.	Dinas LH, Tt Kota dan Perdesaan Dinas PU Dinas Perhubungan Kominfo
	4) Program perencanaan sosial dan budaya	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pembangunan di bidang sosial dan budaya lainnya	BAPPEDA
	5) Program pengembangan data/informasi	Penyediaan data dan informasi pembangunan	Bappeda/BPS
<b>Strategi 3 : Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Pelayanan Pemerintah</b>			
<b>1. Memantapkan kualitas institusi pemberi layanan langsung dan layanan dasar kepada masyarakat</b>	1) Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Web site milik pemerintah Daerah	Dishub Kominfo
	2) Program penataan administrasi kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk,	Disdukcatpil
		Rasio pasangan berakte nikah	
		Kepemilikan KTP, Kepemilikan akta kelahiran per1.000 penduduk	
3) Program pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Prosentase peningkatan pelayanan pemerintah Kecamatan terhadap	Kecamatan dan SKPD terkait	
	Lama proses perijinan (hari)	Kecamatan, KPPT	
	Persentasi penerbitan perijinan (%)	KPPT	
<b>2. Memantapkan kualitas aparat pemberi layanan</b>	1) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Jumlah Perpustakaan Desa	Bagian Humas Setda,
		Jumlah pengunjung perpustakaan Daerah	Kantor Pustarda, Dok dan Arsip

KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		pertahun	Daerah
		Data tersedia	
	2) Program kerjasama pembangunan	Jenis dan jumlah bank dan cabang.	Bagian Ekobang
<b>Strategi 4: Pelibatan Masyarakat Dalam Kebijakan Pembangunan</b>			
<b>1. Meningkatkan sinergi pemerintah dengan masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan</b>	1) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi yang mandiri	Cakupan peserta KB aktif  Penurunan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	Badan KB, Pemberdayaan masyarakat dan perempuan (BKBMP), Dinkes
	2) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Sarana Sosial seperti (panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi)	Dinsos Tk dan Trans,
	3) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio pos kamling perdesa	Satpol PP
	4) Program kerjasama informasi dengan media massa	Prosentase jaringan komunikasi publik	Dishubkominfo
<b>Strategi 5 : Peningkatan Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pendidikan Politik, Penegakkan Aturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku</b>			
<b>1. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</b>	1) Program pengembangan wawasan kebangsaan	Tingkat kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik.	Badan kesbangpol dan PB,
	2) Program pemeliharaan keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Rasio Jumlah petugas Satpol PP per 1.000 penduduk.	Satpol PP
<b>2. Meningkatkan sosialisasi produk hukum daerah dan aturan perundang-undangan yang berlaku</b>	1) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tertata dan tersosialisasinya peraturan perundang – undangan	Set DPRD, Bagian Hukum Setda,
		Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Bagian Hukum. Set DPRD
<b>Strategi 6 : Peningkatan Mutu Dan Layanan Pendidikan Formal Dan Informal, Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Dan Pemerataan Akses Pendidikan</b>			
<b>1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga pendidik</b>	1) Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka kelulusan siswa (%)</li> <li>• Persentase guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV</li> </ul>	Dinas Pendidikan

<b>KEBIJAKAN UMUM</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SKPD PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>serta peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik yang bertugas di wilayah terpencil</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas belajar mengajar berupa penyediaan sarana transportasi bus untuk siswa dan guru.</li> </ul>	
<b>2. Menyediakan sarana pendidikan yang lebih bermutu dan memadai</b>	1) Program Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan
	2) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	APM SD, APK SD dan APS SD APM SMP, APK SMP dan APS SMP	Dinas Pendidikan
	3) Program Pendidikan Menengah	APM SMA, APK SMA dan APS SMA	Dinas Pendidikan
	4) Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	Dinas Pendidikan
	5) Program Pendidikan Luar Biasa	Jumlah Sekolah berkebutuhan khusus.	Dinas Pendidikan
<b>3. Menyediakan pendidikan gratis untuk SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan khusus untuk SMU/ sederajat berasal dari keluarga kurang mampu</b>	1) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Ketersediaan pendidikan gratis untuk SD/ sederajat dan SMP/ sederajat bagi siswa kurang mampu.	Dinas Pendidikan
	2) Program Pendidikan Menengah	Ketersediaan pendidikan gratis untuk SMU/ sederajat bagi siswa kurang mampu	Dinas Pendidikan
<b>4. Menyediakan beasiswa bagi pelajar berprestasi</b>	1) Program Pembinaan dan Pengembangan anak didik.	Jumlah pelajar berprestasi yang menerima beasiswa	Dinas Pendidikan
<b>Strategi 7 : Peningkatan Layanan Serta Pemerataan Akses Kesehatan</b>			
<b>1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan</b>	1) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah Angka Kematian Ibu per 100.000 KH  Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	Dinas Kesehatan
	2) Program peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita	Jumlah Angka Kematian Bayi per 1.000 KH  Persentase balita gizi buruk.	Dinas Kesehatan
	3) Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Peserta KB aktif	BKBPMP, Dinas Kesehatan
	4) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (kartu HSS sehat)	Dinas Kesehatan
	5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penemuan penderita pneumonia balita (%)	Dinas Kesehatan

<b>KEBIJAKAN UMUM</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SKPD PENANGGUNG JAWAB</b>
		Penemuan pasien baru TB BTA positif	
		Penderita DBD yang ditangani	
		Penemuan penderita diare	
		Penanganan penderita HIV/AIDS	
	6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rumah tangga pengguna air bersih.	PU
<b>2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan</b>	1) Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pasien jamkesda dan jamkesmas yang dirujuk	Dinas Kesehatan,
	2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	Dinas Kesehatan
<b>3. Meningkatkan sistem jaminan kesehatan dan pengobatan gratis di RSUD H.Hasan Basry</b>	1) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (kartu HSS sehat).	Dinas Kesehatan
<b>4. Menjadikan RSUD H.Hasan Basry RS Rujukan Banua Enam</b>	1) Program Peningkatan Kapasitas dan sumber daya aparatur	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan rumah sakit	Rumah Sakit
	2) Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	Rumah Sakit
<b>5. Meningkatkan transparansi dalam pelayanan di RSU H.Hasan Basry</b>	1) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesediaan standar pelayanan kesehatan (SOP) RSU	Rumah Sakit
<b>6. Meningkatkan Puskesmas di semua kecamatan untuk melayani rawat inap dengan skala prioritas</b>	1) Program pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah kunjungan dan layanan pasien di puskesmas  Rasio Puskesmas per satuan penduduk  Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien Masyarakat miskin (Mandiri, Kartu HSS Sehat)	Dinas Kesehatan
<b>Strategi 8 : Peningkatan Kemampuan Dan Kapasitas Keuangan Daerah</b>			
<b>1. Meningkatkan penggalan terhadap sumber-sumber penerimaan keuangan daerah</b>	1) Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase PAD Terhadap APBD.	DPPKAD
		Prosentasi retribusi pasar terhadap PAD	Kantor pengelola pasar
	2) Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan	Peningkatan jumlah dan macam pajak serta retribusi daerah	DPPKAD
<b>Strategi 9 : Pemantapan Integrasi Ekonomi Antara Sektor Primer, Sekunder Dan Tersier</b>			

<b>KEBIJAKAN UMUM</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SKPD PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>1. Meningkatkan peran sektor industri, sektor perdagangan, serta sektor jasa swasta</b>	1) Program Peningkatan Iptek Sistem Produksi	Meningkatnya Penerapan teknologi pengolahan hasil agroindustry (jenis yaitu vakum seller, perajang kerupuk dan pemerah santan)	Dinas perindagkop
	2) Program Peningkatan Kemampuan Tekhnologi Industri	Meningkatnya jenis alat produksi cor logam	Dinas perindagkop
<b>2. Menumbuhkan ekonomi pedesaan yang terintegrasi dengan penyediaan pasar baik di daerah maupun luar daerah</b>	1) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Jumlah pasar tradisional perkecamatan	Dinas perindagkop ,
<b>3. Meningkatkan Kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat tani/nelayan</b>	1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	Pertanian & TPH
	2) Program pengembangan sistem penyuluhan pertanian	Cakupan bina kelompok tani  Cakupan bina kelompok nelayan	Bappeluh KP/Dinas pertanian TP
<b>Strategi 10 : Pengembangan Industri Kecil, Koperasi, Pertanian Dan Kedaulatan Pangan, Perdagangan, Hotel, Rumah Makan, Pariwisata dan Sektor Strategis Lainnya</b>			
<b>1. Pengembangan agroindustri berbasis komoditas lokal</b>	1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Peningkatan produksi hasil hutan komoditas unggulan (kayu Manis)  Peningkatan produksi hasil perkebunan komoditas unggulan (kelapa dalam)	Hutbun
	2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan pembinaan Usaha Mikro kecil menengah (UMKM)  Terwujudnya kota kuliner	Dinas perindagkop
	3) Program Peningkatan Produksi pertanian / perkebunan	Tingkat Produktivitas Pertanian (padi/hektar)	Dinas Pertanian & TPH
	4) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Tingkat Produksi perikanan lokal (ton) Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	Diskannak
<b>2. Meningkatkan investasi dan permodalan</b>	1) Program Peningkatan Iklim Investasi	Rasio daya serap Tenaga Kerja	Bagian Ekobang, Bappeda, BPS
<b>3. Meningkatkan produktivitas pertanian secara intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mewujudkan ketahanan pangan</b>	1) Program Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian / perkebunan	Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan hasil produksi	Dinas Pertanian & TPH, Dinas Hutbun,

<b>KEBIJAKAN UMUM</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SKPD PENANGGUNG JAWAB</b>
	2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan utama  Regulasi ketahanan Pangan	Bappeluh KP, Dinas Pertanian & TPH,
<b>Strategi 11 : Penciptaan Lapangan Kerja, Daya Saing Tenaga Kerja Serta Perlindungan Dan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>			
<b>1. Menciptakan peluang usaha dan revitalisasi terhadap unit-unit usaha strategis yang dapat menyerap tenaga kerja</b>	1) Program Peningkatan kesempatan kerja	Terciptanya lapangan kerja	Dinas Sos, TK dan Transmigrasi
<b>2. Melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan ketenagakerjaan, manajerial usaha dan pemasaran produk</b>	1) Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja.  Penurunan Tingkat Pengangguran terbuka  Pencari kerja yang ditempatkan	Dinas Sos, TK dan Transmigrasi, SKPD Terkait
<b>3) Meningkatkan SDM kalangan muda sebagai tenaga kerja potensial/siap kerja</b>	1) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Pembinaan UMKM (5.000 unit)	Dinas Perindagkop UKM
<b>Strategi 12 : Percepatan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Dan MDG's</b>			
<b>1. Meningkatkan perkembangan sektor ekonomi produktif daerah</b>	1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif	Disperindagkop & UKM
<b>2. Meningkatkan implementasi rencana aksi daerah dalam menanggulangi kemiskinan</b>	1) Program Perencanaan Pembangunan ekonomi	Ketersediaan data dan informasi untuk pembangunan ekonomi daerah	Bappeda/BPS
		Prosentase pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin/RASKIN (%)	Dinsos TK dan Trans
	2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Ketersediaan sarjana pendamping desa.	Ekobang
	3) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS)	Persentase penduduk miskin	Bappeda, Badan KBPMP, Dinsos, TK dan Trans
<b>Strategi 13 : Penyediaan Layanan Sosial, Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya</b>			

<b>KEBIJAKAN UMUM</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SKPD PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>1. Meningkatkan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial</b>	1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)  Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dinsos TK dan Trans
	2) Program pembinaan anak terlantar	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Dinsos TK dan Trans
	3) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Dinsos TK dan Trans
	4) Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Dinsos TK dan Trans
<b>2. Melakukan penanganan dan penanggulangan bencana</b>	1) Program Pasca Bencana	Rasio penanggulangan bencana	Badan Kesbangpol dan PB
<b>3. Meningkatkan peran pemuda &amp; mengembangkan keolahragaan dalam pembangunan</b>	1) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah kelompok Olah Raga	Disdik
	2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Gedung Olah Raga	PU
<b>4. Melestarikan serta mengembangkan seni dan budaya daerah</b>	1) Program Pengelolaan kekayaan seni dan budaya	Jumlah kelompok seni.	DisBud Par
		Jumlah Gedung	PU
		Panggung terbuka	DisBud Par
		Prosentase Pelestarian budaya lokal	DisBud Par
		Festival seni dan budaya (kegiatan)	DisBud Par
2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan pariwisata	Disbudpar	
	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	Disbudpar/BPS	
<b>5. Meningkatkan peran perempuan</b>	1) Program Penguatan Kelembagaan gender dan anak	Partisipasi angkatan kerja perempuan  Jumlah kecamatan layak anak (percontohan)  Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK  Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa  Jumlah masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	BKBMP

<b>KEBIJAKAN UMUM</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SKPD PENANGGUNG JAWAB</b>
	2) Program Kesenjangan kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rasio penanganan KDRT	BKBPMP
<b>6. Melaksanakan prograam keluarga berencana dan keluarga sejahtera</b>	1) Program Pembinaan kesejahteraan Keluarga	Cakupan peserta KB aktif Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Pertumbuhan Penduduk	BKBPMP
<b>Strategi 14 : Peningkatan Infrastruktur Wilayah, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Pemerintahan Dan Infrastruktur Sosial Lainnya</b>			
<b>1. Meningkatkan pemenuhan penyediaan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur kewilayahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan infrastruktur lainnya</b>	1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Proporsi Jembatan dalam kondisi baik	Dinas PU
	2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Dinas PU
	3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Izin Trayek Jumlah Uji KIR angkutan Umum	Dis Hub Info&Kom
	4) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Terminal Pengembangan Terminal Tipe B sesuai standar	Dis Hub Info&Kom
	5) Program pengendalian dan Pengamanan lalu lintas	Pemasangan Rambu-rambu	Dis Hub Info&Kom
	6) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	Web site pemerintah daerah Prosentase jaringan komunikasi public	Dis Hub Info &Kom
	7) Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio Ketersediaan Listrik	Dinas Pertambangan dan Energi
<b>2. Meningkatkan pengembangan sarana prasarana permukiman, kependudukan, air bersih dan penunjang lainnya</b>	1) Program Pengembangan Perumahan	Rumah Layak	Dinas PU
		Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Dinas LH & KPPT
	2). Program Lingkungan sehat Perumahan	Rumah tangga pengguna air bersih.	Dinas PU

<b>KEBIJAKAN UMUM</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SKPD PENANGGUNG JAWAB</b>
		Prosentase Rumah Tangga bersanitasi.	
		Prosentasi lingkungan rumah yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (IKM)	
<b>3. Mewujudkan pengembangan wilayah Kota Kandangan</b>	1) Program Perencanaan Pengembangan Kota	Terciptanya rumah yang layak huni dan terjangkau	Dinas PU dan SKPD terkait
<b>Strategi 15 : Perlindungan Dan Perbaikan Lingkungan Hidup.</b>			
<b>1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan</b>	1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Pengawasan terhadap AMDAL pelaksanaan	Dinas LH TK dan Perdesaan, Distamben
	2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Penanganan sampah se kabupaten Rasio TPS persatuan penduduk	Dinas LH dan Perdesaan
<b>2. Mewujudkan penataan ruang yang sesuai dan mampu mawadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomian</b>	1) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	RTH Publik RTH Private	LH Takodes LH Takodes
<b>3. Meningkatkan pengembangan dan konservasi sumberdaya air untuk mengoptimalkan perlindungan dan pemanfaatan lahan</b>	1) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kerusakan kawasan hutan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis sub-susb DAS amandit dan MASIMPAN	Dinas kehutanan, perkebunan,
<b>Strategi 16 :Pemantapan Pemahaman Dan Pengamalan Serta Layanan Keagamaan</b>			
<b>1. Mengembangkan Kehidupan Masyarakat yang Agamis</b>	1) Program pengembangan wawasan kebangsaan	Menjaga keharmonisan hidup beragama	Seluruh SKPD terkait
<b>2. Meningkatkan layanan keagamaan serta sarana prasarana keagamaan</b>	1) Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan pembinaan	Bagian Kesra
		Rasio tempat ibadah (masjid) persatuan penduduk	Bagian Kesra
		Jumlah pemuka agama yang diberikan jaminan sosial	Bagian Kesra
		Jumlah tempat ibadah yang mendapat fasilitas penerangan	Dinas Pertambang dan Energi
		Angka kriminalitas	Satpol PP

<b>KEBIJAKAN UMUM</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SKPD PENANGGUNG JAWAB</b>
		(kasus)	

**BAB VIII**  
**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS**  
**YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 atau merupakan pelaksanaan tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan atas visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program kerja kepala daerah periode 2014 – 2018.

Indikasi rencana program prioritas mengacu pada program-program sesuai dengan yang termaktub dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta perubahannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**. Secara lengkap Indikasi Rencana Program Prioritas berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang disertai kebutuhan pagu indikatif pendanaan per SKPD pada lima tahun kedepan (tahun 2014- 2018) dapat dilihat pada tabel 8.1 berikut:

**Tabel VIII.1**  
**INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PAGU INDIKATIF PENDANAAN**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	1	Urusan Wajib															
1	1	<b>Pendidikan</b>															
1	1	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	2.645.893.250,00	1 tahun	2.698.811.115,00	1 tahun	2.752.787.337,30	1 tahun	2.807.843.084,05	1 tahun	2.863.999.945,73	1 tahun	13.769.334.732,07	Dinas Pendidikan
1	1	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tertaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1 tahun	963.370.000,00	100%	782.637.400,00	100%	798.290.148,00	100%	814.255.950,96	100%	830.541.069,98	100%	4.189.094.568,94	Dinas Pendidikan
1	1	3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tertaksananya Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	52.865.700,00	2 Laporan	53.923.014,00	2 Laporan	55.001.474,28	2 Laporan	56.101.503,77	2 Laporan	57.223.533,84	2 Laporan	275.115.225,89	Dinas Pendidikan
1	1	4 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Tertaksananya Program Pendidikan Anak Usia Dini	52.8%	57.30%	925.866.000,00	61.80%	944.383.320,00	66.30%	963.270.986,40	70.80%	982.536.406,13	75.30%	1.002.187.134,25	75.30%	4.818.243.846,78	Dinas Pendidikan
1	1	5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Tertaksananya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	7.34 Tahun	7.5 Tahun	11.202.850.340,00	7.8 Tahun	12.883.277.891,00	8.1 Tahun	14.815.769.574,65	8.3 Tahun	17.038.135.010,85	8.5 tahun	19.593.855.262,47	8.5 tahun	75.533.888.078,97	Dinas Pendidikan
1	1	6 Program Pendidikan Menengah	Tertaksananya Program Pendidikan Menengah	46.59%	53.11%	5.648.277.569,00	59.63%	6.495.519.204,35	66.16%	7.469.847.085,00	72.68%	8.590.324.147,75	79.20%	9.878.872.769,92	79.20%	38.082.840.776,02	Dinas Pendidikan
1	1	7 Program Pendidikan Non Formal	Tertaksananya Program pendidikan non Formal	33 Lembaga Pendidikan Non Formal	35 Lembaga Pendidikan Non Formal	357.376.000,00	37 Lembaga Pendidikan Non Formal	364.523.520,00	40 Lembaga Pendidikan Non Formal	371.813.990,40	43 Lembaga Pendidikan Non Formal	379.250.270,21	43 Lembaga Pendidikan Non Formal	386.835.275,61	43 Lembaga Pendidikan Non Formal	1.859.799.056,22	Dinas Pendidikan
1	1	8 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Tertaksananya Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	100%	100%	718.420.000,00	100%	732.788.400,00	100%	747.444.168,00	100%	762.393.051,36	100%	777.640.912,39	100%	3.738.686.531,75	Dinas Pendidikan
1	1	9 Program Manajemen Pelayan Pendidikan	Tertaksananya Program Manajemen Pelayan Pendidikan	3 Ujian Sekolah/Ujian Nasional	3 Ujian Sekolah/Ujian Nasional	542.715.000,00	3 Ujian Sekolah/Ujian Nasional	553.569.300,00	3 Ujian Sekolah/Ujian Nasional	564.640.686,00	3 Ujian Sekolah/Ujian Nasional	575.933.499,72	3 Ujian Sekolah/Ujian Nasional	587.452.169,71	3 Ujian Sekolah/Ujian Nasional	2.824.310.655,43	Dinas Pendidikan
1	2	<b>kesehatan</b>															
1	2	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya seluruh proses administrasi perkantoran selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	3.766.719.080,00	1 Tahun	4.642.053.461,60	1 Tahun	3.934.894.530,83	1 Tahun	4.013.592.421,45	1 Tahun	4.093.864.269,88	5 Tahun	20.451.123.763,76	Dinas Kesehatan
1	2	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan baik jumlah maupun jenisnya	1 Tahun	1 Tahun	2.500.955.770,00	1 Tahun	2.600.994.000,80	1 Tahun	1.805.033.760,83	1 Tahun	1.877.235.111,27	1 Tahun	1.952.324.515,72	5 tahun	10.736.543.158,61	Dinas Kesehatan
1	2	3 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan selama 1 tahun	2 Laporan	2 Laporan	21.300.000,00	2 Laporan	21.726.000,00	2 Laporan	22.160.520,00	2 Laporan	22.603.730,40	12 Laporan	23.055.805,01	100%	110.846.055,41	Dinas Kesehatan
1	2	4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan kebutuhan jumlah maupun jenisnya	212.308 jiwa	212.308 jiwa	2.113.525.750,00	212.308 jiwa	2.155.796.265,00	212.308 jiwa	2.198.912.190,30	212.308 jiwa	2.242.890.434,11	212.308 jiwa	2.287.748.242,79	1061,54	10.998.872.882,19	Dinas Kesehatan
1	2	5 Program Pengembangan Data dan Informasi	Tersusunnya Profil dan SP2TP di 21 Puskesmas	212.308 jiwa	212.308 jiwa	20.304.100,00	212.308 jiwa	120.710.182,00	1 tahun	23.124.385,64	1 tahun	23.586.873,35	1 tahun	24.058.610,82	1 tahun	211.784.151,81	Dinas Kesehatan
1	2	6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan masyarakat	6 laporan 1 puskesmas BLUD	6 laporan 1 puskesmas BLUD	418.939.200,00	7 laporan	327.317.984,00	6 laporan 1 puskesmas BLUD	433.864.343,68	7 laporan	398.943.995,23	6 laporan 1 puskesmas BLUD	506.922.875,14	5 tahun	2.085.988.398,05	Dinas Kesehatan
1	2	7 Program Peningkatan Disiplin aparatur	Tersedian Pakaian Dinas	0	691 Orang	284.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	284.950.000,00	Dinas Kesehatan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	2	8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapainya Rumah Tangga Ber PHBS dari 38% menjadi 53%	Penambahan RT Ber PHBS 3%	Penambahan RT Ber PHBS 3%	268.723.750,00	274.098.225,00	Penambahan RT Ber PHBS 3%	279.580.189,50	Penambahan RT Ber PHBS 3%	285.171.793,29	Penambahan RT Ber PHBS 3%	290.875.229,16	Penambahan RT Ber PHBS 15%	1.398.449.186,95	Dinas Kesehatan
1	2	9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penimbangan (D/S) dari 60% menjadi 80%, Tersedianya PMT Bagi Balita Gizi Kurang dan BGM, Gizi Buruk (510 balita), Tersedianya PMT Ibu Hamil KEK (130 org)	Kenaikan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penimbangan (D/S) menjadi 4%/tahun, Tersedianya PMT Bagi Balita Gizi Kurang dan BGM, Gizi Buruk (510 balita), Tersedianya PMT Ibu Hamil KEK (130 org)	Kenaikan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penimbangan (D/S) menjadi 4%/tahun, Tersedianya PMT Bagi Balita Gizi Kurang dan BGM, Gizi Buruk (510 balita), Tersedianya PMT Ibu Hamil KEK (130 org)	722.885.000,00	795.173.500,00	Kenaikan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penimbangan (D/S) menjadi 4%/tahun, Tersedianya PMT Bagi Balita Gizi Kurang dan BGM, Gizi Buruk (510 balita), Tersedianya PMT Ibu Hamil KEK (130 org)	874.690.850,00	Kenaikan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penimbangan (D/S) menjadi 4%/tahun, Tersedianya PMT Bagi Balita Gizi Kurang dan BGM, Gizi Buruk (510 balita), Tersedianya PMT Ibu Hamil KEK (130 org)	699.752.680,00	Kenaikan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penimbangan (D/S) menjadi 4%/tahun, Tersedianya PMT Bagi Balita Gizi Kurang dan BGM, Gizi Buruk (510 balita), Tersedianya PMT Ibu Hamil KEK (130 org)	559.802.144,00	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penimbangan (D/S) menjadi 80%, Tersedianya PMT Bagi Balita Gizi Kurang dan BGM, Gizi Buruk (510 balita), Tersedianya PMT Ibu Hamil KEK (130 org)	3.652.304.174,00	Dinas Kesehatan
1	2	10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya jumlah desa ODF dari 22 desa menjadi 82 Desa	Meningkatnya jumlah desa ODF 10 desa /tahun	Meningkatnya jumlah desa ODF 10 desa /tahun	477.041.420,00	477.041.420,00	Meningkatnya jumlah desa ODF 15 desa /tahun	477.041.420,00	Meningkatnya jumlah desa ODF 15 desa /tahun	496.123.076,80	Meningkatnya jumlah desa ODF 15 desa /tahun	515.967.999,87	Meningkatnya jumlah desa ODF menjadi 82 Desa	2.443.215.336,67	Dinas Kesehatan
1	2	11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Tertangganya penyakit menular yang berkembang di masyarakat	temuan pneumonia balita 39%, temuan pasien baru TB BTA positif 45%, DBD yang ditangani 100%, penemuan penderita deare 53,9% dan Penanganan Penderita HIV 100%	temuan pneumonia balita 39%, temuan pasien baru TB BTA positif 45%, DBD yang ditangani 100%, penemuan penderita deare 51,9% dan Penanganan Penderita HIV 100%	1.207.879.500,00	1.256.194.680,00	temuan pneumonia balita 48%, temuan pasien baru TB BTA positif 40%, DBD yang ditangani 100%, penemuan penderita deare 49,9% dan Penanganan Penderita HIV 100%	1.306.442.467,20	temuan pneumonia balita 52%, temuan pasien baru TB BTA positif 37%, DBD yang ditangani 100%, penemuan penderita deare 45,9% dan Penanganan Penderita HIV 100%	1.358.700.165,89	temuan pneumonia balita 60%, temuan pasien baru TB BTA positif 30%, DBD yang ditangani 100%, penemuan penderita deare 45,9% dan Penanganan Penderita HIV 100%	1.426.635.174,18	temuan pneumonia balita 60%, temuan pasien baru TB BTA positif 30%, DBD yang ditangani 100%, penemuan penderita deare 45,9% dan Penanganan Penderita HIV 100%	6.555.851.987,27	Dinas Kesehatan
1	2	12	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tersusunnya Analisa Standar Belanja Pelayanan Kesehatan dan SOP	Tersusunnya Analisa Standar Belanja Pelayanan Kesehatan dan SOP	Tersusunnya Analisa Standar Belanja Pelayanan Kesehatan dan SOP	11.471.250,00	11.700.675,00	Tersusunnya Analisa Standar Belanja Pelayanan Kesehatan dan SOP	11.934.688,50	Tersusunnya Analisa Standar Belanja Pelayanan Kesehatan dan SOP	12.173.382,27	Tersusunnya Analisa Standar Belanja Pelayanan Kesehatan dan SOP	12.416.849,92	Tersusunnya Analisa Standar Belanja Pelayanan Kesehatan dan SOP	59.696.845,69	Dinas Kesehatan
1	2	13	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Tersedianya Sarana dan Prasarana 6 buah puskesmas/pustu, dan jaringannya sesuai kebutuhan baik jumlah maupun jenisnya	Peningkatan sarana dan prasarana 6 buah puskesmas, 9 buah puskesmas baru , 26 puskesdes, tensi meter di 18 puskesmas dan KIA	Peningkatan sarana dan prasarana 6 buah puskesmas, 9 buah puskesmas baru , 26 puskesdes, tensi meter di 18 puskesmas dan KIA	998.947.450,00	1.018.926.399,00	Peningkatan sarana dan prasarana 15 buah puskesdes pertahun	1.039.304.926,98	Peningkatan sarana dan prasarana 15 buah puskesdes pertahun	1.060.091.025,52	Peningkatan sarana dan prasarana 15 buah puskesdes pertahun	1.081.292.846,03	Peningkatan sarana dan prasarana 75 buah puskesdes	5.198.562.647,53	Dinas Kesehatan
1	2	14	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui kartu hss sehat	135000 jiwa persemester	135000 jiwa persemester	4.110.055.000,00	8.220.110.000,00	135000 jiwa pertahun	8.384.512.200,00	150933 jiwa pertahun	34.865.523.000,00	150933 jiwa pertahun	35.214.178.230,00	5 tahun	90.794.378.430,00	Dinas Kesehatan
1	2	15	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap anak	135000 jiwa persemester	25 orang peserta	15.000.000,00	15.300.000,00	25 orang peserta	15.606.000,00	25 orang peserta	15.918.120,00	25 orang peserta	16.236.482,40	5 tahun	78.060.602,40	Dinas Kesehatan
1	2	16	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Meningkatnya kesehat lansia pada 50 posyandu	1250 org lansia	1250 org lansia	30.000.000,00	32.400.000,00	1450 org lansia	34.992.000,00	1550 org lansia	37.791.360,00	1650 org lansia	43.460.064,00	1650 org lansia	178.643.424,00	Dinas Kesehatan
1	2	17	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Tertaksananya pengawasan dan pengendalian kesehatan pada makanan yang umum di konsumsi masyarakat 3850 tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat sebesar 47%	Tertaksananya pengawasan dan pengendalian kesehatan pada makanan yang umum di konsumsi masyarakat 3850 tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat sebesar 52%	Tertaksananya pengawasan dan pengendalian kesehatan pada makanan yang umum di konsumsi masyarakat 3850 tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat sebesar 57%	164.075.350,00	167.356.857,00	Tertaksananya pengawasan dan pengendalian kesehatan pada makanan yang umum di konsumsi masyarakat 3850 tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat sebesar 62%	155.214.094,14	Tertaksananya pengawasan dan pengendalian kesehatan pada makanan yang umum di konsumsi masyarakat 3850 tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat sebesar 67%	158.318.376,02	Tertaksananya pengawasan dan pengendalian kesehatan pada makanan yang umum di konsumsi masyarakat 3850 tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat sebesar 75%	161.484.743,54	Tertaksananya pengawasan dan pengendalian kesehatan pada makanan yang umum di konsumsi masyarakat 3850 tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat sebesar 75%	806.449.420,71	Dinas Kesehatan
1	2	18	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	angka kematian ibu melahirkan 10 orang dan kematian bayi sebanyak 50 orang	angka kematian ibu melahirkan turun menjadi 5 orang dan kematian bayi turun menjadi 40 orang	angka kematian ibu melahirkan turun menjadi 5 orang dan kematian bayi turun menjadi 40 orang	220.171.000,00	233.381.260,00	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan maksimal 3 orang dan kematian bayi maksimal sebanyak 30 orang	247.384.135,60	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan maksimal 2 orang dan kematian bayi maksimal sebanyak 25 orang	262.227.183,74	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan maksimal 2 orang dan kematian bayi maksimal sebanyak 25 orang	277.960.814,76	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan maksimal 2 orang dan kematian bayi maksimal sebanyak 25 orang	1.241.124.394,10	Dinas Kesehatan
1	2	19	Program Peningkatan Mutu Kesehatan	Terselenggaranya Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 tahun	1 tahun	26.740.593.700,00	34.762.771.810,00	1 tahun	45.191.603.353,00	1 tahun	58.749.084.358,90	1 tahun	76.373.809.666,57	5 tahun	241.817.862.888,47	RSUD
1	2	20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50%	Penambahan Daya dan Instalasi Listrik	2.025.850.000,00	1.329.727.500,00	Biaya Listrik	356.322.050,00	Biaya Litrik	363.448.491,00	Biaya Listrik	370.717.460,82	5 tahun	4.446.065.501,82	RSUD
1	2	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya gedung kantor	0	ICU, ICCU	4.768.799.500,00	10.000.000.000,00	OK, Cafeteria dan Mushola	10.000.000.000,00	HD	10.000.000.000,00	Laundry	300.000.000,00	5 tahun	30.068.799.500,00	RSUD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	22	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhiya obat dan perbekalan kesehatan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan kebutuhan jumlah maupun jenisnya	1 tahun	756.324.000,00	1 tahun	771.450.480,00	1 tahun	786.879.489,60	1 tahun	802.617.079,39	1 Tahun	818.669.420,98	5 tahun	3.935.940.469,97	RSUD		
1	23	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Terpenuhiya Sarana Pelayanan Kesehatan	0	1.971.954.600,00	Rehab Rumah Sakit Lama, Alkes, aplikasi SIM	2.050.832.784,00	Rehab Rumah Sakit, Alkes, aplikasi SIM	2.132.866.095,36	Rehab Rumah Sakit, Alkes, aplikasi SIM	2.218.180.739,17	Rehab Rumah Sakit, Alkes, aplikasi SIM	2.306.907.968,74	5 tahun	10.680.742.187,28	RSUD		
<b>1 3 Pekerjaan Umum</b>																		
1	3	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 tahun	669.609.850,00	1 tahun	683.002.047,00	1 tahun	696.662.087,94	1 tahun	710.595.329,70	1 tahun	724.807.236,29	5 tahun	3.484.676.550,93	PU		
1	3	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Urugan rencana pembangunan kantor Pemda Hamalau, Rehab Kantor Camat 4 buah, gazebo 1 buah, perawatan mobil dinas 8 unit	7.500.740.000,00	Urugan rencana pembangunan kantor Pemda Hamalau, Rehab Kantor Camat 4 buah, gazebo 1 buah, perawatan mobil dinas 8 unit	13.158.754.800,00	pembangunan perkantoran baru bupati tahap I, perawatan mobil dinas 8 unit	27.913.929.896,00	pembangunan perkantoran baru bupati tahap II, perawatan mobil dinas 8 unit	38.472.208.493,92	pembangunan perkantoran baru bupati tahap III, perawatan mobil dinas 8 unit	9.241.652.663,80	5 tahun	96.287.285.853,72	PU		
1	3	3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 laporan	11.300.000,00	2 laporan	7.000.000,00	2 laporan	7.140.000,00	2 laporan	7.282.800,00	2 laporan	7.428.456,00	10 laporan	40.151.256,00	PU		
1	3	4 Program pembangunan jalan dan jembatan	Pengembangan wilayah dan peningkatan ekonomi masyarakat	kondisi jalan dalam keadaan baik 60%, keadaan jembatan dalam kondisi baik 98,8%	55.061.756.150,00	perbaikan jalan 36 km (kondisi baik 60,5%), pembangunan jembatan 9 unit (kondisi baik 99,04%)	56.162.991.273,00	perbaikan jalan 31 km (kondisi baik 61,0%), pembangunan jembatan 9 unit (kondisi baik 99,28%)	57.286.251.098,46	perbaikan jalan 31 km (kondisi baik 61,5%), pembangunan jembatan 9 unit (kondisi baik 99,52%)	58.431.976.120,43	perbaikan jalan 31 km (kondisi baik 62,0%), pembangunan jembatan 9 unit (kondisi baik 100%)	59.600.615.642,84	jalan dalam kondisi baik 62,5%, jembatan dalam kondisi baik 100%	286.543.590.284,73	PU		
1	3	5 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pengembangan wilayah dan peningkatan ekonomi masyarakat	perbaikan jalan 10 km (kondisi baik 60,00%), perbaikan jembatan 25 unit (kondisi baik 99,04%)	24.338.401.000,00	perbaikan jalan 10 km (kondisi baik 60,5%), perbaikan jembatan 25 unit (kondisi baik 99,04%)	24.825.169.020,00	perbaikan jalan 10 km (kondisi baik 61,0%), perbaikan jembatan 25 unit (kondisi baik 99,28%)	25.321.672.400,40	perbaikan jalan 10 km (kondisi baik 61,5%), perbaikan jembatan 25 unit (kondisi baik 99,52%)	25.828.105.848,41	perbaikan jalan 10 km (kondisi baik 62,0%), perbaikan jembatan 25 unit (kondisi baik 99,76%)	26.344.667.965,38	jalan dalam kondisi baik 62,5%, jembatan dalam kondisi baik 100%	126.658.016.234,18	PU		
1	3	6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	kondisi irigasi dalam keadaan baik 48,08%	10.227.502.000,00	perencanaan teknis 20 paket, normalisasi sungai 10 km, rehabilitasi 10 DI (luas irigasi dalam kondisi baik 52,25%)	10.432.052.040,00	perencanaan teknis 20 paket, normalisasi sungai 10 km, rehabilitasi 10 DI (luas irigasi dalam kondisi baik 55,44%)	12.640.693.080,80	perencanaan teknis 25 paket, normalisasi sungai 12,5 km, rehabilitasi 20 DI (luas irigasi dalam kondisi baik 61,80%)	14.393.506.942,42	perencanaan teknis 26 paket, normalisasi sungai 17,5 km, rehabilitasi 20 DI (luas irigasi dalam kondisi baik 64,98%)	16.381.377.081,26	5 tahun	64.075.131.144,48	PU		
1	3	7 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Terselenggaranya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	sanitasi 33,32%, air bersih 46,99% (pipanisasi 31,88%)	2.559.750.000,00	sanitasi 34,33% dan air bersih 35,73%	2.559.750.000,00	sanitasi 35,33% dan air bersih 39,60%	6.536.542.500,00	sanitasi 36,33% dan air bersih 43,40%	6.732.638.775,00	sanitasi 37,33% dan air bersih 47,30%	6.934.617.938,25	sanitasi 38,33% dan air bersih 51,15%	7.142.656.476,40	sanitasi 38,33% dan air bersih 51,15%	29.906.205.689,65	PU
1	3	8 Program Pengendalian Banjir	Terselenggaranya pengendalian banjir dalam antisipasi daya rusak air	rehabilitasi bantaran dan tanggul sungai.... M	8.573.400.000,00	rehabilitasi bantaran dan tanggul sungai 250 m	8.744.868.000,00	rehabilitasi bantaran dan tanggul sungai 275 m	9.007.214.040,00	rehabilitasi bantaran dan tanggul sungai 300 m	9.277.430.461,20	rehabilitasi bantaran dan tanggul sungai 350 m	9.555.753.375,04	rehabilitasi bantaran dan tanggul sungai 1.425 m	45.158.665.876,24	PU		
1	3	9 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Tertaksananya Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	0	5.605.491.000,00	jalan agropolitan 8 ruas	2.500.000.000,00	jalan agropolitan 11 ruas	2.550.000.000,00	jalan agropolitan 11 ruas	2.601.000.000,00	jalan agropolitan 11 ruas	2.653.020.000,00	jalan agropolitan 52 ruas	15.909.511.000,00	PU		
1	3	10 Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	terbanggunya sarana perekonomian yang memadai	0	1.033.275.000,00	dermaga 1 unit dan titan 1 unit	0	0	0	0	0	0	0	dermaga 1 unit dan titan 1 unit	1.033.275.000,00	PU		
1	3	11 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Terbanggunya Saluran Drainase/Gorong-Gorong	0	443.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	terbanggunya drainasedi RSUD Brigiend. H. Hasan Basry	443.600.000,00	PU		
1	3	12 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Terbanggunya Saluran Drainase/Gorong-Gorong	50% dari 68.000 m terpelihara	334.800.000,00	1 Master plan Drainase, 1 Dok DED perencanaan	4.000.000.000,00	4500 M Drainase Primer	4.080.000.000,00	4500 M Drainase Primer	4.161.600.000,00	4500 M Drainase Primer	4.244.832.000,00	18.000 m drainase primer	16.821.232.000,00	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan		
<b>1 4 Perumahan</b>																		
1	4	1 Program Pengembangan Perumahan	Terselenggaranya pengembangan perumahan yg melibatkan peran pemerintah	84,29%	700.000.000,00	87,43%	1.464.000.000,00	90,57%	1.493.280.000,00	96,86%	1.523.145.600,00	100%	1.553.608.512,00	100%	6.734.034.112,00	PU		
<b>1 5 Penataan Ruang</b>																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	1.431.472.400,00	1 tahun	1.460.101.848,00	1 tahun	1.489.303.884,96	1 tahun	1.519.089.962,66	1 tahun	1.549.471.761,91	5 tahun	7.449.439.857,53	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan
1	5	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya gedung kantor dan kendaraan dinas/operasional	Kantor 1 bh, kendaraan dinas 33 unit	Rawat rutin gedung kantor, pemeliharaan 33 unit kendaraan dinas	2.630.897.500,00	Rawat rutin gedung kantor, pemeliharaan 33 unit kendaraan dinas	2.683.515.450,00	Rawat rutin gedung kantor, pemeliharaan 33 unit kendaraan dinas	2.737.185.759,00	Rawat rutin gedung kantor, pemeliharaan 33 unit kendaraan dinas	2.791.929.474,18	Rawat rutin gedung kantor, pemeliharaan 33 unit kendaraan dinas	2.847.768.063,66	Rawat rutin gedung kantor, pemeliharaan 33 unit kendaraan dinas	13.691.296.246,84	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan
1	5	3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan lhtsair realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.235.000,00	2 Laporan	4.319.700,00	2 Laporan	4.406.094,00	2 Laporan	4.494.215,88	2 Laporan	4.584.100,20	2 Laporan	22.039.110,08	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan
1	5	4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tersedianya kinerja pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah se kabupaten = 26,42%	34,69%	3.479.531.800,00	45,91%	3.549.122.436,00	51,65%	3.620.104.884,72	57,42%	3.692.506.982,41	69,19%	3.766.357.122,06	69,19%	18.107.623.225,20	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan
1	5	5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal =50%	100%	2.888.812.100,00	100%	2.946.588.342,00	100%	3.005.520.108,84	100%, IPAL 2 Unit	5.465.630.511,02	100%, IPAL 2 Unit	3.174.943.121,24	100%	17.481.494.183,09	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan
1	5	6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Laporan Neraca SDA (1 buku) dan SLHD (2 buku)	Laporan Neraca SDA (1 buku) dan SLHD (2 buku)	76.900.000,00	Laporan Neraca SDA (1 buku) dan SLHD (2 buku)	78.438.000,00	Laporan Neraca SDA (1 buku) dan SLHD (2 buku)	80.006.760,00	Laporan Neraca SDA (1 buku) dan SLHD (2 buku)	81.606.895,20	Laporan Neraca SDA (1 buku) dan SLHD (2 buku)	83.239.033,10	Laporan Neraca SDA (1 buku) dan SLHD (2 buku)	400.190.688,30	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan
1	5	7	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terlaksananya program ruang terbuka hijau (RTH)	RTH Publik (5,185 Ha) = 25%	26%	1.554.825.000,00	27%	1.585.921.500,00	28%	1.617.639.930,00	29%	1.649.992.728,60	30%	1.682.992.583,17	30%	8.091.371.741,77	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan
					RTH Private (2,593) = 5%	6%		8%		9%		10%		11%		11%		
					Rasio Bangunan Ber IMB per satuan bangunan = 80,08%	81,08%		82,58%										
1	6		<b>Perencanaan Pembangunan</b>															
1	6	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	441.500.000,00	1 tahun	507.725.000,00	1 tahun	583.883.750,00	1 tahun	671.466.312,50	1 tahun	772.186.259,38	5 tahun	2.976.761.321,88	Bappeda
1	6	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1 tahun	76.000.000,00	1 tahun	87.400.000,00	1 tahun	100.510.000,00	1 tahun	115.586.500,00	1 tahun	132.924.475,00	5 tahun	512.420.975,00	Bappeda
1	6	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedian Pakailan Dinas	0	0	-	30 Pakailan	15.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	15.000.000,00	Bappeda
1	6	3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 Laporan	2 laporan	5.500.000,00	2 laporan	6.325.000,00	2 laporan	7.273.750,00	2 laporan	8.364.812,50	2 laporan	9.619.534,38	10 laporan	37.083.096,88	Bappeda
1	6	4	Program pengembangan data/informasi	Terlaksananya Program pengembangan data/informasi	1 laporan RFK APBD, 1 Laporan RFK APBN, 1 Buku KDA/KCK, 1 Buku IPM, 1 Buku Profil Daerah,	1 laporan RFK APBD, 1 Laporan RFK APBN, 1 Buku KDA/KCK, 1 Buku IPM, 1 Buku Profil Daerah, 1 laporan TEPPA, E-Planning, E-Budget, E-Monev	1.137.000.000,00	1 laporan RFK APBD, 1 Laporan RFK APBN, 1 Buku KDA/KCK, 1 Buku IPM, 1 Buku Profil Daerah, 1 laporan TEPPA, E-Data Base, E-Office	1.265.000.000,00	1 laporan RFK APBD, 1 Laporan RFK APBN, 1 Buku KDA/KCK, 1 Buku IPM, 1 Buku Profil Daerah, 1 laporan TEPPA, 3 dokumen infrastruktur dasar, 1 dokumen KLHS	590.300.000,00	1 laporan RFK APBD, 1 Laporan RFK APBN, 1 Buku KDA/KCK, 1 Buku IPM, 1 Buku Profil Daerah, 1 laporan TEPPA, 3 dokumen infrastruktur dasar, 1 dokumen KLHS	649.330.000,00	1 laporan RFK APBD, 1 Laporan RFK APBN, 1 Buku KDA/KCK, 1 Buku IPM, 1 Buku Profil Daerah, 1 laporan TEPPA, 3 dokumen infrastruktur dasar, 1 dokumen KLHS	714.263.000,00	1 laporan RFK APBD, 1 Laporan RFK APBN, 1 Buku KDA/KCK, 1 Buku IPM, 1 Buku Profil Daerah, 1 laporan TEPPA, 3 dokumen infrastruktur dasar, 1 dokumen KLHS	4.355.893.000,00	Bappeda
1	6	5	Program Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Perencanaan Tata Ruang	15 rekomendasi	12 Rekomendasi	124.000.000,00	12 Rekomendasi	142.600.000,00	12 Rekomendasi	163.990.000,00	12 Rekomendasi	188.588.500,00	12 Rekomendasi	216.876.775,00	12 Rekomendasi	836.055.275,00	Bappeda
1	6	6	Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya Program Kerjasama Pembangunan	3 Dokumen Penelitian	2 Dokumen penelitian	380.000.000,00	3 Dokumen penelitian	380.000.000,00	2 Dokumen penelitian	387.600.000,00	2 Dokumen penelitian	395.352.000,00	2 Dokumen penelitian	403.259.040,00	8 Dokumen penelitian	1.566.211.040,00	Bappeda
1	6	7	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Meningkatnya kesehatan lingkungan perumahan	1 dokumen	1 tahun	26.291.200,00	0	-	0	-	0	-	0	26.291.200,00	1 dokumen	52.582.400,00	Bappeda
1	6	8	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya pencemaran dang prugrusakan lingkungan hidup	12 rekomendasi	1 tahun	64.842.800,00	0	-	0	-	0	-	0	64.842.800,00	12 rekomendasi	129.685.600,00	Bappeda
1	6	9	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat permukiman di wilayah kumuh	1 dokumen	1 tahun	64.842.800,00	0	-	0	-	0	-	0	64.842.800,00	1 dokumen	129.685.600,00	Bappeda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	6	10	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Tertaksananya Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	1 dok Pansimas	1 dok Pansimas dan 1 Dok Risipam	536.348.000,00	86.348.000,00	1 dok Pansimas	99.300.200,00	1 dok Pansimas	114.195.230,00	1 dok Pansimas	131.324.514,50	6 dok Pansimas dan 1 Dok risipam	967.515.944,50	Bappeda	
1	6	11	Program perencanaan pembangunan daerah	Tertaksananya Program perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen RKPD	1 Dokumen RKPD	259.387.700,00	298.295.855,00	1 Dokumen RKPD	343.040.233,25	1 Dokumen RKPD	394.496.268,24	1 Dokumen RKPD, 1 Dokumen RPJMD	953.670.708,47	5 Dokumen RKPD, 1 Dokumen RPJMD	2.248.890.764,96	Bappeda	
1	6	12	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Tertaksananya Program perencanaan pembangunan ekonomi	6 Dokumen Laporan	6 Dokumen Laporan	562.000.000,00	646.300.000,00	6 Dokumen Laporan	743.245.000,00	6 Dokumen Laporan	854.731.750,00	6 Dokumen Laporan	982.941.512,50	30 Dokumen Laporan	3.789.218.262,50	Bappeda	
1	6	13	Program perencanaan sosial budaya	Tertaksananya Program perencanaan sosial budaya	2 Laporan	3 laporan	112.250.000,00	280.625.000,00	4 Laporan	322.718.750,00	4 Laporan	371.126.562,50	4 Laporan	426.795.546,88	19 Laporan	1.513.515.859,38	Bappeda	
1	7		<b>Perhubungan</b>															
1	7	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Administrasi kantor yang lancar	1 Tahun	1 Tahun	615.437.700,00	414.746.454,00	1 Tahun	423.041.383,08	1 Tahun	431.502.210,74	1 Tahun	440.132.254,96	5 tahun	2.324.860.002,78	Dishubkominfo	
1	7	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya gedung kantor serta kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	1 Tahun	262.550.000,00	207.801.000,00	1 Tahun	211.957.020,00	1 Tahun	316.196.160,40	1 Tahun	216.196.160,40	5 tahun	1.214.700.340,80	Dishubkominfo	
1	7	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Terpenuhinya pakaian dinas aparatur	57 orang	57 orang	80.750.000,00	-	-	-	-	57 orang	84.787.500,00	5 tahun	165.537.500,00	Dishubkominfo		
1	7	3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan yang baik dan tepat waktu	2 laporan	2 laporan	2.598.000,00	2.753.880,00	2 laporan	2.919.112,80	2 laporan	3.094.259,57	2 laporan	3.279.915,14	12 laporan	14.645.167,51	Dishubkominfo	
1	7	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terpeliharanya seluruh prasarana dan fasilitas LLAJ untuk kelancaran pelayanan	70 alat pemberi isyarat lalu lintas	100% dari 70 alat pemberi isyarat lalu lintas	154.135.000,00	157.217.700,00	1 Tahun	160.362.054,00	1 Tahun	163.569.295,08	1 Tahun	166.840.680,98	5 tahun	802.124.730,06	Dishubkominfo	
1	7	5	Program peningkatan pelayanan angkutan	meningkatnya pelayanan angkutan yang baik dan lancar	14 halte	2 halte	273.418.500,00	208.886.870,00	1 halte	213.064.607,40	3 halte	337.325.899,55	3 halte	344.072.417,54	5 tahun	1.376.768.294,49	Dishubkominfo	
1	7	6	Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya sarana & prasarana fasilitas	belum ada	1 Dermaga	528.800.000,00	-	-	-	-	1 Terminal	25.000.000.000,00	1 dermaga dan 1 terminal B	25.528.800.000,00	Dishubkominfo		
1	7	7	Pengendalian dan Pngamanan Lalu Lintas	Terwujudnya Lalu lintas yang tertib, aman dan terkendali	tersedianya rambu 65 % dari ruas jalan dan marka 80% dari ruas jalan	tersedianya rambu 70 % dari ruas jalan dan marka 80% dari ruas jalan	1.371.803.700,00	1.412.957.811,00	tersedianya rambu 75 % dari ruas jalan, 40 rambu sungai dan marka 80% dari ruas jalan	1.455.346.545,33	tersedianya rambu 80 % dari ruas jalan, 40 rambu sungai dan marka 80% dari ruas jalan	1.499.006.941,69	tersedianya rambu 85 % dari ruas jalan, 40 rambu sungai dan marka 80% dari ruas jalan	1.543.977.149,94	tersedianya rambu 90 % dari ruas jalan, 40 rambu sungai dan marka 80% dari ruas jalan	5 tahun	7.283.092.147,96	Dishubkominfo
1	7	8	Program Peningkatan kelaikann pengoperasian kendaraan bermotor	Meningkatnya kelaikann pengoperasian kendaraan bermotor	belum ada	Tersedianya alat uji kendaraan bermotor	930.450.000,00	0	0	-	0	-	0	-	930.450.000,00	Dishubkominfo		
1	8		<b>Lingkungan Hidup</b>															
1	8	1	Program pengelolaan penerangan jalan umum	Terpeliharanya penerangan jalan umum	Meterisasi PJU 30%	5%	2.056.755.000,00	5%	2.097.890.100,00	5%	2.139.847.902,00	5%	2.182.644.860,04	5%	2.226.297.757,24	25%	10.703.435.619,28	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan
1	8	2	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Meningkatnya aksesibilitas daerah pemukiman terhadap pusat kegiatan	Telah dilaksanakan di 20 % total ruas jalan lingkungan	22 ruas	5.078.590.000,00	15 ruas	5.180.161.800,00	15 ruas	5.283.765.036,00	15 ruas	5.389.440.336,72	15 ruas	5.497.229.143,45	82 ruas	26.429.186.316,17	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan
1	8	3	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Tertaksananya Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 Kecamatan	2 Kecamatan	109.605.000,00	126.045.750,00	2 Kecamatan	144.952.612,50	2 Kecamatan	166.695.504,38	2 Kecamatan	191.699.830,03	11 Kecamatan	738.998.696,91	Bappeda	
1	10		<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>															
1	10	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi kantor	1 tahun	1 tahun	229.451.100,00	234.040.122,00	1 tahun	238.720.924,44	1 tahun	243.495.342,93	1 tahun	248.365.249,79	5 tahun	1.194.072.739,16	Disdukcapil	
1	10	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun	20.300.000,00	20.706.000,00	1 tahun	21.120.120,00	1 tahun	21.542.522,40	1 tahun	21.973.372,85	5 tahun	105.642.015,25	Disdukcapil	
1	10	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Terpenuhinya pakaian dinas aparatur	1 tahun	1 tahun	29.750.000,00	-	1 tahun	35.000.000,00	-	-	-	-	64.750.000,00	Disdukcapil		
1	10	4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terselenggaranya pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan	2 laporan	2 laporan	3.850.000,00	3.927.000,00	2 laporan	4.005.540,00	2 laporan	4.085.650,80	2 laporan	4.167.363,82	12 laporan	20.035.554,62	Disdukcapil	
1	10	5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertatanya administrasi kependudukan	100%	100%	560.179.500,00	560.179.500,00	100%	560.179.500,00	100%	560.179.500,00	100%	560.179.500,00	100%	2.800.897.500,00	Disdukcapil	
1	11		<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>															
1	11	1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Organisasi Perempuan	20 Organisasi Perempuan	11 Kec	287.409.000,00	293.157.180,00	11 Kec	299.020.323,60	11 Kec	305.000.730,07	11 Kec	311.100.744,67	11 kec	1.495.687.978,35	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	11	2	Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga	terlaksananya 10 program pokok PKK	1 Kab dan 11 Kec	1 Kab dan 11 Kec	839.017.300,00	1 Kab dan 11 Kec	855.797.646,00	1 Kab dan 11 Kec	872.913.598,92	1 Kab dan 11 Kec	890.371.870,90	1 Kab dan 11 Kec	908.179.308,32	1 Kab dan 11 Kec	4.366.279.724,13	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
1	11	3	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya penguatan kelembagaan gender dan perlindungan anak	2 lembaga	2 lembaga	127.233.500,00	2 lembaga	129.778.170,00	2 lembaga	132.373.733,40	2 lembaga	135.021.208,07	2 lembaga	137.721.632,23	2 lembaga	662.128.243,70	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
1	12		<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>															
1	12	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	294.789.300,00	1 tahun	300.685.086,00	1 tahun	306.698.787,72	1 tahun	312.832.763,47	1 tahun	319.089.418,74	5 tahun	1.534.095.355,94	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
1	12	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun	67.839.000,00	1 tahun	69.195.780,00	1 tahun	70.579.695,60	1 tahun	71.991.289,51	1 tahun	73.431.115,30	5 tahun	353.036.880,41	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
1	12	3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terselenggaranya pelaporan kinerja dan keuangan	2 laporan	2 laporan	11.343.500,00	2 laporan	5.000.000,00	2 laporan	5.100.000,00	2 laporan	5.202.000,00	2 laporan	5.306.040,00	2 laporan	31.951.540,00	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
1	12	4	Program Keluarga Berencana	Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera	80,28% KB aktif dari 45.857 PUS	80,58%	1.437.093.500,00	80,88%	1.465.835.370,00	81,18%	1.495.152.077,40	81,38%	1.525.055.118,95	81,72%	1.555.556.221,33	81,72%	7.478.692.287,67	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
1	12	5	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB KR yang Mandiri	Terbinanya jumlah keluarga prasejahtera dan KS 1	25,05% dari 70.150 KK	23,45%	159.522.480,00	22,95%	162.712.929,60	21,45%	165.967.188,19	19,95%	169.286.531,96	18,45%	172.672.262,59	18,45%	830.161.392,34	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
1	12	6	Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Berdirinya pusat informasi kesehatan reproduksi remaja	22 kelompok	1 Kelompok	42.048.500,00	1 Kelompok	42.889.470,00	1 Kelompok	43.747.259,40	1 Kelompok	44.622.204,59	1 Kelompok	45.514.648,68	27 Kelompok	218.822.082,67	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
1	13		<b>Sosial</b>															
1	13	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	393.483.350,00	1 tahun	321.353.017,00	1 tahun	327.780.077,34	1 tahun	334.335.678,89	1 tahun	341.022.392,46	5 tahun	1.717.974.515,69	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	13	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun	214.495.000,00	1 tahun	96.669.250,00	1 tahun	98.602.635,00	1 tahun	100.574.687,70	1 tahun	102.586.181,45	5 tahun	612.927.754,15	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	13	3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	5.420.000,00	2 Laporan	5.528.400,00	2 Laporan	5.638.968,00	2 Laporan	5.751.747,36	2 Laporan	5.866.782,31	12 Laporan	28.205.897,67	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	13	4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Tertaksananya pemberdayaan PMKS	100 kk	100 kk	950.118.000,00	100 kk	988.122.720,00	100 kk	1.027.647.628,80	100 kk	1.068.753.533,95	100 kk	1.111.503.675,31	600 kk	5.146.145.558,06	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	13	5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	11 PSKS	11 PSKS	583.589.700,00	11 PSKS	595.261.494,00	11 PSKS	607.166.723,88	11 PSKS	619.310.058,36	11 PSKS	631.696.259,52	55 PSKS	3.037.024.235,76	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	13	6	Program pengelolaan areal pemukiman	Tertaksananya pengelolaan areal pemukiman	2 TPU	2 TPU	1.653.440.200,00	2 TPU	1.719.577.808,00	2 TPU	1.788.360.920,32	2 TPU	1.859.895.357,13	2 TPU	1.934.291.171,42	2 TPU	8.955.565.456,87	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14		<b>Ketenagakerjaan</b>															
1	14	1	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	80 org	80 org	289.131.700,00	80 org	294.914.334,00	80 org	300.812.620,68	80 org	306.828.873,09	80 org	312.965.450,56	400 org	1.504.652.978,33	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial	Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi keluarga korban bencana dan wanita lanjut usia	80 orang	80 orang	71.932.000,00	80 orang	73.370.640,00	80 orang	74.838.052,80	80 orang	76.334.813,86	80 orang	77.861.510,13	400 orang	374.337.016,79	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	14	3	Program pembinaan anak terlantar	Mampunya anak terlantar melaksanakan fungsi sosialnya	40 org	40 org	77.648.000,00	40 org	79.200.960,00	40 org	80.784.979,20	40 org	82.400.678,78	40 org	84.048.692,36	200 org	404.083.310,34	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	4	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Terwujudnya perlindungan dan pengawasan TK	286 org	286 org	71.445.600,00	286 org	72.874.512,00	286 org	74.332.002,24	286 org	75.818.642,28	286 org	77.335.015,13	1430 org	371.805.771,66	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	5	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tersantuninya dan terbinanya penyandang cacat dan eks trauma	146 org	146 org	178.198.400,00	146 org	181.762.368,00	146 org	185.397.615,36	146 org	189.105.567,67	146 org	192.887.679,02	732 org	927.351.630,05	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	6	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Terbinanya eks penyandang penyakit sosial	509 Org	509 Org	179.380.000,00	509 Org	182.967.600,00	509 Org	186.626.952,00	509 Org	190.359.491,04	509 Org	194.166.680,86	2545 Org	933.500.723,90	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	15		<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>															
1	15	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pengelolaan pelayanan adm perkantoran	1 tahun	1 tahun	428.918.000,00	1 tahun	437.496.360,00	1 tahun	446.246.287,20	1 tahun	455.171.212,94	1 tahun	464.274.637,20	5 tahun	2.232.106.497,35	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1	15	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Kantor dan	1 Kantor dan	147.200.000,00	1 tahun	59.364.000,00	1 tahun	60.551.280,00	1 tahun	61.762.305,60	1 tahun	62.997.551,71	5 tahun	391.875.137,31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1	15	3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terselenggaranya Pelaporan Pencapaian kinerja dan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	13.820.000,00	2 Laporan	7.000.000,00	2 Laporan	7.140.000,00	2 Laporan	7.282.800,00	2 Laporan	7.428.456,00	2 Laporan	42.671.256,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1	15	4	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Berkembangnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	40.096 wirausaha	bertambah 200 wirausaha	149.932.500,00	bertambah 1000 wirausaha	611.724.600,00	bertambah 1100 wirausaha	623.959.092,00	0	0	0	2300 wirausaha	1.385.616.192,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
1	15	5	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	partisipasi dan penyelenggaraan pameran	4 kali	4 kali	486.310.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4 kali	486.310.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
1	16		<b>Penanaman Modal</b>															
1	16	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terwujudnya Rencana Pengembangan dan Kerjasama Investasi	15 Perusahaan	15 Perusahaan	87.160.000,00	15 Perusahaan	88.903.200,00	15 Perusahaan	90.681.264,00	15 Perusahaan	92.494.889,28	15 Perusahaan	90.681.264,00	15 Perusahaan	87.160.000,00	Sekretaris daerah - Bagian Ekobang
1	16	2	Program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan Prasarana Daerah	Terlaksananya kajian potensi investasi daerah	0	1 Dokumen	190.636.200,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	190.636.200,00	Sekretaris daerah - Bagian Ekobang
1	16	3	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya Promosi Pengenalan Potensi Unggulan Daerah	0	0	-	4 kali	496.036.200,00	4 kali	505.956.924,00	4 kali	516.076.062,48	4 kali	526.397.583,73	16 kali	554.154.193,47	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1	17		<b>Kebudayaan</b>															
1	17	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pengelolaan pelayanan Administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	307.794.700,00	1 tahun	313.950.594,00	1 tahun	78.487.648,50	1 tahun	80.057.401,47	1 tahun	81.658.549,50	5 tahun	861.948.893,47	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1 tahun	236.750.000,00	1 tahun	156.485.000,00	1 tahun	59.614.700,00	1 tahun	60.806.994,00	1 tahun	62.023.133,88	5 tahun	575.679.827,88	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 laporan	2 laporan	1.970.000,00	2 laporan	4.000.000,00	2 laporan	4.080.000,00	2 laporan	4.161.600,00	2 laporan	4.244.832,00	10 laporan	18.456.432,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	4	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terlestarikannya dan teraktualisasikan adat budaya daerah	9 budaya	1 budaya	252.140.000,00	1 budaya	257.182.800,00	1 budaya	262.326.456,00	1 budaya	267.572.985,12	1 budaya	272.924.444,82	14 budaya	1.312.146.685,94	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	5	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terpelihara dan dilestarikannya Benda Cagar Budaya/Situs. Terlaksananya kegiatan festival seni daerah	23 BCB dan 4 festival seni daerah	23 BCB dan 12 festival seni daerah	808.661.550,00	4 festival seni daerah	512.834.781,00	4 festival seni daerah	523.091.476,62	4 festival seni daerah	533.553.306,15	4 festival seni daerah	544.224.372,28	4 festival seni daerah	2.922.365.486,05	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terpelihara dan dilestarikannya Benda Cagar Budaya/Situs	0	0	-	23 BCB	312.000.000,00	23 BCB	318.240.000,00	23 BCB	324.604.800,00	23 BCB	331.096.896,00	23 BCB	1.285.941.696,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	18	<b>Keperempuanan dan Olahraga</b>																
1	18	1	Program peningkatan peran serta perempuan	Tertaksananya Program peningkatan peran serta perempuan	2 Kegiatan untuk pelajar dan pemuda	2 Kegiatan untuk pelajar dan pemuda	160.450.000,00	3 Kegiatan untuk pelajar dan pemuda	501.999.681,00	3 Kegiatan untuk pelajar dan pemuda	857.147.169,24	3 Kegiatan untuk pelajar dan pemuda	1.226.299.757,13	3 Kegiatan untuk pelajar dan pemuda	1.609.875.589,68	3 Kegiatan untuk pelajar dan pemuda	4.355.772.197,05	Dinas Pendidikan
1	18	2	Program peningkatan penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Tertaksananya Program peningkatan penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	ada	100%	331.706.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	331.706.550,00	Dinas Pendidikan
1	18	3	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Tertaksananya Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	13 Cabang Olahrag	13 Cabang Olahrag	565.131.000,00	14 Cabang Olahrag unggulan	706.413.750,00	15 Cabang Olahrag Unggulan	883.017.187,50	16 Cabang Olahrag Unggulan	1.103.771.484,38	16 Cabang Olahrag Unggulan	1.379.714.355,47	16 Cabang Olahrag Unggulan	4.638.047.777,34	Dinas Pendidikan
1	18	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Tertaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	sebagian fasilitas untuk Stadion Ganda dan Stadion Dr. M. Safi'i telah terbagun	Tribun stadion Ganda dan fasilitas jalan lingkungan di stadion Dr. M. Safi'i	16.898.825.000,00	Fasilitas olah raga di Stadion Ganda 3 unit	17.236.801.500,00	Fasilitas olah raga di Stadion Ganda 2 unit dan perbaikan GOR Aluh Idut	17.581.537.530,00	pemeliharaan stadion Ganda, Stadion Dr. M. Safi'i dan GOR Aluh Idut	300.000.000,00	pemeliharaan stadion Ganda, Stadion Dr. M. Safi'i dan GOR Aluh Idut	500.000.000,00	5 tahun	52.517.164.030,00	PU
1	19	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>																
1	19	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	392.911.100,00	1 tahun	400.769.322,00	1 tahun	408.784.708,44	1 tahun	416.960.402,61	1 tahun	425.299.610,66	5 tahun	2.044.725.143,71	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	kantor sementara di gedung juang	terpeliharanya gedung kantor dan kendaraan operasional	60.850.000,00	rehab kantor baru dan pemeliharaan kendaraan operasional	265.812.000,00	terpeliharanya gedung kantor dan kendaraan operasional	67.128.240,00	terpeliharanya gedung kantor dan kendaraan operasional	68.470.804,80	terpeliharanya gedung kantor dan kendaraan operasional	69.840.220,90	5 tahun	532.101.265,70	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tertaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 laporan	2 Laporan	10.000.000,00	2 Laporan	6.000.000,00	2 Laporan	6.120.000,00	2 Laporan	6.242.400,00	2 Laporan	6.367.248,00	5 tahun	34.729.648,00	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	4	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Tertaksananya pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Sosialisasi 22 kali tingkat kecamatan, rapat KOMINDA 4 kali, rapat FKDM 4 kali	Sosialisasi 22 kali tingkat kecamatan, rapat KOMINDA 4 kali, rapat FKDM 4 kali	257.458.000,00	Sosialisasi 22 kali tingkat kecamatan, rapat KOMINDA 4 kali, rapat FKDM 4 kali	262.607.160,00	Sosialisasi 22 kali tingkat kecamatan, rapat KOMINDA 4 kali, rapat FKDM 4 kali	267.859.303,20	Sosialisasi 22 kali tingkat kecamatan, rapat KOMINDA 4 kali, rapat FKDM 4 kali	273.216.489,26	Sosialisasi 22 kali tingkat kecamatan, rapat KOMINDA 4 kali, rapat FKDM 4 kali	278.680.819,05	5 tahun	1.339.821.771,51	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	belum dilaksanakan	Rapat FKUB 4 kali	10.208.000,00	Rapat FKUB 4 kali	10.412.160,00	Rapat FKUB 4 kali	10.620.403,20	Rapat FKUB 4 kali	10.832.811,26	Rapat FKUB 4 kali	11.049.467,49	5 tahun	53.122.841,95	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	6	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Tertaksananya Pembangunan wawasan kebangsaan	talkshow 1 kali, penyuluhan PPBN 1 kali	talkshow 1 kali, penyuluhan PPBN 1 kali	42.709.100,00	talkshow 1 kali, penyuluhan PPBN 1 kali	43.563.282,00	talkshow 1 kali, penyuluhan PPBN 1 kali	44.434.547,64	talkshow 1 kali, penyuluhan PPBN 1 kali	45.323.238,59	talkshow 1 kali, penyuluhan PPBN 1 kali	46.229.703,36	5 tahun	222.259.871,60	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	7	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Tertaksananya kegiatan pemberantasan pekat di lingkungan Masyarakat	Razia 3 kali, penyuluhan 21 kali	Razia 3 kali, penyuluhan 21 kali	520.071.500,00	Razia 3 kali, penyuluhan 21 kali	530.472.930,00	Razia 3 kali, penyuluhan 21 kali	541.082.388,60	Razia 3 kali, penyuluhan 21 kali	551.904.036,37	Razia 3 kali, penyuluhan 21 kali	562.942.117,10	5 tahun	2.706.472.972,07	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	8	Program pendidikan politik masyarakat	Terfasilitasinya perselisihan, bantuan perpol, pemantauan bantuan perpol dan pembinaan Ormas di Kab. HSS	Fasilitasi 4 kali, verifikasi bantuan terhadap 15 parpol, pembinaan terhadap Ormas 1 kali	Fasilitasi 4 kali, verifikasi bantuan terhadap 15 parpol, pembinaan terhadap Ormas 1 kali, penyuluhan masyarakat 22 kali	172.147.500,00	Fasilitasi 4 kali, verifikasi bantuan terhadap 15 parpol, pembinaan terhadap Ormas 1 kali, penyuluhan masyarakat 11 kali dan Pembuatan Database	225.590.450,00	Fasilitasi 4 kali, verifikasi bantuan terhadap 15 parpol, pembinaan terhadap Ormas 1 kali, penyuluhan masyarakat 11 kali	179.102.259,00	Fasilitasi 4 kali, verifikasi bantuan terhadap 15 parpol, pembinaan terhadap Ormas 1 kali, penyuluhan masyarakat 11 kali	182.684.304,18	Fasilitasi 4 kali, verifikasi bantuan terhadap 15 parpol, pembinaan terhadap Ormas 1 kali, penyuluhan masyarakat 11 kali	186.337.990,26	5 tahun	945.862.503,44	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	9	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Tertaksananya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sosialisasi 11 kali, pelatihan 1 kali, rapat koordinasi 6 kali, simulasi dan lomba 2 kali	Sosialisasi 11 kali, pelatihan 1 kali, rapat koordinasi 6 kali, simulasi dan lomba 2 kali, simulasi dan lomba 2 kali, Peta Digital Daerah Rawan Bencana	395.717.000,00	Sosialisasi 11 kali, pelatihan 1 kali, rapat koordinasi 6 kali, simulasi dan lomba 2 kali	603.631.340,00	Sosialisasi 11 kali, pelatihan 1 kali, rapat koordinasi 6 kali, simulasi dan lomba 2 kali	415.703.966,80	Sosialisasi 11 kali, pelatihan 1 kali, rapat koordinasi 6 kali, simulasi dan lomba 2 kali	424.018.046,14	Sosialisasi 11 kali, pelatihan 1 kali, rapat koordinasi 6 kali, simulasi dan lomba 2 kali	432.498.407,06	5 tahun	2.271.568.759,99	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	10	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Tertaksananya tanggap darurat bencana	penyediaan logistik dan obat-obatan 2 paket, 2 kali kegiatan tanggap darurat	penyediaan logistik dan obat-obatan 2 paket, 2 kali kegiatan tanggap darurat	551.455.300,00	penyediaan logistik dan obat-obatan 2 paket, 2 kali kegiatan tanggap darurat	562.484.406,00	penyediaan logistik dan obat-obatan 2 paket, 2 kali kegiatan tanggap darurat	573.734.094,12	penyediaan logistik dan obat-obatan 2 paket, 2 kali kegiatan tanggap darurat	585.208.776,00	penyediaan logistik dan obat-obatan 2 paket, 2 kali kegiatan tanggap darurat	596.912.951,52	5 tahun	2.869.795.527,64	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	11	Program Pasca Bencana	Tertaksananya program pasca bencana	belum dilaksanakan	tersedianya data dampak bencana 1 dokumen, tersusunnya rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 1 dokumen, fasilitasi bantuan paska bencana 2 kali	54.989.500,00	tersedianya data dampak bencana 1 dokumen, tersusunnya rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 1 dokumen, fasilitasi bantuan paska bencana 2 kali	56.089.290,00	tersedianya data dampak bencana 1 dokumen, tersusunnya rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 1 dokumen, fasilitasi bantuan paska bencana 2 kali	57.211.075,80	tersedianya data dampak bencana 1 dokumen, tersusunnya rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 1 dokumen, fasilitasi bantuan paska bencana 2 kali	58.355.297,32	tersedianya data dampak bencana 1 dokumen, tersusunnya rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 1 dokumen, fasilitasi bantuan paska bencana 2 kali	59.522.403,26	5 tahun	286.167.566,38	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	19	12	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum	Tertaksananya kelancaran pemilihan umum	Pemilukada	pemilu legislatif dan presiden	417.470.000,00	Pilgub	250.000.000,00	-	-	Pemilukada	300.000.000,00	5 tahun	967.470.000,00	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik		
1	19	13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya operasional pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	410.364.400,00	1 tahun	418.571.688,00	1 tahun	426.943.121,76	1 tahun	435.481.984,20	1 tahun	444.191.623,88	5 tahun	2.135.552.817,83	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1	19	14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor	1 tahun	1 tahun	83.416.000,00	1 tahun	253.084.320,00	1 tahun	54.146.006,40	1 tahun	55.228.926,53	1 tahun	56.333.505,06	5 tahun	502.208.757,99	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1	19	15	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur	53 polpp	53 polpp	120.865.000,00	53 polpp	-	53 polpp	-	100 polpp	253.816.500,00	100 polpp	-	100 polpp	374.681.500,00	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1	19	16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Tertaksananya pelatihan dasar bagi anggota sat pol PP kerjasama dengan KOMPI Senapan C kandungan	1 tahun	10org	9.000.000,00	1 tahun	-	1 tahun	-	50 org	54.000.000,00	-	60 Org	63.000.000,00	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
1	19	20	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	3.032.200,00	2 Laporan	3.092.844,00	2 Laporan	3.556.770,60	2 Laporan	3.627.906,01	2 Laporan	3.700.464,13	12 Laporan	17.010.184,74	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1	19	17	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Antisipasi konflik	4 kasus	4 kasus	193.830.000,00	4 kasus	197.706.600,00	4 kasus	227.362.590,00	4 kasus	231.909.841,80	4 kasus	236.548.038,64	5 tahun	1.087.357.070,44	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1	19	19	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Tertaksananya operasi gabungan	156 kali	156 kali	220.600.000,00	156 kali	225.012.000,00	156 kali	258.763.800,00	156 kali	263.939.076,00	156 kali	269.217.857,52	780 kali	1.237.532.733,52	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1	19	21	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PEMILU	Lancarnya Penyelenggaraan PEMILU	0	pemilu legislatif dan presiden	268.952.000,00	pilgub	134.476.000,00	0	-	0	-	0	1.200.000.000,00	pemilu, pilpres dan pilkada	1.603.428.000,00	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1	20		<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kependudukan dan Persandian</b>															
1	20	1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tertaksananya Program dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen SSHBJ	1 Dokumen SSHBJ	60.000.000,00	1 Dokumen SSHBJ	69.000.000,00	1 Dokumen SSHBJ	79.350.000,00	1 Dokumen SSHBJ	91.252.500,00	1 Dokumen SSHBJ	104.940.375,00	5 Dokumen SSHBJ	404.542.875,00	Bappeda
1	20	2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	ada	1 tahun	6.654.835.010,00	1 tahun	6.787.931.710,20	1 tahun	6.923.690.344,40	1 tahun	7.062.164.151,29	1 tahun	7.203.407.434,32	5 tahun	34.632.028.650,21	Sekretariat Daerah
1	20	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	ada	1 tahun	15.563.322.790,00	1 tahun	15.874.589.245,80	1 tahun	16.192.081.030,72	1 tahun	16.515.922.651,33	1 tahun	16.846.241.104,36	5 tahun	80.992.156.822,20	Sekretariat Daerah
1	20	4	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	belum ada	Tersedianya pakaian dinas KDH	155.500.000,00	Tersedianya pakaian dinas KDH	158.610.000,00	Tersedianya pakaian dinas KDH	161.782.200,00	Tersedianya pakaian dinas KDH	165.017.844,00	Tersedianya pakaian dinas KDH	168.318.200,88	Tersedianya pakaian dinas KDH	809.228.244,88	Sekretariat Daerah
1	20	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	ada	ada	350.000.000,00	ada	385.000.000,00	ada	423.500.000,00	ada	465.850.000,00	ada	512.435.000,00	ada	2.136.785.000,00	Sekretariat Daerah
1	20	6	Program peningkatan pelayanan kedinmas kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya pelayanan kedinmas Bupati dan Wakil Bupati	ada	ada	2.264.983.000,00	ada	2.310.282.660,00	ada	2.356.488.313,20	ada	2.403.618.079,46	ada	2.451.690.441,05	ada	11.787.062.493,72	Sekretariat Daerah
1	20	7	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Terciptanya Evaluasi Mengenai Rancangan Peraturan Desa yang berkaitan dengan APB Desa	148 desa	148 desa	143.890.000,00	148 desa	146.767.800,00	148 desa	149.703.156,00	148 desa	152.697.219,12	148 desa	155.751.163,50	148 desa	748.809.338,62	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan
1	20	9	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	148 desa	148 desa	345.000.000,00	148 desa	345.000.000,00	148 desa	345.000.000,00	148 desa	345.000.000,00	148 desa	345.000.000,00	148 desa	1.725.000.000,00	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan
1	20	10	Program penata daerah otonomi daerah baru	Tertatanya daerah otonomi daerah baru	3 batas wilayah	1 batas wilayah	280.000.000,00	1 batas wilayah	280.000.000,00	0	-	-	-	-	-	5 batas wilayah	560.000.000,00	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan
1	20	11	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tertaksananya kerjasama penyelesaian Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	bulan perpaket pengajua	2 bulan perpaket pengajua	583.711.260,00	2 bulan perpaket pengajua	595.385.485,20	bulan perpaket pengajua	607.293.194,90	bulan perpaket pengajua	619.439.058,80	bulan perpaket pengajua	631.827.839,98	5 tahun	3.037.656.838,88	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	20	12	Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Tertaksananya Pembinaan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan masyarakat	350 mahasiswa, 400 org atlet, 121 Imam	350 mahasiswa, 400 org atlet, 121 Imam	4.157.175.000,00	350 mahasiswa, 400 org atlet, 121 Imam	4.240.318.500,00	350 mahasiswa, 400 org atlet, 121 Imam	4.325.124.870,00	350 mahasiswa, 400 org atlet, 121 Imam	4.411.627.367,40	350 mahasiswa, 400 org atlet, 121 Imam	4.499.859.914,75	350 mahasiswa, 400 org atlet, 121 Imam	21.634.105.652,15	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat
1	20	13	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi	Tertaksananya Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP	40%	70%	485.000.000,00	70%	494.700.000,00	70%	504.594.000,00	70%	514.685.880,00	70%	524.979.597,60	70%	2.523.959.477,60	Sekretariat Daerah - Bagian Umum
1	20	14	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya sistem secara transparan dan efektif	2 laporan	2 laporan	1.800.000,00	2 laporan	2.070.000,00	2 laporan	2.380.500,00	2 laporan	2.737.575,00	2 laporan	3.148.211,25	5 tahun	12.136.286,25	Sekretariat Daerah - Bagian Umum
1	20	15	Program Reorganisasi dan Revitalisasi Lembaga Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	30 SKPD	Evaluasi 11 SKPD	595.592.300,00	Evaluasi 30 SKPD	695.592.300,00	Evaluasi 10 SKPD	607.504.146,00	Evaluasi 10 SKPD	619.654.228,92	Evaluasi 10 SKPD	632.047.313,50	5 tahun	3.150.390.288,42	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
1	20	16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	1.605.705.420,00	1 tahun	1.637.819.528,40	1 tahun	1.670.575.918,97	1 tahun	1.703.987.437,35	1 tahun	1.738.067.186,09	5 tahun	8.356.155.490,81	Sekretariat DPRD
1	20	17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun	315.042.500,00	1 tahun	321.343.350,00	1 tahun	327.770.217,00	1 tahun	334.325.621,34	1 tahun	341.012.133,77	5 tahun	1.639.493.822,11	Sekretariat DPRD
1	20	18	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Perbaikan & Peningkatan Kualitas & kuantitas Sarana Aparatur	1 tahun	1 tahun	465.850.000,00	1 tahun	285.727.500,00	1 tahun	291.442.050,00	1 tahun	297.270.891,00	1 tahun	303.216.308,82	5 tahun	1.643.506.749,82	Sekretariat DPRD
1	20	19	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terselenggaranya pelaporan kinerja dan keuangan	2 Laporan	12 Laporan	1.790.000,00	12 Laporan	1.825.800,00	12 Laporan	1.862.316,00	12 Laporan	1.899.562,32	12 Laporan	1.937.553,57	12 Laporan	9.315.231,89	Sekretariat DPRD
1	20	20	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	30 org	30 org	11.182.553.000,00	30 org	11.406.204.060,00	30 org	11.634.328.141,20	30 org	11.867.014.704,02	30 org	12.104.354.998,10	30 org	58.194.454.903,33	Sekretariat DPRD
1	20	21	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	1.129.669.700,00	1 tahun	1.152.263.094,00	1 tahun	1.175.308.355,88	1 tahun	1.198.814.523,00	1 tahun	1.378.636.701,45	5 tahun	6.034.692.374,32	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1	20	22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Lingkungan Kerja yang baik dan meningkatnya volume kerja dengan sarana yang memadai	1 tahun	1 tahun	383.200.000,00	1 tahun	440.680.000,00	1 tahun	506.782.000,00	1 tahun	582.799.300,00	1 tahun	670.219.195,00	5 tahun	2.583.680.495,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1	20	23	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tertaksananya BinteK tentang Implentasi Peraturan Perundang-Undangan	2 binteK	2 binteK	35.383.000,00	2 binteK	40.690.450,00	2 binteK	46.794.017,50	2 binteK	53.813.120,13	2 binteK	61.885.088,14	5 tahun	238.565.675,77	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1	20	24	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya jasa pelaporan	3 laporan	3 laporan	14.675.000,00	3 laporan	16.876.250,00	3 laporan	19.407.687,50	3 laporan	22.318.840,63	3 laporan	25.666.666,72	3 laporan	98.944.444,84	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1	20	25	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	PAD 7%	Peningkatan PAD 6,3%	4.002.910.050,00	Peningkatan PAD 6,3%	4.603.346.557,50	Peningkatan PAD 6,3%	5.293.848.541,13	Peningkatan PAD 6,3%	6.087.925.822,29	Peningkatan PAD 6,3%	7.001.114.695,64	Peningkatan PAD 6,3%	26.989.145.666,56	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1	20	26	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya apengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	487.055.500,00	1 tahun	369.796.610,00	1 tahun	377.192.542,20	1 tahun	384.736.393,04	1 tahun	392.431.120,90	5 tahun	2.011.212.166,15	Inspektorat Kabupaten
1	20	27	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1 tahun	383.910.000,00	1 tahun	71.588.200,00	1 tahun	73.019.964,00	1 tahun	74.480.363,28	1 tahun	225.969.970,55	5 tahun	828.968.497,83	Inspektorat Kabupaten
1	20	28	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur Pemeriksa	0	0	-	80 Pakaian Dinas Aparatur Pemeriksa	34.000.000,00	0	-	0	-	0	-	80 Pakaian Dinas Aparatur Pemeriksa	34.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
1	20	29	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tertaksananya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 laporan	2 laporan	6.800.000,00	2 laporan	6.936.000,00	2 laporan	7.074.720,00	2 laporan	7.216.214,40	2 laporan	7.360.538,69	10 laporan	35.387.473,09	Inspektorat Kabupaten
1	20	30	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	184 temuan	160 temuan	1.205.490.000,00	140 temuan	1.229.599.800,00	120 temuan	1.254.191.796,00	110 temuan	1.279.275.631,92	100 temuan	1.304.861.144,56	100 temuan	6.273.418.372,48	Inspektorat Kabupaten
1	20	31	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	3 binteK	5 binteK	241.182.500,00	5 binteK	246.006.150,00	5 binteK	250.926.273,00	5 binteK	255.944.798,46	5 binteK	261.063.694,43	28 binteK	1.255.123.415,89	Inspektorat Kabupaten

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target (5)	Rp (6)	target (7)	Rp (8)	target (9)	Rp (10)	target (11)	Rp (12)	target (13)	Rp (14)	target (15)	Rp (16)			
1	20	32	Program mengintensifkan penanaman penguasaan masyarakat	Tertanganinya Setiap paguduan yang disampaikan Masyarakat	2 kelompok paguduan	2 kelompok paguduan	410.820.000,00	2 kelompok paguduan	419.036.400,00	2 kelompok paguduan	427.417.128,00	2 kelompok paguduan	435.965.470,56	2 kelompok paguduan	444.684.779,97	2 kelompok paguduan	2.137.923.778,53	Inspektorat Kabupaten
1	20	33	Program Peningkatan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Standart Operasional Pemeriksaan	2 SOP	0	-	1 SOP	8.500.000,00	1 SOP	8.670.000,00	1 SOP	8.843.400,00	0	-	5 SOP	26.013.400,00	Inspektorat Kabupaten
1	20	34	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 paket CAT	pengadaan 1 paket CAT	2.210.304.770,00	1 tahun	810.304.770,00	1 tahun	826.510.865,40	1 tahun	843.041.082,71	1 tahun	859.901.904,36	5 tahun	5.550.063.392,47	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan
1	20	35	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0 ruang kelas, 1 kantor dan kendaraan dinas	perbaikan ruang kelas, kantor dan kendaraan dinas	209.900.000,00	pemeliharaan rutin kantor dan kendaraan dinas	31.773.000,00	pemeliharaan rutin kantor dan kendaraan dinas	32.408.460,00	pemeliharaan rutin kantor dan kendaraan dinas	33.056.629,20	pemeliharaan rutin kantor dan kendaraan dinas	33.717.761,78	perbaikan ruang kelas, kantor dan kendaraan dinas	340.855.850,98	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan
1	20	36	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan capaian kinerja	2 laporan	2 laporan	1.300.000,00	2 laporan	1.495.000,00	2 laporan	5.000.000,00	2 laporan	5.100.000,00	2 laporan	5.202.000,00	5 tahun	18.097.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan
1	20	37	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur melalui diklat	108 aparatur yang belum diklat	148 orang	2.013.282.140,00	150 orang	2.315.274.461,00	150 orang	2.361.579.950,22	150 orang	2.408.811.549,22	150 orang	2.456.987.780,21	748 orang	11.555.935.880,68	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan
1	20	38	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	dok peta jabatan dan kompetensi, penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ditangani, reward PNS, bantuan tugas belajar, seleksi cpns, SK pangkat dan pensiun	peta jabatan dan standar kompetensi belum ada	penyelesaian 100% kasus pelanggaran disiplin ditangani, reward 200 PNS, bantuan tugas belajar 100%, seleksi cpns 100 org, SK pangkat dan pensiun 100%	2.728.424.000,00	1 dok peta jabatan dan kompetensi, penyelesaian 100% kasus pelanggaran disiplin ditangani, reward 200 PNS, bantuan tugas belajar 100%, seleksi cpns 100 org, SK pangkat dan pensiun 100%	3.032.992.480,00	penyelesaian 100% kasus pelanggaran disiplin ditangani, reward 200 PNS, bantuan tugas belajar 100%, seleksi cpns 100 org, SK pangkat dan pensiun 100%	2.838.652.329,60	penyelesaian 100% kasus pelanggaran disiplin ditangani, reward 200 PNS, bantuan tugas belajar 100%, seleksi cpns 100 org, SK pangkat dan pensiun 100%	3.264.450.179,04	penyelesaian 100% kasus pelanggaran disiplin ditangani, reward 200 PNS, bantuan tugas belajar 100%, seleksi cpns 100 org, SK pangkat dan pensiun 100%	3.754.117.705,90	1 dok peta jabatan dan kompetensi, penyelesaian 100% kasus pelanggaran disiplin ditangani, reward 1000 PNS, bantuan tugas belajar 100%, seleksi cpns 500 org, SK pangkat dan pensiun 100%	15.618.636.694,54	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan
1	20	39	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	286.458.500,00	1 tahun	292.187.670,00	1 tahun	298.031.423,40	1 tahun	303.992.051,87	1 tahun	310.071.892,91	5 tahun	1.490.741.538,17	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
1	20	40	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung kerja	1 tahun	1 tahun	20.000.000,00	1 tahun	20.600.000,00	1 tahun	22.042.000,00	1 tahun	23.805.360,00	1 tahun	25.947.842,40	5 tahun	112.395.202,40	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
1	20	41	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan capaian kinerja	2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2 Laporan	2.040.000,00	2 Laporan	2.080.800,00	2 Laporan	2.122.416,00	2 Laporan	2.164.864,32	12 Laporan	10.408.080,32	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
1	20	42	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Tersusunnya sistem informasi pelayanan publik	1 tahun	1 tahun	40.000.000,00	1 tahun	46.000.000,00	1 tahun	10.000.000,00	1 tahun	10.000.000,00	1 tahun	10.000.000,00	5 tahun	116.000.000,00	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
1	20	43	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	1.364.401.420,00	1 tahun	1.569.061.633,00	1 tahun	1.804.420.877,95	1 tahun	2.075.084.009,64	1 tahun	2.386.346.611,09	5 tahun	9.199.314.551,68	Kecamatan dan Kelurahan
1	20	44	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tertaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	1 tahun	234.762.600,00	1 tahun	269.976.990,00	1 tahun	310.473.538,50	1 tahun	357.044.569,28	1 tahun	410.601.254,67	5 tahun	1.582.858.952,44	Kecamatan dan Kelurahan
1	20	45	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tertaksananya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	13.987.600,00	2 Laporan	16.085.740,00	2 Laporan	18.498.601,00	2 Laporan	21.273.391,15	2 Laporan	24.464.399,82	12 Laporan	94.309.731,97	Kecamatan dan Kelurahan
1	20	46	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum/Kamtibmas/Organisasi Kecamatan	Tertaksananya Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum/Kamtibmas/Organisasi Kecamatan	1 tahun	1 tahun	819.778.000,00	1 tahun	942.744.700,00	1 tahun	1.084.156.405,00	1 tahun	1.246.779.865,75	1 tahun	1.433.796.845,61	5 tahun	5.527.255.816,36	Kecamatan dan Kelurahan
1	21		<b>Ketahanan Pangan</b>															
1	22	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertaksananya Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur Pemerintah	1 tahun	1 tahun	331.068.200,00	1 tahun	337.689.564,00	1 tahun	344.443.355,28	1 tahun	351.332.222,39	1 tahun	358.358.866,83	5 tahun	1.722.892.206,50	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	22	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tertaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah	pemeliharaan gedung kantor 1 buah, perawatan Balai Penyuluh di 11 kecamatan, pemeliharaan kendaraan operasional 58 unit	61.650.000,00	63.883.000,00	65.160.660,00	66.463.873,20	67.793.150,66	324.950.683,86	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan						
1	22	3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tertaksananya Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	26.540.604,82	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan						
1	22	4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tertaksananya Penyuluhan dan pendampingan ditingkat Petani	peyusunan program di 148 desa, di 11 kecamatan dan 1 kabupaten, pelaksanaan lomba 1 kali, pertemuan tingkat kabupaten 1 kali, tingkat kecamatan 11 kali	535.289.300,00	340.995.086,00	347.814.987,72	354.771.287,47	611.866.713,22	2.190.737.374,42	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan						
1	22	5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Tertaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan	lumbung padi dan lantai jemur 15 unit, mesin penggilingan padi 2 unit, dan stok beras 11.250 Ton, pembinaan 17 desa mapan	1.220.853.680,00	1.493.509.693,60	1.220.349.887,47	965.297.285,22	984.603.230,93	5.884.613.777,22	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan						
1	22	6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Keikutsertaan Pameran Produk Pertanian Tk. Kab. Dan Propinsi	mengikuti expo tingkat provinsi dan kabupaten 1 kali	13.075.000,00	13.336.500,00	13.603.230,00	13.875.294,60	14.152.800,49	68.042.825,09	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan						
1	22	7	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Penerapan Teknologi Pertanian Organik	pelatihan dan pembelajaran serta gelar teknologi	36.675.180,00	37.408.683,60	38.156.857,27	38.919.994,42	39.698.394,31	190.859.109,60	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan						
1	22	8	Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan	Peningkatan Penyediaan Sarana prasarana Penyuluhan pertanian	dari 11 BPK 7 sudah memiliki sarana dan prasarana lengkap, pondok terbangun 149 dari 889 kelompok	601.821.800,00	408.000.000,00	416.160.000,00	424.483.200,00	432.972.864,00	2.283.437.864,00	Badan pondok pertemuan 20 unit, penyusunan RDK/RDKK 160 dokumen						
1	22		<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>															
1	22	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Sarjana pendamping desa	0	50 Desa	1.183.059.500,00	50 Desa	1.206.720.690	48 desa	1.183.059.500,00	148 desa	4.200.000.000,00	148 desa	4.200.000.000,00	148 desa	11.972.839.690,00	Sekretariat Daerah - Bagian Ekonomi dan Pembangunan
1	22	2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Mewujudkan kemandirian masyarakat dan mengurangi kemiskinan	144 Desa / 4 Kel	144 Desa / 4 Kel	823.728.100,00	144 Desa / 4 Kel	840.202.662,00	144 Desa / 4 Kel	857.006.715,24	144 Desa / 4 Kel	874.146.849,54	144 Desa / 4 Kel	891.629.786,54	144 desa / 4 kel	4.286.714.113,32	Badan Keluarga Barentana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
1	23		<b>Statistik</b>															
1	23	1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Mengembangnya data/informasi/statistik daerah	data 93 desa dari 148 desa	25 desa	250.000.000,00	20 desa	230.000.000,00	-	-	-	-	-	148 desa	480.000.000,00	480.000.000,00	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan
1	25		<b>Komunikasi dan Informatika</b>															
1	25	1	Program Kerjasama informasi dengan mas media	Menyebarkan informasi dan pelayanan internet gratis di kecamatan	3 titik wifi	8 titik wifi (Speedy)	540.670.000,00	4 titik wifi (V sat)	548.000.000,00	2 titik wifi (V sat)	436.000.000,00	2 titik wifi (V sat)	560.000.000,00	4 titik wifi (V sat)	808.000.000,00	440 orang	2.892.670.000,00	Dishubkominfo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	25	2	Program Pengembangan Komonikasi, Informasi dan Media Massa	Adanya karya tulis pemuda HSS di Internet,	belum ada	50 Karya tulis pemuda secara online, 1 draft perencanaan dan pengembangan kebijakan menara komunikasi	179.258.000,00	50 Karya tulis pemuda secara online,	29.843.160,00	50 Karya tulis pemuda secara online,	30.440.023,20	50 Karya tulis pemuda secara online,	31.048.823,66	50 Karya tulis pemuda secara online,	31.669.800,14	302.259.807,00	Dishubkominfo	
1	25	3	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya pengetahuan pelajar dan guru di bidang kominfo	belum ada	330 peserta	139.137.500,00	330 peserta	141.920.250,00	330 peserta	144.758.655,00	330 peserta	147.653.828,10	330 peserta	150.606.904,66	1650 peserta	724.077.137,76	Dishubkominfo
1	25	4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terwujudnya pengembangan Komonikasi, informasi dan Media Massa	1 tahun	1 tahun	585.255.000,00	1 tahun	673.043.250,00	1 tahun	773.999.737,50	1 tahun	890.099.698,13	1 tahun	1.023.614.652,84	5 tahun	3.946.012.338,47	Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat
1	25	5	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya SDM bidang humas	belum ada	50 org	15.000.000,00	50 org	-	-	-	-	-	-	50 org	15.000.000,00	Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat	
1	25	6	Program kerjasama informasi dengan mas media	Terwujudnya kerjasama kehumasan dengan media massa	4 Media massa	4 Media massa	1.560.580.000,00	4 Media massa	1.591.791.600,00	4 Media massa	1.623.627.432,00	4 Media massa	1.656.099.980,64	4 Media massa	1.689.221.980,25	4 Media massa	8.121.320.992,89	Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat
1	26		<b>Perpustakaan</b>															
1	26	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya Pelayanan Adm.Perkantoran yg Tertib menuju pada Pelayanan prima	1 tahun	1 tahun	265.500.000,00	1 tahun	270.810.000,00	1 tahun	276.226.200,00	1 tahun	281.750.724,00	1 tahun	287.385.738,48	5 tahun	1.381.672.662,48	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah
1	26	2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1 tahun	370.000.000,00	1 tahun	384.800.000,00	1 tahun	400.192.000,00	1 tahun	416.199.680,00	1 tahun	432.847.667,20	5 tahun	2.004.039.347,20	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah
1	26	3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Laporan capaian kinerja SKPD secara aktual dan akuntable	2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2 Laporan	2.040.000,00	2 Laporan	2.080.800,00	2 Laporan	2.122.416,00	2 Laporan	2.164.864,32	12 Laporan	10.408.080,32	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah
1	26	4	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Mendorong masyarakat meningkatkan minat, budaya dan kebiasaan membaca	1 tahun	1 tahun	285.000.000,00	1 tahun	296.400.000,00	1 tahun	308.256.000,00	1 tahun	320.586.240,00	1 tahun	333.409.689,60	5 tahun	1.543.651.929,60	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah
1	26	5	Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Tertaksananya penataan arsip dan dokumen daerah	1 tahun	1 tahun	150.000.000,00	1 tahun	156.000.000,00	1 tahun	162.240.000,00	1 tahun	168.729.600,00	1 tahun	175.478.784,00	5 tahun	812.448.384,00	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah
2	1		<b>Pertanian</b>															
2	1	1	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya koordinasi produksi pertanian / perkebunan	4kali	4kali	37.900.000,00	4kali	38.658.000,00	4kali	39.431.160,00	4kali	40.219.783,20	4kali	4.826.373,98	20 Kali	161.035.317,18	Sekretariat Daerah - Bagian Ekonomi dan Pembangunan
2	1	2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Tersalurnya beras bagi raskin	15372 RTSPM	15372 RTSPM	4.833.390.200,00	15372 RTSPM	4.930.058.004,00	15372 RTSPM	5.669.566.704,60	15372 RTSPM	5.782.958.038,69	15372 RTSPM	5.898.617.199,47	15372 RTSPM	27.114.590.146,76	Sekretariat Daerah - Bagian Ekonomi dan Pembangunan
2	1	3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pengelolan pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	295.127.500,00	1 tahun	315.786.425,00	1 tahun	337.891.474,75	1 tahun	361.543.877,98	1 tahun	386.851.949,44	5 tahun	1.697.201.227,17	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	1	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1 tahun	43.800.000,00	1 tahun	194.676.000,00	1 tahun	48.569.520,00	1 tahun	49.540.910,40	1 tahun	50.531.728,61	5 tahun	387.118.159,01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	1	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 laporan	2 laporan	4.350.000,00	2 laporan	4.437.000,00	2 laporan	4.525.740,00	2 laporan	4.616.254,80	2 laporan	4.708.579,90	2 laporan	22.637.574,70	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	1	6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya produktivitas padi per hektar (Ton/Ha)	4,705	5,205	8.401.936.375,00	5,705	8.569.975.102,50	6,205	8.741.374.604,55	6,705	8.916.202.096,64	7,205	9.094.526.138,57	7,205	43.724.014.317,26	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	1	7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%) harga konstan	2,30	2,55	75.120.000,00	2,95	77.373.600,00	3,10	79.694.808,00	3,30	82.085.652,24	3,75	86.189.934,85	3,75	400.463.995,09	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	1	8	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan	2 Jenis teknologi	2 Jenis teknologi	18.287.500,00	2 Jenis Teknologi	85.000.000,00	2 Jenis Teknologi	89.250.000,00	3 Jenis Teknologi	102.637.500,00	5 Jenis Teknologi	118.033.125,00	12 Jenis Teknologi	413.208.125,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	1	9	Program peningkatan kesejahteraan petani	Meningkatnya nilai tukar petani (tanaman perkebunan rakyat)	98,92	98,95	55.535.000,00	98,98	56.645.700,00	99,02	65.142.555,00	99,04	74.913.938,25	99,07	86.151.028,99	99,07	338.388.222,24	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	1	10	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Tersedianya bibit karet dan tanaman kehutanan dan tanaman lokal	110.000 bgt bbt karet, 250 pot angrak, 5 ktp penangkar bibit	117.715 batang bbt karet, 51.650 bgt tanaman kehutanan/perkebunan/rimba	1.019.227.500,00	192.000 batang	1.039.612.050,00	192.000 batang	1.060.404.291,00	192.000 batang	1.081.612.376,82	192.000 batang	1.103.244.624,36	960.000 batang	5.304.100.842,18	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	1	11	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Dikenalinya hasil produksi/pengolahan bidang kehutanan dan perkebunan	2 kegiatan promosi	3 even	12.000.000,00	3 even	12.240.000,00	3 even	12.484.800,00	3 even	12.734.496,00	3 even	12.989.185,92	3 even	62.448.481,92	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	1	12	Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	Tertaksananya peningkatan produksi dan pengolahan hasil perkebunan	100 Ha dan 5 Kelompok	3 kelompok masyarakat	12.855.000,00	3 kelompok masyarakat	13.112.100,00	3 kelompok masyarakat	13.374.342,00	3 kelompok masyarakat	13.641.828,84	3 kelompok masyarakat	15.688.103,17	15 kelompok masyarakat	68.671.374,01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	1	13	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Tertaksananya peningkatan produksi hasil pertanian / perkebunan	100 Ha dan 5 Kelompok	165 Ha dan 8 Kelompok	448.598.500,00	150 Ha dan 7 Kelompok	415.888.275,00	150 Ha dan 7 Kelompok	424.206.040,50	150 Ha dan 7 Kelompok	432.690.161,31	150 Ha dan 7 Kelompok	441.343.964,54	5 tahun	2.162.726.941,35	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	1	14	Program Pencegahan dan Penggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya kesehatan hewan dan ternak dengan menurunnya kematian ternak(S/C)	S/C = 1,6	S/C = 1,6	146.650.000,00	S/C = 1,55	168.647.500,00	S/C = 1,50	193.944.625,00	S/C = 1,45	223.036.318,75	S/C = 1,40	256.491.766,56	S/C = 1,40	988.770.210,31	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	1	15	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi daging (ton)	1392,85	1462,49	1.448.887.600,00	1535,61	1.475.825.352,00	1612,39	1.505.341.859,04	1693,01	1.535.448.696,22	1777,66	1.566.157.670,15	9474,01	7.529.661.177,41	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	2		<b>Kehutanan</b>															
2	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	406.723.700,00	1 tahun	414.858.174,00	1 tahun	423.155.337,48	1 tahun	431.618.444,23	1 tahun	440.250.813,11	5 tahun	2.116.606.468,82	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun	330.525.000,00	1 tahun	56.805.500,00	1 tahun	57.941.610,00	1 tahun	209.100.442,20	1 tahun	63.282.451,04	5 tahun	717.655.003,24	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	2	3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terselenggaranya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 laporan	2 laporan	10.660.000,00	2 laporan	6.000.000,00	2 laporan	6.120.000,00	2 laporan	6.242.400,00	2 laporan	6.367.248,00	2 laporan	35.389.648,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	2	4	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Tertaksananya rehabilitasi hutan dan lahan dan pemanfaatan lahan marginal dalam dan luar kawasan hutan	5.013,25 Ha	150 Ha	2.477.251.300,00	175 Ha	2.650.658.891,00	175 Ha	2.703.672.068,82	175 ha	2.757.745.510,20	175 ha	2.812.900.420,40	5.863,25 ha	13.402.228.190,42	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	2	5	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Tertaksananya perlindungan dan pengamanan terhadap hutan dan kebun lingkup Kab. HSS	24 kali setahun	24 kali setahun	66.250.000,00	24 kali setahun	67.575.000,00	24 kali setahun	68.926.500,00	24 kali setahun	70.305.030,00	24 kali setahun	71.711.130,60	5 tahun	344.767.660,60	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	2	6	Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Terkendalinya pemanfaatan hasil hutan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	0 regulasi, dan 0 profil dan rencana kerja KPHL	1 Regulasi, 1 profil dan 1 Rencana kerja KPHL	152.101.500,00	Survey potensi HHBK dan Penanganan Pasca Panen	155.143.530,00	Survey potensi HHBK dan Penanganan Pasca Panen	158.246.400,60	Survey potensi HHBK dan Penanganan Pasca Panen	161.411.328,61	Survey potensi HHBK dan Penanganan Pasca Panen	164.639.555,18	5 tahun	791.542.314,40	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	3		<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>															
2	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pengelola pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	371.311.700,00	1 tahun	378.737.934,00	1 tahun	356.312.692,68	1 tahun	363.438.946,53	1 tahun	370.707.725,46	5 tahun	1.840.508.998,68	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun	86.643.700,00	1 tahun	88.376.574,00	1 tahun	101.633.060,10	1 tahun	116.878.019,12	1 tahun	134.409.721,98	5 tahun	527.941.075,20	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terselenggaranya rutin pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 laporan	2 laporan	8.755.000,00	2 laporan	8.930.100,00	2 laporan	9.108.702,00	2 laporan	9.290.876,04	2 laporan	9.476.693,56	2 laporan	45.561.371,60	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	4	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Terselenggaranya pertambangan yang aman, terib dan Produktif serta selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan	9 IUP mineral bukan logam dan batuan, 3 IUP batu bara, 1 IUP mineral logam, 1 PKP2B	13 IUP mineral bukan logam dan batuan, 3 IUP mineral logam, 1 PKP2B	61.576.880,00	15 IUP mineral bukan logam dan batuan, 3 IUP batu bara, 1 IUP mineral logam, 1 PKP2B	64.039.955,20	17 IUP mineral bukan logam dan batuan, 3 IUP batu bara, 1 IUP mineral logam, 1 PKP2B	66.601.553,41	20 IUP mineral bukan logam dan batuan, 3 IUP batu bara, 1 IUP mineral logam, 1 PKP2B	69.265.615,54	23 IUP mineral bukan logam dan batuan, 3 IUP batu bara, 1 IUP mineral logam, 1 PKP2B	72.036.240,17	23 IUP mineral bukan logam dan batuan, 3 IUP batu bara, 1 IUP mineral logam, 1 PKP2B	333.520.244,32	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	5	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Terdapat dan Terpenuhiya kebutuhan Listrik Masyarakat yang belum terjangkau PLN	715 PLTS, 55 Genset	25 PLTS dan 55 Genset	506.780.000,00	50 PLTS dan 55 Genset	683.560.000,00	50 PLTS dan 55 Genset	697.231.200,00	50 PLTS dan 55 Genset	711.175.824,00	50 PLTS dan 55 Genset	725.399.340,48	940 PLTS dan 330 genset	3.324.146.364,48	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	6	Program Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Mineral	Terdatanya sumberdaya mineral	4 Kec.	2 Kec.	167.021.000,00	2 Kec.	170.361.420,00	2 Kec.	195.915.633,00	1 Kec.	117.549.379,80	Monitoring	30.000.000,00	11 kec	680.847.432,80	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	7	Program Pengembangan Sumber Energi Alternatif	Termanfaatkannya potensi daerah sebagai bahan energi alternatif	50 Instalasi Biogas, 5 PLTMH	4 Instalasi Biogas	-	2 Instalasi Biogas	50.000.000,00	2 Instalasi Biogas	52.500.000,00	2 Instalasi Biogas	55.125.000,00	2 Instalasi Biogas	57.881.250,00	62 Instalasi Biogas, 5 PLTMH	62 Instalasi Biogas, 5 PLTMH	Dinas Pertambangan dan Energi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab				
				2014		2015		2016		2017		2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target (5)	Rp (6)	target (7)	Rp (8)	target (9)	Rp (10)	target (11)	Rp (12)	target (13)	Rp (14)		target (15)	Rp (16)		
2	3	8	Program Pembinaan dan Pengembangan Minyak dan Gas	Terwujudnya pendistribusian BBM dan Gas	5 SPBU, 3 Agen Mitan, 45 pangkalan mitan, Gas belum ada	5 SPBU, 3 Agen Mitan, 45 pangkalan mitan, Gas belum ada	40.000.000,00	5 SPBU, 3 Agen Mitan, 45 pangkalan mitan, Gas belum ada	41.600.000,00	5 SPBU, 3 Agen Mitan, 45 pangkalan mitan, Gas belum ada	47.840.000,00	5 SPBU, 3 Agen Mitan, 45 pangkalan mitan, Gas belum ada	49.753.600,00	5 SPBU, 3 Agen Mitan, 45 pangkalan mitan, Gas belum ada	51.743.744,00	5 SPBU, 3 Agen Mitan, 45 pangkalan mitan, Gas belum ada	230.937.344,00	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	9	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih	Terpenuhiya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih	17 Unit Sumur Bor Air Bawah Tanah, 15 paket distribusi perpipaan	2 Unit Sumur Bor ABT, 3 paket distribusi perpipaan	961.450.000,00	4 Unit Sumur Bor ABT, 5 paket distribusi perpipaan	2.019.045.000,00	4 Unit Sumur Bor ABT, 5 paket distribusi perpipaan	2.119.997.250,00	4 Unit Sumur Bor ABT, 5 paket distribusi perpipaan	2.225.997.112,50	4 Unit Sumur Bor ABT, 5 paket distribusi perpipaan	2.337.296.968,13	35 Unit Sumur Bor ABT, 38 paket distribusi perpipaan	9.663.786.330,63	Dinas Pertambangan dan Energi
<b>2 4 Pariwisata</b>																		
2	4	1	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Tersebarluasnya informasi dan pemasaran pariwisata	4 Pameran	4 Pameran	379.500.000,00	4 Pameran	387.090.000,00	4 Pameran	394.831.800,00	4 Pameran	402.728.436,00	4 Pameran	410.783.004,72	4 Pameran	1.974.933.240,72	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	4	2	Program pengembangan destinasi pariwisata	Pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah terbangun	2 buah	2 buah	802.465.000,00	2 buah	818.514.300,00	2 buah	834.884.586,00	2 buah	851.582.277,72	2 buah	868.613.923,27	2 buah	4.176.060.086,99	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	4	3	Program pengembangan Kemitraan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan	7 kelompok	7 kelompok	22.680.000,00	7 kelompok	23.133.600,00	7 kelompok	23.596.272,00	7 kelompok	24.068.197,44	7 kelompok	24.549.561,39	7 kelompok	118.027.630,83	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>2 5 Kelautan dan Perikanan</b>																		
2	5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	487.543.900,00	1 tahun	497.294.778,00	1 tahun	571.888.994,70	1 tahun	657.672.343,91	1 tahun	756.323.195,49	5 tahun	2.970.723.212,10	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	5	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tertaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3 unit kantor, 20 kendaraan dinas	3 unit kantor, 20 kendaraan dinas	83.000.000,00	5 unit kantor, 20 kendaraan dinas	84.660.000,00	5 unit kantor, 20 kendaraan dinas	86.353.200,00	5 unit kantor, 20 kendaraan dinas	99.306.180,00	5 unit kantor, 20 kendaraan dinas	114.202.107,00	5 unit kantor, 20 kendaraan dinas	467.521.487,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	5	3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan dinas	2 laporan	2 laporan	7.850.000,00	2 laporan	8.007.000,00	2 laporan	8.167.140,00	2 laporan	9.392.211,00	2 laporan	10.801.042,65	2 laporan	44.217.393,65	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	5	4	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya perikanan	Pembinaan 16 kelompok dari 26 Kelompok	18 Kelompok	251.607.500,00	2 kelompok POKMASWAS dan pembangunan 1 pos pengawasan DITPOL AIR	466.639.650,00	2 kelompok POKMASWAS	325.135.597,50	2 kelompok POKMASWAS	373.905.937,13	2 kelompok POKMASWAS	429.991.827,69	26 Kelompok POKMASWAS, 1 Pos	1.837.280.512,32	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	5	5	Program pengembangan budidaya perikanan	Meningkatnya produksi benih ikan dan produksi perikanan budidaya	2449,3 Ton	2974 Ton	4.047.575.025,00	3272 Ton	4.452.332.527,50	3600 ton	4.897.565.780,25	3959 Ton	5.387.322.358,28	4355 Ton	5.926.054.594,10	5 tahun	24.710.850.285,13	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	5	6	Program pengembangan perikanan tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan	7512 Ton	7737 Ton	916.032.000,00	7969 Ton	934.352.640,00	8208 Ton	953.039.692,80	8454 Ton	972.100.486,66	8708 Ton	991.542.496,39	8708 Ton	4.767.067.315,85	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	5	7	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Tercapainya Nilai Tambah Produk Perikanan Melalui Peningkatan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	10 Kelompok PHP	12 Kelompok PHP	167.790.000,00	12 Kelompok PHP	171.145.800,00	12 Kelompok PHP	174.568.716,00	12 Kelompok PHP	178.060.090,32	12 Kelompok PHP	181.621.292,13	60 Kelompok PHP	873.185.898,45	Dinas Perikanan dan Peternakan
<b>2 6 Perdagangan</b>																		
2	6	1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Terwujudnya kegiatan ukur ulang dan pengawasan barang beredar	11 Kall	11 kali	17.887.500,00	11 kali	18.245.250,00	11 kali	18.610.155,00	11 kali	18.982.358,10	11 kali	19.362.005,26	55 kali	93.087.268,36	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	6	2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	38 pasar	3 unit pasar	1.545.868.500,00	3 unit pasar	1.545.868.500,00	3 unit pasar	1.545.868.500,00	3 unit pasar	1.545.868.500,00	3 unit pasar	1.545.868.500,00	41 unit pasar	7.729.342.500,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	6	3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelaksanaan administrasi kantor sesuai dengan rencana	1 tahun	1 tahun	305.830.000,00	1 tahun	311.946.600,00	1 tahun	318.185.532,00	1 tahun	324.549.242,64	1 tahun	331.040.227,49	5 tahun	1.591.551.602,13	Kantor Pengelola Pasar
2	6	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparat	1 tahun	1 tahun	34.500.000,00	1 tahun	35.190.000,00	1 tahun	35.893.800,00	1 tahun	36.611.676,00	1 tahun	37.343.909,52	5 tahun	179.539.385,52	Kantor Pengelola Pasar
2	6	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 tahun	1 tahun	3.600.000,00	1 tahun	3.672.000,00	1 tahun	3.745.440,00	1 tahun	3.820.348,80	1 tahun	3.896.755,78	5 tahun	18.734.544,58	Kantor Pengelola Pasar
2	6	6	Program Penertiban dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	Tertaksananya operasi penertiban dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar	1 tahun	1 tahun	400.000.000,00	1 tahun	420.000.000,00	1 tahun	441.000.000,00	1 tahun	463.050.000,00	1 tahun	486.202.500,00	5 tahun	2.210.252.500,00	Kantor Pengelola Pasar
<b>2 7 Industri</b>																		
2	7	1	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Meningkatnya kapasitas iptek sistem produksi	11 jenis	2 jenis	261.944.240,00	2 jenis	267.183.124,80	2 jenis	272.526.787,30	1 jenis	138.988.566,00	1 jenis	159.836.850,90	5 tahun	1.100.479.569,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target (5)	Rp (6)	target (7)	Rp (8)	target (9)	Rp (10)	target (11)	Rp (12)	target (13)	Rp (14)	target (15)	Rp (16)			
2	7	2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah	300 wirausaha	300 wirausaha	621.901.400,00	600 wirausaha	1.268.678.856,00	600 wirausaha	1.294.052.433,12	-	-	1500 Wirausaha	3.184.632.689,12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		
2	7	3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri	100 wirausaha	100 wirausaha	149.451.500,00	200 wirausaha	304.881.060,00	200 wirausaha	310.978.681,20	-	-	300 wirausaha	765.311.241,20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		
2	7	4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Menumbuhkembangkan koperasi aktif dari 105 menjadi 150	105 koperasi	5 koperasi	381.601.250,00	10 koperasi	389.233.275,00	11 koperasi	397.017.940,50	7 koperasi	404.958.299,31	12 koperasi aktif	1.985.868.230,11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		
2	7	5	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Terbinanya pedagang kaki lima	100 wirausaha	100 wirausaha	95.167.500,00	100 usaha	109.442.625,00	100 wirausaha	125.859.018,75	300 wirausaha	385.128.597,38	300 wirausaha	392.831.169,32	900 wirausaha	1.108.428.910,45	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

## **BAB IX**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Indikator kinerja memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Suatu indikator kinerja pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan -penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.

#### **9.1. Aspek Pelayanan Umum**

Pada aspek layanan urusan umum penentuan capaian indikator tiap tahunnya selama lima tahun, mencakup pada layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan. Penetapan indikator untuk kedua fokus tersebut dapat dilihat seperti pada tabel 9.1

Tabel: 9.1  
Penetapan Indikator Aspek Pelayanan Umum

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA AKHIR	SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018		
<b>I</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b> <b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>								
<b>I.1</b>	<b>Pendidikan</b>								
I.1.1	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	<b>98,80%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,18%</b>	<b>100%</b> <b>0%</b>	<b>100%</b>	Disdik/BPS
I.1.2	Fasilitas Pendidikan:								
I.1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	<b>52,80%</b>	<b>57,30%</b>	<b>61,80%</b>	<b>66,30%</b>	<b>70,80%</b>	<b>75,30%</b>	<b>75,30%</b>	Disdik
I.1.4	Angka Partisipasi Sekolah (%):								
	a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	<b>97,91%</b>	<b>98,33%</b>	<b>98,75%</b>	<b>99,16%</b>	<b>99,58%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	Disdik/BPS
	b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	<b>79,13%</b>	<b>81,54%</b>	<b>83,96%</b>	<b>86,37%</b>	<b>88,78%</b>	<b>91,20%</b>	<b>91,20%</b>	Disdik/BPS
	c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	<b>46,59%</b>	<b>53,11%</b>	<b>59,63%</b>	<b>66,16%</b>	<b>72,68%</b>	<b>79,20%</b>	<b>79,20%</b>	Disdik
I.1.5	Angka Kelulusan (%):								
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Disdik
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Disdik
	c. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Disdik
I.1.6	Peningkatan kualitas belajar mengajar berupa bis sekolah (unit)	<b>0</b>	<b>1 unit</b>	<b>2 unit</b>	<b>4 unit</b>	<b>4 unit</b>	<b>4 unit</b>	<b>4 unit</b>	DPPKAD/Disdik

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA AKHIR	SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018		
I.1.7	Peningkatan kesejahteraan aparatur	31%/Gaji pokok	ada	ada	ada	ada	ada	ada	BKD dan Diklat
I.1.8	Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (%)								Dinas Pendidikan
	Guru SD	47%	57,6%	68,2%	78,8%	89,4%	100%	100%	Dinas Pendidikan
	Guru SMP	78%	82,40%	86,80%	91,20%	95,60%	100%	100%	Dinas Pendidikan
	Guru SMA/SMK	91,98%	93,38%	95,19%	96,79%	98,40%	100%	100%	Dinas Pendidikan
<b>I.2</b>	<b>Kesehatan</b>								
I.2.1	Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH)	11,5	11	11	10	10	10	10	Dinas kesehatan
I.2.2	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	176 (2012)	175	150	125	110	100	100	Dinas Kesehatan
I.2.3	Rasio Puskesmas Per satuan penduduk	1/10.960	1/10.960	1/11.000	1/11.000	1/12.000	1/12.000	1/12.000	Dinas Kesehatan
I.2.4	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	92,0%	92,5%	93,0%	93,5%	94,0%	95,0%	95,0%	Dinas Kesehatan
I.2.5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit								
	a. Penemuan penderita pneumonia balita (%)	34%	39%	45%	48%	52%	60%	60%	Dinas Kesehatan
	b. Penemuan pasien baru TB BTA positif	48%	45%	43%	40%	37%	30%	30%	Dinas Kesehatan
	c. Penderita DBD yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	d. Penemuan penderita diare	55,9%	53,9%	51,9%	49,9%	47,9%	45,9%	45,9%	Dinas Kesehatan

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA AKHIR	SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018		
	e. Penanganan penderita HIV/AIDS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
I.2.6	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (kartu HSS sehat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
I.2.7	Jumlah kunjungan dan layanan pasien di Puskesmas (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
I.2.8	Jumlah pasien jamkesda & jamkesmas yang dirujuk (%)	32.581 / 201.542 (16,17%)	≤15% kunjungan pasien jamkesda dan jamkesmas di PKM	≤15% kunjungan pasien jamkesda dan jamkesmas di PKM	≤15% kunjungan pasien jamkesda dan jamkesmas di PKM	≤15% kunjungan pasien jamkesda dan jamkesmas di PKM	≤15% kunjungan pasien jamkesda dan jamkesmas di PKM	≤15% kunjungan pasien jamkesda dan jamkesmas di PKM	Dinas Kesehatan
I.2.9	Cakupan desa siaga aktif	52,02%	60,0%	62,0%	65,0%	68,0%	72,0%	80,0%	Dinas Kesehatan
I.2.10	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan/ rumah sakit (%)	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%	BLUD RSUD
I.2.11	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dirumah sakit (%)	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	BLUD RSUD
I.2.12	Tersedianya SOP pelayanan kesehatan rumah sakit (% , Nasional)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BLUD RSUD
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>								
I.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	60,0% (2013)	60,5%	61,0%	61,5%	62,0%	62,5%	62,5%	Dinas PU
I.3.2	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk/th	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>Kesra</b>

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA AKHIR	SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018		
I.3.3	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	33,32%	34,33%	35,33%	36,33%	37,33%	38,33%	38,33%	Dinas PU
I.3.5	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%) 12.573/6.170ha	49,08%	52,25%	55,44%	58,62%	61,80%	64,98%	64,98%	Dinas PU
I.3.6	Proporsi Jembatan dalam kondisi baik (%)	98,8%	99,04%	99,28%	99,52%	99,76%	100%	100%	Dinas PU
<b>4</b>	<b>Perumahan</b>								
I.4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	31,88%	35,73%	39,6%	43,4%	47,3%	51,15%	51,15%	Dinas PU
I.4.2	Terciptanya rumah yang layak huni dan terjangkau	84,29%	87,43%	90,57%	93,72%	96,86%	100,0%	100,0%	Dinas PU
<b>5</b>	<b>Penataan ruang</b>								
I.5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB								
	a. RTH Publik (5,185 Ha )	25%	26%	27%	28%	29%	30%	31%	Dinas LH TAKODES
	b. RTH Private (2,593 Ha )	5,0%	6,0%	8,0%	9,0%	10,0%	11,0%	12,0%	Dinas LH TAKODES
I.5.2	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	80,08%	81,08%	82,58%	85,08%	87,58%	90,08%	92,58%	Dinas LH TAKODES
<b>6</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>								
I.6.1	Tersedianya Perda RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
I.6.2	Tersedianya Perda RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
I.6.3	Tersedianya PerBup RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
I.6.4	Tersedianya E-planing, E-budgeting dan E-monev, E-Database dan E-office	0	3	2	0	0	0	5	Bappeda
<b>7</b>	<b>Perhubungan</b>								
I.7.1	Ijin trayek	152	154	156	158	159	160	160	Dishubkominfo

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA AKHIR	SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018		
I.7.2	Jumlah Uji KIR angkutan umum	1.772	1.797	1.822	1.847	1.872	1.897	1.897	Dishubkominfo
I.7.3	Jumlah Terminal	4	4	4	4	4	4	4	Dishubkominfo
I.7.4	Pemasangan rambu-rambu	442	75	75	75	75	75	817	Dishubkominfo
I.7.5	Pengembangan terminal tipe B	0	0	0	0	1	1	1	Dishubkominfo
<b>8</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>								
I.8.1	Persentase penanganan sampah se kabupaten	26,42%	34,69%	45,91%	51,65%	57,42%	69,19%	69,19%	Dinas LH TAKODES
I.8.2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas LH TAKODES
<b>9</b>	<b>Kependudukan dan catatan sipil</b>								
I.9.1	Pertumbuhan Penduduk	5,3%	4,02%	3,62%	3,22%	2,8%	2,2%	2,2%	Dinas Dukcapil
I.9.2	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	72,6%	78,08%	83,56%	89,04%	94,52%	100%	100%	Dinas Dukcapil
I.9.3	Rasio pasangan berakte nikah	20%	25%	30%	40%	50%	60%	60%	Dinas Dukcapil
I.9.4	Kepemilikan KTP	78,9%	83,12%	87,34%	91,56%	95,78%	100%	100%	Dinas Dukcapil
I.9.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	40,55%	50,19%	59,22%	67,09%	76,13%	80%	80%	Dinas Dukcapil
<b>10</b>	<b>Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>								
I.10.1	Rasio penanganan KDRT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan KB PMP
I.10.2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	52,70%	53,18%	53,56%	54,04%	54,52%	55,13%	55,13%	Badan KB PMP
I.10.3	Jumlah kecamatan layak anak (percontohan)	0	1	2	3	4	5	5	Badan KB PMP

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA AKHIR	SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018		
<b>11</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>								
I.11.1	Cakupan peserta KB aktif	<b>80,28%</b>	<b>80,58%</b>	<b>80,88%</b>	<b>81,18%</b>	<b>81,38%</b>	<b>81,72%</b>	<b>81,72%</b>	Badan KB PMP
I.11.2	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	<b>25,05%</b>	<b>23,45%</b>	<b>22,95%</b>	<b>21,45%</b>	<b>19,95</b>	<b>18,45%</b>	<b>18,45%</b>	Badan KB PMP
<b>12</b>	<b>Sosial</b>								
I.12.1	Sarana sosial seperti (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi) unit.	<b>13 buah</b>	<b>13 buah</b>	<b>14 buah</b>	<b>15 buah</b>	<b>15 buah</b>	<b>15 buah</b>	<b>15 buah</b>	Dinas Sosial, TK, dan Transmigrasi
I.12.2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	<b>1536</b>	<b>2424</b>	<b>2424</b>	<b>2424</b>	<b>2424</b>	<b>2424</b>	<b>2424</b>	Dinas Sosial, TK, dan Transmigrasi
I.12.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	<b>2750</b>	<b>3000</b>	<b>3500</b>	<b>4000</b>	<b>4500</b>	<b>5038</b>	<b>5038</b>	Dinas Sosial, TK, dan Transmigrasi
I.12.4	Prosentase pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin /RASKIN (%) (18.182/4(KK = 100%)= 25%	<b>25%</b>	<b>ada</b>	<b>ada</b>	<b>ada</b>	<b>ada</b>	<b>ada</b>	<b>ada</b>	Dinas Sosial, Tk dan Trans/Bag. ekobang setda kab. HSS
I.12.5	Pemuka/tokoh agama yang mendapatkan jaminan sosial (orang)	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Bagian Kesra Setda Kab. HSS
<b>13</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>								
I.13.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	<b>58,34%</b>	<b>60,47%</b>	<b>61,64%</b>	<b>62,28%</b>	<b>63,62%</b>	<b>65,72%</b>	<b>65,72%</b>	Dinas Sosial, TK, dan Transmigrasi
I.13.2	Pencari kerja yang ditempatkan	<b>32,49%</b>	<b>34,24</b>	<b>35,92</b>	<b>36,87</b>	<b>38,42</b>	<b>41,61</b>	<b>41,61</b>	Dinas Sosial, TK, dan Transmigrasi

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA AKHIR	SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018		
I.13.3	Tingkat pengangguran terbuka	3,98	3,40	3,45	3,50	3,55	3,60	3,60	Dinas Sosial, TK, dan Transmigrasi
I.13.4	Terciptanya lapangan kerja (IKM)	36,21	38,33	39,34	41,42	42,96	44,67	44,67	Dinas Sosial, TK, dan Transmigrasi
<b>14</b>	<b>Koperasi dan UKM</b>								
I.14.1	Persentase koperasi aktif (jumlah)	105 (2012)	110	120	131	138	150	150	Dinas Perindakop dan UKM
I.14.2	Pembinaan UMKM (unit)	40.096	41.096	43.096	45.096	45.096	45.096	45.096	Dinas Perindakop dan UKM
<b>16</b>	<b>Kebudayaan</b>								
I.16.1	Festival seni dan budaya (kegiatan)	4	5	6	7	8	9	9	Dinas Budpar
I.16.2	Prosentase Pelestarian budaya lokal	70%	72%	74%	76%	78%	80%	80%	Dinas Budpar
<b>17.</b>	<b>Otonomi daerah, pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan persandian</b>								
I.17.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 1.000 penduduk (%)	19,52	22,17	35,21	47,82	60,85	82,60	82,60	Satpol PP
I.17.2	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan / desa (%)	75	80	84	90	97	100	100	Satpol PP
I.17.3	Kemiskinan (%)	7,29%	5,83	5,49	5,15	4,81	4,5	4,5	BPS

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA AKHIR	SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018		
I.17.4	Tertata dan tersosialisainya peraturan perundang-undangan	<b>7 Kegiatan</b>	<b>11 Kegiatan</b>	<b>13 Kegiatan</b>	<b>14 Kegiatan</b>	<b>15 Kegiatan</b>	<b>17 Kegiatan</b>	<b>17 Kegiatan</b>	Bagian Hukum setda Kab. HSS
I.17.5	Tingkat kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik	<b>72%</b>	<b>75%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	Badan PB, Kesbang Pol/KPU
I.17.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	Bagian Organisasi Setda Kab. HSS
I.17.7	Opini Audit BPK	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	Inspektorat Kab. HSS
<b>18</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>								
I.18.1	Regulasi Ketahanan Pangan	<b>ADA</b>	<b>ADA</b>	<b>ADA</b>	<b>ADA</b>	<b>ADA</b>	<b>ADA</b>	<b>ADA</b>	Bapeluh
I.18.2	Ketersediaan Pangan Utama	<b>307,82%</b>	<b>308,82%</b>	<b>309,82%</b>	<b>310,82</b>	<b>311,82%</b>	<b>312,82%</b>	<b>312,82%</b>	Bapeluh
<b>19</b>	<b>Pemberdayaan masyarakat dan desa</b>								
I.19.1	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	Badan KB, PMP
I.19.2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa (%)	<b>50%</b>	<b>52,0%</b>	<b>58,0%</b>	<b>62,0%</b>	<b>66,0%</b>	<b>70,0%</b>	<b>70,0%</b>	Badan KB, PMP
I.19.3	Jumlah masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	<b>57,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>64,0%</b>	<b>70,0%</b>	<b>75,0%</b>	<b>75,0%</b>	<b>75,0%</b>	Badan KB, PMP
<b>20</b>	<b>Statistik</b>								
I.20.1	Buku "Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam angka"	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>	Bappeda
I.20.2	Buku "PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan"	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>	Bappeda

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA AKHIR	SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018		
<b>21</b>	<b>Komunikasi dan informatika</b>								
I.21.1	Web site milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1	1	1	Dishubkominfo
I.21.2	Prosentase Jaringan Komunikasi Publik	0%	25%	50%	100%	100%	100%	100%	Dishubkominfo
<b>22</b>	<b>Perpustakaan</b>								
I.22.1	Jumlah Perpustakaan Desa	51	56	61	66	71	76	76	KPAD
I.22.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah pertahun	14.454	15.704	17.004	18.354	19.754	21.204	21.204	KPAD
<b>FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>									
<b>23</b>	<b>Pertanian</b>								
I.23.1	Produktivitas padi per hektar (T/Ha)	4,705	5,205	5,705	6,205	6,705	7,205	7,205	Dinas Pertanian/BPS
I.23.2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) atas dasar Harga konstan	2,30	2,55	2,95	3,10	3,30	3,75	3,75	Dinas Pertanian/BPS
I.23.3	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%) atas dasar Harga Konstan	26,27	27,35	27,90	28,25	28,97	29,32	29,32	Dinas Pertanian/BPS
I.23.4	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%) atas dasar Harga konstan	2,52	2,73	3,10	3,47	3,89	4,10	4,10	Dinas Pertanian/BPS
I.23.5	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	100/913	182/913	182/913	182/913	182/913	182/913	913	Dinas Pertanian

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA AKHIR	SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018		
I.23.6	Nilai Tukar Petani (NTP) Pertanian secara umum	100,44	100,47	100,49	100,51	100,54	100,56	100,56	Pertanian/BPS
<b>24</b>	<b>Kehutanan</b>								
I.24.1	Rehabilitasi hutan dan lahan	<b>5.013,25 Ha</b>	<b>6.813,25 Ha</b>	<b>7.263,25 Ha</b>	<b>7.743,25 Ha</b>	<b>8.093,25 Ha</b>	<b>8.443,25 Ha</b>	<b>8.443,25 Ha</b>	Dinas Hutbun
I.24.2	Kerusakan kawasan hutan	<b>13.660,83 Ha</b>	<b>12.860,83 Ha</b>	<b>12.410,83 Ha</b>	<b>11.930,83 Ha</b>	<b>11.580,83 Ha</b>	<b>11.230,83 Ha</b>	<b>11.230,83 Ha</b>	Dinas Hutbun
I.24.3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	<b>0,39</b>	<b>0,41</b>	<b>0,52</b>	<b>0,94</b>	<b>1,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	Dinas Hutbun/BPS
I.24.4	Peningkatan produksi hasil hutan komoditas unggulan (kayu manis)	<b>1.436,53</b>	<b>1.465,26</b>	<b>1.527,96</b>	<b>1.611,96</b>	<b>1.698,61</b>	<b>1.708,04</b>	<b>1.708,04</b>	Dinas Hutbun/BPS
<b>25</b>	<b>PERKEBUNAN</b>								
I.25.1	Peningkatan produksi hasil perkebunan komoditas unggulan (karet)	<b>7.206,92 ton</b>	<b>8.276,50 ton</b>	<b>9.004,66 ton</b>	<b>9.732,83 ton</b>	<b>10.461 ton</b>	<b>11.189,17 ton</b>	<b>11.189,17 ton</b>	Dinas Hutbun
<b>26</b>	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>								
I.26.1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	3,36	3,25	3,15	3,00	2,95	2,94	2,94	Dinas Tamben
<b>27</b>	<b>PARIWISATA</b>								
I.27.1	Kunjungan pariwisata (orang)	<b>41.666</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>52.000</b>	<b>54.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	Dinas Parbud
I.27.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,06	0,10	0,15	0,25	0,50	1,00	1,00	Dinas Parbud
<b>28</b>	<b>PERIKANAN</b>								
I.28.1	Produksi perikanan lokal (Ton)	<b>7712.21</b>	<b>11225.55</b>	<b>11386.23</b>	<b>11518.72</b>	<b>11582.11</b>	<b>11856.54</b>	<b>11856.54</b>	Diskannak

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA AKHIR	SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018		
I.28.2	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	75,25%	76,55%	77,25%	78,33%	79,25%	80,55%	80,55%	Diskannak
I.28.3	Cakupan bina kelompok nelayan	50%	55%	58%	60%	63%	66%	66%	Diskannak
<b>29</b>	<b>PERDAGANGAN</b>								
I.29.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,04	12,75	13,10	13,89	14,25	15,68	15,68	Dinas Perindakop dan UKM
I.29.2	Jumlah pasar tradisional perkecamatan	38	38	38	39	39	40	40	Dinas Perindakop dan UKM
<b>30</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>								
I.30.1	Kontribusi sektor industry terhadap PDRB (%)	6,58	7,12	7,98	8,27	9,00	9,75	9,75	Dinas Perindakop dan UKM
I.30.2	Meningkatnya jenis alat produksi cor logam (jenis)	11	13	15	16	17	18	18	Dinas Perindakop dan UKM
I.30.3	Meningkatnya penerapan teknologi pengolahan hasil agroindustry (jenis yaitu vakum seller, perajang kerupuk dan pemerah santan)	0	1	2	3	3	3	3	Dinas Perindakop dan UKM

## 9.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek kesejahteraan masyarakat penentuan capaian indikator tiap tahunnya selama lima tahun, mencakup pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga. Penetapan indikator untuk ketiga fokus tersebut dapat dilihat seperti pada tabel 9.2

**Tabel 9.2**  
**Penetapan Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA AKHIR	SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018		
<b>II. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>									
<b>1. Fokus Pemerataan Ekonomi</b>									
II.1.1	Indeks Daya Beli (%)	67,16	<b>68,66</b>	<b>69,16</b>	<b>69,66</b>	<b>70,16</b>	<b>70,66</b>	<b>70,66</b>	BPS
II.1.2	Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi) (%)	5,60	<b>6,04</b>	<b>6,18</b>	<b>6,32</b>	<b>6,46</b>	<b>6,60</b>	<b>6,60</b>	BPS
II.1.3	PDRB per kapita harga berlaku (ribuan rupiah)	10.196	<b>15.081</b>	<b>16.778</b>	<b>18.686</b>	<b>20.751</b>	<b>23.077</b>	<b>23.077</b>	BPS
II.1.4	PDRB per kapita harga konstan (ribuan Rupiah)	5.301	<b>5.919</b>	<b>6.141</b>	<b>6.370</b>	<b>6.608</b>	<b>6.856</b>	<b>6.856</b>	BPS
II.1.5	Indeks Gini	0,34	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	BPS

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA AKHIR	SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018		
<b>2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat</b>									
<b>II.1.</b>	<b>Pendidikan</b>								
II.1.1	Angka melek huruf (%)	<b>96,80%</b>	<b>97,44%</b>	<b>98,08%</b>	<b>98,72%</b>	<b>99,36%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	Dinas Pendidikan/ BPS
II.1.2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	<b>7,35%</b>	<b>8,40%</b>	<b>8,76%</b>	<b>9,12%</b>	<b>9,48%</b>	<b>9,84%</b>	<b>9,84%</b>	Dinas Pendidikan/ BPS
II.1.3	Angka partisipasi kasar (%)								
	a. SD/MI	<b>107,87%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	Dinas Pendidikan/ BPS
	b. SMP/MTs	<b>91,45%</b>	<b>92,96%</b>	<b>94,47%</b>	<b>95,98%</b>	<b>97,49%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	Dinas Pendidikan/ BPS
	c. SMA/SMK/MA	<b>56,69%</b>	<b>62,45%</b>	<b>68,21%</b>	<b>73,97%</b>	<b>79,72%</b>	<b>85,48%</b>	<b>85,48%</b>	Dinas Pendidikan/ BPS
II.1.4	Angka Partisipasi Murni (%):								Dinas Pendidikan/ BPS

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA AKHIR	SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018		
II.1.5	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94,55%	95,64%	96,73%	97,82%	98,91%	100%	100%	Dinas Pendidikan/ BPS
II.1.6	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	67,82%	74,25%	75,76%	77,27%	78,78%	80,29%	80,29%	Dinas Pendidikan/ BPS
II.1.7	c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	42,51%	48,27%	54,03%	59,79%	65,54	71,30%	71,30%	Dinas Pendidikan/ BPS
II.1.8	Jumlah lembaga pendidikan sekolah luar biasa	1	1	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan
II.1.9	Prosentase pendidikan 9 tahun khusus siswa miskin (%)	87,80%	90,24%	92,68%	92,70%	93,10%	93,50%	93,50%	Dinas Pendidikan
II.1.10	Prosentase pendidikan 12 tahun khusus siswa miskin (%)	26,31%	41,05%	55,78%	70,52%	85,26%	85,50%	85,50%	Dinas Pendidikan
II.1.11	Jumlah siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa (%)	35	45	50	55	60	65	65	Dinas Pendidikan
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>								
2.1	Angka usia harapan hidup (tahun)	64,32 (2011) / 64,69 (2012)	65,4	65,7	66,0	66,3	66,6	66,6	Dinas Kesehatan/ BPS

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA AKHIR	SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018		
2.2	Persentase balita gizi buruk (%)	0,050% 0,02	0,050% 0,018	0,045% 0,016	0,040% 0,014	0,035% 0,012	0,030% 0,010	0,030% 0,010	Dinas Kesehatan/ BPS
2.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,20 (2011) / 71,64 (2012)	71,84	72,04	72,24	72,44	72,64	72,64	BPS
<b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>									
<b>1.</b>	<b>Kebudayaan</b>								
1.1	Jumlah kelompok seni	58	60	62	64	66	70	70	Budpar
1.2	Jumlah gedung (buah)	1	1	1	2	2	3	3	Budpar
1.3	Panggung Terbuka	1	1	2	2	2	2	2	Budpar
<b>2</b>	<b>Olah raga</b>								
2.1	Jumlah Gedung Olah Raga	1	1	2	3	4	4	4	PU
2.2	Kota Kuliner (kegiatan)	0	30	30	30	30	30	30	Perindag

### 9.3. Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek daya saing daerah penentuan capaian indikator tiap tahunnya selama lima tahun, mencakup pada Kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia. Penetapan indikator untuk keempat fokus tersebut dapat dilihat seperti pada tabel 9.3

**Tabel: 9.3**  
**Penetapan Indikator Aspek Daya Saing Daerah**

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/ INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA AKHIR	SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018		
<b>III. ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>									
<b>Fokus Kemampuan ekonomi daerah</b>									
<b>1.</b>	<b>OTDA, PUM, Administrasi Daerah dan Persandian</b>								
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (rupiah)	650.600 (2011)	657.259	659.493	661.735	663.985	666.243	666.243	BPS
1.3	Prosentasi PAD terhadap APBD (IKM)	<b>0,070</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	DPPKAD
1.4	Prosentasi retribusi pasar terhadap PAD (IKM)	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	Kantor Pasar
<b>FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR</b>									
<b>3.</b>	<b>OTDA, PUM, Administrasi Daerah dan Persandian</b>								

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/ INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA AKHIR	SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018		
3.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang	10	10	10	10	10	10	10	Bag. Ekobang Setda Kab. HSS
3.2	jumlah hotel/penginapan	11	1	1	1	1	1	17	Dinas Parbud
3.3	Prosentase formasi pegawai dan jabatan sesuai dengan kompetensi aparatur	92,85%	93%	94%	95%	100%	100%	97%	BKD Dan DIKLAT
3.4	Pengkajian dan evaluasi kelembagaan SKPD	50%							Bagian Organisasi Setda Kab. HSS
3.5	Prosentasi peningkatan pelayanan pemerintah kecamatan terhadap masyarakat (PATEN)	0%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Seluruh Kecamatan Kab. HSS
3.6	Jangka waktu pembahasan perda dan implementasi perda	2 bulan / paket pengajuan	2 bulan / paket pengajuan	2 bulan/ paket pengajuan	2 bulan/ paket pengajuan	2 bulan/ paket pengajuan	2 bulan/ paket pengajuan	2 bulan / paket pengajuan	Sekretariat DPRD/ Bag. Hukum Setda Kab. HSS
<b>4.</b>	<b>Lingkungan hidup</b>								
4.1	Prosentasi lingkungan rumah yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (IKM)	51,35% 76/148	54,05%	56,76%	59,46%	62,16%	64,86%	64,86%	Dinas PU
<b>5.</b>	<b>Komunikasi dan informatika</b>								
5.1	Rasio ketersediaan daya listrik	1,1 : 1	1,1 : 1	1,1 : 1	1,1 : 1	1,1 : 1	1,1 : 1	1,1 : 1	Dinas Tamben
5.2	Persentasi rumah tangga yang menggunakan listrik	82,49%	83%	84%	85%	86%	87%	87%	Dinas Tamben

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/ INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL (2012)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA AKHIR	SKPD
			2014	2015	2016	2017	2018		
5.3	Persentasi tempat ibadah yang menggunakan listrik	95.64%	96%	97%	98%	99%	100%	100%	Dinas Tamben
<b>FOKUS IKLIM BERINVESTASI</b>									
<b>1.</b>	<b>OTDA, PUM, Administrasi Daerah dan Persandian</b>								
1.1	Angka kriminalitas (kasus)	282	272	262	252	242	232	232	Satpoll PP
1.2	Lama proses perijinan (hari)	2	2	2	2	2	2	2	KPPT
1.3	Jumlah dan macam pajak serta retribusi daerah	12	13	13	14	14	15	15	DPPKAD
1.4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	12	13	14	15	16	17	17	Bagian Hukum Setda Kab. HSS/Set DPRD
1.5	Persentasi penerbitan perijinan (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	KPPT
1.6	Menurunnya temuan PKPT (temuan)	184	160	140	120	110	100	100	Inspektorat Kab. HSS
1.7	Suasana Kondusif kehidupan beragama (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan PB Kesbang Pol
<b>FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA</b>									
<b>1</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>								
1.1	Ketersediaan sarjana pendamping desa (%)	0%	33,7%	50%	70%	80%	100%	100%	Bag. Ekobang Setda Kab. HSS

## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

#### **10.1. PEDOMAN TRANSISI**

Dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati Hulu Sungai Selatan untuk masa bakti 2009 - 2013 dengan masa bakti Bupati terpilih periode 2014-2018, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun ke depan.

#### **10.2. KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 - 2018 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Bupati Hulu Sungai Selatan untuk 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti periode 2014 - 2018 serta mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025.

RPJMD Tahun 2014 - 2018 sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan setiap tahunnya.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2014 - 2018, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan RPJMD Tahun 2014 - 2018 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan;
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Hulu Sungai Selatan dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- (3) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar

melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2014 - 2018 dengan sebaik-baiknya;

- (4) Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018;
- (5) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2014 - 2018 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018;
- (6) Penyusunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten;
- (7) RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
- (8) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- (9) Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
- (10) Dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2014 - 2018, setiap SKPD perlu mengupayakan penguatan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2014 - 2018 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, instansi terkait maupun masyarakat luas;

- (11) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2014 - 2018, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2014 - 2018, sebagai berikut:
- a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
  - b. Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
  - c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
  - d. Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
  - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (12) Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
- (13) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**



**ACHMAD FIKRY**